

"Saya penganut falsafah Jawa
sing becik ketitik, sing olo ketoro
artinya yang baik akan ketahuan dan
yang buruk juga terlihat."

— **Prabowo Subianto**

(Saat menepis tuduhan Letjen Sintong Panjaitan)



PRABOWO

★★★ Dari Cijantung Bergerak ke Istana



"Saya mendekati Prabowo karena saya
nilai dia sudah menjadi Soekarno kecil.
Dia Lebih Soekarnois."

— **Permadi SH**

Paranormal, mantan anggota DPR RI

Femi Adi Soempeno

— Penulis buku *bestseller Perang Panglima*
dan *Mereka Mengkhianati Saya*

Prabowo

Dari Cijantung

Bergerak ke ISTANA



Femi Adi Soempeno

Prabowo
Dari Cijantung
Bergerak ke ISTANA



Prabowo dari Cijantung Bergerak ke Istana

Penulis: Femi Adi Soempeno

Penyunting: J. Felicianus

Perancang Sampul: Teguh Prastowo

Penata Letak: Amir Hendarsah

Foto Kover Depan: Koleksi Penulis

Foto Kover Belakang: www.kontekaja.com

Foto Isi: Koleksi Penulis & www.antara.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Cetakan I, 2009

Cetakan II, 2009

Cetakan III, 2009

Penerbit: **Galangpress** (Anggota IKAPI)

Gedung Galangpress Center

Jln. Mawar Tengah No. 72 Baciro Yogyakarta 55225

Telp. (0274) 554985, 554986 Faks. (0274) 556086

e-mail: galangpress@jmn.net.id

www.galangpress.com

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Soempeno, Femi Adi

Prabowo dari Cijantung Bergerak ke Istana

Penyunting: J. Felicianus ; Yogyakarta: Penerbit Galangpress;

Cet. I, 2009; 150 x 230mm ; 229 halaman

ISBN: 978-602-8174-18-3

I. Politik

II. Judul

Dicetak oleh:

Percetakan Galangpress

Gedung Galangpress Center

Jln. Mawar Tengah No 72 Baciro Yogyakarta 55225

Telp. (0274) 554985, 554986 Faks. (0274) 556086

email:percetakan@galangpress.com

Distributor Tunggal: **PT Buku Kita**

Jl. Kelapa Hijau No.22 RT 06/RW 03

Kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta 12620

Telp./Faks: (021) 78881850/60

email: marketingbukukita@gmail.com

www.distributorbukukita.com



The Rising Star, itulah Prabowo Subianto peraih bintang termuda dalam sejarah militer Indonesia. Jabatan Pangkostrad pernah diembannya, seperti mertuanya Soeharto pada waktu peristiwa G 30 S.

PENGANTAR PENERBIT

Pesta demokrasi sudah siap menghadang kita. Para tokoh politik sudah pasang kuda-kuda, bahkan jauh hari sebelumnya sudah koar-koar di layar kaca dan media cetak, tunjuk diri sebagai tokoh yang layak memimpin penduduk dengan 250 juta jiwa ini.

Lantas siapakah tokoh satria pinilih tersebut yang bakal memimpin bangsa ini? Semua masih samar dan menerka-nerka. Tapi melihat gelagat di jagat politik yang semakin mirip kereta luncur es, bisa diduga bakal terjadi kejutan-kejutan dalam Pilpres 2009 mendatang.

Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri boleh saja dielu-elukan bakal bersaing kuat dalam perebutan tahta presiden mendatang. Tapi siapa menduga jika nama-nama yang selama ini dicibir dan tidak diperhitungkan, bahkan dilupakan tampil di muka. Prabowo Subianto adalah satu di antara tokoh tersebut. Ia pernah dicibir, dituding pengkhianat Cendana, bahkan Letnan Jenderal (Purn) Sintong Panjaitan di dalam bukunya menuding Prabowo makar dan berniat melakukan kudeta dengan "mengamankan" para jenderal pada bulan Maret 1983. Boleh jadi

polemik ini sengaja dihembuskan untuk memanas-manasi dan memarat-maritkan konstelasi politik menjelang Pilpres 2009 mendatang. Semua masih tanda tanya.

Dunia perpolitikan memang menghasilkan berbagai kejutan dan Prabowo dengan caranya sendiri mampu tampil memukau akhir-akhir ini. Dengan kendaraannya, yakni Partai Gerindra ia mampu menempatkan partainya lekat dengan wong cilik seperti petani, nelayan, dan pedagang. Padahal sebelumnya konstituen wong cilik identik dengan PDIP. Inilah keberhasilan yang dicapai Prabowo dan Gerindra yang mampu menggaet isu-isu wong cilik dengan cepat, sehingga cepat atau lambat, bukan tidak mungkin Prabowo dan Gerindra bisa menyalip partai-partai besar lainnya.

Atas semangat inilah kami menerbitkan kembali buku "Prabowo Titisan Soeharto" dengan judul baru "Prabowo, Dari Cijantung Bergerak Ke Istana". Di dalam edisi baru ini, ada perubahan di bab awal, yakni di beberapa bagian dan penambahan beberapa data penting. Harapan kami pembaca dapat menyimak dan mereview kembali perjalanan "The Rising Star" dari Cijantung ini lebih saksama dan detail. Merasakan pergulatan batinnya, sekaligus menyelami konflik dan prahara yang pernah Prabowo alami. Selamat Membaca.

Penerbit

PENGANTAR PENULIS

Di ujung tahun 2007 lalu, ratusan penggenjot sepeda yang ada di Jakarta berduyun-duyun menyambangi Monas. Saya, termasuk salah satu di antaranya. Kami mendapatkan *bike-tag* dan *sticker* saat memasuki pelataran Monas. Acara pagi itu cukup penting, yaitu melepas 50 pesepeda dari komunitas Bike To Work itu untuk mengayuh pedal sejauh 1447 km di 44 kota dari Jakarta menuju Bali. Ini adalah bagian dari kampanye *Bicycle For Earth Goes To Bali* untuk acara KTT *United Nation Framework on Climate Change* (UNFCCC).

Iklim dunia memang sudah berubah. Beberapa kerabat yang tinggal di USA mengeluhkan, salju datang terlambat. Seorang teman di Jepang juga menuturkan musim gugur yang tak lagi seajeg dahulu. Di Jerman, musim panas yang hangat tiba-tiba direcoki oleh air hujan yang tumpah dari langit. Di Indonesia sendiri, hujan bukan sekadar air yang tumpah ke bumi, namun disertai angin kencang yang merobohkan baliho, pepohonan bahkan mengangkat kemudian menghempaskan atap rumah.

Jika mau lebih ditelisik, sesungguhnya bukan hanya iklim saja yang berubah di Indonesia. Momentum 'kejatuhan' Soeharto dan

gonjang-ganjing di seputar keluarga Cendana sudah mengantarkan Indonesia pada sebuah perubahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi.

Dalam perubahan iklim, penggunaan bahan baku plastik yang berlebihan, penggundulan hutan, pembuangan limbah di sungai, energi yang terlalu royal digelontorkan, serta asap kendaraan maupun pabrik yang menyesakkan menjadi pelajaran yang sangat mahal bagi bumi yang kian memanas. Segendang seperjogetan dengan perubahan iklim tersebut, begitu juga perubahan tatanan demokrasi di Indonesia. Peristiwa 1998 menjadi *Indonesian lesson* yang sangat mahal harganya.

Setelah mengalami periode perbaikan perikehidupan sosial ekonomi serta menempati posisi yang dipandang oleh negara-negara ASEAN dan negara-negara lain, Indonesia ditinggalkan oleh Soeharto, sosok yang memimpin (baca: menguasai) Indonesia selama lebih dari tiga dasawarsa. Selebihnya, *The Smiling General* ini menyisakan perkara hukum yang belum tuntas hingga sekarang.

Entah sesuai dengan matematika reformasi atau tidak, nyatanya hingga saat ini sejumlah masalah di dalam negeri belum juga terselesaikan. Salah satunya, menyeret Soeharto ke meja hijau untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang dilakukannya selama ia menganggangi negeri ini. Malah, Soeharto menjadi kian licin untuk didudukkan ke kursi Kejaksaan. Alasannya: sakit.

Toh, tetap saja ada yang menarik dari ‘skenario sakit’ Soeharto ini. Seperti ada kerinduan rakyat Indonesia akan Repelita yang disusun oleh Soeharto untuk membangun negeri ini. Dus, *Triple Track Strategy*, yaitu *progrowth* (pertumbuhan), *projob* (lapangan kerja), dan *propoor* (rakyat miskin) yang didengungkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla kian bangkrut jika dibandingkan dengan Trilogi Pembangunan milik Soeharto, yaitu pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas.

Beberapa program yang mendek selama satu dasawarsa usai pemerintahan Soeharto kemudian membawa wabah SARS alias

Saya Amat Rindu Soeharto. Peredaran wabah ini begitu kuat di daerah pedesaan, juga kalangan yang mengalami penggusuran, bencana alam, dan medan-medan pengungsian.

Tapi Soeharto tak lagi segagah dulu untuk bisa tampil dan menebarkan senyumnya yang ramah khas orang desa. Ia semakin terbujur kaku di tempat tidur setiap menjelang hari pemeriksaan Kejaksaan itu tiba. Bukan lagi stroke ringan, tetapi juga komplikasi dengan jantung, ginjal dan paru-paru. Soeharto yang dulu tegap dengan baju doreng hijaunya kini tak lagi bisa memamerkan bedilnya lagi. Ia sakit. Padahal, genderang kenduri demokrasi tahun 2009 sebentar lagi ditabuh.

Ada sebuah temuan menarik hasil jajak pendapat KOMPAS pada Oktober 2007 lalu. Yaitu, persepsi masyarakat kian positif terhadap kiprah para purnawirawan di negeri ini. Nyatanya, dalam jajak pendapat itu, ada sekitar 46,6% responden memilih tokoh militer sebagai presiden dan 43,5%. Bila dibandingkan dengan jajak pendapat KOMPAS pada tahun 1998, sebanyak 64,1% responden menolak kemungkinan militer sebagai presiden. Bahkan, pada jajak pendapat tahun 2000, hanya 5,3% responden saja yang menginginkan jabatan setingkat menteri diduduki purnawirawan TNI.

Jajak pendapat lain dibikin oleh Lembaga Kajian dan Survei Nusantara (LAKSNU). Dalam survei tersebut, nama Prabowo Subianto menjadi satu dari sebelas tokoh yang dikenal masyarakat disamping Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sutiyoso, Yusril Ihza Mahendra, Hasyim Muzadi, Agung Laksono, Hidayat Nurwahid, Aburizal Bakrie, Salahuddin Wahid, dan Adang Daradjatun. Memang, nyaris belum ada wajah baru sebagai tokoh yang tergolong populer. Tapi tetap saja, peremajaan kepemimpinan itu harus dirawat meski tidak harus dipaksakan pada 2009.

Buku ini saya tulis bukan untuk meramal sikap politik para pemimpin yang bakal nyalon pada hajatan lima tahunan nanti.

Femi Adi Soempeno

Dalam kaitannya dengan ‘skenario sakit’ Soeharto dan kemunculan Prabowo menjelang pemilu 2009 ini saya menjadi terusik dengan iklan pemilu 2004. Dalam iklan tersebut, Prabowo ‘menunggangi’ kesejahteraan, stabilitas maupun keamanan di zaman Orde Baru. Ia berujar, “Biarkan sang macan kembali mengaum ...” Saat itu, Prabowo seolah muncul untuk menjadi sosok yang ingin mengembalikan Indonesia sebagai salah satu macan di Asia di bidang ekonomi.

Jika ini disebut sebagai sebuah pemanis di masa kampanye, ia seperti tengah menularkan harapan akan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan kepemimpinan yang kuat itu dalam figur dirinya yang notabene adalah ‘jebolan tentara’. Dan jika Prabowo mencalonkan diri pada pesta demokrasi 2009 nanti, setidaknya menunjukkan proses pemulihan kepercayaan diri keluarga Cendana dan para pendukungnya.

Meski Prabowo sudah ditendang dari keluarga Cendana, namun namanya tidak akan pernah bisa lepas dari Soeharto. Sejarah sudah menuliskan Prabowo sebagai ‘anak emas’ Soeharto yang mendapat privilese dalam karir kemiliterannya. Karenanya, kegagalannya di pemilu 2004 bisa jadi sebuah energi untuk membabat lawan politiknya di tahun 2009. Bisa jadi pula, kesakitan Soeharto saat ini adalah momentum yang tepat bagi Prabowo untuk meminta restu pada sang mertua.

Lepas dari perubahan iklim maupun demokrasi di Indonesia, bangsa ini memang tengah membutuhkan satu jaminan. Yaitu, seorang pemimpin nasional yang mau merawat demokrasi dan tahu benar bagaimana menjalankannya.

Salam hangat,

Femi Adi Soempeno



Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono, akankah mereka bersaing memperebutkan kursi presiden 2009.

Daftar Isi

Pengantar Penerbit — 7

Pengantar Penulis — 9

Bayang-Bayang Soeharto — 19

Mengantongi Indonesia dengan Supersemar — 23

Soeharto Membangun — 30

1998, Soeharto Mengundurkan Diri — 39

Menguasai Indonesia, atau Memimpin Indonesia? — 49

Soeharto Lengser — 49

Brankas Keluarga Cendana Kian Semok — 56

Adili Soeharto! — 66

Soeharto, Si Kancil yang Cerdik — 78

Soeharto, Semar, dan Rahasia ‘Klenik’ — 82

Prabowo, Sebuah Mozaik — 107

Menjadi Anak Emas Soeharto — 109

Licin di Korps Baret Merah — 113

Kesejahteraan Harus Nomor Satu — 118

Tersandung Pelanggaran Hak Asasi Manusia — 125

Femi Adi Soempeno

- Sandungan Terus Menghadang — 133
Kudeta 22 Mei 1998 — 143
22 Mei, versi BJ Habibie — 147
22 Mei, versi Prabowo — 153
Karir Prabowo Habis? — 157
Hengkang dari Cendana — 165
Pusaran Konflik Makin Kencang — 171
Yordania, Negeri Kedua Prabowo — 176

Prabowo *Facelift* — 191

- Prabowo for President — 194
Duh, Militer Lagi? — 196
(Masih) Tersandung Kasus HAM — 200
Iklan: Mengerek Popularitas — 203

Daftar Pustaka — 207

Tentang Penulis — 229



Mantan Presiden Soeharto, memiliki aura kepemimpinan yang menitis di menantunya Letjend (Purn) Prabowo Subianto.

BAYANG-BAYANG SOEHARTO

SOEHARTO YANG TUTUP USIA pada 27 Januari 2008 lalu mewariskan seribu satu cerita. Termasuk, Prabowo yang merupakan sosok yang bertali-temali cukup erat dengannya.

Bisa jadi, potret muda Soeharto tergambar dalam diri Prabowo meski mereka hidup di zaman yang berbeda. Mulai dari pilihan hidup untuk menjadi seorang prajurit, prinsip hidup yang sangat kuat, membukukan catatan perjalanan karier yang cukup mulus, meninggalkan jejak tudingan kejahatan hak asasi manusia, dan menjadi orang yang pernah sangat berpengaruh di Indonesia.

Dari semua ragam kisah hidup Soeharto yang bermunculan, Soeharto adalah sejarah yang selalu menarik untuk diperdebatkan. Apalagi, ia adalah pelaku utama dalam menyulap Indonesia dari negara miskin menjadi negara yang beranjak ke negara industri baru. Tak heran, Soeharto mendapat julukan sebagai Bapak Pembangunan. Bahkan, label ini dikukuhkan secara formal melalui Tap MPR No V/MPR/1983. Maka, yang diterima setelah itu tak lebih dari pelengkap pujaan yang diberikan para pembantu dan orang-orang di sekelilingnya.

Julukan lain yang melekat pada Soeharto adalah Penyelamat Pancasila, Memegang Teguh Konstitusi, Memiliki Indra Keenam, Menyatu dengan Aspirasi Bangsa, Negarawan Puncak Bangsa, bahkan Pemimpin Paripurna. Para pembantunya berujar, meski Sang Jenderal tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, nyatanya bisa membawa negeri ini ke arah yang lebih baik dan lebih maju.

Bisa dipastikan, Soeharto berguru pada pengalamannya yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan pertanian. Itu sebabnya, Soeharto paham betul kehidupan rakyatnya. Kendati Indonesia diarak pada kehidupan industri sebuah negara berkembang, tapi sebagian besar rakyatnya masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.

Sosok Soeharto kemudian dikenal sebagai Bapak Pembangunan yang rendah hati. Apalagi, saat kariernya begitu mulus hingga menjadi orang nomor satu di negeri ini, tapi ia tetap tidak lupa akan kehidupan yang sebenarnya dari rakyatnya. Dibantu oleh para ahli ekonomi dari Universitas Indonesia yang dipimpin Prof Widjojo Nitisastro dan Prof Ali Wardhana, Soeharto merancang sebuah konsep pembangunan ekonomi jangka panjang yang terprogram, yaitu “Garis Besar Haluan Negara” yang diterjemahkan dalam rencana pembangunan lima tahunan (repelita).

Gaya kepemimpinan Soeharto dengan konsep pembangunan seperti ini berbeda dengan gaya presiden Soekarno yang mengibarkan gaya “Demokrasi Terpimpin”. Tahap pertama yang dirancang Soeharto ialah menjalankan Repelita I-nya pada tahun 1969 agar bangsa Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangan dan juga sandang sendiri. Lebih-lebih, Indonesia akhirnya mencapai swasembada pangan pada tahun 1984 yang membikin Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menyurungkan penghargaan bagi Soeharto.

Langkah pembangunan yang ditapaki Soeharto untuk Indonesia kemudian di bidang perumahan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan kemudian pembangunan industri. Nyatanya, bukan hanya pujian yang diberikan, tetapi konsep pembangunan banyak yang ditiru oleh negara-negara lain. Pendeknya, kerja keras Soeharto mendesain negeri ini cukup berhasil.

Prof Donald W Wilson, guru besar Universitas Pitsburg, AS, salah seorang penulis buku tentang Soeharto, dalam wawancaranya dengan majalah Tempo tahun 1992 mengatakan, “Boleh saja dikatakan bahwa saya memang pro-Soeharto dan pro-Orde Baru. Tetapi Anda harus ingat, saya punya pengalaman tinggal di Indonesia tahun 1949-1955. Saya tidak mengatakan Presiden Soeharto dan Orde Baru sempurna. Namun, saya yakin keberadaan Soeharto dan Orde Baru mempunyai hubungan sangat erat dengan keberhasilan Indonesia 25 tahun terakhir.”

Soeharto kemudian dikenal juga sebagai Orang Kuat di Indonesia. Sebutan ini ditempelkan pada Soeharto lantaran ia mampu bertahan untuk memerintah Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Saking lamanya, beragam penyimpangan tetap saja tak terelakkan. Apalagi, ia memiliki kekuasaan tak terbatas atas menteri, gubernur, Pangdam, bahkan sampai bupati. Selain soal kursi panas kekuasaan, ia juga menjadi penentu yang berkaitan dengan aliran dana negara dan kebijakan di sektor formal.

Kekuatan Soeharto seolah tak ada habisnya. Bahkan, sepenggal kalimat yang mencuat dari bibir rakyatnya, ia tuding sebagai sebuah penghinaan. Barangkali kita masih ingat kasus Sri Bintang Pamungkas pada tahun 1996 yang dianggap telah menghina Soeharto lantaran menggunakan istilah ‘diktator’ untuk menunjuk pada Soeharto. Hal itu dilontarkannya saat memberikan ceramah adi Technische Universitet Berlin tanggal 9 Januari 1995.

Perdebatan yang panjang soal penghinaan terhadap Soeharto ini tak urung harus mendatangkan ahli bahasa Prof Dr Yus Badudu dan ahli hukum tata negara Prof Dr Harun Alrasyid SH. Menurutnya, mengungkapkan kalimat “Si A menyeleweng” dalam sebuah ceramah tidak berarti menghina. Tetapi, apabila kalimat itu diucapkan langsung kepada yang bersangkutan bisa berarti menghina.

Kehadiran dan penjelasan Yus Badudu cukup menarik perhatian pengunjung, sehingga beberapa kali ketua majelis hakim Syoffinan Sumantri memperingatkan pengunjung untuk tidak bertepuk tangan, “Petugas, supaya diteliti, siapa saja yang bersorak-sorak, keluarkan saja.”

Kerepotan seperti ini juga dialami oleh pers. Pada tahun 1996, Soeharto menilai semakin sering ada pelanggaran etika dalam pers, tulisan yang melanggar prinsip-prinsip yang tercantum dalam peraturan kode etik yang dibuat dan disepakati wartawan sendiri. Misalnya, pemberitaan yang tidak mempertimbangkan kepatutan dan berita yang bersifat spekulatif sehingga mengganggu rasa tenteram masyarakat.

Soeharto merasa prihatin memperhatikan berita, tulisan atau gambar yang menyedatkan, membingungkan, meresahkan, mengandung ketidakbenaran atau melecehkan kemampuan berpikir khalayak. Tidak jarang pula terdapat pemutarbalikan atau pengaburan fakta, mencampuradukkan fakta dan opini sendiri, yang merugikan atau menguntungkan suatu pihak, tidak menghormati asas praduga tak bersalah dan seterusnya. Sejatinya, penilaian ini adalah untuk melanggengkan kenyamanan Soeharto berkuasa bersama dengan kroninya agar tidak terusik oleh pers yang ‘usil’.

Soeharto dengan Orde Baru (Orba)-nya dengan sengaja memilih menjadi pemimpin yang ditakuti. Dan ini, untuk tujuan serta ambisinya dalam konteks Orba, sangat efektif. Sebagai pemimpin yang ditakuti, Soeharto bahkan melengkapi

kepemimpinannya dengan berbagai mesin pencipta ketakutan, bukan hanya di lingkungan pengikutnya, tetapi juga ke segenap anggota masyarakat. Mesin-mesin itu bisa mulai dari mesin teror, mesin represi, mesin kekerasan, dan seterusnya.

Kita bisa mengingat dan membayangkan di masa-masa kejayaannya, bahkan untuk menyebutkan 'Soeharto' begitu saja di sembarang tempat, kita sudah bergidik ketakutan. Nama Soeharto harus diucapkan dengan penuh hormat-nama Soeharto sudah menjadi 'Bapak Soeharto'. Bahkan, penulisan 'kepala negara' itu salah, yang benar adalah 'Kepala Negara'.

Dalam kehidupan bernegara, pola interaksi dan komunikasi berasal dari satu pintu, yaitu bibir Soeharto. Taruh kata, dalam satu jentikan jari saja, semua masalah yang ada akan terselesaikan dengan sendirinya. Kekuatan inilah yang bak momok dalam 32 tahun ini dan menggulung kengerian sekaligus kemarahan rakyat Indonesia.

Mengantongi Indonesia dengan Supersemar

Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966 merupakan tonggak sejarah paling penting bagi Soeharto. Selama ini beredar kabar bahwa surat tersebut diberikan Presiden Soekarno dengan sukarela. Nyatanya, tidak. Meskipun tanpa todongan senjata, masuk akal kalau pembuatan surat tersebut dilakukan oleh Soekarno di bawah tekanan tiga perwira tinggi yang disuruh Soeharto.

Inilah salah satu kontroversi Supersemar. Surat tersebut dibuat bukanlah atas inisiatif dan kemauan Soekarno sendiri. Tahun 1998, anggota Tjakrabirawa Letnan Dua (purn) Soekardjo Wilardjito mengaku bahwa Jenderal Panggabean menodongkan pistolnya kepada Presiden Soekarno, dengan kata lain penugasan tersebut (baca: pengalihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto) diberikan dalam keadaan terpaksa. Pada gilirannya, orang bisa



Presiden Soekarno berbincang akrab dengan Letjen Soeharto pemegang Supersemar.

menduga bahwa pada bulan Maret 1966 itu terjadi semacam kudeta.

Kesaksian Soekardjo di atas didukung pula oleh Kaswadi (77 tahun) dan Serka (Purn) Rian Ismail Tengah. Mereka melihat bahwa tamu yang datang ke Istana Bogor berjumlah empat orang, bukan tiga orang seperti yang diketahui selama ini. Yaitu, Basuki Rahmat, Amir Machmud, dan M Jusuf selaku pembawa surat sebelum mereka menyampaikannya kepada Soeharto.

Bahkan Kaswadi mengakui, “Pada waktu itu, 11 Maret 1966, saya melihat Panggabean ada di Istana Bogor. Saat itu sekitar pukul 01.00 dini hari. Panggabean datang mengendarai mobil jip dan berpakaian dinas militer. Ia kemudian berjalan masuk menuju Istana Bogor”, tutur Kaswadi kepada LBH Yogyakarta. Kesaksian tersebut perlu dipertegas, kejadiannya tanggal 11 Maret atau 12 Maret 1966 (karena sudah masuk 01.00 pagi).

Jabatan Mayjen M Panggabean pada waktu itu, seperti diungkapkan dalam tulisan Moerdiono “Di antara Para Sahabat:

Pak Harto 70 tahun”, adalah ketua Tim Umum yang dibentuk oleh Soeharto. Letnan Satu Infanteri Moerdiono menjadi sekretaris Tim Politik yang diketuai oleh Mayjen Basuki Rakhmat dan Mayjen Ashari menjadi ketua Tim Ekonomi.

Jumat pagi 4 September 1998, Jenderal M Jusuf mengatakan bahwa yang menemui Soekarno tanggal 11 Maret 1966 hanya tiga jenderal, dan mereka di sana hanya sampai pukul 20.30. Tidak ditanyakan wartawan, berapa lama ketiga jenderal itu di Istana Bogor dan apa saja yang dibicarakan mereka dengan Presiden Soekarno? Kalau betul mereka baru pulang pukul 20.30 malam, itu memperlihatkan bahwa pembicaraan dengan Soekarno berjalan alot.

Kontroversi lain dari tiket emas ini ialah pengetik Supersemar. Soalnya, muncul pengakuan Letkol (Purn) TNI-AD Ali Ebram, staf Asisten I Intelijen Resimen Cakrabirawa bahwa dia yang mengetik surat tersebut. Surat tersebut diketik dalam waktu satu jam dengan didiktekan oleh Bung Karno. Ia mengetik dengan gemetar dan mengatakan bahwa konsep itu berasal dari Soekarno sendiri.

Yang diingatnya sekarang bahwa “dalam surat itu disebut ajaran, koordinasi, terus laporan dan menyangkut empat pokok: soal keluarga, melindungi keluarga yang tidak ada. Yang keempat itu memberi laporan”. Sebagai orang yang tidak biasa mengetik, ia mengerjakannya dengan gemetar dan berkata kepada Soekarno, “Pak, saya mohon *ampun kesesa* (Pak, saya mohon tidak tergesa-gesa). Sebelum ditandatangani diketik kotanya yaitu Bogor.

Satu lagi, kontroversi yang ditemukan oleh Ben Anderson, sejarawan asal Amerika. Berdasarkan pengakuan seorang tentara yang mengaku waktu itu bertugas di Istana Bogor, Ben merasa yakin dengan keterangannya bahwa mungkin saja surat perintah yang asli itu dihilangkan karena diketik dengan kop Markas Besar Angkatan Darat. Jadi jika dipertahankan tentu sangat lucu, surat

kepresidenan ditulis dengan kertas berkop MBAD. Jadi surat itu 'dihilangkan' bukan karena isi tetapi karena kop suratnya.

Bekas Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono pernah menyampaikan pengalamannya. Saat itu di bawah Letkol Sudharmono, Moerdiono yang masih menjabat sebagai Lettu tahu, Supersemar itu distensil di kantornya, Jalan Merdeka Barat. Sementara itu, Sugianto, anggota Opsus Kostrad yang ada di bawah Ali Murtopo, mengakui, Supersemar pernah di tangannya selama satu jam, dibawa keliling Jakarta untuk mencari tempat penggandaan. Akhirnya, surat itu bukan digandakan dengan mesin stensil, tetapi dengan memotretnya memakai kamera *polaroid*.

Bisa jadi, ada lebih dari satu pihak yang menggandakan Supersemar. Cara penggandaan seperti itu memungkinkan terdapatnya lebih dari satu versi, apalagi jika penggandaannya dilakukan dengan mengetik ulang. Hanya saja, ada yang lebih mengagetkan adalah keterangan Kivlan Zein bahwa putra Brigjen Sutjipto SH menemukan Supersemar asli dalam dokumen milik almarhum ayahnya. Menurut Kivlan, surat itu diserahkan kepada Jenderal Soeharto.

Atas ketidakjelasan ini, bisa saja Soeharto diseret ke pengadilan. Undang-Undang no 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, pasal 11 berbunyi: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Undang-Undang ini dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun. UU Kearsipan tersebut ditandatangani oleh Soeharto. Dengan demikian, bila Soeharto terbukti menyimpan naskah asli Supersemar dan tidak menyerahkannya kepada negara ia bisa dijatuhi hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Keberadaan SP 11 Maret itu kemudian dikukuhkan lagi dengan Tap MPRS No IX/ 1966. Bahkan pada tanggal 20 Februari 1967, keluar Pengumuman Presiden yang menyatakan penyerahan

kekuasaan kepada Pemegang SP 11 Maret. Namun, dari segi konstitusi, keabsahan SP 11 Maret maupun Tap-Tap MPRS yang memperkuatnya masih terus diperdebatkan sejak saat itu hingga kini. Keabsahan MPRS sendiri pun sesungguhnya dipertanyakan, karena para anggotanya tidak dipilih melalui pemilihan umum melainkan diangkat langsung oleh Presiden.

Selain itu muncul pertanyaan, mengapa surat perintah dari presiden yang berisikan pelimpahan kekuasaan (secara terbatas) itu justru diperkuat oleh Tap MPRS. Apakah Presiden Soekarno pada saat itu memang berada dalam kondisi berhalangan tetap sebagaimana dijelaskan pasal 8 UUD 1945?

Di luar segi keabsahan konstitusional, juga muncul pertanyaan, dalam kondisi fisik dan psikis seperti apa ketika Soekarno menandatangani SP 11 Maret 1966 maupun mengeluarkan pengumuman tanggal 20 Februari 1967 tersebut? Ada dugaan, Soekarno berada di bawah tekanan psikis yang menyebabkannya terpaksa menandatangani kedua dokumen politik tersebut.

Seandainya dugaan itu benar, maka hal itu merupakan suatu kudeta terselubung yang diperkuat melalui rekayasa atas aturan-aturan kenegaraan. Terlepas dari benar-tidaknya penilaian di atas, sebagai bangsa yang terbiasa mengambil hikmah dari pengalaman pahit masa lampau, kontroversi seputar SP 11 Maret 1966 itu kembali menyadarkan betapa berbahayanya merekayasa amendemen konstitusi demi kepentingan politik praktis jangka pendek dan demi ambisi kekuasaan individu dan kelompok-kelompok tertentu.

Oleh Soeharto, surat sakti ini digunakan untuk membubarkan PKI, menangkap 15 menteri yang loyal terhadap Bung Karno, memulangkan pasukan Cakrabirawa yang setia kepada Presiden Soekarno, mengawasi berita ekonomi dan politik yang di RRI, TVRI, dan media lain. Dalam konteks ini, perintah untuk

mengamankan situasi, termasuk mengamankan Presiden Soekarno, disalahgunakan untuk keperluan lain oleh penerima perintah.

Hingga saat ini, setiap tanggal 11 Maret datang, kontroversi surat perintah sebelas Maret atau Supersemar selalu menjadi perdebatan menarik. Pasalnya, semakin banyak temuan kontroversial yang muncul. Salah satu buku mengenai Supersemar yang bisa menjadi rujukan ialah “Membongkar Supersemar: Dari CIA hingga Kudeta Merangkak Bung Karno’ yang ditulis oleh Baskara T Wardaya.

Menurut Jeremias Lemek, praktisi hukum, kontroversi Supersemar mencuat sejak reformasi bergulir. Bahkan sudah ada beberapa kelompok masyarakat yang menggugat secara hukum soal peristiwa ’65-66 tersebut. “Namun semuanya masih kandas di tengah jalan karena tembok kekuasaan. Budaya masyarakat Jawa yang masih menganggap *saru* untuk membongkar aib seseorang juga menjadi penyebab lambannya pengungkapan kebenaran sejarah, “ katanya.

Ronnie Hatley, peneliti dari Amerika Serikat, juga bilang, keberadaan Supersemar tidak terlepas peran Amerika yang berkepentingan untuk menguasai sumber-sumber kekayaan alam Indonesia. Sebagai warga negara Amerika, konon ia merasa malu dan bersalah dengan sepak terjang negaranya. “Sayangnya negara tidak memiliki sikap dan pandangan yang sama dengan saya. Saya melihat Amerika tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Empat puluh dua tahun berlalu, tinggal Soeharto saja yang masih hidup. Basuki Rahmat, Soekarno, Amir Machmud, dan M Jusuf meninggal tanpa memberikan keterangan yang jelas mengenai keberadaan Supersemar. Selebar surat ampuh itu Soeharto mengeluarkan surat keputusan, di Jakarta, tertanggal 12 Maret 1966. Keputusan Presiden/Pangti ABRI/ KOTI Nomor 1/3/1966 tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya di seluruh

Indonesia. Disusul 18 Maret, keputusan menahan 15 menteri dan mengangkat sejumlah menteri ad interim pengisi pos-pos kosong.

Pembubaran PKI adalah soal prinsip, khususnya pascaperistiwa G30S, bahkan telah menjadi isu tarik-ulur antara Bung Karno dan lawan politiknya. Keputusan pembubaran PKI telah disebarluaskan lewat semua pemancar RRI dandicetak di koran. Namun, aneh sekali, bagaimana mungkin Bung Karno justru tidak sadar bahwa surat perintahnya telah dipakai untuk membubarkan PKI?

Penyerahan pemerintahan kepada Soeharto baru terlaksana pada 22 Februari 1967. Dituntaskan lewat sidang istimewa awal Maret tahun yang sama, MPRS mencabut mandat Bung Karno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Berakhirnya kekuasaan Bung Karno masih belum menyurutkan kewibawaannya. Hal ini mendorong Soeharto pada Mei 1967 mengeluarkan keputusan presiden, melarang Bung Karno memakai gelar kepresidenan dan beragam sebutan lain, termasuk perintah pengusirannya dari Istana Merdeka dengan batas akhir sebelum 17 Agustus 1967.

Selama hari-hari panjang tersebut Soeharto-Nasution sebiduk sendirian. Namun kemudian mulai retak dan bahkan tumbuh menjadi pertikaian personal. Menurut Jusuf, Ketua MPRS beranggapan, Pejabat Presiden harus memberikan pertanggungjawaban kepada pimpinan MPRS. Pertikaian berlanjut sampai Sidang Umum MPRS Maret 1968. Soeharto dilantik menjadi presiden pada 27 Maret malam (keesokan harinya dia harus terbang ke Jepang), sementara sidang MPRS baru bisa ditutup pada tanggal 30 Maret.

Sebelum upacara pelantikan berlangsung, sejumlah kericuhan muncul. Jusuf harus bolak-balik menemui Soeharto dan Nasution untuk menyasrakan tetek bengek masalah, sejak yang prinsip sampai soal protokoler. Akhirnya, upacara pelantikan bisa dilakukan. Nasution memakai baju lengan pendek, Jenderal Soeharto

berpakaian sipil lengkap plus peci.... Maka, secara resmi, Soeharto menjadi presiden, menggantikan Bung Karno yang sudah *dilengserkan*.

Soeharto Membangun

Bisa jadi, modal Soeharto untuk tampil di muka umum adalah sebuah keberanian semata. Bagaimana tidak. Saat peristiwa G30S terjadi dan semua pihak masih saling menunggu, Soeharto berani mengambil posisi sebagai perwira tinggi TNI-Angkatan Darat yang secara jelas menyatakan bahwa yang melakukan kudeta atau pemberontakan kepada pemerintah pimpinan Pemimpin Besar Revolusi, adalah PKI. Soeharto juga menegaskan bahwa temuan enam mayat jenderal dan seorang perwira pertama yang ditemukan di Lubang Buaya adalah tindakan dari para pendukung G30S itu.

Kebetulan, Soeharto mendapat dukungan dari kekuatan yang luar biasa, yaitu anti-PKI dan anti-pemerintahan Presiden Soekarno-Demokrasi Terpimpin. Berkebalikan dengan Soekarno yang mengusung tatanan Demokrasi Terpimpin yang serba revolusioner dengan politik sebagai panglima, Soeharto muncul untuk menciptakan tatanan dengan nama 'Orde Baru; yang berdasar Demokrasi Pancasila. Makanya jangan heran, jamak kita dengar 'menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen'.

Setelah diangkat menjadi Penjabat Presiden tahun 1967 dan Presiden tahun 1968, *The Smiling General* ini pun membikin strategi dengan mengubah kebutuhan yang semula memprioritaskan kehidupan politik menjadi kehidupan ekonomi. Tahu sendiri, kehidupan ekonomi di era Soekarno saat itu tengah membukukan rapor merah. Nah, strategi pembangunan ekonomi inilah yang digunakan Soeharto untuk membangun imej positif atas dirinya.

Tapi ia tidak berjalan sendirian. Ia merangkul sejumlah ahli ekonomi dari Universitas Indonesia, terutama kelompok Profesor

Wijoyo Nitiasastro, di dalamnya Prof Dr Sadli, Prof Dr Soebroto, Prof Dr Emil Salim, dan lain-lain. Di sebuah lembaga negara yang diberi nama Bappenas, ia memprioritaskan pembangunan ekonomi yang disusun dalam bentuk Repelita, Rencana Pembangunan Lima Tahun yang sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Di sini, Sultan Hamengku Buwono IX-Prof Dr Wijoyo Nitiasastro mendapatkan mandat dari Soeharto untuk kelompoknya merancang pembangunan per lima tahun untuk jangka pendek, menengah dan panjang.

Bukan hanya kekuatan ekonomi internal saja yang ia pulihkan. Baginya, pembangunan ekonomi memerlukan sokongan dari stabilitas keamanan yang juga ditopang oleh negara-negara tetangga. Itu sebabnya, Soeharto buru-buru memulihkan hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB, mensponsori pembentukan ASEAN dan kemudian menjadi motor penggerak organisasi regional tersebut. Tak heran, ASEAN pun kemudian bermarkas di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa keamanan di dalam negeri harus terjamin. Tujuannya masih tak jauh dari pembangunan ekonomi, yaitu agar investor asing tidak *ngabur* atau henggang dari Indonesia. Bentuk ketegasan ini ia tunjukkan dalam bentuk tekanan yang cukup represif dilakukan baik terhadap pers, mahasiswa maupun kelompok masyarakat yang mencoba melakukan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah.

Meski Soeharto agresif memulihkan kehidupan ekonomi, ia tetap tidak mengabaikan kekuatan politik yang menopang kekuasaannya. Lebih dari sekadar menopang kenyamanannya duduk sebagai RI-1, dengan kekuatan yang dibangunnya, ia malah bisa melanggengkan kekuasaannya.

Contohnya saja di lingkungan TNI, ia mematenkan konsep dwifungsi ABRI, yang membuka peluang bagi warga TNI memasuki ruang pemerintahan sipil-birokrasi. Ia menciptakan kekuatan militer

yang sangat kuat dan menjadi perekat bangsa. Dwi Fungsi ABRI dibikin seakan-akan sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Ia juga membangun Golkar sebagai kekuatan politik pemerintah Orde Baru.

Ia merangkul orang-orang dekat yang terdiri dari beragam kelompok. Bukan hanya dari lingkungan militer, tetapi juga para ekonom UI. Sikapnya yang halus, sopan dan murah senyum, sering tampak saat ia mendengar keterangan dan penjelasan dari para menteri ekonominya dengan penuh perhatian. Tahu sendiri, Soeharto bukanlah ahli ekonomi. Ia adalah ahli strategi yang mampu menjaring orang-orang hebat untuk menyokongnya. Tak heran, dalam waktu 10 tahun ia mampu menguasai persoalan teknis tersebut.

Sayangnya, pembangunan yang dilakukan oleh Soeharto tidak cukup merata. Ia lebih banyak berkonsentrasi di pulau Jawa, serta sedikit Sumatera dan Bali. Di pulau-pulau lainnya, seperti Irian, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan apa lagi Nusa Tenggara, perhatian Soeharto boleh dikatakan sangat minim. Sampai sekarang, akibat dari ketimpangan pola kerja Soeharto masih sangat terasa. Infrastruktur di Irian bisa dikatakan salah satu yang terburuk di dunia.

Misalnya saja, di Kalimantan, lantaran buruknya transportasi, harga minyak tanah di sebuah desa terpencil bisa enam kali lipat dibanding harga minyak tanah di kota. Padahal, masyarakat desa umumnya dari kalangan kurang mampu. Kekurangmampuan mereka secara ekonomi diperberat oleh sistem transportasi yang amat buruk. Kemiskinan mereka makin menjadi-jadi karena ketidakmampuan rezim yang berkuasa melakukan distribusi barang secara baik dan benar.

Selama memerintah negeri ini, Soeharto tak terlalu memusingkan kemampuan anak buahnya. Asal mereka punya keahlian, loyal, dan dapat bekerja sama dalam satu tim, seorang

menteri bisa duduk di kursi yang sama dalam beberapa periode. Ajaib ya! Rapor kemampuan atau ketidakmampuan menteri bukan di tangan rakyat. Bahkan, rakyat juga tak tahu apakah menteri itu sungguh mampu menjawab keinginan rakyat. Penulis rapor itu adalah Soeharto.

Soeharto juga merangkul mereka dengan sepenuh hati. Asal menteri itu sudah ia pilih, maka ia akan ‘memelihara’ dan akan ia bela mati-matian meskipun punya kecacatan dalam bertugas. Lantaran sikapnya yang menyamaratakan semua anak buahnya, sering muncul kecurigaan antara satu anak buah dengan yang lainnya. Konkretnya, saling cemburu. Padahal, tidak ada istilah ‘anak emas’ maupun ‘putra mahkota’ bagi Soeharto.

Kesejahteraan adalah nomor satu bagi Soeharto. Loyalitas orang-orang di sekitarnya ia ciptakan melalui kemampuannya untuk bersikap royal pada semua anak buahnya. Karenanya, jangan heran bila para menteri maupun jenderal sangat tergantung padanya.

Bagaimana dengan orang-orang yang tak menyetujui model kepemimpinannya? Sudah bisa dipastikan, Soeharto akan membatasnya habis-habisan. Barangkali Anda masih ingat kritik pedas yang pernah dilontarkan oleh 50 tokoh nasional tahun 1980. Di sinilah kita bisa melihat bagaimana Soeharto ‘bermain’. Mereka yang ikut serta menandatangani Petisi 50 itu tidak pernah diundang dalam acara resmi kenegaraan di istana. Lebih dari itu, kehidupan ekonomi mereka juga dihabisi oleh Soeharto. Dari lingkaran Cendana maupun istana negara, mereka dibuang.

Soeharto sangat menjaga hubungan baik dengan luar negeri. Tahun 1974 terjadi demonstrasi mahasiswa yang menentang modal asing ketika PM Tanaka berkunjung ke Jakarta yang diikuti dengan pembakaran mobil Jepang di jalan-jalan. Soeharto marah. Aksi demonstrasi semacam itu akan menyebabkan larinya modal asing yang dibutuhkan untuk pembangunan Indonesia. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Peristiwa Malari 1974.

Aksi-aksi anti-Soeharto semacam itu membuatnya curiga bahwa ada pihak-pihak yang ingin menggeser kedudukannya sebagai orang kuat di Indonesia. Tak lama, Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) yang waktu itu dijabat oleh Jenderal Sumitro, akhirnya disingkirkan. Hal-hal seperti ini memberinya pelajaran tentang musuh-musuh politik yang harus diwaspadainya.

Soeharto juga tak melalaikan pendidikan. Untuk melembagakan sejarah sesuai dengan apa yang dimauihnya, Soeharto membentuk BP7 yang menjadi pelaksana dari rangkaian bersambung penataran yang diberi nama P4 dengan materi indoktrinasi penataran adalah Pancasila, UUD 1945, dan GBHN. Pendeknya, ia lah yang menciptakan klaim-klaim atas sejarah sesuai apa yang ia inginkan, bukannya apa yang terjadi. Contohnya, Pancasila tidak lahir pada 1 Juni 1945 tetapi 18 Agustus 1945.

Di dalam negeri, Soeharto sangat menjaga agar tidak ada satupun aset dalam negeri yang dicuri oleh asing. Itu sebabnya, ia memupuk rasa anti-SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) di tengah-tengah masyarakat. Ia tak pernah mengembuskan isu yang bisa mengganggu hubungan harmonis antar-etnis.

Sebagai orang Jawa yang lahir di sebuah desa kecil, Soeharto tetap membungkus dirinya sebagai anak desa yang sangat sederhana. Ia menyambangi desa-desa, melakukan safari keliling Indonesia, berbincang dengan orang-orang di daerah, mengenakan kaus oblong di rumah, tidak pelit senyum, serta memamerkan kegemarannya beternak dan memancing.

Tapi, tak banyak yang tahu bahwa di balik kesederhanaan dan senyumnya yang ramah itu ia mengetahui pembunuhan ribuan orang jalanan yang mati ditembak oleh 'petrus' (pembunuh misterius). Mereka yang ditembaki ini adalah preman atau residivis kriminal yang memiliki tato di tubuhnya. Mayatnya ditaruh di

tempat umum antara tahun 1983-1985 dengan jumlah mencapai 5.000 jiwa.

Ia semakin mengasah kekuatan dan kekuasaannya. Sebuah ide muncul dari istrinya, yaitu Siti Hartinah atau dikenal sebagai Ibu Tien. Ibu negara ini membayangkan wujud kekuasaan Soeharto ada dalam bentuk miniatur Indonesia. Maka dibangunlah Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Para gubernur dipaksa untuk membantu pembiayaan pembangunan TMII ini. Bahkan, tanah rakyat dibeli dengan harga yang sangat murah.

Saat itu, rencana pembangunan TMII ini ditentang oleh banyak pihak. Tapi, apa sih yang tidak dipunyai oleh Soeharto? Ia menegaskan, siapapun yang menentang ide pembangunan TMII akan 'ditindak tegas'. Bahkan, Ibu Tien ikutan berujar bahwa ia tak akan mundur untuk merealisasikan mimpinya membangun TMII.

Jadi, bila Anda menyambangi TMII, Anda tak sekadar melihat miniatur Indonesia saja. Lebih dari itu, Anda juga melihat bagaimana sebuah kekuasaan itu dipatenkan dalam sebuah arsitektur megah yang dibangun di atas penderitaan rakyat Indonesia. Di sanalah simbol keluarga Cendana mapan.

Sepertinya tak ada yang tak mungkin bagi Soeharto. Bahkan, ia bukan hanya mengangkat menteri, tetapi juga mengangkat seluruh jajaran eksekutif seperti gubernur, wali kota, bupati, Gubernur Bank Sentral, bahkan sebagian anggota parlemen yang tidak dipilih melalui pemilu. Pengangkatan hakim agung dan Ketua Mahkamah Agung tergantung kepada Soeharto. Dalam bidang bisnis, ia juga memilih Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apalagi yang sangat vital seperti Pertamina. Kebijakan yang penting dari BUMN tersebut juga menunggu persetujuan dia. Pemilihan itu bukan dari rakyat, melainkan presiden.

Alih-alih kursi panas di jajaran eksekutif, untuk menjadi ketua partai, bahkan Ketua Palang Merah Indonesia, harus mendapat

'restu' dari Soeharto. Restu Soeharto juga harus dikantongi oleh wadah-wadah yang hanya boleh ada satu di Indonesia, seperti organisasi wartawan, dokter, buruh, pengusaha. Karenanya jangan heran, besarnya kekuasaan Soeharto mengantarkan sejumlah catatan pembredelan pers yang mengkritik kebijakan orang kuat di Indonesia itu. Misalnya saja, Majalah *Tempo*, *Editor*, dan *Detik* ditutup tahun 1994.



Demonstrasi anti Jepang menyambut kedatangan perdana menteri Kakuei Tanaka, pada peristiwa Malari 1974.

Soeharto juga bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang 'melampaui' Soekarno. Yaitu, saat ia menduduki jabatan sebagai Ketua Gerakan Non Blok 1992-1995. Apalagi, sebelumnya ia mengantongi sejumlah penghargaan internasional seperti di bidang pertanian dan keluarga berencana. Indonesia juga menjadi pemimpin ASEAN, serta aktif di dalam APEC.

Meski semuanya terlihat ingar-bingar sebagai sebuah kesuksesan, nyatanya Indonesia juga tersandung dengan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. Puncak dari tragedi kemanusiaan ini adalah penembakan terhadap warga sipil di makam Santa Cruz pada 12 November 1991. Peristiwa ini bukan satu-

satunya pelanggaran hak asasi manusia sejak Indonesia ada di genggaman Soeharto. Bahkan, bisa dibilang, ia memerintah negeri ini di atas pelanggaran hak asasi manusia rakyatnya sendiri.

Kekuasaan dan kekuatan yang dikantongi Soeharto seolah tak berakhir. Apa yang belum terkantongi? Nyaris tak ada. Usai memenuhi segala ambisinya, Soeharto pun mulai mengepakkan sayap bisnis keluarganya. Apalagi, anak-anaknya juga sudah mapan dan siap untuk menjabat sebagai pucuk-pucuk pimpinan perusahaan yang dibangunnya. Hasilnya, sebuah ke-wah-an (wah-nya dengan W yang besar!) yang sangat luar biasa.

Soeharto dan anak-anaknya kemudian menancapkan kuku di bisnis yang sangat strategis. Yaitu, mulai dari jalan tol, minyak, perbankan, televisi, sampai kepada papan reklame. Eh, ini bukan hanya di Jakarta saja, tetapi juga hingga pelosok negeri. Lantaran mereka adalah anak orang nomor satu di negeri ini, otomatis mereka memenangi setiap tender yang juga dibuka untuk umum. Pada tahun 1999, seorang konsultan bisnis asal Australia, Michael Backman mencatat setidaknya ada 1.251 perusahaan keluarga Soeharto yang terlibat kerja sama dengan 66 perusahaan multinasional.

Pada tahun 1999, majalah mingguan Warta Ekonomi pernah mengulas soal bisnis keluarga Cendana dengan rinci dan detil, lengkap tentang perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh keluarga Cendana. Mulai dari yayasan-yayasan yang jumlahnya mencapai 40 buah dan dikelola oleh anak, saudara hingga besan. Pendeknya, mata rantai bisnis ini bermodal nama besar Soeharto.

Setahun sebelumnya, majalah TEMPO pernah menurunkan tulisan soal wawancara dengan Christianto Wibisono yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pusat Data Bisnis Indonesia ini (PDBI). Menurutny, selama 18 tahun PDBI mengumpulkan informasi mengenai semua konglomerat di Indonesia, termasuk Soeharto.

Temuannya, nilai kekayaan Soeharto dari kerajaan bisnisnya, anak-anak, cucu, hingga kroninya mencapai Rp 200 triliun.

Praktek yang dijalankan oleh keluarga Cendana cukup menarik, yaitu dengan *dummy company*, artinya perusahaan yang disamarkan. Dus, si empunya bisnis itu bersembunyi di belakang layar, sedangkan yang tampil adalah operator saja. Menurut Christanto, skema seperti ini sering kali dilakukan oleh pengusaha yang curang. Perusahaan semacam ini tidak dimasukkan daftar yang dibuat PDBI, jadi yang dihitung kekayaannya hanya perusahaan yang terdaftar resmi sebagai milik Keluarga Cendana.

Pola perkembangan bisnis keluarga Cendana selalu sama. Pertama-tama, biasanya mereka terjun ke proyek-proyek yang butuh izin khusus. Di sini mereka cuma mencari komisi, praktek ini biasa disebut *rent seeking business*. Jadi keluarga Cendana cuma membantu mengurus perizinan.

Tahap kedua, mereka lantas mulai membangun *company*. Hal itu untuk melanggengkan apa yang mereka lakukan lewat keberadaan sebuah lembaga. Mereka juga meminta lisensi istimewa yang seolah-olah untuk kepentingan nasional, tetapi sebenarnya untuk memperkaya diri sendiri. Lihat saja apa yang dilakukan Tommy dengan BPPC, bukan kepentingan petani yang diutamakan, tetapi justru merugikan petani.

Tahap ketiga, keluarga Cendana mulai terjun ke dalam berbagai macam mega proyek, dan bisnis mereka mendapat proteksi dan perlakuan khusus. Misalnya Tutut, ia adalah satu-satunya pengusaha swasta yang diberi izin untuk membangun jalan tol. Lantas bagaimana Tommy memperoleh fasilitas khusus untuk mengembangkan proyek mobil nasional Timor, padahal mobil itu 100% buatan Korea Selatan.

Keluarga Cendana juga membikin sejumlah yayasan. Sebagian besar kekayaan yayasan itu berasal dari sumbangan berbagai pihak. Sebenarnya sumbangan itu lebih tepat dikatakan sebagai

pemerasan. Dan sebagai kompensasinya, para pengusaha itu tentu meminta fasilitas untuk kepentingannya sendiri. Kata Christanto, hal inilah yang tidak disadari oleh Soeharto, ia berpikir bahwa para pengusaha itu memberikan sumbangan secara sukarela terhadap yayasannya. Dan ketika para pengusaha itu meminta berbagai fasilitas, sulit bagi Soeharto untuk menolaknya. Hal inilah yang membuat keputusan politik Soeharto sering kali lebih menguntungkan bagi sekelompok orang saja.

Seiring sejalan dengan bisnis yang kian moncer, pertentangan antar-etnis yang selalu disembunyikan di bawah karpet istana, tak urung mencuat juga. Awalnya adalah kerusuhan antar-etnis yang kental dengan aura politis pada tahun tahun 1997 dan berkesinambungan di pelbagai daerah. Misalnya saja, konflik massal terjadi di Sanggauledo yang menjalar ke beberapa tempat di Kalimantan Barat, sebelum Pemilu 1997 melibatkan etnis asal Dayak yang menyokong PDI dan Madura yang mendukung PPP.

Semuanya itu muncul lantaran PDI maupun PPP hanya sebagai sebuah boneka dalam setiap kenduri demokrasi. Dus, pemenangnya sudah bisa dipastikan, yaitu Golkar. Fusi paksa seperti ini akhirnya memunculkan berbagai kerusuhan massal di Tasikmalaya, Rengasdengklok, Karawang, dan seterusnya. Di titik inilah, meski Soeharto masih sangat kuat, nyatanya rakyat sudah mulai berani menggoyang kursi yang didudukinya.

1998, Soeharto Mengundurkan Diri

Melihat Soeharto rasanya seperti melihat Lee Kuan Yew, orang kuat Singapura. Keduanya memiliki kesamaan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi demi menyejahterakan rakyat. Hitungan di atas kertas, jika ekonomi tumbuh subur, rakyat dapat pekerjaan dan bisa hidup layak. Nah, jika rakyat kenyang, praktis negara aman. Keduanya tak ingin ada oposisi. Bahkan, keduanya juga sama-sama tak ingin ada yang memungguni penguasa.



Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden RI Mei 1998, kemudian diganti oleh BJ Habibie.

Kendati Lee memainkan perannya sebagai orang nomor satu di Singapura dengan tangan besi, nyatanya keduanya tetap memiliki perbedaan, yaitu dari sisi penegakan hukum. Bagi Lee, rakyat wajib taat hukum dan tertib. Tidak ada toleransi untuk penjahat serta koruptor. Sementara, di Indonesia, Soeharto adalah koruptor itu sendiri.

Bulan Juli 1997 pecah krisis moneter di Thailand yang ternyata menjalar ke wilayah Asia Tenggara lainnya termasuk Indonesia. Indonesia tumbang. Bukan hanya krisis di Thailand saja, tetapi juga nilai tukar rupiah terhadap US\$, utang swasta yang berjangka pendek dan tidak ada kepercayaan terhadap bank di Indonesia. Buntutnya, rakyat marah dan kian kencang menggoyang kursi Soeharto.

Dalam kondisi seburuk ini, Soeharto masih pergi ke Cairo, Mesir, untuk menghadiri sebuah pertemuan tingkat tinggi tanggal 9 Mei 1998. Ketika ia pulang didapatinya Jakarta telah hangus terbakar. Seribu orang diperkirakan tewas akibat kerusuhan dan pembakaran yang terjadi 13-14 Mei 1998.

Pemicu peristiwa itu adalah tewasnya empat mahasiswa Trisakti yang ditembak aparat keamanan. Massa marah. Setelah acara pemakaman mereka mengamuk dan secara terencana di titik-titik tertentu di Ibu Kota terjadi kerusuhan dan pembakaran. Waktu pembakaran hampir pada waktu yang bersamaan pada titik-titik yang jauh jaraknya. Terkesan bahwa peristiwa itu direkayasa, sungguh pun tidak terbukti siapa provokatornya.

Kemudian, himbauan agar Soeharto mundur pun mulai berdatangan dari berbagai pihak. Saat itu, Ketua DPR/MPR Harmoko bilang, demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR baik Ketua maupun para Wakil Ketua, mengharapakan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Keterangan pers menyebutkan, “Pimpinan Dewan dalam rapatnya hari ini (Senin 18/5/1998) telah mempelajari dengan cermat dan sungguh-sungguh perkembangan dan situasi nasional yang sangat cepat yang menyangkut aspirasi masyarakat tentang reformasi, termasuk Sidang Umum MPR dan pengunduran diri Presiden.”

Usai menyampaikan keterangan persnya, Harmoko dengan ekspresi wajah tanpa senyum, bergegas meninggalkan ruangan tanpa bersedia diwawancara lagi. Harmoko diikuti para wakilnya, kecuali langkah Syarwan Hamid yang terhenti karena diwawancarai puluhan mahasiswa. Menanggapi hal tersebut, Soeharto tampak tegar, dan tenang. Bahkan, ia menegaskan akan menjawab sendiri persoalan itu.

Dari sore hingga malam, Soeharto bertemu dengan berbagai pihak di kediaman Jalan Cendana. Di petang hari, dalam waktu yang hampir bersamaan, Kepala Negara menerima Mendagri Hartono, Menhankam/ Pangab Jenderal TNI Wiranto, dan Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto. Sesaat kemudian hadir KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo. Sementara itu, terdengar pula suara helikopter yang berputar-putar dan melintas sangat rendah.

Satu per satu para pembantu Presiden itu keluar. Diawali Mendagri Hartono. Beberapa saat kemudian Menhankam/-Pangab Wiranto beserta KSAD Subagyo, dan Prabowo. Tanpa memberi keterangan sepele kata pun, mereka langsung menuju ke mobil masing-masing. Beberapa saat sebelumnya, hadir Mensesneg Saadillah Mursjid.

Tepat pukul 18.49 WIB, Presiden Soeharto menerima Wakil Presiden BJ Habibie. Wapres yang biasa ramah dengan wartawan, kali ini tampak lebih serius. Wapres meninggalkan Cendana pukul 19.20 WIB. Pada saat itu, secara berurutan hadir mantan Menko Kesra Azwar Anas, Ka Bakin Moetojib, Menko Polkam Feisal Tanjung, Menko Wasbang dan PAN Hartarto, Menko Ekuin/Kepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita, dan Menko Kesra dan Taskin Haryono Suyono.

Dan benar. Soeharto menjawab sendiri imbauan itu. Pada hari Selasa, 19/5/1998 atau dua hari sebelum pengunduran dirinya, Soeharto bilang, kedudukannya sebagai Presiden bukanlah hal yang mutlak, karena itu tak masalah bila harus mundur. Bagi saya, sebetulnya mundur dan tidaknya itu tidak menjadi masalah. “Yang perlu kita perhatikan itu, apakah dengan kemunduran saya itu, kemudian keadaan ini akan segera bisa diatasi,” ujarnya.

Di saat yang bersamaan, ia juga mengumumkan, akan melaksanakan pemilihan umum (pemilu) secepat-cepatnya, berdasarkan Undang-undang (UU) Pemilu yang baru. Ia juga menegaskan, tidak bersedia lagi dicalonkan sebagai Presiden. Soeharto mengemukakan pula, akan segera membentuk Komite Reformasi yang bertugas untuk menyelesaikan UU Pemilu; UU Keparitaaian; UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD; UU Antimonopoli; dan UU Antikorupsi, sesuai dengan keinginan masyarakat. Anggota komite ini terdiri dari unsur masyarakat, perguruan tinggi, dan para pakar.

Nurcholish Madjid yang saat itu menjabat sebagai Direktur Yayasan Paramadina sempat bilang, “Pak Harto akan tidak mau dicalonkan lagi. Bahkan Pak Harto sempat guyon: saya ini kapok jadi Presiden. Itu sampai tiga kali, saya bilang kalau orang Jombang itu, bukan kapok, tapi *tuwuk* (kekenyangan).”

Soeharto menambahkan, “Setelah mendengar saran-saran dan pendapat dari para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, berbagai organisasi kemasyarakatan, dan pendapat ABRI, maka untuk menyelamatkan negara dan bangsa, pembangunan nasional, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kesatuan dan persatuan bangsa, saya mengambil keputusan, sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh MPR, saya sebagai Presiden Mandataris MPR, saya akan melaksanakan dan memimpin reformasi nasional secepat mungkin.”

Rupanya, pemberi saran dan pendapat dalam pertemuan itu, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (PB NU) KH Abdurrahman Wahid -yang hadir dengan kursi roda -budayawan Emha Ainun Najib, Direktur Yayasan Paramadina Nurcholish Madjid, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ali Yafie, Prof Malik Fajar (Muhammadiyah), Guru Besar Tata Negara dari Universitas Indonesia Prof Yusril Ihza Mahendra, KH Cholil Baidowi (Muslimin Indonesia), Sumarsono (Muhammadiyah), serta Ahmad Bagdja dan Ma'aruf Amin dari NU.

Abdurrahman Wahid, Emha Ainun Najib, Yusril Ihza Mahendra, Nurcholish Madjid, dan Mensesneg Saadillah Mursjid menilai, keinginan Soeharto untuk membentuk Komite Reformasi, membentuk Kabinet Reformasi, dan secepatnya melaksanakan pemilihan umum adalah langkah terbaik.

Menurut Soeharto, sebelum terpilih menjadi Presiden RI 1998-2003, ia telah mengingatkan, “Apa benar rakyat Indonesia masih percaya pada saya, karena saya sudah 77 tahun. Agar dicek benar-benar, daripada semuanya itu,” lanjut Presiden. Menurut Presiden,

seluruh kekuatan sosial politik, PPP, PDI, Golkar maupun ABRI mengatakan rakyat masih menghendaki.

“Baiklah, kalau demikian, tentu saya terima dengan rasa tanggung jawab. Jadi, saya terima bukan karena kedudukannya, tetapi karena tanggung jawab. Lebih-lebih pada saat kita menghadapi kesulitan akibat berbagai krisis tersebut. Rasa-rasanya kalau saya meninggalkan begitu saja, lantas bisa dikatakan, *tinggal gelanggang colong playu*. Berarti meninggalkan keadaan yang sebenarnya saya masih harus turut bertanggung jawab,” kata Presiden.

Ia mengimbuhkan, “Karena itu, pada waktu itu, sekali lagi saya terima dengan rasa tanggung jawab, semata-mata terhadap negara dan bangsa Indonesia ini. Sekarang, ternyata baru saja timbul yang tidak seluruhnya mendukung, artinya unjuk rasa bahwa mereka sudah tidak percaya lagi pada saya. Sehingga lantas mengajukan supaya saya mundur.”

Sekali lagi ditegaskan, Presiden tidak mempermasalahkan persoalan mundur tersebut. Karena Presiden sudah punya tekad untuk *madeg pandito* bila tidak lagi menjadi Presiden. Dalam arti, akan lebih mendekatkan diri pada Tuhan, mengasuh anak-anak agar menjadi warga negara yang baik, dan kepada masyarakat bisa memberi nasihat, sedang terhadap negara, dengan sendirinya tut wuri handayani.

Hitungan Soeharto, bila saat itu ia mundur, maka jabatan Presiden harus diserahkan kepada Wakil Presiden, yang saat itu dijabat BJ Habibie. “Apakah ini juga merupakan jalan penyelesaian masalah dan tidak akan timbul lagi. Nanti Wakil Presiden juga harus mundur lagi. Kalau begitu terus-menerus, itu menjadi preseden atau menjadi kejadian dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dengan sendirinya, negara dan bangsa kita itu akan kacau, seolah-olah tidak mempunyai landasan dalam

menjamin kehidupan kita dalam berbangsa dan bermasyarakat,” jelasnya.

Karena itu, Presiden menegaskan, perlunya mengambil berbagai langkah yang tidak meninggalkan konstitusi dan bisa digunakan sebagai landasan menyelesaikan persoalan, terutama dalam mengatasi berbagai krisis. “Jadi, demikianlah, ada yang juga mengatakan, terus terang saja dalam bahasa Jawanya, tidak menjadi Presiden, tidak akan *patheken*. Itu kembali menjadi warga negara biasa, tidak kurang terhormat dari Presiden asalkan bisa memberikan pengabdian kepada negara dan bangsa. Jadi, jangan dinilai saya sebagai penghalang, tidak sama sekali. Semata-mata karena tanggung jawab saya,” tegasnya.

Asal tahu saja, ucapannya ‘*ora dadi presiden ora patheken*’ ini mencerminkan kedongkolan. Ia tak rela turun, tetapi “dipaksa” turun karena tuntutan mahasiswa dan rakyat. Sebaliknya saat berkuasa, dia merasa amat kuat, mengumpulkan kekuasaan di satu tangan.

Usai Soeharto menyatakan seperti itu, langsung mengangkat harga-harga saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ, kini Bursa Efek Indonesia atau BEI) dan nilai tukar rupiah sempat jatuh sampai Rp 16.000 per US\$. Saat itu, rupiah di pasar uang spot antarbank Jakarta, Selasa (19/5/1998), ditutup pada posisi Rp 11.725/ Rp 12.425 per US\$. Kurs penutupan Senin Rp 12.200/Rp 13.200 per US\$. Sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta ditutup pada posisi 413,824 atau naik sekitar 6,4% (24,906 poin).

Kepanikan pelaku pasar uang kembali mewarnai perdagangan sesi pagi saat itu, sehingga rupiah sempat melemah hingga Rp 14.500 per US\$. Bahkan, pergerakan dollar/rupiah cukup lebar dengan rentang 3.500 poin. Rupiah sempat menguat ke level tertinggi Rp 11.000, namun juga sempat terjerembap ke titik terendah Rp 14.500 per US\$. Likuiditas rupiah pada penutupan

cukup ketat dengan tingkat suku bunga *overnight* antarbank sebesar 55-60%.

Kalangan pialang saham menilai, pernyataan Soeharto menjadi pemicu investor melakukan aksi beli yang mendorong harga sejumlah saham, terutama saham-saham perusahaan yang punya hubungan dekat dengan penguasa. Apalagi harga sejumlah saham memang sudah cukup rendah.

Menanggapi pernyataan Soeharto tersebut, PM Jepang Ryutaro Hashimoto mengharapkan dalam pemilihan umum untuk mencari pengganti Soeharto akan meredakan ketegangan di Indonesia.”Dengan tulus kami mengharapkan Indonesia akan menyelesaikan kebingungan sosial dan politik secepat mungkin dan pemulihan ekonomi rakyat dan stabilitas akan terealisasikan,” ujar Hashimoto.

PM Australia John Howard secara khusus dalam jumpa pers mengatakan, Indonesia perlu mengadakan pemilu secepatnya, bila ini hanya terjadi setahun atau dua tahun lagi, maka kredibilitas reformasi Indonesia akan sia-sia. PM Howard juga menyanjung tindakan Presiden Soeharto membentuk Kabinet Reformasi yang memikirkan bangsa Indonesia terlebih dahulu.

Ia menegaskan, bila pemilu yang dijanjikan Presiden Soeharto harus menunggu dua tahun maka, “Bila lamanya sampai sebegitu, kredibilitas akan langsung berkurang. Saya berharap tidak akan memakan waktu lama. Pengertian saya adalah ini (pemilu-ed) akan terjadi secepatnya”.

Menlu Manila, Domingo Siazon menyambut baik pernyataan Presiden Soeharto. Namun ia mengemukakan, stabilitas akan tergantung dari ‘apakah mereka memiliki saling pengertian di antara kekuatan-kekuatan politik, termasuk angkatan darat.’ Presiden Ramos sendiri dalam pesannya kepada calon presiden utama, Joseph Estrada, “Kita harus menunjukkan bahwa kita dalam kondisi lebih

baik daripada sahabat-sahabat dan tetangga kita, dengan segala hormat kepada mereka.”

Sementara itu pemerintah Belanda bereaksi positif terhadap pernyataan Presiden Soeharto bahwa pemilu akan segera dilaksanakan. Mantan Menlu Hans van Mierlo menyatakan pernyataan itu adalah ‘sikap positif terhadap rakyat Indonesia’. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Kobsak Chutikul menyatakan pihaknya netral terhadap pernyataan Presiden Soeharto. Thailand akan memonitor peristiwa-peristiwa di Indonesia dan meminta semua pihak tenang dan menahan diri dari kekerasan.

Menlu Malaysia Abdullah Ahmad Badawi seperti dikutip Bernama menyatakan, pihaknya berharap rencana pemilu akan mengakhiri kerusuhan sosial dan krisis politik. Reaksi juga muncul dari Cina. Juru bicara Kemlu Cina Zhu Bangzhao mengatakan, “Masalah ini adalah urusan dalam negeri Indonesia dan semua sudah diketahui. Kami tidak memberikan komentar dalam urusan dalam negeri negara lain.”

Dari Washington, Subkomite Urusan Asia Timur dan Pasifik di Senat AS pada Senin lalu mengadakan dengar pendapat darurat mengenai situasi di Indonesia. Stanley Roth, Asisten Menlu untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik menegaskan kebijaksanaan luar negeri AS terdiri dari tiga elemen. Pertama, mengimbau agar semua pihak menahan diri baik polisi dan militer dalam menangani para demonstran dan juga agar para demonstran, kalau mereka turun ke jalan, supaya melakukannya dalam keadaan damai. Kedua, menahan diri saja tidak akan mengakhiri krisis politik dan karena itu, pemerintah AS percaya adalah sangat penting untuk terjadi proses reformasi politik guna mengatasi krisis. Ketiga, dialog sebagai mekanisme untuk melakukan reformasi politik.

Dan benar, Soeharto kemudian mengundurkan diri pada keesokan paginya, 21 Mei 1998. Soeharto menyerahkan jabatannya pada Habibie selaku Wakil Presiden.

Sebagian warga menyambut gembira pengunduran diri Soeharto. Para mahasiswa berteriak dan berjingkrak kesenangan begitu mendengar Soeharto mundur. Setelah berjingkrak dan bersalam-salaman. Mereka berlarian ke tangga utama DPR sambil menyanyikan lagu Sorak-sorak Bergembira. Seiring berkumandangnya lagu kebangsaan Indonesia Raya, mereka menaikkan bendera Merah Putih setengah tiang menjadi satu tiang penuh.

Di Bogor, pengunduran diri Soeharto dari jabatan presiden disambut dengan memotong sapi dan kambing, masing-masing sembilan ekor. Sapi dan kambing itu dipotong selama tiga hari berturut-turut dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitarnya di daerah Perumahan Bogor Baru. Warga yang memotong kambing dan sapi itu adalah Ki Gendeng Pamungkas, paranormal yang tinggal di daerah Bogor Baru, Kotamadya Bogor. Ki Gendeng Pamungkas mengatakan, penyembelihan hewan itu sebagai kaul.

Kaul itu akan ditutup dengan 40 nasi tumpeng pada hari ketiga, yakni Sabtu malam. Kamis siang ratusan warga setempat menyaksikan pemotongan kambing dan sapi yang dilaksanakan di samping rumah Ki Gendeng Pamungkas, yang didahului dengan penyulutan petasan. Diperkirakan, tiap kepala keluarga di seputar tempat tinggal Ki Gendeng Pamungkas itu, akan menerima pembagian daging sekitar dua kilogram.

Ki Gendeng dengan singkat mengatakan, pihaknya ingin bersukacita dengan warga setempat sambil membagikan daging atas pengunduran diri Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden RI. Di wajah Ki Gendeng Pamungkas masih menampakkan rasa murung, karena dari pandangannya sebagai paranormal,

pengunduran diri Soeharto masih akan disusul dengan situasi yang tak menggembirakan sekurang-kurangnya 38 hari sejak Soeharto mengundurkan diri.

Menguasai Indonesia, atau Memimpin Indonesia?

Di akhir 1998, ada sebuah ulasan menarik yang dibikin oleh St Sularto dan Thomas Pudjowidijanto di harian KOMPAS. Tulisan ini berisi tentang kepemimpinan Soeharto. *Othak-athik gathuk, eeh*, ketemu juga hasil yang sesuai. Pas!

Soeharto *Lengser*

Kalimat yang dikutip dari dunia pewayangan, dunia alam pemikiran Jawa itu, disampaikan lebih lengkap, *lengser keprabon, madeg pandhito ratu*. Tugas *pandhito*, katanya, pertama adalah mendekati diri kepada Tuhan Yang Mahakuasa. Kedua, mengasuh anak-cucu dan cicit supaya menjadi orang yang berguna bagi negara dan bangsa.

Soeharto adalah orang yang mempopulerkan istilah ‘ini’. Nyatanya, yang terjadi pada Soeharto saat itu adalah dipaksa *lengser*. Ia tidak *madeg pandhito ratu* seperti yang dia inginkan, juga yang sesuai dengan konsep awalnya tentang apa yang dilakukan raja-raja setelah tak lagi menjabat. Sebaliknya, ia justru dihujat, dicaci-maki, diperiksa dan digugat secara hukum. Pendeknya, ia semakin dikucilkan dari sejarah Indonesia.

Konon, Serat Wedhatama karangan Mangkunegara IV yang menjadi acuan sumber pernyataan Soeharto, dimaksudkan sebagai pitutur bagi pemegang kuasa. Orang Inggris mengenal *Lord Acton* dengan pernyataan *the power tends to corrupt*. Lain dengan orang Jawa yang mengenal ajaran, kekuasaan yang menumpuk di satu tangan pada dasarnya akan menjadi absolut. Praktek kekuasaan mengenal hukum karma.



Demonstrasi menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto Mei 1998 yang berbuntut kerusuhan Massal.

Bila sudah demikian, yang berlaku adalah hukum *sopo gawe bakal nganggo; sopo nandur bakal ngundhuh; sopo goroh bakal growah; sopo salah bakal seleh*. Terjemahannya kurang lebih: siapa yang membikin, memakainya; siapa yang menanam, bakal panen; siapa berdusta akan rusak; siapa bersalah harus turun.

Berlawanan dengan nasib buruk penguasa rakus yang harus (seleh), ada pepatah tambahan: *lengser keprabon*. *Lengser* mengacu pada tindakan berhenti sementara, mengambil jarak, dan sangat mungkin penguasa yang *lengser* naik tahta lagi; sesuatu yang sama sekali berbeda dengan seleh keprabon, sebab yang seleh tak mungkin naik lagi.

Suryanto Sastroatmadja, pakar otodidak Kejawen dari Yogyakarta, cara memerintah dengan tangan besi sering terjadi pada zaman raja-raja Jawa. Coba saja lihat pemerintahan Raja Airlangga hingga Sultan Agung. Saat itu, *lengser* keprabon kemudian bersinonim dengan taktik licik untuk bertahan dalam kekuasaan; sinonim pula dengan menghindarkan diri demi nama baik.

Di Kraton Yogyakarta, aksi *lengser* ini juga pernah dilakukan oleh Hamengku Buwono VII. Lantaran ia merasa sudah tua, ia merelakan kedudukannya untuk Hamengku Buwono VIII. Menurut penafsiran Onghokham, HB VII mundur karena tekanan Belanda dan sakit-sakitan, ia lebih suka tinggal di pesanggrahan luar kota, persisnya di lokasi Hotel Ambarukmo (Kini Ambarukmo Plaza). Ia tidak mau menemui orang Belanda, tetapi masih ikut menentukan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan keraton. HB VII tidak naik tahta lagi, meskipun tidak juga memakai istilah *seleh* keprabon.

Seleh keprabon secara baik-baik, hanya terjadi pada Prabu Brawijaya IV dari Majapahit. Sedangkan pada umumnya *seleh keprabon* di kerajaan Mataram, terjadi karena dipaksa dan diberontak. Nasib mereka pun umumnya dibunuh, dipenjara, dihujat.

Asal tahu saja, konsep kekuasaan Jawa bahwa raja adalah *gung binathara*, *bau dendha*, *nyokrowati* yang artinya sebesar kekuasaan dewa, penegak hukum, dan penguasa dunia. Pendeknya, absolut. Kemutlakan kekuasaan mesti dilengkapi dengan berbudi *bawa leksana*, *ambeg adil paramarta* yang artinya berbudi luhur yang meluap, adil terhadap sesama. Kekuasaan mutlak raja harus diimbangi dengan keadilan yang diandaikan meluap dari dirinya sendiri.

Agar bisa menerapkannya secara pas, raja perlu refleksi, perlu retreat, atau perlop (cuti) sementara dari tugasnya sebagai kepala negara. Itulah *lengser* keprabon. Itulah menyinkingir sementara.

Hanya saja, dengan *lengser*, terkandung bermacam-macam tujuan. Agar ia bisa melihat lebih awas pola tingkah para pesaingnya sehingga menemukan strategi untuk mengalahkan mereka. Untuk madik-madik, mengamati-amati ataupun memberi kesempatan calon ahli warisnya-putra mahkota satrio piningit-magang. Artinya, *lengser* dilakukan tak ada sangkut-paut dengan urusan kenegaraan. Ada yang tetap menangani keputusan-keputusan yang bersangkutan dengan negara lain.

Sebaliknya, kalau *lengser* tak ada unsur paksaan, pada seleh ada unsur dipaksa. Ada unsur diharuskan, umumnya oleh rakyat atau pemuka masyarakat. Karena itu, ada proposisi di depan *seleh*, *sing sopo salah*. Raja turun tahta karena dianggap salah. Itulah konsekuensi tugas. Salah karena apa? Karena tidak memposisikan diri sebagai raja (Jawa) yang mengayomi dan melindungi rakyat. Ironisnya, sepanjang sejarah Jawa, tak ada raja yang seleh, kecuali oleh pemberontakan (kraman).

Lain dengan *madeg pandhito ratu*. Peranan ini hanya dimungkinkan oleh seorang raja yang turun tahta karena kehendaknya sendiri. Itu konsep kekuasaan Jawa yang ideal, yakni seorang raja yang tidak turun tahta karena dipaksa (*sing sopo salah*, seleh, tidak juga berhenti sementara (*lengser*), tetapi yang tahu diri. Dia mundur atas kehendaknya, tetap siap memberi nasihat, baik diminta atau tidak. Dia mengambil posisi sebagai pendeta, *madeg pandhito ratu*. Dan dalam kisah raja-raja Jawa, tak ada raja yang *madeg pandhito ratu*, berdiri tegak sebagai pendeta.

Kearifan agaknya sudah ada di ubun-ubun. Itu sebabnya Soeharto berkali-kali melontarkan ucapan keinginan untuk *madeg pandhito ratu*. Kapan? Ya saat dia merasa tak sanggup lagi secara fisik, walaupun untuk itu ia selalu mengatakan, “Bila rakyat menghendaki, masih siap memangku jabatan presiden.”

Dengan keinginan *madeg pandhito ratu*, Raja mempersiapkan segalanya, agar proses pemerintahan tidak gonjang-ganjing; suatu

cita-cita ideal yang hanya ada dalam dunia wayang, misalnya peranan yang dimainkan oleh Begawan Abiyoso. Dalam sejarah raja-raja Jawa tak ada mantan raja berperan sebagai *madeg pandhito ratu*. Dalam wayang, peran seperti itu dimainkan oleh Abiyoso, itu pun Abiyoso tak pernah jadi raja.

Sementara dengan konsep itu yang diidealkan adalah, sewaktu menjadi raja, dia berperan betul sebagai raja yang ideal. Memerintah negara secara *adil ambeg paramarta*, sehingga tercipta suasana *tata tentrem gemah ripah loh jinawi*. Mementingkan kepentingan rakyatnya bukan keluarga dan kroninya. Keadilan meluap dari dirinya sendiri. ia dijunjung dan disembah hingga akhir hayat. Dan itulah kelengkapan seorang pemimpin negara, melaksanakan keadilan sebagai bagian utuh dari kekuasaan mutlaknya, dan memberikan saran *wur-wur sembur* di saat usia senja.

Nah, disinilah Soeharto memimpikan diri seperti Abiyoso. Akan tetapi apa yang terjadi, faktual dia mundur. Secara psikologis tidak menerima kenyataan. Karena itu pernyataan *ora dadi presiden ora patheken* tanggal 19 Mei itu, disambut spontan dan langsung oleh Nurcholish Madjid, “Wah, sudah *tuwuk* (kekenyangan-ed) Pak.”

Dalam satu jentikan jari, kekuasaan berikut segala daya magisnya, juga yang dipresentasikan dalam birokrasi yang dia ciptakan, mulai kehilangan makna. Tindakan yang dipilihnya dia sebut *lengser* dan bukan seleh. Tak ada perasaan kalah, apalagi perasaan bersalah. Dia merasa tidak perlu *glanggang colong playu*. Sebagai prajurit, tak ada kamus ‘lari dari tanggung jawab’, tak ada kamus mundur dari jabatan, tak ada kamus melarikan diri.

Padahal konotasi *lengser* amat dekat dengan *longsor*, *lingsir*, *lungsur*. Mengandung arti alami, sifatnya kecelakaan,” kata Dr Alex Sudewo, dosen Sejarah Universitas Sanata Dharma. Kenyataannya, para pujangga Jawa tidak pernah mendeskripsikan *kelengseran* raja

secara drastis, kecuali disebut misalnya Raja Majapahit saat terjadi perbenturan perlawanan dengan anak-nya, Sultan Bintara, atau Sultan Pajang melawan Panembahan Senapati, atau Paku Buwono III melawan Mangkubumi. Raja yang *lengser* selalu dihormati secara mitologis oleh para pujangga. Kejadian itu persis seperti ketika Soeharto *melengser* Soekarno.

Kekuasaan Soeharto dilihat sebagai sebuah kemiripan dengan kekuasaan raja-raja Jawa jaman dulu. Apa saja yang tertera dalam konsep-konsep kekuasaan Jawa, berlaku klop. Sarana mengumpulkan daya magis lewat senjata-senjata atau klangenan di era kerajaan, mirip dengan apa yang terjadi selama 32 tahun rezim Orde Baru. Kalau raja-raja mengumpulkan senjata-senjata adalah simbol konsentrasi kekuasaan, rezim Orde Baru mengumpulkan berbagai atribut tanda jasa mulai dari gelar Bapak Pembangunan hingga kedudukan-kedudukan pengakuan internasional.

Hanya saja, yang ada dalam diri Soeharto ini sudah berfusi dengan modernitas. Sudewo melihat atribut modern diterapkan persis seperti yang dilakukan penjajah Belanda. Bukan hanya akumulasi kekuasaan, tetapi juga politik memecah-belah seperti dilakukan VOC. “Tidak hanya mengumpulkan tanda-tanda, tetapi cara memerintahnya persis seperti penjajah Belanda dulu,” katanya.

Anderson menulis, ada dua cara mengumpulkan kekuasaan dalam tradisi Jawa, yakni dengan cara menyerap kekuasaan yang ada di sekitarnya, atau menghancurkannya sama sekali. Cara pertama dipakai kalau raja atau penguasa belum merasa kuat; suatu cara yang dipraktekkan oleh Panembahan Senapati saat membangun dinasti Mataram, sehingga dikenal tipu-muslihat mengelabui Ki Ageng Mangir dari Bantul dengan ledek cantik. Sementara sebagian besar cara mengumpulkan kekuasaan dilakukan dengan menjarah dan menguasai raja-raja kecil.

Sudewo kemudian melihat bahwa selama ini Soeharto menguasai, bukan memimpin. Dan, begitu *lengser*-maksudnya mungkin mundur sementara dan mau naik lagi-sulit ditemukan tokoh selain Soeharto. Mengapa? Karena dalam konsep VOC, tak ada konsep menyiapkan pemimpin. Menyiapkan pemimpin, sama halnya membuat munculnya bintang baru, sebaliknya yang disiapkan adalah penguasa baru-tentu yang sealiran, sepaham, dan ada jaminan melanggengkan kekuasaan.

Gelar sultan di masa lalu, era akhir Kerajaan Mataram seperti masa Sultan Agung, memperkuat konsep sebagai penguasa dunia dan penguasa agama sekaligus. Menurut de Graaf, raja ketiga dinasti Mataram, Sultan Agung, itulah raja yang ekspansif dan nyaris bisa mewujudkan cita-cita Senapati untuk menyatukan seluruh Jawa. Sultan Agung, dan bukan Senapati, jadi tokoh panutan raja Jawa, tulis Anderson. Karena itu di zaman modern ini banyak orang mengaku keturunan Sultan Agung, bukan keturunan Amangkurat I, II, III dan IV, terutama Amangkurat I yang digambarkan Suryanto Sastroatmadja sebagai raja paling rakus-serakah dan kejam.

Sebagai data ilmu sejarah, kelemahan studi konsep kekuasaan Jawa selama ini, menurut Sudewo kurang memperhatikan aspek realitas dalam praktek. Sifatnya lebih telaah sastra. Asinkronis, karena hanya menangani praktek kekuasaan abad ke-16 sampai ke-19. Padahal penelitian lebih baru di bidang sejarah, mengungkapkan bahwa pada abad ke-19 berkembang feodalisme keraton yang sangat dipengaruhi sistem kolonial Belanda/ Barat.

Sudewo bilang, “Kalau banyak orang mengatakan Soeharto sebagai raja Jawa, perlu dilihat dalam konteks abad ke-19 di mana berkembang feodalisme keraton yang sangat dipengaruhi sistem kolonial.” Dus, menelaah konsep kekuasaan Jawa, meng-*othak-athik gathuk* praktek kekuasaan Orde Baru dengan konsep kekuasaan Jawa, perlu memperhatikan aspek historis empirisnya, antara sebelum dan sesudah Perjanjian Giyanti.

Sebab masuknya faktor baru dalam konsep kekuasaan Jawa seperti yang disebut Onghokham sebagai kekuasaan supranegara-masuknya unsur Barat yang dibawa VOC-berpengaruh besar dalam paham kekuasaan Jawa; atau di sini ketemu pernyataan Sudewo, bahwa apa yang dilakukan rezim Soeharto tidak mendekati keadaan yang dipraktekkan raja-raja Mataram, tetapi konsep-konsep raja yang dipraktekkan penjajah Belanda. Hasilnya memang mirip: kekuasaan terpusat, tak terbagi, tak menghasilkan pemimpin atau tokoh.

Brankas Keluarga Cendana Kian Semok

Agaknya rakyat Indonesia tak cukup berpuas diri dengan melengserkan Soeharto dari kursi RI-1 saja. Usai henggang dari istana, rakyat mulai bergerak untuk mendorong pengusutan kekayaan Soeharto. Bahkan, tahun 1999, majalah Time (Asia) menurunkan tulisan yang berjudul *Soeharto Inc: How Indonesia's Boss Built a Family Fortune*. Dalam majalah edisi 24 Mei 1999, diungkapkan kekayaan Soeharto senilai US\$ 15 miliar-73,24 miliar.

Majalah itu menulis pula, pada bulan Juli 1998, Soeharto sempat mentransfer uang senilai US\$ 9 miliar dari Swiss ke sebuah bank di Austria. Departemen Keuangan AS, yang kini dipimpin Lawrence Summers menggantikan Robert Rubin, dilaporkan telah melacak transfer itu melalui berbagai jalur diplomatik di Wina, ibu kota Austria.

Bukan hanya Departemen Keuangan AS yang melacak harta Soeharto melalui jalur-jalur diplomatik di Austria. Dua anggota Kongres AS, Senator John Kerry, dan anggota House of Representatives, Howard Berman, juga sedang melakukan hal serupa. Mereka sudah menulis surat kepada Presiden Bill Clinton untuk melacak harta Soeharto di AS, permintaan sudah dikabulkan Gedung Putih, dan kini juga sedang mengadakan pengusutan.

Dalam surat pertamanya kepada Bill Clinton, Berman dan Kerry meminta Pemerintah AS melakukan pengusutan terhadap kekayaan Soeharto beserta kroni-kroninya. Mereka mendesak pemerintahan AS bersedia membantu rakyat Indonesia melacak kekayaan Soeharto. Berman dan Kerry juga menyebutkan, membantu melacak harta Soeharto bukanlah hanya kebijakan luar negeri belaka, tetapi juga kewajiban yang mutlak harus dilakukan Clinton.

Laporan media massa asing terhadap kekayaan Soeharto dan para pengusaha Indonesia pernah juga diungkapkan majalah Forbes edisi 6 Juli 1998. Disebutkan, keluarga Soeharto berada dalam urutan ke-74 daftar, dengan nilai US\$ 4 miliar yang ditanam pada sektor investasi. Belum lagi saham mereka di sekitar 3.200 perusahaan, yang tak termasuk dalam jumlah US\$ 4 miliar itu.

Selain Soeharto, orang-orang Indonesia lain yang masuk daftar 200 terkaya di dunia itu adalah Liem Sioe Liong (Sudono Salim), Eka Tjipta Widjaya, dan keluarga Wonowidjojo. Mereka masing-masing menduduki urutan ke-182, 74, dan 154.

Di tahun yang sama, seorang peneliti asal Australia, Michael Backman menerbitkan buku berjudul *Asian Eclipse: Exposing the Dark Side of Business in Asia*. Menurut Backman, keluarga Soeharto bahkan memiliki kepentingan bisnis dengan mantan PM Australia, Paul Keating, dan PM Malaysia Mahathir Mohamad.

Ia menulis, Keating minta tolong agar perusahaan Australia, Telstra, diberi kemudahan mendapatkan proyek telekomunikasi di Jawa Tengah. Sementara anggota keluarga Mahathir memiliki kaitan bisnis dengan cucu Soeharto, Ari Sigit, melalui perusahaan komunikasi Goldtron.

Backman menyimpulkan, bisnis telekomunikasi di Indonesia dikuasai keluarga Cendana. Ada Ari Sigit yang ikut mensuplai telepon Prabayar, Bambang Trihatmodjo yang ikut di satelit Palapa dan Satelindo, Siti Hadiani Rukmana alias Tutut yang ikut punya

saham di Lucent dan Motorola, serta Hutomo Madala Putra di perusahaan Jepang, NEC.

Menurut Backman, krisis ekonomi Indonesia ternyata hampir tidak mempengaruhi kinerja bisnis mantan Presiden Soeharto dan anak-anaknya. Selain itu, terungkap pula bahwa aset keluarga Cendana praktis dalam keadaan aman, karena upaya penyitaan justru akan menimbulkan dampak negatif terhadap rasa percaya para investor asing.

Backman berpendapat, proses penyidikan atas kekayaan Soeharto sampai saat ini merupakan upaya yang sia-sia, karena sebagian besar bisnis keluarga Cendana merupakan usaha patungan dengan perusahaan-perusahaan besar dari luar negeri. “Menyita aset keluarga Soeharto sama dengan menyita aset investor-investor asing,” katanya.

Menurut Backman ada 1.251 perusahaan keluarga Soeharto yang terlibat kerja sama dengan 66 perusahaan multinasional. Backman meramalkan, bisnis keluarga Soeharto akan bertahan dalam situasi krisis saat ini, bahkan keadaannya lebih baik dibandingkan bisnis konglomerat-konglomerat lain.

Backman berpendapat, Soeharto sudah biasa memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan bisnis pribadi. “Memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, itulah bagian fundamental dari apa yang terjadi di Indonesia saat ini,” katanya dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press di Sydney, Australia bulan April 1999.

Bagaimana melacak harta hasil korupsi para pejabat Indonesia? Selain berdasarkan laporan media-media asing, ada sejumlah perusahaan swasta yang khusus bergerak di bidang itu. Nama yang paling populer adalah Kroll Associates yang bermarkas di New York, AS. Perusahaan detektif ini pernah menolong pemerintah Indonesia melacak harta karun Eddy Tanzil yang sampai kini masih buron.

Pada tahun 1999, majalah TEMPO juga pernah menurunkan tulisan tentang temuan George Junus Aditjondro, pakar sosiologi korupsi, mengenai kekayaan keluarga Cendana. Ia mengumpulkan catatan kepemilikan properti milik Keluarga Cendana yang tersebar di Eropa, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan kawasan Laut Karibia. Inilah tulisan TEMPO saat itu:

Eropa

Probosutedjo: Norfolk House, Putney Hill, London. Bangunan bertingkat empat ini punya sembilan kamar tidur, garasi ganda, serta pekarangan berumput sepanjang 50 meter di belakangnya. Dibeli pada 1973 seharga 93 ribu poundsterling, dan sejak Januari lalu sudah ditawarkan lewat agen real-estate Foxtons seharga 1,4 juta poundsterling (Rp 21 miliar).

Siti Hardiyanti Rukmana: Beberapa apartemen di 16 Hyde Park Square, Mayfair, London, yang dibeli sekitar tahun 1988 seharga 350 ribu pound melalui Citibank, London. Sesudah krisis moneter, direnovasi dengan biaya 110 ribu pound, yang rekeningnya dikirim ke KBRI, yang menolak untuk membayarnya.

Sigit Harjojudanto: Rumah mewah berlantai tiga dengan lima kamar tidur di Winnington Road No. 8, East Finchley/Hampstead, London.

Di Swiss: Sigit punya rumah di perbukitan sekitar Danau Jenewa, yang dibeli untuk Seto Harjojudanto, anak keduanya, yang menderita penyakit polio. Sejak Januari lalu ditawarkan lewat agen properti John Wood & Co. seharga 1,95 juta pound (Rp 29 miliar), ditambah ongkos renovasi.

Elsje Ratnawati Harjojudanto: Rumah mewah berlantai tiga dengan sembilan kamar tidur di Winington Road No. 89, East Finchley/Hampstead, London. Sejak Januari lalu ditawarkan lewat agen properti John Wood & Co. Harga penawaran pertama adalah 9,5 juta pound, yang belakangan ini diturunkan menjadi 8 juta pound.

Siti Hedyati Prabowo: Sejumlah apartemen di Upper Grosvenor Road No. 38, Mayfair, London.

Hutomo Mandala Putra: Rumah besar, lengkap dengan padang golf 18 lubang, di dekat Pacuan Kuda Ascot, London Utara. Rumah peristirahatan di Brighton, kota pantai di sebelah selatan London.

Pantai Barat Amerika Serikat

Sudwikatmono di Hawaii

Kondominium dengan dua kamar, di gedung bertingkat Plaza Landmark No. 290, Likini Street, Honolulu, Hawaii.

Dibeli Mei 1985 seharga US\$ 216,4 ribu. Pada 1997, kondominium ini di kantor pajak jelas-jelas tercatat atas nama Sudwikatmono ditaksir bernilai US\$ 253 ribu.

California

Rumah di North Hillcrest Drive No. 605, Beverly Hills.

Rumah ini tercatat sebagai milik C. Elliot Fitzgerald, tapi warga Indonesia mengetahui ini milik Sudwi sejak 1980-an. Tiga orang anak Sudwi—Martina, Miana, dan Agus Lasmono—tinggal di rumah ini semasa studi mereka.

California

Rumah di North Hillcrest Drive No. 701, Beverly Hills.

Dibeli pada 1994 oleh New Hillcrest Inc. seharga hampir US\$ 5 juta. Masih sering dihuni anggota keluarga Sudwikatmono, terutama si bungsu Agus Lasmono, yang jip Lamborghininya sering terparkir di sini.

Bambang Trihatmodjo: Kondominium di Beverly Hills 27, California (interiornya pernah dimuat di majalah Tiara).

Bersama teman-temannya, Bambang Tri berbisnis jual beli apartemen mewah di Beverly Hills.

Hutomo Mandala Putra dikabarkan memiliki salah satu kondominium mewah di kompleks Beverly Park, Beverly Hills.

Pantai Timur Amerika Serikat

Dandy Rukmana dan Danty Rukmana (anak-anak Tutut) Tiga rumah di luar Kota Boston, di Negara Bagian Massachusetts:

1. Hubbard Road No. 60, Weston, daerah elite 20 mil dari Boston. Oktober lalu, rumah ini ditaksir bernilai US\$ 2 juta.
2. Bishops Forest Drive 337, Waltham, lima mil dari pusat Kota Boston.
3. Bishops Forest Drive 337, Waltham, Middlesex County.

Kondominium (nomor 2) dibeli Dandy Rukmana pada 1992 seharga US\$ 237 ribu.

Rumah (nomor 3) sudah dijual pada 1995 seharga US\$ 255 ribu. Dandy dan Danty tetap menggunakan alamat ini untuk surat-surat pemilikan mobil-mobil mewah, yang tidak sedikit.

Kawasan Laut Karibia

Hutomo Mandala Putra: Di Cayman Islands, British West Indies, Tommy memiliki perusahaan Mabua International Ltd., salah satu pusat pencucian uang.

Keluarga Soeharto juga punya rumah peristirahatan di kawasan ini.

Selandia Baru

Hutomo Mandala Putra: Kawasan wisata berburu Lilybank Lodge seluas 2.500 hektare di pegunungan di Pulau Selatan. Diperoleh Tommy dan partner bisnisnya dari Singapura, Alan Poh, 1992, dengan biaya sewa pakai 2 juta dolar NZ. Ongkos renovasi 4 juta dolar NZ. Akhir tahun lalu, Lilybank Lodge ditawarkan ke pasar 10 juta dolar NZ karena pengunjung merosot terus akibat publikasi negatif yang dikaitkan dengan *crony capitalism* Soeharto.

Bagi keluarga Cendana, soal duit seperti sudah punya mesin cetaknya sendiri. Konon, seorang calon pembeli yang pernah menyambangi rumah keluarga Sigit di London sempat terbungong-bungong. Ia cuma mendapati dua kamar kosong. Sisanya? Tumpukan tas belanja dari Selfridges yang bahkan, katanya, belum sempat dibuka.

Seorang sumber TEMPO berujar, “Jangankan di London, di Jakarta saja mereka sering tidak sempat membuka barang yang telah dibeli.” Luar biasa. Padahal Selfridges dan Harrods adalah pusat belanja kalangan jet set di London, yang terletak di Oxford Street yang tersohor itu.

Keluarga ini juga gemar pamer mobil mentereng. Eno Sigit, salah seorang cucu Soeharto dari Sigit, semasa kuliah fashion di American College, London, selalu pulang pergi diantar Rolls Royce

mengkilap. Tentu saja pengemudinya adalah seorang *chauffeur* atau sopir pilihan dengan setelan jas dan topi hitam-hitam.

The Independent juga melaporkan Eno pernah menggelar pesta di Hotel Hilton yang menghabiskan tak kurang dari £ 150 ribu atau sekitar Rp 2,25 miliar. Ia juga dikabarkan pernah mengganti telepon genggamnya dalam waktu sehari cuma karena ia tak suka dengan warnanya. Semasa itulah di kalangan mahasiswa Indonesia di sana sangat populer sebuah komentar *nyinyir* ke arah trah Cendana: “Ingin menikmati gaya hidup supermewah? Gampang. Jadilah anak dan cucu presiden.”

Cerita lain datang dari putra-putri kesayangan Tutut yaitu Dandy dan Danty Rukmana. Sewaktu mereka kuliah di Boston, mulai tahun 1991, gaya hidup dua remaja baru gede ini luar biasa *jumawa*, bahkan untuk ukuran orang Amerika. Kedua sumber itu sering melihat Dandy dan Danty berseliweran di jalan dengan mobil Ferrari, Rolls Royce, dan Porsche.

Konon, Dandy bahkan pernah membeli sebuah Lamborghini-Diablo seharga Rp 1 miliar. Buat warga kota kecil seperti Boston, gaya hidup mereka amat mencolok. Sampai-sampai, jika sebuah mobil Lamborghini melintas, orang langsung bisik-bisik, “Itu cucu salah seorang presiden di Asia.” Seorang agen mobil terkenal di kota itu sampai hapal banget kebiasaan mereka yang kerap gonta-ganti mobil. “Paling lama, mereka ganti mobil sebulan sekali,” katanya.

Yang lebih dahsyat, menurut George, dua remaja ini juga memiliki tiga rumah mewah di kawasan itu, dengan nilai total US\$ 2,5 juta atau, ya ampun, mencapai Rp 37,5 miliar. Sumber TEMPO mendengar penuturan salah seorang temannya yang pernah diundang menghadiri pesta di sana. Rumah itu dilengkapi dengan taman yang luas, kolam renang supermewah, dan lapangan tenis.

Balap dan judi adalah kisah berikutnya di seputar gelimang harta dinasti Soeharto. Seorang teman reli Tommy Soeharto

menuturkan bagaimana habis-habisannya mantan bos mobil nasional Timor itu melakoni hobi mahalunya. Sewaktu survei reli dunia di Medan pada 1997 lalu, kata temannya itu lagi, cuma dalam waktu sepekan, Tommy sampai “menghabiskan” tiga unit Mitsubishi Evolution IV.

Bukan apa-apa, tiga mobil yang harga setiap unitnya Rp 250 juta itu ringsek mencium tebing. Dan dalam setahun setidaknya Tommy harus menghabiskan 10 unit mobil survei. Teman reli Tommy yang lain menuturkan keterbengongan seorang wartawan Australia yang mewawancarainya. Waktu itu, kepadanya ditanyakan pihak mana yang mensponsori tim relinya. Si wartawan melongo ketika diberi tahu bahwa seluruh dana yang bisa mencapai ratusan juta sampai miliaran rupiah sekali reli ditanggung pihaknya sendiri, alias tanpa sponsor. Padahal pereli kelas dunia tak mungkin berlaga tanpa ada yang mensponsori.

Berbagai kasino kondang di seantero jagat pun luber dengan uang klan Soeharto. Di Christmas Island, Burswood Casino, Australia, atau Genting Highland, Malaysia, misalnya, nama beken anggota Keluarga Cendana sudah menjadi buah bibir. Seorang sumber TEMPO yang berkawan dekat dengan Ari Sigit, kakak Eno, menuturkan ulah cucu Soeharto yang satu itu. Ceritanya begini. Ketika itu, Ari ikut reli di Malaysia dengan bendera timnya, Sexy Motor Sport, yang mengandalkan kedigdayaan mobil Audi. Pamannya, Tommy, juga ikut balap dengan timnya, Goro Rally.

Konon, di suatu sore, setelah kandas di arena balap, Ari mengajak semua anggota rombongannya ke Genting Highland, pusat perjudian terkenal di sana. Tak jelas seberapa tebal ringgit yang ia habiskan di meja judi. Yang jelas, silakan hitung sendiri, sampai ayam berkokok, putra sulung Sigit Harjojudanto itu masih asyik menjajal *baccarat*, *black jack*, dan *rolet*. Padahal semalaman itu tak sekali pun ia dikunjungi Dewi Keberuntungan, alias kalah melulu. Tapi ia rupanya tak begitu ambil pusing soal kalah menang, soalnya ia cuma cari hiburan.



Dimana-mana terjadi demonstrasi menuntut mundurnya Presiden Soeharto Mei 1998.

The Independent juga menggambarkan bagaimana entengnya Tommy menghamburkan uang di meja kasino. Salah seorang temannya yang pernah berjudi bareng di Ritz Casino, London, punya cerita menarik. Suatu malam, Tommy keok terus. Duitnya ambblas sampai lebih dari £ 1 juta (Rp 15 miliar). Tapi putra bungsu Soeharto ini kelihatan tak begitu ambil peduli. Dengan entengnya, seolah tak terjadi apa-apa, ia langsung mengajak teman-temannya makan malam di sebuah restoran mewah. Easy going.

Sang teman reli itu juga mengaku pernah diajak ikut berjudi ke London, dua tahun lalu. Mereka berangkat bersepeuluh dengan jet pribadi milik 'Sang Pangeran'. Waktu itu, di luar kebiasaan, Tommy, yang lebih sering kalah ketimbang menang, bernasib terang. Duit hasil judi itu pun langsung ambblas. Hari itu juga ia menghabiskannya dengan membeli sedan reli mutakhir, Subaru Impreza. Waktu itu saja harganya sudah mencapai setengah miliar rupiah. Dua kasino favorit Tommy adalah di Christmas Island dan Genting Highland. Di lapangan golf, kegemarannya berjudi juga tak tertahankan. Nilai taruhannya terbilang kecil, 'hanya' Rp 50 jutaan.

Oh my gosh!

Adili Soeharto!

Bank Dunia pernah mengeluarkan daftar nama mantan pemimpin negara yang dianggap melakukan korupsi besar ketika memegang kekuasaan. Salah satunya Soeharto. Mantan presiden kedua Indonesia itu bahkan berada pada peringkat pertama. Soeharto diduga melakukan korupsi sebesar US\$15 miliar-35 miliar.

Asal tahu saja, sesungguhnya yang menyatakan bahwa Soeharto adalah koruptor, bukan hanya Bank Dunia saja. Transparency International (TI), sebuah lembaga internasional terpercaya, bukan para mahasiswa atau demokrat radikal yang menggulingkannya pada Mei 1998. Lembaga ini memiliki jaringan informasi global, periset jempolan, dan memiliki lembaga perwakilan hampir di seluruh dunia. Lembaga internasional inilah yang mengeluarkan laporan korupsi global bertema korupsi politik serentak di seluruh dunia 25 Maret 2004 (Kompas, 26/3/2004).

TI melaporkan, ke-10 besar pemimpin politik (presiden atau perdana menteri) terkorup di dunia. Bila TI tidak mengeluarkan laporan itu, rakyat Indonesia tentu “mulai” lupa dengan sepak terjang Soeharto. Saya sendiri cukup tercengang menyaksikan Soeharto kemarin ikut pencoblosan. Marcos saja tak bisa ikut pemilu setelah lari ke Hawaii. Soeharto kemarin terlihat sehat dan putrinya, Siti Hardiyanti Rukmana, menyatakan bahwa ayahnya tak bisa bicara, tapi bisa mengenal tanda gambar partai.

Tahun lalu, Ban Ki-moon, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus diacungi dua jempol karena ia meluncurkan program global Stolen Asset Recovery Initiative di Markas Besar PBB, New York. Korupsi di mana pun di dunia, termasuk di Indonesia, adalah kejahatan terhadap umat manusia (*crimes against humanity*), bukan sekadar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dan yang terpenting, korupsi di suatu negara kini bukan lagi masalah negara itu sendiri, tetapi sudah menjadi kepedulian semua bangsa dan negara di dunia.

Alhasil, Soeharto dan keluarganya kini tak boleh buru-buru senang dengan putusan Mahkamah Agung yang menggajarnya ganti rugi Rp 1 triliun atas kemenangannya terhadap majalah Time yang membeberkan kekayaan keluarga Cendana ini mencapai miliaran dollar AS, yang diduga hasil KKN selama berkuasa. Menurut versi StAR PBB, Soeharto menduduki peringkat pertama koruptor dunia, “menggelapkan” US\$ 15 miliar-35 miliar.

Kebetulan, Indonesia ikut menandatangani UN Convention against Corruption (2003), tentu terikat menyukseskan program StAR. Kehadiran Adiyatwidi Adiwoso, Deputi Perwakilan Tetap RI untuk PBB, dan Arif Havas Oegroseno, Direktur Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri RI, menegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus bergerak cepat menuntaskan kasus korupsi yang disorot Sekjen PBB Ban Ki-moon dan UNODC.

StAR Initiative PBB (Lihat <http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/Star-rep-full.pdf>) menegaskan fokus program pada sepuluh nama, dan Soeharto menduduki urutan pertama. Sebagai perbandingan saja:

- (1) Soeharto, Indonesia (1967-1998), US\$ 15 miliar- 35 miliar
- (2) Ferdinand E Marcos, Filipina (1972-1986), US\$ 5 miliar-10 miliar
- (3) Mobutu Sese Seko, Kongo (1965-1997), US\$ 2 miliar-5 miliar
- (4) Sani Abacha, Nigeria (1993-1998), US\$ 2 miliar- 5 miliar
- (5) Slobodan Milosevic, Serbia/Yugoslavia (1989-2000) US\$ 1 miliar
- (6) Jean- Claude Duvalier, Haiti (1971-1986), US\$ 300 juta-800 juta
- (7) Alberto Fujimori, Peru (1990-2000), US\$ 600 juta

- (8) Pavlo Lazarenko, Ukraina (1996-1997), US\$ 114 juta-200 juta
- (9) Arnaldo Aleman, Nikaragua (1997-2002), US\$ 100 juta
- (10) Joseph Estrada, Filipina (1998- 2001), US\$ 78juta-80 juta

Jika memang pemerintah berniat serius menggarap aset Soeharto dan kroninya ini, mestinya tembakan dari Bank Dunia, PBB dan TI ini dimanfaatkan pemerintah untuk lebih serius dalam menyelesaikan perkara korupsi bekas orang kuat di Indonesia tersebut. Apalagi, sejak Soeharto lengser dari singgasananya, belum ada satu presiden pun yang mampu menyeret Soeharto ke meja hijau. Padahal, jejak kesalahan Soeharto sudah diendus oleh Kejaksaan Agung tiga bulan setelah ia mundur.

Kalkulasi kejaksaan, selama Soeharto menganggangi negeri ini, ia berhasil mengeruk kekayaan untuk diri sendiri, keluarga, dan kroni-kroninya melalui tujuh yayasan yang dipimpinya. Celakanya, uang yang masuk ke dalam kas tujuh yayasan tersebut diperoleh dari perusahaan-perusahaan swasta dan negara dengan menggunakan keputusan presiden. Kerugian negara dari tindakan Soeharto ini diperkirakan US\$ 571 juta.

Pengumuman PBB tahun lalu seolah membenarkan laporan Time (Asia) yang menurunkan tulisan yang berjudul *Soeharto Inc: How Indonesia's Boss Built a Family Fortune*. Dalam majalah edisi 24 Mei 1999, diungkapkan kekayaan Soeharto senilai US\$ 15 miliar-73,24 miliar. Menurut data Time, selama 32 tahun berkuasa, Soeharto membangun kerajaan bisnis bersama keluarga dan kolega-koleganya melalui praktek monopoli terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dari praktek bisnis tersebut, Soeharto bisa memupuk harta yang diperkirakan mencapai 73,24 miliar dollar AS (Rp 659 triliun). Luar biasa!

Siapa pun yang berhasil mengeruk harta negara, pasti tidak akan mengaku. Mana ada maling mengaku maling. Itu sebabnya,

Soeharto pernah membantah bahwa dirinya memiliki kekayaan di luar negeri. “Saya tidak punya satu sen pun uang di luar negeri,” katanya pada 6 September 1998, delapan bulan sebelum Time melansir beritanya.

Tidak puas dengan pemberitaan Time, Soeharto mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap majalah itu. Padahal, dalam waktu yang bersamaan Soeharto juga sedang menghadapi dakwaan Kejaksaan Agung atas korupsi yang diduga dilakukan melalui tujuh yayasanannya.

Meskipun pengadilan negeri maupun pengadilan tingkat banding menolak semua gugatan Soeharto atas Time, Soeharto tak lantas menyerah. Ia pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Tanggal 28 Agustus 2007 lalu MA mengeluarkan keputusan memenangkan gugatan Soeharto atas Time. Time harus membayar uang Rp 1 triliun kepada Soeharto dan meminta maaf melalui media massa. Keputusan MA jelas mengancam kebebasan pers nasional dan internasional, ketakberpihakan hukum, mengabaikan UU Pers, dan menihilkan investigasi empat bulan Time (Asia) di seluruh dunia melalui cover both sides.

Ahli politik-ekonomi dari AS, Jeffrey Winters, kepada Antara pada tahun 1999 bilang bahwa laporan Time mengenai kekayaan keluarga Soeharto sangat akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. “Time adalah majalah yang paling terkenal dan terpercaya di dunia. Laporan itu bukan spekulasi, karena itu menyangkut kredibilitas dan reputasi mereka,” kata Winters.

Padahal, melalui Prakarsa Pengembalian Aset Curian atau Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative yang dilansir PBB dan Bank Dunia pada 17 September 2007 lalu, kedua lembaga tersebut siap membantu negara berkembang memulangkan aset yang dicuri pemimpinnya yang korup dan mencegah secara internasional pelarian uang hasil kejahatan. “Tidak boleh ada surga yang aman

bagi mereka yang mencuri dari masyarakat miskin,” kata Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick.

Christianto Wibisono dalam wawancaranya dengan majalah TEMPO pada tahun mengusulkan agar diberi amnesti nasional untuk keluarga Soeharto, dan sebagai sanksi sebagian hartanya diberikan kepada negara. Perinciannya begini, 30% hartanya dipotong sebagai pajak kepada negara, ditambah 25% sebagai denda atau penalti. Jadi total 55% harta Soeharto dikembalikan kepada negara.

Hitungan Christianto, dalam kondisi normal, jika orang punya uang sebesar satu milyar, maka ia harus membayar pajak sebesar 30% kepada negara. Penalti sebesar 25% itu karena ia menganggap bahwa kekayaan yang diperoleh Soeharto semasa menjadi presiden itu didapat dari praktek KKN.

Sesungguhnya sejak tahun 1999 Gus Dur sudah menyatakan membuka kembali kasus dugaan korupsi Soeharto meski sebelumnya kasus itu telah dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan dengan dalih tidak cukup bukti. Barangkali Gus Dur tidak mau senasib dengan mantan Presiden Habibie, yang selama berkuasa tidak pernah dipercayai rakyat gara-gara tidak punya nyali politik untuk mengadili Soeharto.

Mengadili Soeharto secara teknis hukum tentu bukan perkara sulit. Sejauh ini pengadilan terhadap Soeharto terasa sulit, karena arah penyidikannya keliru. Seolah untuk dapat mengadili Soeharto harus dicari dulu harta kekayaannya, walau hal itu bukan perkara sulit kalau ada kemauan politik meski harus dicari sampai ke luar negeri. Padahal ayam hasil curian bisa saja sudah lenyap, lantaran sudah dijual atau dipanggang. Harta yang dicari pun dieliminasi sebatas diri Soeharto.

Padahal korupsi, seperti dirumuskan dalam UU No 3 Tahun 1971 maupun penggantinya, UU No 31 Tahun 1999, bukan sekadar penyimpangan kewenangan atau pelanggaran hukum untuk

kepentingan pribadi, tetapi juga bisa untuk orang lain, yang menimbulkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara.

Arah penyidikan kasus Soeharto sesungguhnya dapat dimulai dengan memeriksa dugaan perbuatan tindak pidana korupsinya, seperti kebijakan-kebijakan Soeharto, baik yang resmi atau tidak. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap para menteri di masa Soeharto, atau para pengusaha yang diduga terlibat di dalamnya. Dari situ, sesungguhnya berapa keuangan atau perekonomian negara yang dirugikan dan berapa kekayaan yang diraup keluarga Soeharto dan kroni, bisa dikalkulasi.

Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, tentu bukan hanya penyimpangan penggunaan dana yayasan-yayasan Soeharto yang harus diperiksa, tetapi ratusan kasus lainnya. Untuk menemukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) Soeharto dalam kasus yayasan, yang diperiksa semestinya adalah apa wewenang Soeharto menggunakan dana negara untuk kepentingan oligarki dari sebuah yayasan. Yang dipersoalkan Kejaksaan sejauh ini adalah hanya penyimpangan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan misi yayasan. Ini 'kan sama saja Kejaksaan membenarkan pengalihan dana negara tersebut.

Yayasan menjadi beranak-pinak, menebar citra filantropi sekaligus jadi bank untuk bisnis kroni dan keluarga. Ada sekitar tujuh yayasan yang dikangkangi Soeharto. Yayasan Supersemar didirikan 16 Mei 1974 untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang pintar dari keluarga yang tidak berada. Yayasan Trikora membantu para janda prajurit yang gugur dalam operasi di Irian Barat.

Yayasan Dharmais dibentuk 8 Agustus 1975 membantu rumah yatim piatu, kaum invalid. Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila didirikan 17 Februari 1982 membangun masjid-masjid. Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (Dakab) memberi kredit kepada usaha kecil dan menengah. Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan

membantu korban bencana alam. Yayasan Dana Sejahtera Diri (Damandiri) didirikan 15 Januari 1996 bertujuan mengurangi jumlah orang miskin.

Tak henti-hentinya masyarakat mendesak Soeharto harus diadili. Tentu saja, ini bukan semacam pelampiasan dendam terhadap pemimpin yang zalim. Tetapi ingin melihat perwujudan komitmen pemerintah pasca-Soeharto untuk memulai pemerintahan baru yang bersih. Dalam hal ini, pengadilan Soeharto bukan sekadar mengadili masa lalu, tetapi sekaligus meletakkan dasar-dasar supremasi hukum di masa depan, guna menjamin kepastian hukum di masyarakat, yang sejauh ini telah jatuh terpuruk.

Bisa jadi, jika berhasil mengembalikan duit negara yang sudah dicuri Soeharto ke kas negara, mampu menyelamatkan 120 juta rakyat miskin Indonesia, yang hidup dengan US\$ 2 per hari, 40 juta pengangguran, serta ribuan anak-anak busung lapar yang terancam maut di Nusa Tenggara Timur dan daerah-daerah lain hari ini.

Selain korupsi, tuduhan terhadap Soeharto adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tahun 1998, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Clementino dos Reis Amaral, mengemukakan, saat ini PBB mencatat tiga kategori pelanggaran HAM di Indonesia. Pelanggaran HAM itu adalah tentang penangkapan warga negara yang dinilai tidak sesuai prosedur hukum, tentang tindakan kekerasan terhadap warga negara, dan tidak adanya itikad baik pemerintah untuk meratifikasi konvensi PBB. “Untuk yang terakhir, konvensi PBB yang berkaitan dengan HAM yang diratifikasi Indonesia jumlahnya baru empat. Jika dibanding dengan negara lain yang secara ekonomis masih di belakang Indonesia, jumlah itu tergolong minim,” kata Amaral.

Sejak lengsernya Soeharto, desakan agar orang nomor satu ini diadili karena kejahatan korupsi dan pelanggaran HAM ini makin kencang. Tiga bulan usai Soeharto turun, Direktur Eksekutif

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Abdul Hakim Garuda Nusantara menuntut pemerintah menuntaskan beragam pelanggaran HAM yang terjadi di waktu lalu. Penuntasan pelanggaran HAM itu harus dalam kerangka rekonsiliasi nasional dan bukan untuk politik balas dendam. Walaupun begitu, pelaku pelanggaran HAM yang cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan, tetap harus disidangkan.

Abdul Hakim menyarankan agar Pemerintahan Habibie membentuk Komisi Rekonsiliasi Nasional yang terdiri dari Komisi Kebenaran, Komisi Amnesti, dan Komisi Reparasi. Komisi itulah yang ditugasi untuk mengetahui duduk persoalan dari semua kasus pelanggaran HAM, mencari pihak yang bertanggung jawab, dan kemudian memberikan kompensasi kepada korban. “Itu pernah terjadi di Afrika Selatan saat Presiden Nelson Mandela berkuasa dan membentuk Komisi untuk menyelidiki kejahatan rezim Apartheid. Upaya itu ternyata berhasil memperkuat institusi demokrasi di negara itu,” ujar Abdul Hakim.

Surungan lain juga datang dari Solidaritas untuk Penyelesaian Damai Timor Leste (Solidamor), Masyarakat Indonesia untuk Kemanusiaan (MIK), Front Aksi Perempuan Indonesia (FAPI), Solidaritas Masyarakat Pers Indonesia (SMPI), dan Serikat Pengacara Indonesia (SPI). Mereka meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kelima LSM itu mendesak Komnas HAM lebih aktif menyelidiki pelanggaran HAM yang dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto.

“Sebenarnya bukti awal adanya pelanggaran HAM yang dilakukan atau diketahui oleh Soeharto sudah cukup. Tetapi mengapa sampai kini Komnas HAM belum pernah mengambil sikap terhadap hal itu. Komnas HAM belum pernah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto,” gugat Yeni Rosa Damayanti dari Solidamor.

Usaha ini memang tidak sia-sia. Namun Indonesia membutuhkan lima tahun untuk membentuk Tim Ad Hoc untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto. Tim yang terdiri dari 15 orang ini mulai bekerja tahun 2003, di antaranya Billah, Hasto Atmodjo, Chandra Setiawan, dan Achmad Ali dari Komnas HAM; Munir, Ita F Nadia, Aswi Warman Adam, Hendaradi, Luhut Pangaribuan, Bambang Widjojanto, Nursyahbani Katjasungkana, Romo Sandyawan, Karlina Leksono, Sita Aripurnami, dan Pendeta Karel Erari.

Tim ini melakukan reinterpretasi sejarah terhadap pelanggaran HAM yang diduga dilakukan rezim Soeharto sejak tahun 1965-1998, dengan menggunakan peristiwa penting. Mulai dari tragedi berdarah 1965, Pemilihan Umum 1971 yang diduga diwarnai tindak kekerasan aparat terhadap warga, penembakan misterius (petrus) awal tahun 1980-an, Tanjung Priok tahun 1984, Tragedi Daerah Operasi Militer Aceh, penculikan aktivis, Peristiwa 27 Juli 1996, dan Kerusuhan Mei 1998.

Setahun sesudahnya, Rapat Pleno Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menerima fakta dugaan adanya pelanggaran HAM berat mantan Presiden Soeharto dalam lima kasus. Kelima kasus tersebut adalah kasus Tanjung Priok, 12 September 1984, kasus 27 Juli 1996, pelaksanaan Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh, tahanan politik Pulau Buru, dan kasus penembakan misterius. Menurut Billah, kelima peristiwa yang diduga kuat pelanggaran HAM berat tersebut mengandung unsur *by commision* dan *by ommision*. Dari kelima kasus, hanya DOM Aceh yang penyelidikannya belum *pro justisia*.

Upaya-upaya menyeret Soeharto ke meja hijau ini memang patut diacungi jempol. Apalagi, MPR sebenarnya telah menetapkan dua model penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, yakni melalui Pengadilan HAM Ad Hoc serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Ide membentuk KKR adalah sebuah ide yang terus hidup sejak berakhirnya kekuasaan Soeharto.

BJ Habibie dan KH Abdurrahman Wahid ikut berjasa memunculkan ide rekonsiliasi nasional dalam sebuah ruang perdebatan publik. Gagasan itu diwujudkan ketika Presiden Megawati Soekarnoputri menyampaikan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ke DPR dan kemudian RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 pada 6 Oktober 2004.

KKR adalah sebuah produk bersama bangsa Indonesia. BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid telah ikut memberikan kontribusi atas lahirnya KKR. Megawati Soekarnoputri telah menetapkan landasan hukum untuk berdirinya sebuah komisi yang diharapkan mampu menjadi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan yang dipimpin Nelson Mandela. Dan terakhir, tentunya menjadi tugas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mewujudkannya sebuah KKR.

Hanya saja, pemerintahan SBY-JK memang tersendat untuk menjalankan tanggung jawab penegakan hukum dan HAM antara lain terlihat dari tidak adanya tindak lanjut pemerintah (Jaksa Agung) terhadap hasil penyelidikan Komnas HAM atas beberapa kasus pelanggaran HAM berat. Lebih dari itu, pemerintah maupun sistem yudisial juga tak berdaya menghadapi penolakan terus-menerus sejumlah aparat TNI dan Polri untuk bekerja sama dengan penyidik dalam proses penyelidikan proyustisia terkait dugaan pelanggaran HAM berat dan kasus penghilangan paksa atas belasan aktivis.

Sesungguhnya pembentukan KKR adalah sebuah upaya untuk meraih kembali momentum. Momentum perdamaian di Aceh adalah sebuah momentum baru yang diharapkan mampu melecut pemimpin negeri untuk segera menyiapkan instrumen guna menyelesaikan masa lalu. Jajak pendapat yang dilakukan oleh harian KOMPAS pada 3-4 Agustus 2005 menunjukkan, mayoritas responden (lebih dari 50 persen) tidak puas dengan penyelesaian

kasus pelanggaran HAM masa lalu. Meski demikian, 53,4 % kerabat korban bersedia memberi maaf, 41,4% menolak memberi maaf jika ada proses pengungkapan kebenaran.

Hampir sembilan tahun sejak mundurnya Presiden Soeharto, memang ada sebuah konsistensi dari pemerintahan pasca-Soeharto-BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono-dalam pemroduksian hukum HAM. Koreksi terhadap hukum yang melanggar HAM dilakukan sejak perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sampai ratifikasi konvensi internasional.

Konsistensi dalam pemroduksian hukum HAM secara tidak langsung “dipaksa” oleh Rencana Aksi Nasional HAM periode 1998-2003 yang dibuat Presiden BJ Habibie dan Rencana Aksi Nasional HAM periode 2004-2009 yang dibuat Presiden Megawati Soekarnoputri. Akan tetapi, yang menjadi kegelisahan orang adalah bagaimana merealisasikan semuanya.

Nyatanya, pengadilan bekas orang kuat di Indonesia ini dihentikan pada tahun 2006. Dus, tidak ada lanjut soal rekomendasi Tim Pencari Fakta atas kerusuhan Mei 1997 yang mencatat perkosaan massal atas 168 perempuan etnis Tionghoa. Begitu pula dengan peristiwa Trisakti, penyerbuan kantor PDI, penghilangan aktivis pro-demokrasi dan pemerkosaan sekitar 600 perempuan selama sembilan tahun pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh.

Bagi Indonesia, berbagai kasus pelanggaran HAM dan kejahatan atas kemanusiaan, termasuk mega-korupsi di masa lalu yang hingga kini terkesan masih dipetieskan, harus segera diungkap dan dituntaskan lewat proses hukum. Tanpa itu, kita masih tergolong negara yang tidak serius memerangi impunitas. Penghentian peradilan Soeharto, mantan penguasa yang menjadi aktor kunci dalam banyak pelanggaran HAM dan tindak korupsi Orde Baru, adalah sebuah langkah mundur dalam upaya memerangi impunitas.

Tuntutan pidana yang telah dihentikan dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP) oleh Jaksa Agung Abdulrahman Saleh dengan alasan sakit permanen ini sangat ganjil. Bagaimana tidak, dalam SKPP itu tidak ada penjelasan mengenai apa itu 'sakit permanen'.

Sesungguhnya lebih elegan jika dikeluarkan ketetapan 'penundaan' proses penyidikan sampai yang bersangkutan sembuh karena hal ini lebih aspiratif terhadap perasaan keadilan masyarakat sekaligus menjunjung tinggi Tap MPR I Tahun 2003 yang memperkuat Tap MPR XI Tahun 1998. Bisa ditebak, tampaknya kasus ini sulit dilaksanakan sungguh-sungguh karena sarat dengan berbagai kepentingan masa lampau orang nomor satu di Indonesia ini.

Karenanya, sejatinya langkah hukum maupun langkah politik harus dilakukan secara beriringan. Pasalnya, yang menjadi objek tersidik adalah mantan presiden yang telah banyak berjasa terhadap bangsa dan negara. Dengan demikian, keputusan politik dan hukum harus bijaksana dan mencerminkan jiwa negarawan. Beberapa pihak menyerukan amnesti untuk Soeharto. Tapi bila diberi amnesti, ini pun kental dengan aura 'penghormatan'. Lagi pula, usulan amnesti itu jamak dilakukan untuk kejahatan politik semata.

Jika memang pemerintah konsisten dengan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM dan kasus korupsi Soeharto, pemerintah bisa membentuk tim penyidik independen. Tim ini terdiri dari unsur ahli hukum, ahli kedokteran, politisi, birokrat maupun penegak hukum yang tak memiliki kepentingan terhadap Soeharto. Selain itu, juga dilakukan peradilan in absentia sebagai terobosan hukum karena tidak dapat dihadirkan dalam persidangan dan merupakan solusi aspiratif serta tetap menjunjung tinggi *due process of law* dan keadilan. Nah, jika pengadilan memutuskan Soeharto bersalah, ia bisa diberikan grasi. Langkah ini cukup adil bagi semua pihak, baik itu rakyat maupun Soeharto. kesempatan pemberian grasi merupakan langkah elegan.

Soeharto, si Kancil yang Cerdik

Kalau anda pernah menyambangi Desa Kemusuk di pinggiran Kota Jogja, bisa jadi Anda akan terkesan dengan keasrian, kebersihan dan desa yang berbeda dengan lainnya. Tak usah jauh-jauh. Lihat saja parit yang menempel di sepanjang jalan kecil, yang dekat dengan hamparan sawah yang menghijau indah. Aspal dibenamkan hingga ke tepi parit.

Mungkin desa ini memang mendapat perlakuan yang istimewa ketimbang desa-desa yang lain. Sudah barang tentu, karena desa ini merupakan desa kelahiran Soeharto pada 8 Juni 1921. Ia adalah anak petani bernama Kertosudiro yang juga berprofesi sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa. Sedangkan ibunya bernama Sukirah. Soeharto kecil tumbuh di desa Kemusuk dan mulai bersentuhan dengan dunia pendidikan di usia ke delapan tahun. Semula Soeharto mengenyam pendidikan di Sekolah Desa (SD) Puluhan, Godean.

Kemudian pindah ke SD Pedes, lantaran ibunya dan ayah tirinya, Pak Pramono pindah rumah, ke Kemusuk Kidul. Namun, Pak Kertosudiro lantas memindahkannya ke Wuryantoro. Soeharto dititipkan di rumah adik perempuannya yang menikah dengan Prawirowihardjo, seorang mantri tani. Cita-cita menjadi prajurit akhirnya kesampaian, Soeharto terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombang, Jawa Tengah pada tahun 1941. Pada 5 Oktober 1945 ia resmi menjadi anggota TNI.

Kemudian, seorang anak pegawai Mangkunegara Siti Hartinah atau Ibu Tien mampu menarik perhatian Soeharto. Dilangsungkanlah perkawinan Letkol Soeharto dan Siti Hartinah tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Pada saat melangsungkan pernikahannya, Soeharto berusia 26 tahun dan Siti Hartinah 24 tahun. Soeharto dan Ibu Tien dikaruniai enam putra dan putri: Siti Hardiyanti Hastuti (Mbak Tutut), Sigit Harjojudanto, Bambang

Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra (Tommy) dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiék).

Konon, hingga Soeharto menjabat sebagai presiden, Ibu Tien masih memasak sendiri untuk suaminya. Masakan kesukaan Soeharto adalah ikan laut bakar dengan sambal, oseng-oseng cabe hijau, sambal goreng *lombok jemprit* alias cabe rawit, sayur tempe pakai cabe rawit, tumis sayur wangi (sejenis selada yang panjang-panjang kurus), dan sup ikan.

Ibu Tien meninggal pada tahun 1996. Bagi Soeharto, kepergian Ibu Tien itu merupakan suatu kehilangan terbesar dalam hidupnya. Soeharto mengatakan hal tersebut sebelum acara peringatan tujuh hari meninggalnya Ibu Tien.

“Sejak hari Minggu pagi, 28 April 1996, ada sesuatu yang hilang dari tengah-tengah keluarga kami, sesuatu yang tak ternilai harganya bagi kami. Keluarga besar kami kehilangan seorang istri pendamping setia, seorang ibu tercinta, seorang eyang, dan seorang eyang-buyut yang penuh kasih. Keluarga besar kami telah kehilangan seseorang tempat kami mencurahkan segala kasih sayang. Kami kehilangan seseorang yang melimpahkan segala kasih sayangnya kepada kami,” ujar Soeharto.

Tanpa kehadiran Ibu Tien, perjalanan hidup Presiden Soeharto menjadi sangat berbeda. Bahkan, Soeharto pernah menyebut istrinya sebagai ‘pembantu saya yang terdekat dan setia’. Bagi Soeharto, posisi Ibu Tien sebagai Ibu Negara tidak tergantikan meski sempat ada usulan agar putri tertua Presiden, Ny Siti Hardiyanti Hastituti Rukmana atau Mbak Tutut menggantikan posisi Ibu Negara. Hanya saja, Soeharto menolak usulan tersebut. Menteri Negara Sekretariat Negara (Mensesneg) Moerdiono 23 Mei lalu mengungkapkan, Presiden Soeharto menegaskan, tidak akan menggantikan posisi Ibu Negara. Posisi itu tidak dapat digantikan siapa pun.

Karir gemilangnya di dunia militer terbukti ketika dia berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan penjajah Belanda pada tahun 1949. Beliau juga pernah menjadi Pengawal Panglima Besar Sudirman. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Mandala (pembebasan Irian Barat). Dan puncaknya terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965, meletus G-30-S/ PKI Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Selain dikukuhkan sebagai Pangad, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkoptamtib oleh Presiden Soekarno.

Bisa jadi, tak ada yang berkomentar terhadap Soeharto saat ia berkuasa. Tepatnya, tak ada yang berani berkomentar terhadap kebijakan yang ia bikin maupun kehidupan pribadinya. Keberanian itu baru terkumpul usai Soeharto *lengser* dari kursi panasnya di tahun 1998.

Tahun 2001, muncul biografi Soeharto yang ditulis oleh Robert Edward Elson, seorang akademisi Australia. Judulnya adalah *Soeharto, Political Biography* dan diterbitkan oleh Cambridge UP. Ini bukan pengalaman pertamanya berjejalin dengan tanah Indonesia. Sebelumnya, ia menulis disertasi *Javanese Peasant and The Colonial Sugar History: Impact and Change in an East Java Residency 1830-1940* (Oxford UP, 1984). Tahun 1997 ia juga menerbitkan buku *The end of the peasantry in Southeast Asia: a social and economic history of Peasant Livelihood, 1800-1900* (Maxmillan).

Menurut Elson, Indonesia agaknya ingin melupakan Soeharto, karya-karyanya, dan menganggap Orde Baru sebagai penyimpangan dalam perkembangan sejarah negeri ini. Elson bisa memahami perasaan bangsa Indonesia, meski ia menyebutnya 'dangkal'. Menurutnya, "Soeharto merupakan tokoh amat penting selama abad ke-20 di Asia." Kata Elson, Soeharto secara hati-hati dan terencana telah membangun Indonesia yang sama sekali baru. Hanya saja, Indonesia baru yang diciptakan melalui tahap-tahap

pembangunan berencana justru melahirkan kekuatan baru yang menginginkan 'reformasi total'.

Beberapa komentar datang dari penjuru dunia. John Monfries (Australian Book Review, Maret 2002) mengatakan Soeharto menjalankan dua jenis ekonomi secara simultan, yaitu ekonomi pasar modern dan ekonomi non-budgeter (lewat jalan belakang, pencari rente, dan seterusnya). Anehnya sistem ini berjalan cukup lama dengan hasil spektakuler. Kelemahan Soeharto adalah tidak bisa membedakan antara keuntungan pribadi dan kepentingan umum.

David Reeve dari University of New South Wales bilang, terlepas dari asal-usul Soeharto yang gelap, keberuntungan adalah salah satu kunci suksesnya. Tetapi Soeharto juga memiliki kemampuan pribadi yang hebat serta penguasaan politik yang menghasilkan "pertumbuhan ekonomi luar biasa". Terlepas dari itu, Reeve berkesimpulan, Soeharto adalah pribadi yang sulit dipahami.

Robert Elson dalam wawancara dengan Radio Australia ABC, 6 Maret 2002, mengatakan, dari segi horizon intelektual, Soeharto termasuk manusia "satu dimensi". Ia tidak berusaha menemukan arah dan jalan baru dalam pengetahuannya, tetapi menengok ke dalam dirinya atau berdasarkan pengalaman sendiri. Soeharto tidak kreatif, namun lihai memanfaatkan kesempatan dan mengarahkan menjadi keuntungan. Namun, Soeharto seorang yang tak kenal ampun, musuhnya dibuat tidak berkulit.

Di Selandia Baru, ada tinjauan buku amat panjang yang ditulis Nicholas Tarling, memuji karya Elson ini "lebih manusiawi" dan "jelas objektif". Anthony L Smith dari Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, berpendapat biografi ini dikerjakan serius bukan puja-puji seperti yang ditulis OG Roeder. Smith menyangkan mengapa fokus pembicaraan hanya politik yang

terjadi di Jakarta, kurang membahas konflik di Aceh dan Papua misalnya.

Dalam bukunya, Elson bilang, “Begitu besar yang telah dicapainya sehingga kerusakan karena krisis keuangan 1997-1998 hanya sedikit berpengaruh kepada keseluruhan rekornya. Tidak usah diragukan lagi bahwa warisan Soeharto adalah pertumbuhan ekonomi yang luar biasa yang dihasilkan pemerintahannya.” Peter Carey dari Inggris tak sependapat dengan ini. Bagi Carey, jika diadakan survei ekonomi Indonesia terhadap lautan utang negara dan swasta, bangkrutnya sistem perbankan nasional dan korupsi yang sudah melembaga, maka penilaian di atas adalah sebaliknya.

Tapi Carey sependapat dengan Elson yang bilang, “Ketika ia meninggalkan gelanggang, chaos membuat negeri ini terlihat sulit untuk diurus, semangat Orde Baru tetap langgeng. Untuk mencapai tujuannya, negara melakukan kekerasan terhadap warga secara periodik dan sistematis.” Itulah warisan Soeharto yang sesungguhnya.

Dalam perjalanan pulang dan mampir di Singapura, Mondale bertemu PM Goh Chok Tong dan Menteri Senior Lee Kuan Yew. Mondale sempat bertanya apakah Soeharto seorang pahlawan atau penjahat (*crook*)? Jawaban yang disampaikan Lee Kuan Yew sangat menarik. “Sebagai Presiden Indonesia, Soeharto merasa dirinya seperti seorang sultan besar dari kerajaan besar. Ia merasa wajar apabila putra-putrinya mendapatkan privelese seperti halnya para pangeran dan putri pangeran di Kerajaan Solo. Dia melihat dirinya sebagai seorang patriot. Saya juga tidak mengklasifikasikan dia sebagai seorang penjahat (*crook*).

Soeharto, Semar dan rahasia ‘klenik’

Arwan Tuti Artha, seorang wartawan harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta pernah menelisik dunia Soeharto melalui dimensi klenik lewat bukunya *Dunia Spiritual Soeharto*. Jamak dipahami. klenak-



Petilasan Gunung Srandil Cilacap yang sering disinggahi Soeharto.

klenik itu menjadi ikon tersendiri yang terus dihidupkan di tengah modernisme dan kepemimpinan orang-orang Jawa. Agaknya, hitungan berdasarkan klenik ini juga yang dilakukan oleh Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya.

Sebagai orang Jawa, sosok Soeharto juga tak bisa dilepaskan dari unsur hitungan Jawa dan klenak-klenik ini. Menurut Onghokham dalam *Dari Soal Priayi sampai Nyi Blorong*, Soeharto juga berpuasa setiap sebelum tanggal 17 Agustus atau pada hari-hari penting lain dan Soeharto senang dikelilingi benda-benda pusaka dari zaman lampau untuk meminjam kekuatan magis mereka. Bagi masyarakat Jawa, apa yang dilakukan Soeharto itu juga dilakukan oleh nenek moyang mereka.

Bisa jadi, keputusannya untuk mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 sekitar pukul 09.00, bisa jadi Soeharto juga menghitungnya dengan rumusan klenik ini sebagai sebuah kemenangan, bukannya kekalahannya meskipun ia tidak lagi memangku jabatan presiden. Clifford Geertz, antropolog Amerika menyebutkan kegemaran orang Jawa pada hitungan semacam ini

memang dipelihara dan mereka percaya angka-angka itu berasal dari leluhurnya yang sangat keramat.

Berdasarkan *petung* Jawa mengenai kelahiran Soeharto yang jatuh pada 8 Juni 1921, harinya Rabu, pasarannya Kliwon, windunya Sangara dan wukunya Maktal. Orang yang lahir pada Rabu Kliwon bisa dihitung nilainya dengan cara menguraikan jumlah hari Rabu dan jumlah pasaran Kliwon. Itulah yang disebut *neptu*.

Rabu memiliki nilai atau *neptu* 7 sedang Kliwon 8, maka Rabu Kliwon memiliki *neptu* berjumlah 15, yakni 7 ditambah 8. Hari dan pasaran dalam *petung* Jawa ini memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan seseorang. Dalam buku-buku primbon atau kajian-kajian kejawen, masyarakat Jawa punya keyakinan terhadap keberadaan suatu akibat yang disebabkan salah memilih hari dan pasaran. Mereka sangat mempercayai angka tertinggi, yakni 9. Begitu pula weton seseorang, dianggap memiliki pengaruh terhadap suatu kegiatan.

Dalam falsafah Jawa, setiap pasaran memilikisifat dan karakternya masing-masing. Kliwon dianggap sebagai pasaran yang pertama. Anan Hajid T dalam bukunya *Orang Jawa, Jimat & Makhluk Halus* bilang, Kliwon ditafsirkan memiliki sifat alam seperti batu. Dus, mereka yang lahir pada pasaran Kliwon ini bisa dikatakan memiliki sifat-sifat yang sama dengan batu, yakni keras, kuat dan berbobot. Hal ini dimiliki juga oleh Soeharto, lakon anak desa yang keras bagaikan batu.

Arwan menyebut Soeharto sebagai sebuah meteor luar biasa yang muncul dari sebuah desa kecil di Yogyakarta. Padahal, menurut perhitungan Jawa, Soeharto adalah orang biasa. Ia tidak mengenyam pendidikan tinggi dan tidak berasal dari keluarga kaya. Hanya saja, nasibnya lebih banyak beruntung. Sejak 1 Oktober 1965 tiba-tiba perbawanya muncul bagaikan meteor yang jatuh dari langit.

Lihat saja, dulu saat ia belum menjadi orang nomor satu di Indonesia, tak ada satu pun yang berniat mengetahui sosok ini. Pun, tak ada yang merasa perlu mengerti asal-usul dan nenek moyangnya. Sebagai orang Jawa, belakangan baru diketahui bahwa Soeharto ternyata tidak bisa dibilang remeh. Meskipun sewaktu kecil makannya *tiwul*, yakni makanan yang terbuat dari gapek singkong – yang identik dengan simbol kemelaratan – Soeharto memiliki pulung dan memiliki pikiran yang cemerlang.

Ketika orang mulai tahu Soeharto berasal dari desa, adakah ia *wong desa dadi ratu*? Di dalam cerita wayang terdapat lakon Petruk Dadi Ratu. Tetapi Soeharto bukan Petruk. Ia bahkan lebih menyukai disebut sebagai Semar. Sebab, Semar adalah lambang rakyat.

Kalau saja Soeharto tidak mengenal tokoh Semar, tentunya ia tidak akan menggunakan istilah Semar untuk ucapan Sebelas Maret. Bagi Soeharto 11 Maret 1966 adalah hari keramat. Tokoh Semar secara tidak langsung telah memberi inspirasi pada momentum yang pada hari itu, Presiden Soekarno antara lain memberi kekuasaan pada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan presiden, serta demi keutuhan bangsa dan negara RI dan melaksanakan dengan pasti ajaran-ajaran Panglima Besar Revolusi.

Momentum 11 Maret 1966 itulah yang dijadikan titik keramat bagi Soeharto untuk bertindak, berkuasa, melakukan gerakan apa saja tanpa merasa di mata Soekarno ia telah menyalahi wewenang yang diberikannya. Bahkan sesungguhnya, telah terjadi suksesi dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. Pada saat itulah Soeharto *mesem*, memperoleh kemenangan karena ia cerdik dalam menggunakan strategi *perang ngluruk tanpa bala*. Strategi ini ia pelajari dari ilmu Suryomentaram. Soeharto tidak perlu mengerahkan bala tentara, tetapi lawan bisa dibuat takluk dan

menyerah. Kesuksesan Soeharto yang sangat cerdas menyingkirkan Soekarno, membuat Soeharto selalu tersenyum.

Jabatan yang dikangkanginya selama 32 tahun, misalnya. Menurut Umar Kayam dalam bukunya *Kelir Tanpa Batas*, Orde Baru sebagai babakan sejarah yang berlangsung relatif panjang. Dari atas kursinya, Soeharto tak henti-hentinya tersenyum, mesem melihat dunia yang dipijaknya. Soeharto pun tersenyum dalam foto-foto resmi yang dipajang di berbagai instansi pemerintah, institusi, organisasi kemasyarakatan, kampus, sekolah, atau di tempat-tempat penting, berdampingan dengan foto wakil presiden dari periode ke periode secara bergantian. Soeharto juga tersenyum dalam prangko-prangko resmi. Soeharto juga *mesem* dalam uang kertas lima puluh ribuan. Kalau di mana-mana Soeharto digambarkan tersenyum, itulah lambang kemenangannya. Karena itulah ia disebut sebagai *The Smiling General*.

Kebiasaannya tersenyum ini sejalan dengan karakter Semar yang juga sering *mesem* dalam menghadapi persoalan di dunia. Ketika memasuki *babakan goro-goro*, yakni terjadinya kerusuhan, keguncangan dan huru-hara, Semar menjadi tokoh penting dalam jagat pewayangan Jawa. Kemunculan Semar justru bisa memberi solusi yang bijak atas konflik yang terjadi antara Pandawa dan Kurawa. Adegan *goro-goro* ini selalu menarik karena bisa membangunkan penonton wayang yang tertidur. Biasanya, pada adegan tersebut Semar ditemani anak-anaknya, yakni Gareng, Petruk dan Bagong. Oleh karena itulah jagat pewayangan akan geger jika Semar hilang dari peredaran, sebagaimana bisa kita saksikan pada lakon Wahyu Tejamaya.

Semar sudah ada sebelum orang Jawa, sehingga Semar melekat pada kehidupan orang Jawa. Meskipun digambarkan sebagai dewa badut, tetapi sebagaimana Soeharto ketika masih berkuasa, Semar juga mempunyai kekuatan luar biasa. Yaitu, kentutnya bisa mengguncangkan kemapanan para dewa. Dialah dewa yang menjelma

menjadi seorang abdi, penghibur, yang bertugas melayani para satria. Satria yang ditemani Semar beserta anak-anaknya, yaitu Petruk, Gareng dan Bagong, selalu menang dalam peperangan melawan raksasa dan musuh-musuhnya. Menjadi pelayan, abdi, pembantu, adalah pilihan Semar.

Kalau Soeharto menyamakan dirinya dengan Semar, menurut mitos penciptaan alam, Semar lahir dari telur yang menetas sendiri bersama dua makhluk tertua lainnya, yaitu Batara Guru dan Togog. Menurut kajian Tuti Sumukti, hal ini menunjukkan bahwa Semar adalah salah satu makhluk tertua menurut pikiran orang Jawa.

Selain itu, Semar adalah turunan dari satu dewa dalam mitos yang paling berkuasa. Bagi masyarakat Jawa, dewa-dewa dalam wayang itu pada umumnya digambarkan sebagai manusia, sedang kelebihanannya dewa ini memiliki kekuasaan tertentu yang luar biasa, dan tinggal di Kahyangan di puncak-puncak gunung. Dewa-dewa ini dalam keyakinan masyarakat Jawa juga bisa terbang, mereka ini bisa dihubungi melalui jalan meditasi atau semadi. Jika tidak dilakukan dengan cara meditasi, bisa dilakukan dengan cara mendaki gunung kosmis.

“Sesungguhnya Soeharto itu bukan Semar, tetapi jenis siluman. Yakni Banaspati,” celetuk Prof. Dr. C Bakdi Soemanto, berkelakar. Lepas dari Soeharto yang mencirikan dirinya Semar atau Bakdi yang menyebut Soeharto sebagai Banaspati, tetap saja Soeharto mengklaim dirinya adalah Semar. Kekuasaan yang ada pada diri Semar itu juga menyatu pada kekuatan Soeharto selama memimpin Orde Baru, sebagai suatu keabadian. Semar, dalam berbagai kesempatan selalu memperlihatkan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan konsep-konsep dan kepercayaan orang Jawa. Sebab, Semar sesungguhnya seorang guru, dan memiliki kekuatan yang mampu mengembalikan keseimbangan di alam semesta.

Keseimbangan ini pula yang agaknya senantiasa dijaga oleh Soeharto semasa hidupnya. Barangkali, lantaran ia seorang presiden maka ia mempunyai kesempatan untuk memberi contoh kepada rakyatnya bagaimana mencapai harmonisasi dalam kehidupan. Harmonisasi ini dibangun melalui ajaran-ajaran yang mengandung nilai kearifan budaya Jawa. Di sisi lain disempurnakan dengan menunjukkan kualitas kerja secara sungguh-sungguh, menerapkan disiplin dengan konsisten, mengembangkan cinta kasih dan memberi makna pada kehidupan.

Salah satu keseimbangan dalam kehidupan pribadinya datang dari perempuan terdekatnya, yaitu Siti Hartinah, atau yang kerap disebut dengan Ibu Tien. Tahu sendiri, mitos Jawa membenarkan bahwa perempuan itu bisa memegang kekuatan gaib yang menyebabkan siapa pun yang berhasil menikahinya, bisa menjadi raja atau memegang kekuasaan.

Mungkin Anda ingat kitab Pararaton, ada cerita legenda mengenai tokoh perempuan cantik bernama Ken Dedes. Ia adalah anak tunggal pendeta Buda di Panawijen, Empu Purwa. Pada suatu hari Ken Dedes sedang pesiar ke Taman Boboji naik kereta. Setelah sampai di taman itu, Ken Dedes turun dari kereta. Kebetulan tersingkap kainnya dari betis sampai rahasianya. Hal itu secara kebetulan dilihat oleh Ken Arok, yang menyebabkan ia terpesona karena rahasia Dedes memancarkan sinar yang luar biasa. Melihat perempuan cantik yang memancarkan sinar itu membuat Ken Arok jatuh cinta kepada Ken Dedes. Ia berusaha untuk menikahinya.

Sepulang dari taman, peristiwa itu diceritakan Ken Arok pada pendeta Lohgawe. Menurut Lohgawe, perempuan yang bersinar rahasianya sebagaimana yang dilihat Ken Arok itu adalah perempuan nariswari. Ken Arok bertanya, apa itu perempuan nariswari? “Perempuan nariswari adalah perempuan pilihan. Betapa pun nestapanya, laki-laki yang menikahi perempuan seperti itu ia akan menjadi raja besar,” jawab Lohgawe.

Mendengar jawaban itu, Ken Arok timbul niatnya untuk merebut Ken Dedes. Caranya, Tunggul Ametung harus dibunuh dengan sebilah keris. Sebab, pada waktu itu Ken Dedes sudah menjadi istri Tunggul Ametung. Akhirnya Tunggul Ametung memang terbunuh oleh Ken Arok dengan keris Empu Gandring, kemudian Ken Arok menikahi Ken Dedes. Di dalam mitos Jawa, memang ada perempuan yang bisa mengangkat derajat seseorang, sebagaimana terdapat dalam kitab Pararaton. Bahkan Ken Dedes ketika menikah dengan Ken Arok yang diceritakan sebagai perampok itu, akhirnya menurunkan raja-raja yang menjadi cikal-bakal kerajaan di Jawa Timur termasuk Majapahit.

Segendang seperjogetan dengan Ibu Tien, ia adalah perempuan keturunan Mangkunegara. Menurut berbagai babad dan kepercayaan, perempuan keturunan raja ini memiliki pusaka paling keramat, sebab darinya berasal api keramat kerajaan yang dapat mengangkat rakyat biasa menjadi raja. Hukum alam ini benar, usai menikah dengan Soeharto pada tahun 1947 di Solo, Soeharto menjadi penguasa tunggal pada masa pemerintahan Orde Baru yang bertahan cukup lama.

Bak kejatuhan durian dari langit, 'kesaktian' itu seolah turun begitu saja dari putri keturunan ningrat ini. Soeharto juga tak perlu mencuri selendang Nawangwulan ketika turun mandi disungai yang bening seperti yang dilakukan oleh Jaka Tarub. Tetapi, pertemuan antara Soeharto yang pada waktu itu masih berpangkat Letnan Kolonel dan Siti Hartinah bagaikan sudah diatur oleh Tuhan. Bahkan, dalam buku yang ditulis OG Roeder, *Anak Desa Biografi Presiden Soeharto*, bahkan Ibu Tien sampai menolak banyak pinangan dari orang lain.

Dalam ilmu *kasunyatan* Jawa, perkawinan Soeharto dengan Siti Hartinah adalah contoh kehidupan keluarga yang membawa berkah. Soeharto berhasil mengambil pusaka melati dari Surakarta. Kebetulan Siti Hartinah menyukai melati. Inilah simbol suasana

batin keluarga yang harmonis. Yakni yang menjaga keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam mengarungi samudra kehidupan.

Karenanya, saat Ibu Tien meninggal tahun 1996, Soeharto seperti kehilangan *endhog jagad* yang selama hampir setengah abad itu bersamanya. Menurut hukum klenik yang dijelaskan oleh Arwan, kehilangan *endhog jagad* artinya Soeharto tak lagi bisa menggenggam telur dunia. Seharusnya Soeharto tahu diri, mawas diri, tidak serakah, dan tidak perlu mencalonkan diri lagi menjadi presiden pada periode berikutnya. Sebab, pasti akan terjadi ketimpangan dan ketidakharmonisan. Dengan kata lain, untuk apa menjadi presiden lagi jika presiden tanpa *first lady*?

Itu sebabnya, tertangkap oleh jutaan pasang mata saat pemakaman istrinya, Soeharto menyeka air matanya dengan sapu tangan putih, sebelum jenazah Ibu Tien Soeharto dimakamkan di Giri Bangun, Kompleks Astana Agung kerabat Mangkunegaran di Desa Karang Bangun, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Soeharto merasakan bahwa sejak saat itu ada sesuatu yang hilang dari tengah-tengah keluarganya, sesuatu yang tidak ternilai harganya.

Menurut penuturan penjaga makam Giri Bangun, Soeharto sangat kuat tidak tidur selama tiga hari di samping makam istrinya itu. Soeharto juga sering melakukan ritual di tempat tersebut. Ritual Jawa seperti ini bukanlah barang baru bagi Soeharto, karena semasa kecilnya ia sudah sering laku prihatin untuk tujuan menciptakan kesejahteraan dan kemandirian. Lebih dari itu, laku prihatin ini juga mengantarnya untuk memperoleh wahyu untuk memimpin negeri ini.

Asal tahu saja, cerita tentang wahyu pemimpin, wangsit menjadi raja, memperoleh kepercayaan rakyat menjadi kepala negara, yang turun pada diri seseorang memang banyak sekali terjadi di dunia ini. Cara memperoleh wahyu atau kekuatan itu pun berbeda-beda. Dalam Babad Tanah Jawi, misalnya, ada yang

berupa bintang turun dari langit, sebagaimana dialami Panembahan Senopati, ketika berupaya melepaskan diri dari kekuasaan Pajang.

Pada suatu malam ia pergi ke Lipuro dan tidur di atas sebuah batu datar. Di tempat itulah ia dijumpai Ki Juru Martani yang menjadi guru spiritualnya. Iadibayangkan, ketika itu pula sebuah bintang turun di dekat kepalanya. Bintang yang turun itu mengucapkan kalimat, yang maksudnya keinginan Senopati akan dikabulkan oleh Sang Hyang Mahakuasa. Ia akan memerintah Mataram, demikian pula anak dan cucunya. Tak sembarang orang bisa memperoleh wahyu semacam itu. Apalagi, dalam masa 32 tahun di negeri kita, hanya seorang yang menjadi presiden.

Datangnya *endhog jagad* juga tak bisa terjadi pada setiap orang. Untuk Soeharto, kesadaran bahwa *endhog jagad* itu selalu mengikuti gerak langkahnyabarubaru benar-benar dirasakan setelah Ibu Tien wafat. Tetapi, proses menjadinya Soeharto dalam republik ini adalah fenomena baru dalam sejarah Jawa (modern) abad 19-20. Seperti sudah tercantum dalam keyakinan para pujangga, para cerdik pandai, dan para empu, melalui karya-karya besarnya, seorang perempuan juga ada yang memiliki kekuatan spiritual, bisa diramalkan menjadi perempuan yang bisa menurunkan orang-orang penting, atau orang yang menikahinya bakal menjadi pemimpin.

Salah satu ramalannya adalah jika gua garba perempuan itu memancarkan cahaya gaib. Soeharto dalam hubungan ini adalah orang yang terpilih untuk memegang kekuatan itu, setelah mendapatkan perempuan bercahaya, perempuan yang memancarkan sinar, namun kekuatan yang diperolehnya itu ada batasnya. Kekuatan itu akan hilang apabila sudah tiba waktunya. Wahyu kepresidenan Soeharto memang sudah terpegang, dan wahyu kepresidenan itu sudah selesai di tangan Soeharto. Wahyu kepresidenan yang datang pada Soeharto di zaman modern adalah kepercayaan rakyat dan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berhasil dikuasainya.

Dus, sebagai orang yang memegang teguh laku prihatin dan klenik semacam ini, Soeharto tak cukup hanya menggunakan kekuatan fisik dari militer saja untuk menguasai negeri ini. Lebih dari itu, ia juga menempuh jalur supranatural. Yakni membawa beberapa pusaka, benda keramat, barang-barang bertuah dari berbagai tempat. Termasuk benda-benda yang berasal dari Keraton Surakarta yang kebanyakan berupa keris. Tujuannya agar bisa melindungi Soeharto di Jakarta pada tahun 1966. Apalagi, kegemaran Soeharto pada hal-hal yang bersifat klenik, kekuatan gaib, benda-benda pusaka, memang tidak asing lagi, karena sudah dihayatinya sejak muda.

Kehidupan Soeharto memang tak bisa lepas dari pengaruh ilmu kejawan yang menelingkupinya. Seperti yang Ricklefs bilang, bahkan Soeharto juga selalu dibantu kiai yang dikenal sebagai dukun. Hanya saja, ia melakoninya dalam batas antara versi Islam ortodoks yang populer, dengan pembacaan Al quran dan mistisnya, dengan semangat kebatinan Jawa, hantu, cerita-cerita rakyat dan magisnya. Dia sangat mempercayai klenik kebatinan Jawa pedalaman yang kental, sebuah klenik yang hanya mengakui Islam dalam bentuk yang lebih esoteris dan hukum agama hanya memiliki kekuatan kecil.

Nah, hanya dalam dunia inilah Soeharto menemukan kedamaian batin yang bisa menjelaskan gaya kepemimpinannya yang berkepala dingin selama bertahun-tahun. Jika Soeharto bisa dikatakan sebagai orang penting di tanah Jawa karena memimpin sebuah republik dalam rentang masa yang panjang, sesudah Soeharto akan sangat sulit bisa ditemukan orang-orang yang memiliki nasib seperti itu.

Sayangnya, penguasaan dan kesukaan terhadap ilmu kejawan ini tidak menitis pada anak-anak Soeharto. Mereka hanya memanfaatkan fasilitas yang sangat luar biasa itu ketika orang tuanya menjadi penguasa. Namun, setelah Soeharto tidak lagi

menggenggam kekuasaan, nasib mereka seperti telapak tangan yang bisa di balik dengan secepat kilat.

Misalnya, Hutomo Mandala Putera alias Tommy Soeharto yang keluar-masuk penjara, kemudian istrinya menuntut perceraian. Bambang Trihatmodjo mengalami kasus amukan anak dan istrinya, karena masuknya faktor perempuan lain ke dalam keluarganya. Siti Hediati Herijadi yang dikenal dengan nama akrab Titiek Prabowo dikabarkan tidak harmonis dengan suaminya.

Pujangga Keraton Surakarta, Raden Ngabehi Ranggawarsita, yang lahir pada Senin Legi, 15 Maret 1802 di Kampung Yasadipuran, Surakarta, tentu tidak mengenal Soeharto. Bahkan ketika Soeharto naik tahta menjadi presiden menggantikan Soekarno, Ranggawarsita sudah lama wafat. Ranggawarsita bagi kebanyakan masyarakat Jawa dinilai sebagai tak sekadar pujangga, tetapi seorang penulis ramalan yang bisa melihat jauh ke depan karena ilmu yang dikuasainya.

Dia seorang yang *waskitha* dan *ngerti sadurunge winarah*. Salah satu ramalannya adalah akan munculnya Satria Piningit bagi Indonesia di masa depan, yakni ketika Indonesia sedang menghadapi gara-gara dan kerusuhan besar. Satria Piningit ini akan membawa Indonesia menuju kemakmuran dan kejayaan seperti pada zaman Majapahit. Asal tahu saja, sesungguhnya Satria Piningit itu bukan menunjuk pada sosok Soeharto. Sebab, Soeharto tidak sesuai dengan penggambaran mengenai Satria Piningit.

Namun tak bisa dipungkiri, sebagai presiden, kepala negara serta penguasa tunggal di sebuah rezim bernama Orde Baru, Soeharto memang berwibawa. Selain berwibawa, Soeharto dan keluarganya adalah lambang kemakmuran. Kalau Soeharto tidak berwibawa, maka kepemimpinannya gampang digoyang dan tidak bisa bertahan selama kurang lebih 32 tahun. Akan tetapi, pada akhir kepemimpinannya, nasib Soeharto agak kurang memuaskan karena lengser bukan atas kehendak konstitusi tetapi lengser karena

dipaksa rakyat. Kenyataan ini menyebabkan kesan Soeharto di mata rakyat menjadi kurang baik. Bertolak belakang dengan saat-saat Soeharto naik ke atas kursi kepresidenan.

Bertali-temali dengan ramalan Ranggawarsita, Soeharto ini pas dengan sebutan 'Satria Mukti Wibawa Kesandhung Kesampar'. Artinya, Soeharto semasa menjadi presiden banyak dinilai sebagai pemimpin yang mukti wibawa, makmur dan berwibawa. Selama ia memimpin negeri ini, nyaris tak ada yang berani melawannya. Bahkan, usai kejatuhannya, sulit bagi orang selain Soeharto bisa menduduki kursi kepresidenan sepanjang masa itu.

Dalam tipologi kepemimpinan versi Ranggawarsita, tak cuma menggambarkan tipologi yang bisa dikait-kaitkan dengan kepemimpinan Soeharto. Dalam versi Ranggawarsita, terdapat tujuh tipe kepemimpinan. Selain Satria Mukti Wibawa Kesandhung Kesampar yang ditafsirkan sesuai dengan kepemimpinan Soeharto, ada pula 'Satria Kinunjara Murwa Kuncara'. Ramalan ini melekat pada Soekarno, yang memang diketahui sebelum tampil sebagai presiden ia keluar masuk penjara. Selepas dari penjara ia berhasil membawa Indonesia memasuki dunia merdeka, merdeka dari kolonialisme dan imperialisme. Soekarno sangat hebat sebagai pemimpin sehingga bisa mempengaruhi sepertiga dunia dengan Gerakan Non Blok.

Tipe yang lain adalah 'Satria Jinumput Sumela Atur'. Pemimpin ini ditafsirkan ketika naik tahta bukan karena pilihan rakyat, melainkan karena dipungut begitu saja. Tipe ini sesuai dengan BJ Habibie, yang menjadi presiden setelah Soeharto lengser. Presiden yang dipungut begitu saja ini seakan-akan hanya mengisi kekosongan, hanya *sumela atur*. Sedang tipe berikutnya adalah 'Satria Lelana Tapa Ngrame'. Inilah pemimpin yang mengembara, yang juga diibaratkan dengan *wuta ngideri jagad*. Ramalan ini ditafsirkan pada Gus Dur. KH Abdurrahman Wahid adalah seorang pemimpin, menjadi presiden melalui pilihan wakil-

wakil rakyat, tetapi kemampuannya terbatas, yakni pada pandangan matanya.

Tiga tipe kepemimpinan versi Ranggawarsita lainnya adalah, 'Satria Piningit Hamong Tuwuh', 'Satria Boyong Pembukaning Gapura', dan 'Satria Pinandita Sinisihan Wahyu'. Tipe Satria Piningit Hamong Tuwuh maksudnya pemimpin yang bagaikan tersembunyi dan kemudian keluar dari pertapaan. Yakni seorang ratu atau seorang raja yang dipingit dan mendapatkan legitimasi luas karena hamongtuwuh dari keturunannya. Ia menjadi simbol penderitaan dari orde sebelumnya, sehingga begitu keluar dari pingitan ia mendapat dukungan luas dari publik.

Tipe Satria Boyong Pembukaning Gapura, ditafsirkan yang berpindah tempat dan membuka gerbang. Pemimpin ini akan menjembatani ke arah kemakmuran. Ia adalah negarawan tanpa pamrih. Ia mengemban tugas meletakkan fondasi kenegaraan baru seperti membuka pintu gapura zaman keemasan dan menggelar tikar, walaupun tidak akan sempat menduduki tikar yang digelar itu. Dan tipe Satria Pinandita Sinisihan Wahyu adalah tipe pemimpin yang berjiwa dan bersemangat religius kuat. Pemimpin tipe ini ditunggu-tunggu untuk membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan bangsa.

Apa yang dilakukan Ranggawarsita ini tentu hanya sekadar meramalkan apa yang akan terjadi. Melalui ketajamannya melihat ke depan, kita tinggal mengaitkan dengan situasi masa kini. Kebetulan, selama menjadi kepala negara, Soeharto memang berjaya. Hal ini sesuai dengan apa yang digambarkan Ranggawarsita. Memang ada tipe pemimpin yang seperti itu, menurut ramalan Ranggawarsita. Tetapi, pemimpin tersebut tidak hanya berhenti sampai pada *mukti wibawa*, sebab karena tidak bisa membawa diri dan mengendalikan nafsu keserakahannya, pemimpin tadi bisa *kesandhung kesampar*. Siapa yang tak mengharapkan hidup berjaya seperti itu? Kalau bisa kejayaan itu dinikmati selamanya.

Soeharto, barangkali akan terus dipercekapkan orang. Sewaktu masih menjadi penguasa pada rezim Orde Baru, banyak orang tidak berani membicarakan soal dukun yang dipakai Soeharto, takut mendapat urusan sampingan yang tak mudah penyelesaiannya. Tetapi setelah Soeharto sudah tidak lagi berkuasa dan tidak lagi mempunyai taring kekuasaan, media massa pun mulai berani mengungkap misteri itu.

Misalnya saja Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat edisi 9 Desember 1998 misalnya, mengungkapkan perjalanan Soeharto ke Selok, gunung keramat di Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Cilacap. Tempat ini sering dikunjungi Soeharto, sebagai petunjuk spiritual, untuk menyepi. Biasanya Soeharto mengambil tempat pemujaan di Jambe Pitu. Bahkan, di tempat itu terpasang foto Soeharto sedang berbincang dengan Rama Diyat dari Semarang. Rama Diyat sering menjadi mitra dialog Soeharto. Tetapi semenjak Rama Diyat meninggal dan beberapa tahun menjelang lengser, Soeharto jarang berkunjung.

Asal tahu saja, saat Soeharto masih aktif, kalau berkunjung ke Jambe Pitu dengan penjagaan ketat. Sebuah heli mengantarkan Soeharto mendarat ke Gunung Selok. Digambarkan oleh juru kuncinya, Rama Tomo, perjalanan menuju tempat itu sangat rumit karena tertutup hutan lebat. Biasanya Soeharto bersemadi, menyepi, berkonsentrasi penuh untuk memohon kepada Tuhan Maha Esa.

Banyak sekali orang datang ke Gunung Selok dengan berbagai tujuan, antara lain ada yang ingin cepat kaya, cepat naik pangkat, ingin usahanya lancar, atau berharap dagangannya laris. Selain Selok, tempat lainnya adalah Srandil di Desa Glempang Pasir, Kecamatan Adipala, Cilacap. Di Selok biasanya ada ritual khusus kepada mereka yang ingin cepat naik pangkat, yakni harus laku semadi.

Selain di Jambe Pitu, tempat pemujaan lainnya adalah Jambe Lima. Penamaan tempat ini disesuaikan dengan pohon jambe yang

tumbuh disitu yang dianggap sebagai pohon bertuah. Pemujaan Jambe Pitu ini dibuka 18 Juni 1958. Pada setiap bulan Sura biasanya momentum itu sering dimanfaatkan Soeharto. Tempat itulah, yang terdiri atas Sanggar Pamujan, Sanggar Palereman Kakung, Sanggar Palereman Putri, dan Sanggar Supersemar, menjadi saksi bisu laku spiritual Soeharto.

Mereka yang ingin *ngalap berkah* diminta untuk memohon kepada Tuhan Maha Esa dengan bersamadi di tempat pemujaan Jambe Pitu. Jika ada *wisik* yang diterima oleh pemandunya, biasanya diteruskan dengan laku sakral di Jambe Lima. Kemudian berlanjut ke Goa Rahayu yang gelap. Menurut penjelasan penjaga goa itu, gelap melambangkan kematian.

Kegelapan ini diharapkan bisa menyadarkan seseorang agar senantiasa berbuat kebaikan sebelum menuju alam kematian. Di goa itu ada tetesan air bening yang amat dingin. Tetesan air ini dipercaya bisa menyembuhkan penyakit dan bisa menyebabkan awet muda. Di goa ini biasanya orang diajak merenung: menakar kebaikan dan keburukan yang pernah diperbuatnya.

Setelah dari Goa Rahayu, diajak menuju ke Goa Nagaraja. Di sini ada berbagai macam benda dan makanan yang tersedia, yang bisa diambil bebas sesuai dengan keinginannya. Oleh pemandu laku spiritual, benda-benda yang diambil itu kemudian ditafsirkan satu demi satu selaras dengan tekad dan niat yang akan dijalani di dunia. Lalu, laku berikutnya mereka diajak menghadap lautan, yang dikuasai Nyai Loro Kidul. Lautan ibarat keluasan yang tiada tepi, juga simbol kesabaran dan hati untuk menerima yang baik dan yang buruk.

Tentu, bukan hanya Gunung Selok tempat yang sering dikunjungi Soeharto. Masih ada tempat lain seperti Gunung Srandil. Atau, pada tahap-tahap tertentu petunjuk spiritual itu diperoleh tidak dengan bepergian mengunjungi tempat-tempat yang dipakai sebagai perantara.

Kekuatan yang dibangun Soeharto berdasarkan petunjuk spiritual, salah satunya terletak pada konde yang dikenakan isterinya, yakni Ibu Tien. Melalui konde itulah Ibu Tien menjadi perantara turunnya wangsit itu. Tetapi, satu jam setelah Ibu Tien meninggal, konde itu sudah menghilang dan menurut bisikan gaib bisa ditemukan di petilasan pertapaan Panembahan Senopati, yang dikenal dengan Banglampir.

Untuk bisa mendapatkan kembali konde itu seseorang harus menjemputnya ke puncak Gunung Mahenoko atau Gunung Lanang, di Desa Blimbing, Kelurahan Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, jangan sampai melewati pukul 10.00. Inilah wangsit yang ketika itu turun melalui Ibu Tien, untuk mengawal Soeharto menjadi presiden.

Menurut kepercayaan, hilangnya konde ini apabila belum ditemukan bisa menjadi rebutan orang-orang yang berkeinginan menjadi pemimpin. Tidak mengherankan jika banyak orang berdatangan ke Banglampir, karena di situlah tempat turunnya wahyu keraton. Wahyu keraton pernah turun untuk Panembahan Senopati, sehingga Panembahan Senopati bertakhta di Kerajaan Mataram. Konon, petilasan ini masih banyak dihuni macan putih yang sewaktu-waktu bisa muncul.

Selain konde, menurut Sudjono Humardani berdasarkan wawancaranya dengan HM Nasruddin Anshoriy Ch, Soeharto juga mendapat kembang Wijayakusuma dari Nusakambangan yang kemudian dibawanya ke Cendana. Kembang Wijayakusuma itulah yang secara spiritual menopang semua kehebatan dan keberuntungan Soeharto.

Konon, Soeharto juga banyak berkomunikasi dengan berbagai dukun, kiai, guru spiritual, orang yang memiliki *ilmu linuwih*, untuk mendapatkan pegangan. Ada yang memberi jimat untuk kekuasaan agar langgeng, ada yang mengirim empat naga besar agar Soeharto terhindar dari santet dan tenung.

Siapakah guru spiritual Soeharto? Pertanyaan ini, pada suatu saat berkembang di Yogyakarta secara diam-diam. Pertanyaan itu berkembang justru setelah melihat Soeharto sedemikian kuat dan ampuhnya, sudah berkali-kali masuk rumah sakit namun penyakit itu bisa saja ditanggulangi oleh kekuatan fisik Soeharto. Ada yang mengomentari sakitnya Soeharto itu sakit politis. Tetapi, ada yang melihat ada guru spiritual yang membentengi kekuatan fisik Soeharto, sehingga seakan-akan Soeharto bersandiwara ketika benar-benar sakit.

Menurut Onghokham, salah seorang guru spiritual Soeharto adalah Sudjono Humardani. Sesungguhnya, tak Cuma Sudjono Humardani. Bahkan hampir di setiap propinsi Soeharto punya guru spiritual yang bisa dipercaya. Sudjono Humardani selama ini dikenal sebagai salah satu pendiri Center Strategic and Indonesian Studies (CSIS) dan seorang pemikir terkemuka di negeri ini.

Namun, masih menurut Onghokham, Soeharto pernah menyangkal peran Humardani dan mengatakan bahwa Soeharto sendiri itulah guru spiritual yang lebih hebat dari Humardani. “Penegasan tersebut diungkapkan dengan menyamakan diri Soeharto dengan Semar, tokoh dunia pewayangan yang berperan sangat dominan dalam kehidupan orang Jawa, baik secara kultural maupun spiritual,” kata Onghokham.

Konon, Soeharto juga gemar menyimpan benda keramat. Termasuk di dalamnya keris-keris bertuah. Tidak ada informasi tertulis mengenai jumlah keris yang disimpan Soeharto. Namun, seorang pengamat budaya Jawa yang enggan disebut namanya meyakini, “Hampir semua jenis keris dimiliki Pak Harto. Ada keris luk13 sampai *luk* yang tak dipunyai orang lain,” katanya.

Dari mana keris-keris itu, ia tidak menjelaskan. Tetapi, keris-keris yang jumlahnya sangat banyak itu, setelah Soeharto tak lagi memegang kekuasaan, konon akan diserahkan pada Keraton Yogyakarta tetapi ditolak. Kemudian keris-keris tersebut akan

diserahkan pada Keraton Surakarta. Keris-keris itu banyak dinilai sebagai kekuatan yang dipinjam Soeharto untuk menjaga kekuasaan yang sedang dipangkunya. Setelah Soeharto tak lagi menjadi penguasa, untuk apa lagi keris itu?

Keris bagi masyarakat Jawa, dianggap memiliki nuansa mistik. Keris juga dianggap memiliki kekuatan gaib yang besar dan mempunyai peranan penting dalam segala urusan yang bersifat spiritual. Dalam buku *Pararaton*, kita mengenal keris buatan Empu Gandring. Keris itulah yang dipakai oleh KenArok untuk membunuh Tunggul Ametung, yang menjadi sebab Ken Arok bisa menikahi Ken Dedes.

Meskipun keris juga dikenal sebagai senjata pembunuh, masyarakat Jawa yang lebih menjaga harmonisasi menganggap keris sebagai benda yang berkekuatan gaib yang bisa dipakai untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada keris yang dipakai untuk jabatan, ada keris yang dipakai untuk ketenteraman, ada pula keris yang dipakai untuk kewibawaan.

Dalam Serat Babad Tanah Jawi disebutkan, Ratu Lautan Kidul bersedia memberi bantuan kepada Senapati dan raja-raja penerus Kerajaan Mataram berupa bala jin, peri dan sesamanya, apabila mereka menghadapi kesulitan. Praktek-praktek perdukunan tak selamanya putih, sebab praktek perdukunan bernuansa hitam pun berkembang, yang dikenal dengan istilah *black magic*. Di antara sikap-sikap hormat pada Soeharto, tentu ada sekelompok orang yang tidak menyukai. Dalam kancah politik, permusuhan yang disebabkan perbedaan prinsip bisa saja terjadi, sehingga muncul apa yang dinamakan musuh-musuh politik.

Dalam dunia kompetisi kekuasaan, rupanya Soeharto sudah memperhitungkan hal itu. Soeharto juga memahami, mungkin ada sekelompok orang yang merasa terus-menerus dirugikan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkannya dalam memerintah negeri ini, sehingga mereka tidak memperoleh tempat yang layak di

negerinya sendiri. Tetapi, ada pula di antara mereka yang mencoba-coba menguji kekuatan spiritual yang dimiliki Soeharto, apakah benar-benar menyimpan kesaktian?

Asal tahu saja, dari olah batin yang dilakukannya selama ini, Soeharto sudah siap dengan benteng-benteng spiritual untuk menangkal bentuk-bentuk serangan bawah tanah, serangan-serangan tak tampak, serangan-serangan gaib, yang berasal dari orang-orang yang tak menyukainya. Soeharto tidak cukup hanya dengan memasang pengawal terlatih yang galak setingkat kolonel, atau berpuasa Senin dan Kamis, tetapi ia juga mendengarkan nasihat para orangtua Jawa zaman dahulu. Soeharto juga merasuk pada olah batin dan olah spiritual, yang sudah menjadi tradisi turun-temurun.

Soeharto termasuk orang Jawa yang bersedia menjalankan ilmu leluhurnya dengan cara olah batin seperti ini. Karenanya jangan heran, saat Soeharto menyerahkan kekuasaannya pada Habibie, 21 Mei 1998, sekitar pukul 09.00 di Credentials Room, Istana Merdeka, Jakarta, bergetarlah bumi Nusantara. Sejarah pun segera mencatat melalui isyarat-isyarat yang dikirimkan dari dunia klenik. Daun-daun seakan berhenti, tak bergoyang, karena angin pun tidak bertiup. Pakaian sipil harian berwarna gelap, berupa safari lengan pendek, yang dikenakan Soeharto, seakan menunjukkan kedukaan yang dalam.

Inilah saatnya *wangsit keprabon* itu loncat dan berpindah pada orang lain. Inilah pertama kalinya sebuah kekuasaan seorang presiden yang begitu besar diserahkan dalam keadaan sadar kepada wakilnya selang 72 hari setelah ia dipilih dengan suara bulat pada bulan Maret 1998. Dalam tafsir klenik, *wangsit keprabon* akan berpindah kepada orang lain apabila orang lain itu dikehendaki.

Selama ini *wangsit* itu telah menemani Soeharto dalam menjalankan kekuasaannya, lebih dari 30 tahun. Pada saat seperti itu, kekuasaan seakan tidak ada artinya. Bagi Soeharto, bukan lagi

kekuasaan yang penting, tetapi bagaimana ia menempatkan diri di tengah jagat ramai. Melalui suatu rezim yang kemudian diberi nama Orde Baru yang dimulai dari kecerdasan Soeharto menguasai keadaan chaos, sekitar tahun 1966, *wangsit keprabon* itu merendah dan hinggap pada dirinya. Tetapi, pada waktunya nanti *wangsit keprabon* itu akan *oncat* atau pindah tempat.

Dalam ilmu kejawen, ada konsep *begja* (keberuntungan) dan konsep *cilaka* (kejatuhan). *Begja lan cilaka* juga dipahami sebagai konsep cakramanggilingan, yang bisa diibaratkan sebuah rodayang berputar. Ada kalanya putaran itu berada diatas, itulah yang dikatakan sebagai orang yang sedang mengalami kabegjan. Sampai berapa lama keberuntungan itu akan digenggam, manusia tidak bisa menebak, sebab itu merupakan rahasia gaib. Ada yang tercatat 32 tahun, ada yang hanya sebentar tak sampai lima tahun, bahkan ada yang di tengah jalan harus turun. Sedang nasib sial, cilaka, ketidakteruntungan, bisa terjadi ketika roda sedang berputar di bawah.

Bagi Soeharto dalam meniti kehidupannya juga berlaku perhitungan saat mana *begja* dan saat mana *cilaka*. Tanggal 11 Maret 1966 adalah saat yang membawa keberuntungan bagi Soeharto, karena ia naik tahta menjadi presiden. Sedang tanggal 21 Mei 1998 adalah saat *cilaka*, karena pada tanggal itu Soeharto meletakkan jabatan sebagai penguasa tunggal Orde Baru yang sudah digenggamnya cukup lama. Lebih dari 30 tahun adalah hitungan waktu yang cukup lama. Pada saat itulah *wangsit keprabon* yang digenggam Soeharto hilang, bersamaan dengan tidak adanya *endhog jagad* di sisi Soeharto.

Tafsir lain, sebagaimana tulisan Onghokham dalam bukunya *Dari Soal Priayi sampai Nyi Blorong, Refleksi Historis Nusantara*, Soeharto menjadi penguasa mutlak karena, seperti raja-raja Jawa, ia adalah paku buwana. Yakni paku bagi bumi, agar bumi itu menancap dengan kuat. Bila paku itu dicabut maka bumi akan kiamat. Ketika Soeharto naik menjadi presiden ia memaku dirinya

pada jagat bernama Indonesia, sehingga begitu paku itu dicabut maka goyanglah jagat Soeharto. Lepasnya paku tadi, sama halnya dengan dengan *oncate wangsit keprabon*.

Seharusnya, begitu *endhog jagad* itu tidak lagi berada di sisi Soeharto, ia cepat-cepat memutuskan menjadi *pandhito*. Itu lebih baik daripada menantang kemampuan dirinya, meskipun ketika Soeharto mengecek kesehatannya ke Jerman, Profesor Reiner Koerfer yang melihat secara keseluruhan kondisi Soeharto menyarankan sampai tahun 2003 tidak masalah. Mungkin, karena *ilmu kasunyatan* menyatakan Soeharto sehat, keputusan menjadi *pandhito* menjadi dilupakan. Padahal, salah satu fungsi *pandhito* adalah memberi nasihat kebaikan kepada mereka yang membutuhkan, tanpa pamrih, kecuali keinginan agar dunia tetap harmoni, selaras, dan seimbang. Bukankah peran *pandhito* sudah melebihi predikat raja?

Kekuasaan itu barang pinjaman. Jika sudah selesai dipakai harus dikembalikan. Kekuasaan tidak seharusnya digenggam terus-menerus. Peristiwa ini dinilai sebagai kekeliruan besar Soeharto dalam memahami 'aji mumpung' dalam jagat Jawa.



Prabowo Subianto dulu panglima Kostrad sekarang panglima GERINDRA yang bergerak menuju RI 1.

PRABOWO, SEBUAH MOZAIK

SALAH SATU SOSOK yang bertali-temali dengan Soeharto adalah Prabowo Subianto. Bisa jadi, potret muda Soeharto tergambar dalam diri Prabowo meski mereka hidup di zaman yang berbeda. Mulai dari pilihan hidup untuk menjadi seorang prajurit, prinsip hidup yang sangat kuat, membukukan catatan perjalanan karier yang cukup mulus, meninggalkan jejak tudingan kejahatan hak asasi manusia, dan menjadi orang yang pernah sangat berpengaruh di Indonesia.

Dalam torehan catatan kehidupan Prabowo, ia kerap disebut-sebut sebagai anak emas Soeharto. Bukan hanya karena ia menikahi Siti Hedijati Harijadi (Titiek), anak keempat Soeharto. Lebih dari sekadar menjadi bagian dari *the first family* di Indonesia, Prabowo juga memiliki kecerdasan di atas rata-rata prajurit kebanyakan. Bisa disebut, sejak lahir pun ia sudah mengundang kontroversinya sendiri.

Mari mencermati anak ketiga begawan ekonomi Indonesia Soemitro Djojohadikusumo ini. Berkaitan erat dengan nama Soemitro, Prabowo juga tak bisa dilepaskan dari kakeknya, Margono Djojohadikusumo, pengikut Boedi Oetomo dan pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) 1946. Sementara itu saudara-saudaranya

yang lain adalah Biantiningsih Djiwandono, Maryani Le Maistre, dan Hashim Suyono Djojohadikusumo.

Keempat anak Soemitro lahir dan dibesarkan di kalangan intelektual. Namun, keempatnya memilih titik pijak karier yang berbeda-beda. Meski awalnya Prabowo tidak berkubang di lahan bisnis, tetapi darah intelektual tetap menitis di tubuhnya. Kelak, 'darah intelektual' ini pula yang akan membuatnya tersingkir dari panggung militer Indonesia.

Nah, di antara semua saudaranya, Prabowo bahkan dikenal sebagai anak yang paling doyan memamah buku. Dari koleksi di perpustakaan milik pribadi di kantor maupun di rumahnya, Prabowo paling menyukai buku tentang sejarah dan militer. Konon, ia selalu belanja banyak buku jika bepergian keluar negeri. Itu sebabnya, buku dalam bahasa asing pun ia lumat.

Prabowo memang tak menolak buku-buku berbahasa asing. Di antara prajurit seusianya, penguasaan terhadap bahasa asingnya terbilang oke. Selain bahasa Inggris, ia menguasai bahasa Prancis, Jerman, dan Belanda. Wajar saja. Masa kecilnya dihabiskan di luar negeri, seperti Singapura tiga tahun, Malaysia dua tahun, Hong Kong dua tahun, Swiss dua tahun, dan Inggris dua tahun. Ia mengikuti ayahnya yang berpindah-pindah dalam masa pengasingan. Tak heran, sikapnya pun kebarat-baratan dan cenderung 'arogan'.

Apapun jalan hidup yang dipilih oleh keempat anaknya, Soemitro mengaku bangga. Hingga akhir masa tugas Prabowo, Soemitro bahkan tak pernah menyesali apa yang telah terjadi pada putra kesayangannya. Dalam wawancaranya dengan TEMPO pada tahun 1999, Soemitro sempat berujar, "Dalam bahasa Jawa, ada istilah *wiryo kencono*; seorang anak, biar dia seperti sampah pun, tetap harus kita banggakan."

Menjadi Anak Emas Soeharto

Prabowo menyelesaikan bangku sekolah menengahnya di usia 16 tahun di American School di London, U.K.. Konon, Prabowo terkenal rewel di kelasnya. Untuk itu, ia ‘dihukum’ dengan dinaikkan kelasnya ke satu level yang lebih tinggi. Lulus sekolah di usia yang lebih muda ketimbang teman-teman sebayanya, Prabowo kemudian diterima sebagai mahasiswa di tiga universitas di Amerika Serikat. Salah satunya adalah Universitas Colorado.



Prabowo Subianto merupakan menantu kesayangan Soeharto.

Namun kuliah di usia muda justru mencemaskan Soemitro. Menurutnya, tak baik secara psikologis bagi Prabowo bila duduk di bangku kuliah di usia yang begitu muda. Untuk itu, ia mengusung Prabowo kembali ke tanah air dan memintanya menunda keinginannya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tetapi yang ada di benak Prabowo rupanya berbeda dengan Soemitro. Ditariknya Prabowo dari negeri Harry Potter itu justru mencuatkan kembali cita-cita lama Prabowo, yaitu sekolah di bidang

militer. Awalnya, Soemitro yang rewel. Katanya, “Ada banyak hal terjadi-demonstrasi mahasiswa, Orde Baru.” Kemudian dijawab oleh Prabowo, “Saya ingin menjadi bagian dari itu. Saya ingin kembali.”

Keukeuh dengan pendiriannya, Prabowo pun melanjutkan sekolahnya di Akademi Militer Nasional (AMN), sebagai Taruna Akabri Darat Magelang. Sponsor utama untuk pendidikan di sekolah militer ini datang dari Jenderal Sutopo Juwono. Di sekolahnya, Prabowo kerap menjadi bulan-bulanan teman-temannya. Soalnya, bahasa Indonesianya masih setengah-setengah, ditambah lagi ia adalah anak Soemitro yang notabene saat itu tengah menjabat Menteri Perdagangan.

Prabowo menamatkan pendidikannya di AMN tahun 1974. Beberapa nama dari angkatan yang sama dengan Prabowo yang cukup kesohor kemudian di antaranya Kolonel Syafrie Syamsudin, Kolonel Mahidin Simbolon, dan Kolonel Eddi Budianto. Namun, tak seperti yang lainnya, masa tugas Prabowo lebih banyak dilalui di lingkungan pasukan tempur. Meski suasana tak bergejolak saat itu, toh, karirnya tak menuai buntung.

Dengan pangkat Letnan Dua, pada tahun 1976 ia menjadi Komandan Peleton Grup I Kopasandha (nama lawas Kopassus). Setahun kemudian, naik menjadi Komandan Kompi di lingkungan Grup I kesatuan yang sama, Kompi Nanggala 28, hingga tahun 1980. Ia tiba di Timor-Timur untuk tugas pertamanya pada bulan Maret 1976, sekitar 3 bulan setelah separo pulau tersebut ditinggalkan bangsa Portugis dan diduduki Indonesia. “Kami semacam pasukan penggempur,” paparnya.

Ia mengimbuhkan, “Kami keluar dari Dili selama dua, tiga minggu untuk patroli dengan jangkauan panjang. Sekali, kami dikepung ratusan gerilya. Pada waktu itu, kami tidak mempunyai banyak helikopter dan cuacanya tidak bagus sekali. Saya ingat berharap: Kalau saya tertembak, biarkan saya tertembak pada pagi

hari. Karena kalau tertembak sesudah jam 2, tidak ada helikopter yang akan datang dan menyelamatkan.”

Kemudian tahun 1978, ia kembali sebagai komandan Kompi 112, dengan kode Nanggala 28. Bersama beberapa anak buahnya Prabowo pernah bekerja sama dengan beberapa anggota Batalyon 744. Operasi itu berhasil menewaskan Presiden dan Menteri Pertahanan Fretilin Nicolao Dos Reis Labato di Timor Timur. Ini pula yang membuat Prabowo mendapatkan kenaikan pangkat. Lima tahun kemudian, ia memimpin satuan tugas anti gerilya. Akhirnya, Prabowo ditempatkan di Timor Timur dari tahun 1988 hingga 1989 sebagai Komandan Batallion Udara 328 Kostrad.

Karirnya terus naik kelas. Pada tahun 1980, jabatannya naik lagi menjadi Perwira Operasi di Grup I. Jabatan ini diembannya sampai tahun 1983. Lebih kontroversial ketimbang sekadar menjadi anak Soemitro, di tahun 1983 Prabowo menikahi Siti Hedijati Harijadi (Titiek), anak keempat Presiden Soeharto. Prabowo kemudian menjadi bagian dari *the first family* di Indonesia. Sejak itu, Prabowo dikenal sebagai menantu kesayangan Soeharto lantaran kecerdasannya berada di atas rata-rata prajurit kebanyakan. Pernikahan itu pula yang kemudian disebut-sebut sebagai pemicu kenaikan pangkat Prabowo yang mulus.

Empat bulan usai setelah pesta perkawinannya, ia kembali ke lapangan untuk mengepung Fretilin. Konon, pada operasi tersebut, Prabowo sempat terkepung oleh pasukan Fretilin di medan yang banyak ilalang. Kabarnya, di sinilah ketrampilannya sebagai prajurit pernah ditunjukkan. Fretilin membakar Prabowo. Ayah satu anak ini pun kemudian menyelamatkan diri dengan cara masuk ke sebuah lubang. Sehari ia tak menampakkan diri dan selama 12 jam ia diberitakan hilang.

Berkaitan dengan Timor-Timur, awal tahun 90-an, Prabowo pernah mencoba membujuk Jakarta untuk memberikan otonomi pada Timor-Timur. Bukan sekadar basa-basi, duta besar Indonesia

Francisco Lopez da Cruz dan mantan menteri luar negeri Ali Alatas pun membenarkan fakta yang selama ini tak pernah muncul di permukaan ini. Fransisco Lopez dan Ali Alatas memang lama terlibat dalam kebijakan Timor Timur. Nah, Prabowo kemudian muncul belakangan menjadi satu dari para pengusul pertama otonomi.

“Dalam keadaan pemberontakan, selalu harus ada pemecahan yang bersifat politis,” kata Prabowo. “Dan saya pikir bahwa suatu daerah otonomi khusus akan ideal. Tetapi tentu saja siapa yang akan mendengarkan seorang letnan dua, letnan satu atau seorang kapten?” Nyatanya, statusnya sebagai menantu Suharto tidak banyak memberikan perbedaan, karena Soeharto tetap bersikeras agar Timor-Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia.

“Baginya (*Soeharto—cd*), integrasi merupakan hasil akhirnya,” kata Prabowo, yang merasa bahwa pilihan Timor Timur untuk meninggalkan Indonesia, sebagian, merupakan suatu pembuktian. “Saya selalu menentang diteruskannya peperangan tersebut. Pada akhirnya terbukti kebenarannya. Beberapa orang yang berkedudukan tinggi punya ide gila bahwa bila dapat meneruskan peperangan ini akan merupakan hal bagus.”

Pada tahun 1993, kembali ia ditugaskan di Kopassus, dengan jabatan Pejabat Sementara Komandan Grup III Pusdik Kopassus, dan tak lama kemudian menjadi Komandan Grup 3 Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (Pusdikpasus). Tahun 1994, kembali ia dipromosikan untuk mendampingi Brigjen Soebagyo Hari Siswoyo, yang saat itu menjabat Komandan Kopassus, sebagai Wakil Komandan Kopassus.

Sejak menjabat posisi Wakil Komandan Kopassus, aktivitas Prabowo di luar tugas keprajuritan makin kentara. Malah, ia pun tak segan tampil di depan publik dan diliput media massa, baik dengan baret merahnya, maupun kegiatannya selaku Ketua Majelis

Pertimbangan Keluarga Mahasiswa Alumni Penerima Beasiswa Supersemar.

Hanya magang menjadi Wakil Komandan selama 14 bulan, ia naik satu level lagi menggantikan komandannya, Soebagyo, yang dipromosikan menjadi Panglima Kodam IV/Diponegoro dan menyandang dua bintang di bahu. Dengan demikian, Prabowo tercatat sebagai Jenderal pertama alumni angkatan 1974. Bila Anda masih ingat, saat itu, hampir semua halaman koran memuat potret Prabowo di halaman utama sebagai Komandan Kopassus anyar.

Sesungguhnya, jauh sebelum diresmikan sebagai Komandan Kopassus, kabar naiknya Prabowo ini sudah santer beredar di Jakarta. Bahkan jurnal *East-West Center*, edisi 8 September 1995, yang terbit di Amerika Serikat, tak ragu-ragu meramalkan keberuntungan anak ketiga Soemitro ini dua bulan sebelum pelantikan Prabowo.

Rupanya, ramalan ini tak keliru. Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor 820/XI/1995 tanggal 15 November 1995 tentang ‘Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia’ pun terbit. Surat yang berlaku sejak 1 Desember 1995 mengesahkan Prabowo sebagai Komandan Kopassus dengan bintang satu di pundak.

Licin di Korps Baret Merah

Saat itu, Soemitro menyaksikan putra kebanggaannya dilantik sebagai Komandan Kopassus dalam usia yang relatif muda, 44 tahun. Pesannya pada Prabowo, “*Sing eling* dan jangan lupa daratan. Sekarang kamu pengabdikan rakyat, dan jangan sekali-kali rakyat menjadi pengabdian kamu.” Menurut Soemitro yang gemar mengkritik ini, pesan tersebut serupa dengan pesan dari ayahnya, Margono, saat ia diangkat menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pengangkatan Prabowo ini sempat menjadi pro dan kontra. Tetapi, buru-buru para perwira tinggi mengoreksi embusan miring soal Prabowo. Maka, sejumlah fakta pun dibeberkan. Menurut para perwira tinggi, naiknya Prabowo ini ke kursi Komandan Kopassus ini lantaran ia terbilang cemerlang selama menjadi prajurit.

Contohnya, prestasinya saat bertugas di Timor Timur. Pasukan yang dipimpinnnya memang mencapai beberapa kali sukses. Misalnya, berhasil menembak Presiden Fretilin, Nicolao Lobato, dalam sebuah operasi khusus di Timor Timur pada 1976- 1978. Pasukannya pula yang berhasil menyergap Panglima Angkatan Bersenjata Fretilin, Guido Soares, dan anggota Komite Sentral Fretilin, Somotxo, serta Komandan Sektor Fretilin, Koliman.

Menurut Jenderal Hartono yang saat itu menjabat kursi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), alasan lain terpilihnya Prabowo adalah , “Dia dinilai sebagai perwira yang paling sesuai atau paling tepat dari perwira lain yang juga sesuai.” Lagipula, penilaian terhadap Prabowo ini dilakukan oleh sebuah dewan khusus dan dibahas oleh Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi.

“Saya tidak melebih-lebihkan, tapi kenyataan menunjukkan bahwa jabatan Dan Kopassus, dari semua calon yang ada, dinilai paling tepat diserahkan kepada Prabowo.” Menurutnya, Prabowo memang figur paling ideal untuk menempati posisi strategis tersebut. “Saya tidak bermaksud untuk melebih-lebihkan apa yang ada. Tapi terus terang, dilihat dari kebutuhan saat ini dan masa datang, Prabowo adalah calon terbaik untuk jabatan komandan Kopassus. Yang lain juga sesuai, tapi yang paling sesuai adalah Prabowo,” katanya.

Namun ada pula gosip lain yang sempat beredar saat itu. Kabarnya, usai *the golden boy* itu diangkat sebagai komandan Kopassus, ia akan dipromosikan menjadi KSAD dan kemudian menjadi Panglima ABRI. Jabatan terakhir ini terbilang paling

prestisius. Bahkan, mertuanya sendiri, Soeharto, pernah menyandang jabatan ini.

Tentu saja, rumor ini ditepis langsung oleh Hartono. “Anggota ABRI hanya berpikir, laksanakan tugas, dan pimpinan yang akan menilai. Tidak ada itu cerita tentang calon KSAD atau calon Pangab,” tegasnya. Tentu saja ujaran ini terdengar naif. Pasti, di benak setiap prajurit, menjadi KSAD maupun Pangab adalah cita-cita bahkan ambisi terpendam.

Bila ingin berkata secara objektif, regenerasi, promosi dan mutasi di jajaran militer bukanlah hal baru. Hanya saja, ABRI menempati posisi unik dalam konstelasi politik dan kenegaraan di Indonesia. itu sebabnya rotasi di tubuh kemiliteran ini menjadi bahan obrolan seru di tengah masyarakat. Apalagi porsi pemberitaan mengenai promosi Prabowo terlihat lebih besar dibandingkan dengan porsi pemberitaan rotasi Soebagyo, bahkan Soesilo Bambang Yudhoyono yang saat itu ditunjuk sebagai Kepala Pengamat Militer PBB di Bosnia.

Maka, bisik-bisik tentang kerusakan sistem birokrasi pun digelindingkan kembali: karena Prabowo menantu Presiden Soeharto, maka jalan menuju kursi Komandan Kopasus ini lebih licin ketimbang yang lainnya. Bagaimana bila memang Prabowo bukanlah anak begawan Ekonomi Indonesia, dan bukan menantu Soeharto, akankah karpas merah juga tergelar dengan begitu cepatnya? Bila ada yang berani berspekulasi mengenai hal ini, pasti hanya kasak-kusuk di belakang Prabowo saja.

Tentu, rusaknya sistem birokrasi seperti ini menyebarkan rasa tak adil, tak pasti, dan frustrasi bagi mereka yang tidak punya koneksi. Maka, bila Prabowo kemudian disiriki jajaran perwira tinggi ABRI, ya wajar saja. Tentu saja, kebanyakan dari mereka tidak menyatakan perasaan hati mereka karena takut. Bahkan sempat beredar cerita, saat Prabowo masih berpangkat kolonel, umum

diketahui ada perwira tinggi yang datang ke rumahnya seakan-akan 'menghadap'.

Birokrasi Indonesia yang sudah rusak sejak Orde Baru berkuasa, mumbulnya karier Prabowo yang begitu cepat tentu saja tak bisa dipisahkan dari kedudukannya sebagai menantu Soeharto. Sementara orang lain menggunakan jalan biasa, Prabowo dengan begitu gampang bak mengakses jalan tol. "Tidak. Tidak ada power game di ABRI," tepis Hartono, menegaskan.

Moncernya prestasi Prabowo dan tali-temali status sebagai menantu Soeharto, hanya ditanggapi dingin oleh Prabowo. Menurutnya, tudingan itu wajar saja. Hartono kemudian mencontohkan, Jenderal Colin Powell, peringkat ke berapa dia bisa jadi pangab AS. Dia bekas sekretaris militer Bush waktu jadi Wakil Presiden. Jadi, waktu Bush jadi Presiden, dia jadi Pangab. "Bahwa saya punya akses kepada penguasa politik, saya sependapat. Tapi kan bukan hanya saya," paparnya.

Kemudian Prabowo menjelaskan beragam prestasi yang berhasil diraihinya. Mulai dari kontak senjata langsung di medan operasi, berapa kali bertugas di daerah operasi, berapa kali timnya di Kopassus merebut kejuaraan, berapa kali operasi militer ia selesaikan, Mount Everest yang mengangkat bangsa, hingga melatih prajurit komando dari beberapa negara. "Itu kan tidak dilihat. Yang dicari cuma daftar dosa saya," tandasnya.

Gerundelan tentang naiknya Prabowo pun terdengar hingga ke kuping bekas KSAD, Jenderal (Purn.) Rudini. Menurutnya, pengangkatan Prabowo itu justru tak istimewa. Hitungan Rudini begini. Saat Prabowo menjadi Jenderal berbintang satu, usianya tak lagi terhitung muda dibanding dengan yang lain. Melihat masa dinas Prabowo di ketentaraan yang sudah mencapai hitungan belasan tahun, maka menurut Rudini wajar saja ia menjadi Brigjen. Lagi pula, Rudini melanjutkan, di lingkungan ABRI bukan cuma

Prabowo yang memperoleh pangkat Jenderal setelah berdinastikan belasan tahun.

Selain itu, menurut Rudini, sejak lulus dari Akademi Militer dan memasuki dunia kemiliteran secara penuh, mereka sudah dihadapkan pada sistem pembinaan karier. Lewat berbagai saringan yang ketat, akan muncul orang-orang yang akan memperoleh promosi lebih cepat daripada rekan-rekannya, atau bahkan mendahului angkatan sebelumnya. Dus, tak ada yang luar biasa atau yang tersembunyi di balik promosi Prabowo atau Soebagyo. “Jadi apa yang dicapai oleh Prabowo adalah wajar dan normal. Bahwa ia meninggalkan rekan-rekan seangkatannya, itu semata-mata karena prestasinya,” ujar Rudini.

Panglima ABRI yang kala itu dijabat oleh Jenderal Feisal Tanjung pun urun bicara. Ia menyebutkan bahwa jabatan untuk prajurit ABRI disesuaikan dengan pendidikan, latihan, dan pengalamannya. Maka mutasi itu sifatnya tidak urut kacang atau berurutan dari yang lebih senior. “ABRI akan berusaha menempatkan *the right man on the right place*, berdasarkan prestasi yang bersangkutan dan tidak urut kacang,” ujar Feisal.

Kemudian, Feisal pun menjelaskan panjang lebar mengenai penempatan *the right man on the right place* ini. Awalnya, niat pergantian ini datang dari pimpinan ABRI yang melihat bahwa posisi Asisten Intel dan Kepala BIA yang dirangkap oleh Mayjen Syamsir Siregar harus segera dipisahkan. Maka penjatahan pun dimulai. Karena yang dianggap pantas menduduki posisi tersebut hanya perwira tinggi berpangkat Mayjen, maka yang dianggap pantas adalah Mayjen Yusuf Kartanegara, Pangdam IV/ Diponegoro. Ia diproyeksikan untuk menduduki Asintel Kasum ABRI.

Nah, posisi Yusuf yang ditinggalkan harus diisi. Setelah ditimbang-timbang, ternyata yang dianggap cocok adalah Brigjen Soebagyo. Selanjutnya posisi Soebagyo pun mesti diisi. Maka

muncul nama Kolonel Prabowo Subianto yang memang telah memegang sebagai Wakil Komandan Kopassus.

Suka atau tidak suka, karena ini adalah garis komando, maka Prabowo tetap melenggang di karpet merah sebagai Komandan Kopassus. Kontroversi soal *the golden boy* yang memperoleh beragam kemudahan lantaran ia menantu keluarga Cendana, toh tak memelorotkan jabatannya. Malah, setahun kemudian, ia naik pangkat lagi menjadi Komandan Jenderal Kopassus.

Kesejahteraan Harus Nomor Satu

Salah satu kesamaan lain Prabowo dengan Soeharto adalah keinginannya untuk menyejahterakan orang-orang di sekitarnya. Baik Prabowo maupun Soeharto sangat peduli dengan orang-orang yang sudah mendukungnya (baca: kroni-kroninya). Sebut saja, keduanya bak kacang yang tak pernah lupa pada kulitnya. Apalagi, posisi Prabowo sangat strategis. Menjadi anak begawan ekonomi Soemitro, menantu kesayangan Presiden Soeharto, dan menganggangi kursi di Korps Baret Merah. Kurang apa lagi?

Tentu saja, Prabowo harus berterima kasih pada Jenderal Feisal Tanjung, Jenderal Hartono dan Brigjen Soebagyo yang memuluskan jalannya menuju kursi Komandan Jenderal Kopassus. Saat itu, santer terdengar, Feisal dan Hartono kondang dengan julukan 'Jenderal Santri'.

Sebagai langkah awal, Prabowo membersihkan pasukannya dari kegiatan-kegiatan yang tidak efisien. Misalnya saja, mengefisienkan latihan-latihan, bahkan melarang perwira-perwiranya main golf. Padahal, permainan ini digemari oleh para Jenderal. Nyatanya, semua tunduk pada Prabowo.

Setelah itu, Prabowo membengkakkan jumlah prajuritnya menjadi 7000 prajurit. Alasan Prabowo memekarkan pasukannya adalah karena Ancaman, Gangguan, Hamabatan dan Tantangan

(AGHT). Apapun alasannya, tetap saja menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari sebagian petinggi militer sendiri. Mestinya pasukan elit ini harus ramping dan ringkas.

Contoh yang sering-sering disebut sebagai pasukan yang ringkas adalah Grup Gerak Khas Malaysia. Pasukan elit negeri perak itu hanya terdiri dari tiga resimen mirip RPKAD zaman *baheula*. “Kalau jumlahnya terlalu besar, namanya bukan pasukan khusus lagi,” ujar Mayjen (Purn.) Syamsudin, yang dulu pernah digembleng di RPKAD.

Prabowo sengaja menggelembungkan jumlah pasukannya. Ia menyaring dan membentuk dua grup lain lagi selain grup 1, 2 dan 3 yang sebelumnya sudah ada. Grup yang dibikin Prabowo adalah grup 4 dan grup 5 yang merupakan orang-orang pilihan dari 3 grup pertama. Grup 4 yang disebut Sandhi Yudha berlokasi di Cijantung Jakarta dan merupakan orang pilihan dari 3 grup pertama yang dilatih kembali menjadi berkualifikasi Intelijen Tempur.

Mereka adalah tentara profesional yang dalam pergerakannya dalam bentuk unit yang jumlahnya sekitar 5 orang. Nah, saat tidak ada pergolakan, mereka ditugasi untuk Intelijen Teritorial. Misalnya, mengetahui karakteristik demografi suatu daerah, pendukung dana yang bisa dimanfaatkan, tokoh-tokoh masyarakat, hingga preman-preman.

Pemekaran grup oleh Prabowo ini melahirkan genre baru dalam kemiliteran di Indonesia. Grup 4 ini, contohnya. Pola perilaku dan penampilan mereka sama sekali tidak mirip tentara. Cara bicara tidak patah-patah, rambut panjang, tidak pernah menghormati atasan atau yang pangkatnya lebih tinggi bila bertemu di luar Ksatrian mereka. Mereka tidak ngantor setiap hari dan sangat jarang pakai seragam, hanya pada saat tertentu saja mereka kembali ke kantor.

Pendeknya, mereka sangat aktif berkecimpung dalam kehidupan masyarakat biasa misalnya di RT / RW, Perkumpulan

Terjun Payung, Jeep Club dll. Konon, grup ini sangat profesional dalam penyamarannya dan juga sudah mendapatkan pendidikan Perang Kota dari Green Berets US Army. Di tiga hotspot di Indonesia yaitu Timor Timur, Aceh dan Irian, mereka menyusup sampai ke kampung-kampung dan membentuk basis perlawanan terhadap GPK dari masyarakat lokal sendiri. Oleh karenanya kemampuan menggalang massanya sangat terlatih.

Sedangkan grup lainnya adalah Grup 5 atau yang dikenal sebagai Den 81 —disebut demikian karena keberhasilannya dalam peristiwa pembajakan pesawat di Don Muang, Muangthai tahun 1981. Orang-orang ini adalah orang pilihan dari grup 4 dan merupakan yang terbaik yang dimiliki Kopassus. Mereka memiliki Ksatrian tersendiri di Cijantung dan terisolir.

Klasifikasinya adalah anti teroris dan akan selalu mengikuti perjalanan kenegaraan Presiden. Pengetahuan orang bahkan ABRI sendiri tentang grup ini sangat minim, karena mereka sangat terisolir dan rahasia. Konon, grup ini mengikuti pola GSG 9 Jerman atau pasukan elite polisi Jerman yang berhasil dalam pembebasan sandera di Kedutaan besar Jerman di Iran. Konon, Prabowo adalah satu-satunya Perwira Indonesia yang pernah lulus dalam pendidikan anti teroris di GSG 9.

Langkah Prabowo memang selalu mengejutkan. Bukan hanya memekarkan pasukannya saja, bulan Juni 1997, masih di bawah pimpinan Prabowo, Kopassus mengirimkan tim kecilnya ke seluruh kota-kota besar di Indonesia dengan tugas yang sangat rahasia. Bahkan, ABRI yang lain pun tidak mengetahui dengan pasti apa tugas tim kecil Prabowo ini. Pada kenyataannya, tentara lokal tersinggung karena seolah-olah dianggap tidak becus mengatur daerahnya. Untuk meminimalkan kericuhan antar pasukan, tim kecil ini ditarik kembali ke Jakarta pada bulan Januari 1998.

Sesungguhnya, kejutan Prabowo itu tidak dimulai sejak ia menduduki kursi Komandan Kopassus. Saat masih menjabat

sebagai Wakil Komandan Kopassus, di bawah Komandan Kopassus Brigjen Soebagyo, Prabowo sudah membungkus surprise layaknya *April Mop*. Dengan Johny Lumintang, misalnya. Saat Johny menjadi Komandan Korem 164/Wiradharma Timor Timur (1993-1995). Prabowo, sebagai Wadanjen Kopassus, sering melakukan operasi-operasi intelijen dan operasi militer di Timor Timur, di luar pengetahuan Lumintang. Tentu saja, aksi Prabowo ini membikin Johny gerah.

Pertikaian keduanya berlanjut saat Prabowo dan pasukannya datang ke Irian Jaya (kini Papua) untuk ikut menangani kasus penyanderaan sejumlah peneliti oleh gerilyawan Organisasi Papua Merdeka (OPM), 1996. Saat itu, Prabowo sudah menjabat Komandan Jenderal Kopassus, sedangkan Lumintang menjabat Kasdam XII/Trikora. Kodam Trikora, ketika itu Pangdamnya Mayjen TNI Dunidja, marah karena pasukan Prabowo tidak mau tunduk di bawah komando Panglima Kodam, dan bahkan melancarkan operasi sendiri, tanpa koordinasi dengan pasukan Kodam. Kalau sudah begini, repot kan.

Kejutan lain Prabowo saat menjabat Komandan Kopassus juga sempat membuat geram para petinggi ABRI. Tahun 1995, Prabowo mengirimkan pasukan ‘ninja’ ke Timor Timur untuk melancarkan aksi teror. Aksi Prabowo ini membuat Komandan Korem Timor Timur saat itu, Kolonel Inf Kiki Sjahnakrie, geram dan nyaris baku hantam dengan Prabowo di kantor Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Adang Ruchiatna.

Di bawah Soebagyo, Prabowo juga sempat mengirimkan pasukan ‘ilegal’ ke Aceh. Di sana, konon Prabowo melakukan banyak pembunuhan. Toh, Soebagyo tak bisa berkutik. Bahkan, Soebagyo tak bisa menghadang Prabowo yang sering pelesiran ke luar negeri tanpa izinnya. Sebagai orang awam dan orang di luar tubuh militer, kita bisa saja menudingkan, siapa yang berani menghadang mantu Soeharto.

Toh, Kopassus dengan cepat mendapatkan reputasi sebagai salah satu cabang militer yang paling terlatih baik dan paling didanai. Eh, sebentar. Didanai? Iya! Recehan-recehan yang ditabung dalam celengan ayam milik Prabowo itu datang dari hubungan-hubungan bisnis di luar militer. “Saya bukan satu-satunya yang melakukan hal tersebut,” protesnya. “Banyak perwira yang melakukannya. Kami harus melakukannya. Dana kita (Kopassus) tidak pernah cukup.”

Tapi, jangan kelewat berburuk sangka dengan Prabowo, lo. Soalnya, sejak Prabowo mengangkangi kursi Komandan Kopassus, kesejahteraan anggota Kopassus lebih baik ketimbang tentara lainnya. Ayah berputra satu itu dikenal sebagai komandan yang memperhatikan kesejahteraan anak buahnya. Contoh yang paling dekat adalah bila ada lelangan mobil di Bimantara, mobil bekas itu akan segera dibeli oleh Kopassus untuk dijual murah kepada anggotanya.

Seperti usai ditaburi pupuk, bisnis Kopassus juga berbiak dengan subur. Bisnis pasukan elit ini didirikan pada tahun 1993 dengan nama Yayasan Kesejahteraan Korps Baret Merah atau disingkat Kobame. Awalnya, mereka hanya punya koperasi simpan-pinjam dan beberapa usaha yang lain. Yang paling besar adalah angkutan bus antarkota Jakarta-Semarang. Hasilnya, “Setiap bulan kami mendapat jatah odol, sabun, dan semir sepatu. Odolnya bikin mulut kita gatal,” kata Mayjen TNI (Purn.) Sjamsuddin.

Bisnis Kobame kian bersolek pada 1995, ketika berpatungan dengan kelompok Arseto, konglomerasi milik Sigit Harjojudanto. Setelah berkolaborasi dengan perusahaan Sigit, Kobame menargetkan membangun dua pabrik briket arang di Solo dan Serang. Investasinya pun bikin ngiler, yaitu sekitar Rp 7 miliar. Catat, angka sebesar itu untuk investasi tahun 1995, lo. Bayangkan, betapa duit mengucur dari langit dengan mudahnya!

Kobame juga pernah berencana membangun perusahaan armada angkutan laut, yang dimulai dengan mendirikan PT Tribuana Antar Nusa. Kobame menguasai 70% saham perusahaan tersebut. Tribuana kemudian membeli kapal motor penyeberangan Tribuana I seharga Rp 7,5 miliar. Kapal ini dipakai melayani rute pelayaran Merak-Bakauheni. Namun, krisis membuat pinzaman Tribuana juga macet. Akhirnya, kapal feri diambil alih oleh Prabowo, yang kemudian berbisnis sendiri dengan bendera PT Nusantara Energy Resources.

Cerita mengenai Kobame tidak berhenti sampai disitu saja. Kopassus membangun gedung pusat perbelanjaan yang dinamai Graha Cijantung di atas tanah 1,6 hektare milik Kodam Jaya di Cijantung. Lagi-lagi, Kobame tak sendirian. Koperasi ini berkongsi dengan Ktut Abdurachman Masagung, putra Masagung, pendiri kelompok usaha Gunung Agung. Hasil perkongsian ini melahirkan Kobame Propertindo, dengan saham masing-masing 50%. Perusahaan patungan ini memperoleh pinjaman Rp 45 miliar dari BRI dan Bank Pelita milik Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo. Total Jenderal, pembangunan Graha Cijantung menghabiskan Rp 55 miliar.

Apesnya, di tengah jalan, tepatnya awal 1998, Ktut mundur dari perusahaan itu. Kobame Propertindo kemudian 100 persen dikuasai pihak Baret Merah. Tapi utangnya ke Bank BRI dan Pelita macet gara-gara bunga melejit sampai di atas 70%. Selain itu, Bank Pelita dibekukan pada Maret 1999. Akibatnya, kredit Kobame, yang membengkak menjadi Rp 68 miliar, diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Carut-marut bisnis Kobame menemui ujungnya sampai disini.

Kontroversi Prabowo berikutnya datang menjelang Sidang Umum MPR 1998 (SU MPR). Hajatan lima tahunan belum lagi digelar, sudah ramai terdengar tentang rencana mutasi pimpinan ABRI. Agaknya sudah menjadi tradisi, di seputar SU MPR selalu ada mutasi jabatan dalam pimpinan ABRI. Jabatan seperti Pangab

adalah jabatan setingkat Menteri, maka wajar kalau pelantikannya bersamaan dengan pelantikan anggota Kabinet. KSAD juga kerap diserahterimakan sekitar waktu itu. Contohnya, Jenderal Rudini dilantik sebagai KSAD dekat-dekat SU-MPR 1983, atau Jenderal Try Sutrisno dilantik sebagai Pangab tak lama sesudah SU-MPR 1988.

Nah, di ujung tahun 1997, rumor bahwa Prabowo bakal dipromosikan sebagai Panglima Kostrad sudah beredar di tanah air. Itu artinya, bintang di pundak Prabowo bertambah satu, dari Brigjen menjadi Letjen. Mengulang selorohan yang sudah-sudah soal usia, Prabowo masuk dalam jajaran Pati senior di ABRI/TNI-AD, dalam usia relatif muda, 46 tahun. Menantu Soeharto ini juga menjadi lulusan AMN tahun 1974 pertama yang menduduki kursi ini.

Waktu itu sempat muncul kegalauan, dengan bakal naiknya Prabowo di kursi Pangkostrad, maka akan terjadi penumpukan pada perwira angkatan 1971 sampai 1973, terutama yang masih berpangkat Kolonel. Pada jabatan Danrem misalnya, dari 42 Danrem yang ada saat itu, sekitar separuhnya masih dijabat angkatan 71, sedang separuhnya lagi dibagi merata antara angkatan 1972 sampai 1975. Dus, laju karier angkatan 1971-1973 sedikit terhambat, sehubungan dengan melajunya karir adik kelas mereka, Prabowo.

Perjalanan karir Prabowo yang supercepat memang tidak bisa dibandingkan dengan perjalanan karier panglima tinggi lainnya. Umumnya, seorang tentara harus merangkak dalam menapaki kariernya, mulai Danton, Danki, Danyon, Dandim, Danbrig, Asisten Kasdam, Danrem, dan seterusnya. Kalau kita telusuri karier Prabowo, masih ada satu sektor penugasan yang belum pernah dialami Prabowo, yaitu penugasan dalam bidang teritorial. Prabowo tidak pernah menjadi Dandim, Asisten di Kodam atau Danrem.

Kereta cepat yang dilalui Prabowo ini kemudian selalu dikaitkan dengan keberadaan Soeharto sebagai mertuanya. Selebihnya, hal ini juga mengingatkan kita pada Jenderal TNI (Purn.) Benny Moerdani. Perjalanan karier Benny sungguh istimewa dan sedikit ‘aneh’. Sebagian besar karier Benny adalah di dunia intelijen. Karier lapangan Benny hanya sampai Danyon di RPKAD (Kopassus) tahun 1965.

Selepas itu, sampai diangkat menjadi Pangab tahun 1983, Benny bergumul dengan dunia intelijen. Sama dengan Prabowo, Benny juga tidak pernah bertugas di bidang teritorial. Bahkan Seskoad dan Kursus Reguler Lemhanas pun tidak. Tapi ketika menjadi Pangab, Benny muncul sebagai figur yang sangat kuat. Prabowo Subianto memang bukan Benny Moerdani. Meski serupa tapi tak sama, keduanya dipertemukan oleh perseteruan internal di tubuh serdadu.

Tersandung Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Sisi lain kemiripan Prabowo dengan Soeharto adalah catatan atas tudingan pelanggaran hak asasi manusia. Meski Prabowo tak ingin hal ini terjadi, nyatanya ia harus terkantuk di batu yang sama dengan mertuanya. Penyebabnya adalah sistem birokrasi yang ruwet. Keruwetan ini datang lantaran ia harus melindungi dua pihak, negara dan keluarga Cendana. Tahu apa sebabnya? Karena SU MPR 1998 sudah dekat.

Saat Soeharto gusar karena maraknya oposisi terhadapnya, ia pun memanggil sang menantu kesayangan. Kabarnya, saat itu Soeharto memerintahkan Prabowo ‘menertibkan’ gerakan-gerakan oposisi yang lagi marak. Soeharto khawatir SU MPR 1998, yang akan kembali mengukuhkan dirinya sebagai presiden ketujuh kalinya, terganggu aksi-aksi unjuk rasa.



Prabowo Subianto Jenderal yang dekat dengan kalangan ulama.

Unjuk rasa, protes sana-sini, teriak seenaknya, datang dari akar rumput, yaitu masyarakat. Gerakan massa ini tak urung membuat Soeharto menjadi panas. Bisa jadi, rasanya seperti ada kompor di kolong kursi. Tak terhindarkan, 9 orang aktivis diculik

oleh segerombolan orang yang kemudian disebut sebagai Tim Mawar. “Tujuan penculikan itu untuk mengamankan pemilihan Soeharto,” ungkap Pius Lustrilanang, korban penculikan yang pertama kali memberi kesaksian terbuka. Kesimpulan itu diperoleh Pius dari pertanyaan-pertanyaan penculik selama proses interogasi berlangsung.

Kisah itu bermula dari pembentukan sebuah satuan khusus oleh Mayor Inf. Bambang Kristiono pada Juli 1997. Namanya Tim Mawar. Ia adalah Perwira Menengah (Pamen) Diperbantukan (pada) Prabowo yang menganggangi kursi Komandan Jenderal Kopassus itu, beserta 10 anggota Grup IV Korps Baret Merah. Anggotanya, selain Bambang sebagai komandannya, yaitu Kapten Inf. F.S. Mustajab, Kapten Inf. Nugroho Sulistiobudi, Kapten Inf. Julius Stefanus, Kapten Inf. Untung Budiarto, Kapten Inf. Dadang Hindrayuda, Kapten Inf. Joko Budi Utomo, Kapten Inf. Fauka Nurfarid, Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi. Targetnya jelas: memburu dan menangkap aktivis radikal.

Saat itu, aktivis yang berada dalam daftar ‘aktivis radikal’ adalah aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD). Menurut Prabowo, sesungguhnya tak ada perintah untuk menculik. Yang ada, operasi intelijen untuk mengamankan aktivis radikal itu. Maklum, saat itu sudah terjadi ancaman peledakan bom di mana-mana. Bahkan pada DKP Prabowo membeberkan bahwa perintah pengamanan itu tidak rahasia. Dari atasan dan sejumlah instansi, termasuk Kodam dilibatkan.

Nah, menjelang SU MPR 1998 itu, ada sekitar 28 orang yang harus ‘diamankan’ dan diselidiki, bukannya diculik. Siapa yang member perintah? *Nobody knows*. Bahkan hingga saat ini, bila Prabowo ‘ditabuh’, ia tetap memilih bungkam. Alasannya, ia harus menjaga kehormatan institusi ABRI. Apalagi, kursi Panglima Tinggi diduduki Soeharto. Konon, daftar itu didapatkan dari Soeharto beberapa hari setelah ledakan bom di rumah susun Tanah Tinggi.

Menurut pengakuan Prabowo, enam aktivis, Andi Arief dkk., ada dalam daftar pencarian orang (DPO), yang diberikan polisi. Sedangkan tiga lainnya, Pius Lustrilanang, Desmond J. Mahesa, dan Haryanto Taslam, itu dianggap sebagai ‘kecelakaan’. “Saya tak pernah perintahkan untuk menangkap mereka. Semua mencari mereka yang ada dalam DPO itu. Kita dapat *briefing* terus dari Mabes ABRI. Kita selalu ditanyai. Sudah dapat belum Andi Arief. Tiap hari ditanya. Sudah dapat belum si ini... begitu. Kejar-kejaran semua,” aku Prabowo.

Sempat terdengar kabar bahwa bukan hanya Prabowo saja yang menerima daftar aktivis bengal itu. KSAD Jenderal Wiranto dan Pangab saat itu, Jenderal Feisal Tanjung, juga menerima daftar serupa. Namun menurut penuturan Prabowo, dirinya bukan satu-satunya panglima yang menerima daftar itu. Pimpinan ABRI lainnya juga menerima. Dan daftar itu memang sifatnya untuk diselidiki. Bahkan Soeharto sendiri sudah mengakui kepada sejumlah menteri bahwa itu adalah operasi intelijen.

Nah, para aktivis itu menjadi sasaran Tim Mawar lantaran Tim Mawar telah mendapat bocoran tentang rencana detail operasi PRD bawah tanah untuk membentuk Dewan Nasional. Mengetahui hal ini, nurani Bambang pun terpanggil untuk mengamankan kepentingan nasional yang saat itu tengah genting. Ia mengaku risau melihat aksi para aktivis yang dianggapnya radikal itu sudah mengganggu stabilitas. Apalagi, saat itu SU MPR 1998 sudah dekat.

Nah, untuk menculik para aktivis bengal itu, ia membagi Tim Mawar ke dalam satuan-satuan lebih kecil, terdiri dari tiga sampai empat orang. Operasi itu dinyatakan amat rahasia, menggunakan metode hitam, dan dengan posko berdiri sendiri. Maka, satu per satu target operasi dicituk, yaitu Andi Arief, Nezar Patria, Desmond J. Mahesa, Pius Lustrilanang, Haryanto Taslam, Faisol Resha, dan Raharjo Waluyojati. Selama berada dalam penyekapan mereka mengalami perlakuan yang tak manusiawi, disiksa saat interogasi dengan cara ditelanjangi, dipukuli, disetrum, ditidurkan di es balok, disundut rokok, hingga tak sadarkan diri.

Ada 14 orang lainnya yang hingga saat ini masih hilang. Mereka adalah Yanie Afri, Sony, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Petrus Bima Anugerah, Wiji Thukul, Ucok Munandar, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Naser.

Perintahnya menyelidiki, *eech* kepeleset, menculik. Menurut Prabowo, dalam operasi intelijen, setelah orang-orang itu diambil, kemudian ditanyai. Nah, kalau bisa, dia bekerja untuk si penangkap, dalam hal ini Kopassus. “Kan begitu prosedurnya. Sudahlah, itu kesalahan teknis, yang kemudian dipolitisasi,” terang Prabowo.

Saat dihadapkan di sidang Mahkamah Militer Tinggi II, Jakarta Timur, dua korban penculikan, Andi Arief dan Pius Lustrilanang, mengenali para penculik itu. Pius, yang sedari awal sudah mengetahui bahwa para penculiknya adalah anggota Grup

IV Kopassus, malah langsung mengenali sang komandan. “Saya tahu Bambang Kristiono. Dia salah satu penculik,” katanya.

Darimana datangnya duit sebagai modal menculik mereka? Konon, dana operasi penculikan oleh Tim Mawar tersebut berasal dari dana Batalion 42 Kopassus yang terdiri atas dana rutin, dana latihan dan dana yang diambil dari bunga dana abadi batalion yang disimpan di bank.

Saat kasus ini disidangkan pada awal tahun 1999, ada satu hal yang terlihat ganjil. Yaitu, alasan pembentukan Tim Mawar yang lebih karena berdasarkan hati nurani. Padahal, dalam keprajuritan, harusnya segala sesuatu berdasarkan perintah dari atasan. Dengan tanpa menutup-nutupi, Bambang seolah menjadi tumbal dalam peristiwa penculikan aktivis ini, dan dengan sendirinya menyingkirkan Prabowo. Kalau begini sih, gaya lawas. Ikan kakapnya disembunyikan, dan ikan terinya yang diajukan. Dus, dengan menyurungkan Bambang ke depan, tak lain menjadi sebuah usaha ABRI untuk melokalisasi sebuah operasi rahasia menjadi suatu kerja liar oknum ABRI.

Siapa pun masih ingat hasil temuan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang diumumkan oleh Menhankam/Panglima ABRI Jenderal Wiranto, bahwa dari hasil pemeriksaan atas mantan Danjen Kopassus Letjen (Purn.) Prabowo Subianto dan Mayjen Muchdi P.R. serta Komandan Grup IV Kopassus Kol. Chairawan, telah tegas-tegas dinyatakan bahwa penculikan tersebut dilakukan atas perintah dan sepengetahuan para pimpinan Kopassus saat itu. Dus, aksi itu bukan semata-mata atas inisiatif kesebelas anggotanya. Anehnya, dakwaan di pengadilan bisa berbeda dengan hasil temuan DKP itu.

Saat mengumumkan hal itu di bulan Agustus 1998, Wiranto bahkan sempat berujar, “Keputusan ini sesuai dengan tujuan dan jiwa daripada DKP, merupakan keputusan administratif. Dengan demikian, tentu tidak menutup kemungkinan untuk dilanjutkan ke

Mahmil, jika dalam proses persidangan Mahmil terhadap 10 anggota Kopassus lainnya nyata-nyata membuktikan ke arah itu (tindak pidana).”

Mantan Komandan Puspom ABRI, Mayjen CHK Syamsu Djalaluddin, S.H., bahkan punya pendapat lebih jauh. Menurut dia, seperti yang dinyatakan KSAD dan Ketua DKP Jenderal TNI Soebagyo, Prabowo telah mengaku melakukan tindak pidana penculikan. Karena itu, tidak ada alasan lain, Prabowo memang harus diajukan ke mahkamah militer. Dalam temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), disebutkan bahwa jika dalam persidangan anggota Kopassus tersebut terbukti Prabowo terlibat, bekas Komandan Kopassus dan juga bekas Panglima Kostrad itu akan diajukan ke mahkamah militer.

Logikanya, kata Syamsu lagi, tidak mungkin ke-sebelas anggota Kopassus itu melakukan operasi secara sendiri-sendiri, tanpa perintah komandannya, kecuali saat itu mereka adalah pasukan yang melakukan desersi. “Saat itu, mereka tidak desersi, sehingga sudah pasti ada yang memerintahkan mereka,” tegas Syamsu. Dan semuanya terlampau jelas jika dirunut dari hierarki komando di Kopassus. Saat itu, komandan satuan tugas operasi penculikan adalah Mayor Bambang. Atasan langsung Bambang adalah Kolonel Chairawan, yang secara langsung bertanggung jawab kepada Danjen Kopassus saat itu, Mayjen TNI Prabowo Subianto.

Menurut salah satu korban penculikan, Mugiyanto, Soeharto juga perlu dimintai keterangan karena ada dugaan dialah yang memberikan daftar nama aktivis yang kemudian menjadi target penculikan dan penghilangan paksa itu. Konon, Prabowo pernah mengaku mendapatkan daftar aktivis yang harus diselidiki. Dalam pemeriksaan oleh DKP, Prabowo mengaku salah menganalisis perintah bawah kendali operasi (BKO). Namun, Ketua TKP saat itu Jenderal Soebagyo HS menolak memberi tahu siapa yang memberi BKO.

BKO ini memang kunci untuk membuka kasus ini. BKO merupakan hal yang lazim dilakukan bila suatu kesatuan yang mendapat tugas tertentu membutuhkan bantuan kekuatan dari satuan lain dalam melaksanakan tugas tersebut. Dan pasukan bantuan ini berada di bawah kendali operasi serta tanggung jawab komandan kesatuan yang meminta bantuan tadi. “Jadi dia untuk sementara terlepas dari induk satuannya, dan dia di bawah kendali operasi dari satuan yang baru yang mendapat tugas tertentu itu,” terang Wiranto.

Nah, perintah BKO itu memiliki levelnya sendiri. Namun, Wiranto menolak membicarakan BKO yang dipegang oleh Prabowo berkaitan dengan penculikan aktivis itu. Soalnya, yang bisa menggerakkan Grup 4 Koppasus dengan satuan Tim Mawarnya hanya Danjen Kopassus yang saat itu dijabat Prabowo, Panglima TNI Jenderal Feisal Tanjung, dan panglima tertinggi TNI Presiden Soeharto. “Kamu tanya Prabowo sendiri, jangan ke saya, dong,” ujar Wiranto.

“Saya sejak awal percaya, Soeharto tahu hal ini. Kalau saya lihat dari kecenderungan masa lalunya, ketika dia memerintahkan ‘petrus’ (penembakan misterius), bisa jadi perintah penculikan datang langsung dari

Soeharto. Apalagi waktu itu dia Panglima tertinggi ABRI, dia paling bertanggung jawab,” kata Pius.

Ia juga yakin, penculikan tersebut tidak hanya melibatkan Kopassus melainkan kesatuan-kesatuan lain, termasuk Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Kodam Jaya). “Banyak instansi lain yang terlibat. Pekerjaan intelijen itu kan tak pernah satu instansi. Apalagi ini di Jakarta _paling tidak Kodam harus tahu. Tanpa ada perlindungan politik, tidak akan pernah ada suatu kesatuan yang berani melakukan tindakan konyol itu,” ucapnya.

Menurut Pius sejak awal dia yakin penculikan atas dirinya dan aktivis lain melibatkan korps pasukan baret merah tersebut. Dugaan

itu, katanya, berdasarkan pengetahuan Pius dari, antara lain, lokasi penyekapan, profesionalitas penculik yang pernah latihan di luar negeri, dan lingkup aksi yang membuat para penculik bisa melakukan tindakan itu di luar batas teritorial.”Yang salah adalah komandannya dan mantan Presiden Soeharto,” tegas Pius.

Prabowo kemudian mengaku memberi instruksi kepada anak buahnya untuk mengungkap sejumlah gerakan radikal. “Kalau memang benar ada anggota Kopassus yang terlibat (dalam aksi penculikan), saya siap bertanggungjawab,” tegas Prabowo. Toh, bentuk pertanggungjawaban itu tidak serta merta diikuti dengan tanggung jawab pidana.

Selama delapan tahun sejak penculikan, Komnas HAM akhirnya baru bisa merampungkan penyelidikan kasus sejumlah aktivis yang hilang dalam kurun waktu 1997-1998, November 2006 lalu. Bisa kita tebak, disudahinya penyelidikan kasus penculikan aktivis ini tak mencatatkan pengadilan dan hukuman terhadap si pemberi BKO.

Tetapi kita masih bisa sedikit menghibur hati, kok. Dalam laporannya, Komnas HAM menyatakan, motif utama penculikan di bawah operasi intel Sandi Yudha ini adalah upaya rezim Soeharto mempertahankan kekuasaan. Selain itu, serta kasus sembilan aktivis yang diculik kemudian dilepaskan dan kasus 14 orang lainnya yang hingga kini masih hilang, merupakan satu rangkaian dari operasi yang sama (Sandi Yudha) yang berada di atas perintah Panglima ABRI.

Prabowo, Wiranto dan Soeharto yang ketiganya menjabat secara garis komando dari Danjen Kopassus, Panglima ABRI dan Panglima Tinggi, cuci tangan dalam kasus penculikan ini. Contoh nyata atas penculikan ini, setidaknya —sekali lagi— menegaskan pada seluruh rakyat Indonesia, bahwa Mahkamah Militer didesain untuk menghindari tanggung jawab ketiga level ini.

Sandungan Terus Menghadang

Sandungan Prabowo tidak berhenti pada penculikan aktivis saja. Catatan kotor lainnya ada pada pertemuan di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Makostrad), pada 14 Mei 1998. Sampai-sampai Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menyelidiki peristiwa yang terjadi pada tanggal keramat tersebut. Soalnya, centang perenang beberapa peristiwa sesudahnya selalu menunjuk pada tanggal ini.

Nah, TGPF merekomendasikan untuk mencari tahu aktivitas apa saja yang dilakukan di Makostrad dari pagi hingga malam hari oleh Prabowo dan orang-orang dekatnya – seperti Kaskostrad Kivlan Zen dan Danjen Kopassus Muchdi Pr. – yang bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat pada hari itu.



Pendidikan modal utama untuk menjadi seorang pemimpin.

“Yang dipersoalkan TGPF dari pertemuan itu bukan soal makar atau tidak makar. Yang direkomendasikan TGPF adalah kalau pertemuan itu diusut, mungkin itu bisa memberi informasi. Itu saja. Nah, siapa-siapa yang kumpul di situ, dan ada apa itu? Maka perlu diusut siapa yang mengambil prakarsa, siapa saja yang diundang, apa yang diomongkan, kan begitu. Ya, supaya transparan lah,” terang Abdul Hakim Garuda Nusantara, salah seorang anggota TGPF.

Atas rekomendasi TGPF ini, respons pun muncul dari beberapa orang yang saat itu menjadi peserta di Makostrad. WS Rendra, contohnya. Si Burung Merak ini menilai rekomendasi TGPF bak dagelan. “Mengapa harus diselidiki, pertemuan itu biasa saja tidak ada apa-apanya. Saya anggap rekomendasi TGPF tentang pertemuan itu sebuah ‘dagelan’, lucu begitu,” kata Rendra. Menurutnya, peristiwa seremeh itu didramatisir, dan jadinya seperti dagelan.

“Kasih TGPF analisisnya begitu, mereka itu nggak punya pengalaman, kecuali kalau mereka pensiunan CIA, BIA, atau Bakin. Kalau saya mau diapa-apakan karena menghadiri pertemuan itu, ‘ya silakan saja,” timpal Setiawan Djody. Waktu ia datang, tambah Djody, sudah banyak orang seperti Din Syamsuddin, Iqbal Assegaf, Ruhut Sitompul, dan lainnya.

Menurut pemeriksaan di TGPF, mantan Ka BIA Zacky Makarim, konon mengatakan bahwa sebulan sebelum peristiwa Trisakti, ada perkiraan situasi intelijen versi Prabowo, yang mengatakan, eskalasi meningkat dan dikhawatirkan akan ada martir di kalangan mahasiswa.

Saat itu, berdasarkan analisis situasi, Prabowo mengingatkan kemungkinan adanya eskalasi yang memanas dan kalau aksi mahasiswa meluas, bukan tidak mungkin jatuh korban atau ada pihak-pihak yang ingin ada korban di pihak mahasiswa. “Itu saya ingatkan,” kata Prabowo. Namun tuduhan berbalik pada Prabowo,

bahwa ia menjadi dalang dari tertembaknya mahasiswa. “Saya ini selalu dituduh. Apa untungnya bagi saya membuat jatuh korban?” gungatnya.

Baiknya kita merunut sejak hari-hari menjelang pertemuan itu.

Pada hari Selasa, 12 Mei, terjadi insiden penembakan mahasiswa Trisakti. Panglima Komando Operasi langsung memerintahkan keadaan siaga satu ke seluruh jajaran keamanan. Menurut Komandan Jenderal Marinir Mayjen Suharto, perubahan keadaan dari siaga tiga menjadi siaga dua lalu ke siaga satu itu diterima pada pukul 21.25 WIB. Kekuatan pengamanan terdiri atas 17 ribu anggota Kepolisian RI dan 10.364 pasukan pendamping, yang terdiri atas 5.764 pasukan lain-lain (17 unsur) serta 4.600 pasukan Kodam Jaya.

Prabowo mengaku berada di rumah ketika ditelepon Mayjen Sjafrie Sjamsuodddin tentang tertembaknya mahasiswa Trisakti. Saat itu, jam menunjukkan pukul 20.00. “Gawat nih Wo, ada mahasiswa yang tewas tertembak,” kata Sjafrie. Ia kemudian berangkat ke kantornya, Markas Kostrad, untuk menyiapkan pasukan tambahan. Malam itu, Prabowo terus memantau situasi. Saat itu ia berpikir mengenai rencana acara Kostrad di Malang pada 14 Mei 1998. “Rencananya inspektur upacara adalah Pangab Wiranto. Pangkostrad juga harus hadir. Kalau ibu kota genting, apa kita masih pergi juga?” tukas Prabowo.

Sehari sesudahnya, **Rabu, 13 Mei 1998**, upaya pengamanan keadaan yang semakin genting oleh polisi hanya berhasil sampai upacara pemakaman mahasiswa yang tewas selesai. Kerusuhan mulai terjadi di Jakarta Barat dan beberapa lokasi lainnya. Sementara itu, menurut Kasdam Jaya Brigjen Sudi Silalahi, atas perintah Pangkoops ia mengontak para panglima komando utama di Jakarta dan di luar Jakarta untuk meminta bantuan. “Saya langsung kendalikan bagaimana pemberangkatan Hercules ke Solo,

Malang, Surabaya untuk angkut pasukan ke Jakarta hingga pada tanggal 14 sudah terkumpul 13.983 pasukan dan disusun dalam SSK-SSK,” katanya kepada TGPF.

Pada hari itu, Kapolda Hamami Nata melaporkan kepada Kapolri bahwa pihaknya sudah angkat tangan. ia kewalahan menghadapi situasi amukan massa yang marah kepada aparat kepolisian karena peristiwa penembakan mahasiswa, dan sesuai dengan prosedur SK 658 Pangab maka Pangkoops mengambil alih kemudi pengamanan.

“Apabila seorang Kapolda di dalam mengendalikan wilayah dia merasa sudah tidak mampu, dengan sudah minta *backup* dan sebagainya, dia melaporkan kepada Kapolri dan ini sudah saya lakukan. Dan ini saya lakukan. Kapolri, ini situasi sudah begini. Saya kira satuan kita sudah turun dan harus diambil alih Pangab. Apa memang betul? Dua kali beliau tanya begitu,” tutur Mayjen Hamami Nata.

Pihak kepolisian mengalami kesulitan mengendalikan massa di lapangan karena merasa pasukan pendamping tidak terlalu mendukung upaya polisi membubarkan massa. Bahkan markas polisi diserbu, hingga tercatat 22 markas polisi dibakar dan dirusak. Nah, pengalihan kendali pengamanan dari Kapolda ke Pangkoops Jaya membuat Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin memutuskan memindahkan pos koordinasi ke Markas Garnisunn yang terletak bersebelahan dengan Markas Kostrad di Jalan Merdeka Selatan.

Sementara itu, melihat keadaan yang semakin rusuh, Prabowo mengambil inisiatif mengontak Markas Besar ABRI dan mengusulkan agar kunjungan Wiranto selaku Pangab dan rombongan ke acara gelar Pasukan Pemukul Reaksi Cepat Kostrad (PPRC) di Malang yang dijadwalkan pada 14 Mei ditunda. “Sepanjang hari itu, saya menelepon kantornya sebanyak delapan kali dan semua jawabannya sama bahwa *the show must go on*,” aku Prabowo. Ia tidak bertemu langsung, tetapi melalui telepon ke

sekretarisnya. “Tapi keputusan akhir tetap saja berangkat,” tutur Prabowo.

Prabowo juga sempat mengontak Kolonel Nur Muis dan menyampaikan usulan agar acara di Malang ditunda. Atau, kehadiran pangab dibatalkan saja karena situasi ibu kota genting. Pikir Prabowo, dia sendiri saja yang berangkat. Namun, jawaban dari Pak Wiranto yang disampaikan lewat Kol. Nur Muis, acara tetap berlangsung sesuai rencana. “Irup tetap Pak Wiranto dan saya selaku Pangkostrad tetap hadir,” ujar Prabowo.

Sebaliknya, menurut Wiranto, Prabowo tak pernah melakukan hal tersebut. “Pernyataan bahwa saya ditelepon berkali-kali ini rasanya aneh. Setiap telepon yang masuk selalu tercatat di sekretaris pribadi atau ajudan. Kenyataannya, permintaan pembatalan itu tak ada dalam catatan,” tegasnya. Ia pun berangkat ke Malang untuk menghadiri acara serah-terima PPRC.

Konon, sudah jauh-jauh hari Prabowo memintanya memimpin upacara itu, dan ia menyatakan akan hadir. Bagi Wiranto, kepergian perwira tinggi ke Malang sudah berdasarkan pertimbangan staf. Dinilai, keikutsertaan mereka—kebanyakan perwira staf Mabes ABRI—tak akan jadi masalah karena mereka tidak terlibat pengamanan Jakarta. Apalagi, kepergiannya hanya membutuhkan waktu tiga jam.

Kendati berselisih versi, keputusan Pangab untuk tetap pergi ke Malang kendati keadaan mulai rusuh dianggap wajar oleh Kepala Pusat Penerangan ABRI Mayjen Syamsul Maarif. “Itu urusan Pangab berangkat ke Malang. Pengamanan di Ibu Kota Jakarta sudah dilimpahkan ke Pangdam Jaya sebagai penanggung jawab Kodam,” katanya.

Nah, peristiwa yang mengundang selidik itu datang pada **hari Kamis, 14 Mei 1998**. Menurut keterangan Prabowo Subianto, ia sudah berada di Bandar Udara Halim Perdanakusuma pada pukul 6 pagi bersama para pejabat teras rombongan Pangab yang ‘cukup

banyak jumlahnya'. Rombongan lalu terbang ke Malang untuk menghadiri acara yang sudah disiapkan sebulan sebelumnya itu. Sementara itu, menurut pengakuan Komandan Jenderal Marinir Mayjen Suharto, saat itu ia bersama KSAL terbang dengan helikopter untuk mengikuti upacara pemanfaatan lahan tidur TNI-AL di Jonggol, yang diadakan pukul 9 pagi.

Namun, kepulangan rombongan Wiranto dari Malang ternyata dipercepat hingga rombongan kembali mendarat di Halim sekitar pukul 12.30—dari jadwal semula pukul 14.00. “Dipercepat pulangnya karena sewaktu kami di Malang, kami dengar telepon-telepon ke Pangab di ruang VIP tentang kerusuhan di Jakarta,” kata Prabowo.

Sesampai di Jakarta, Prabowo menyatakan langsung menuju ke Markas Kostrad dan melihat ada helikopter Pangkoops di helipad Makostrad (Markas Garnisun tidak memiliki helipad-*pen*). Ia lantas bertemu dengan Sjafrie di Markas Garnisun, kemudian diajak terbang dengan helikopter dan menyaksikan berbagai aksi pembakaran sudah terjadi. Prabowo pun kembali ke Markas Staf Komando Garnisun (Skogar).

Setelah itu, ia berangkat ke Kantor ICMI di Gedung Departemen Agama untuk memenuhi jadwal pertemuan dengan Ahmad Tirtosudiro pada pukul 16.00. “Karena Pak Ahmad Tirtosudiro kan bagaimanapun Ketua ICMI pada saat itu, dan saya berharap ia dapat membantu menenangkan massa,” kata Prabowo.

Namun, Prabowo mendengar kasak-kusuk dengar dari orang-orang ICMI, Sarinah akan dibakar. STO, maka ia pun kembali ke Skogar dan bertemu Sjafrie. “Saya katakan, “Frie, Thamrin kosong. Saya dapat info sebentar lagi Sarinah mau dibakar.” Sjafrie mengatakan, “Tunggu, saya bawa pasukan ke Thamrin.”,” ujar Prabowo. Saat itu, Prabowo melihat di depan Mabes ABRI dan Dephankam banyak panser, jumlahnya sekitar 12 unit. Kemudian

ian menyarankan agar panser-panser itu dipakai patroli, agar di Sudirman-Thamrin tidak terjadi pembakaran lagi.

Saran itu rupanya diterima. Sjafric kemudian bersama Prabowo dan Muchdi membawa delapan panser untuk berpatroli hingga sekitar maghrib. Sore hari, dalam perjalanan pulang ke markas, Prabowo mendapat info ada beberapa tokoh ingin bertemu, “Saya bilang tunggu. Saya kembali ke markas, mereka sudah di sana. Pertemuan itu sangat terbuka. Saya mencoba memberi penjelasan tentang situasi. Tak ada yang aneh-aneh.” Mereka, imbuh Prabowo, ingin tahu apakah sikapnya berbeda dengan Pangab. “Tegas saya katakan, ABRI tetap kompak dan patuh pada Pangab. Saya tahu ada usaha-usaha agar TNI pecah,” jelas Prabowo.

“Waktu itu saya diliputi kegalauan mengenai maraknya tindakan anarki. Nah, waktu itu kami berdua sepakat, kita coba saja bertemu dengan Prabowo. Kita tanya saja pada dia yang waktu itu banyak rumor yang mengatakan dia adalah dalangnya,” kata Rendra lagi. Mujurnya usaha untuk bertemu Prabowo berhasil. Dan, setelah itu dia pun mengontak Adnan Buyung Nasution untuk bersama-sama datang ke Makostrad. Menjelang maghrib, akhirnya mereka sampai di tempat dan diterima Prabowo langsung.

Menurut Hashim, acara pada 14 Mei 1998 itu bukan prakarsa abangnya, melainkan Adnan Buyung Nasution. “Ini bisa dicek langsung ke Bang Buyung,” kata Hasyim. Djody juga bersikeras pertemuan itu diadakan karena Buyung meneleponnya meminta bantuan untuk bertemu dengan Prabowo. Setelah berembuk dengan Rendra, Djody pun mengontak Fahmi Idris, yang kemudian mengontak balik dan menyatakan Prabowo bersedia bertemu dengan mereka di kantornya. Maka, Fadli Zon dan Fahmi Idris, menurut Hashim, hanya bisa tiba dengan menumpang panser.

Bak *kethoprakan* saja. Saat dicek ke Buyung, ia malah langsung menampik bahwa dirinya adalah pemrakarsa dari pertemuan itu. Menurutnya, ia hadir atas undangan telepon dari W.S. Rendra.

Lepas dari siapa pemrakarsa pertemuan 14 Mei, Hashim justru santer menyerukan protes terhadap rencana TGPF menyelidiki pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan pada 14 Mei 1998 itu sangat terbuka dan melibatkan banyak orang sehingga tak mungkin menyangkut rencana makar. “Itu cuma pertemuan silaturahmi antarteman untuk menanyakan situasi terakhir,” jelas Hashim.

Jawaban Hashim ini terdengar diplomatis, tetapi janggal. Bila sekadar pertemuan silaturahmi antarteman untuk menanyakan situasi terakhir, kenapa mesti hadir secara fisik dari pagi hingga larut malam, padahal situasi di luar begitu genting. Dan prajurit-prajurit Kostrad sangat ditunggu-tunggu bantuannya. “Saat itu saya tak punya wewenang komando atas pasukan. Saya tak begitu mengerti mengapa bisa begitu. Yang jelas, Sjafrie memberi tahu saya, polisi telah menarik pasukannya sekitar 100 kompi,” tutur Prabowo.

Namun, penjelasan Prabowo mengenai ditariknya pasukan sejumlah 100 kompi dari lapangan ini menuai kontra dari Wiranto. “Tidak pernah ada. Saya tidak pernah tahu. Gila apa menarik pasukan dalam keadaan gawat begitu? Silakan tanya Kapolri. Tak ada perintah dari Pangab untuk menarik atau mengurangi pasukan,” tegasnya. Yang benar, menurut Wiranto, jumlah aparat keamanan tak sebanding dengan massa yang turun ke jalan.

Selain pasukan di lapangan kosong, di ibukota waktu itu bertiup isu akan terjadinya kudeta militer untuk membentuk junta. Kerusuhan itu sendiri dilihat sebagai upaya menciptakan situasi darurat sehingga ada alasan untuk pembentukan kekuasaan ekstra konstitusional baru. Maka, wajar jika TGPF bertanya penuh selidik, “Situasi sedang panas, kok kumpul-kumpul di situ?” kata Garuda.

Nah, apa sebenarnya yang istimewa dari pertemuan itu? Barangkali karena hari itu situasi politik begitu genting. Panglima ABRI Wiranto dikabarkan sulit mengendalikan keadaan. Sedangkan Prabowo disiapkan menjadi Panglima Kopkamtib, sebagai operator Presiden Soeharto yang memegang kewenangan penuh dari MPR untuk mengamankan negara. Bila Anda juga ingat hari-hari itu, Jakarta kala itu hancur lebur dalam lautan api.

Selain ‘silaturahmi’ seperti yang diberberkan Hashim, konon pembicaraan lain dalam pertemuan itu juga menyangkut penembakan mahasiswa Trisakti. Sempat terungkap saat itu, Buyung sangat emosional saat menanyakan kasus ini. Tetapi Prabowo menjawab dengan tenang, bahwa waktu itu, bahkan Prabowo menyatakan berani bersumpah di atas Al Qur’an bahwa ia tidak melakukan, baik itu secara langsung atau tidak langsung atas penembakan yang menewaskan 4 mahasiswa itu.

Mereka-mereka yang hadir juga melakukan penilaian kritis terhadap pemerintahan Soeharto. Penilaian kritis itu secara terbuka dilontarkan. Atas penilaian kritis tersebut, pada waktu itu Prabowo mengatakan, bahwa jika rakyat menghendaki Soeharto mundur, Soeharto pasti akan bersedia mundur. “Asalkan secara konstitusional,” cerita Hasyim mengutip omongan Prabowo. Bisa jadi, lontaran ini yang membuat Prabowo kemudian dituduh merencanakan kudeta.

Akhir dari pertemuan itu sendiri, menurut Hasyim, tidak menyimpulkan apapun, atau menjurus untuk membuat suatu pernyataan, ataupun membuat konsensus tertentu. “Juga tak ada negosiasi apapun. Sebab pertemuan itu intinya hanya sekadar sumbang saran saja,” kata Hashim. Pertemuan kemudian diakhiri dengan makam malam di Makostrad itu juga. Setelah selesai, menurut Hasyim, Prabowo kemudian bergegas menuju ke rumah kediaman Gus Dur di Ciganjur, juga untuk melakukan silaturahmi.

Bisik-bisik di belakang, pada hari yang sama, Prabowo dituding menyiapkan pasukannya. “Prabowo sudah siap dengan pasukannya? Untuk apa, menyiapkan pasukan untuk apa? Merebut kekuasaan? Kenapa saya tidak melakukan? Anda tahu, sebagai Panglima Kostrad, saya punya 34 batalion. Katakanlah saat itu saya punya dukungan 10 batalion dari Kopassus, itu sudah 44 batalion. Tambah lagi belasan batalion dari Kodam Jaya dan Siliwangi. Saat itu, mungkin ada 70 lebih batalion yang akan ikut saya, kalau hal itu saya lakukan. Tapi, coba pikir. Kok saya tidak melakukan (hal itu),” tukas Prabowo, geram.

Usai pertemuan itu, Prabowo menghadiri rapat paparan keadaan oleh Pangkoops di Markas Garnisun, yang dihadiri oleh Pangab serta para pejabat teras militer lainnya. Dalam pertemuan itu, menurut Prabowo, Pangab menanyakan ke Pangdam Jaya sebagai Panglima Komando Operasi (Pangkoops), “Apakah Anda masih bisa mengendalikan keadaan?” Sjafric bilang masih. Akhirnya kembali ke soal teknis, misalnya soal pembagian sektor. Marinir pegang sektor selatan, Kostrad, Kopassus pegang yang lain.

Saat itu, Wiranto juga menanyakan kesanggupan Kapolda dan Pangdam Jaya untuk tetap melakukan pengendalian langsung di lapangan. Kalau tidak mampu lagi, komando akan ditarik Wiranto ke atas. Tetapi, mereka menyatakan kesiapannya. Saat itu juga Wiranto memutuskan menambah jumlah aparat ke Ibu Kota, berasal dari Marinir dan Kostrad Jawa Timur, dengan jaminan informasi intelijen Jawa Timur dalam keadaan terkendali.

Di akhir rapat, Pangab menawari para peserta untuk memberikan usulan. Menurut Mayjen Suharto, hanya dia dan Prabowo yang menanggapi tawaran itu. Prabowo mengusulkan agar Jakarta dibagi dalam beberapa sektor, dan tanggung jawab sektor diberikan kepada satu unit kesatuan. Suharto mengusulkan agar semua kendaraan lapis baja dikeluarkan untuk memperkuat efek pasukan keamanan. Setelah rapat bubar, Prabowo berpatroli dan dengan ditemani Ketua GP Ansor Iqbal Assegaf ia sempat

berkunjung ke rumah Ketua PBNU Abdurrahman Wahid sekitar pukul 1 subuh.

Sehari sesudah pertemuan itu, pada hari Kamis, 15 Mei 1998, keadaan mulai dapat dikuasai oleh pihak keamanan. Presiden Soeharto tiba di Jakarta dari kunjungan ke Kairo, dua hari lebih cepat dari jadwal semula. Toh, pertemuan di Makostrad ini tidak pernah ada cerita kelanjutannya. Soalnya, tersandung langkah kompromi pemerintah Habibie untuk tetap baik hati dengan keluarga Cendana saat itu.

Kudeta 22 Mei 1998

Bila tuduhan ‘kudeta’ lengket di tubuh Soeharto saat menggulingkan Soekarno melalui Supersemar pada tahun 1966, isu serupa juga terjadi sama pada Prabowo yang dituduh berniat menggulingkan BJ Habibie pada tahun 1998.

Dalam sebuah pidato di depan peserta Forum Editor Asia-Jerman II di Istana Merdeka, Habibie membeberkan soal ‘kudeta’ yang diupayakan oleh Prabowo.

Habibie mengatakan, sehari setelah pelantikannya sebagai presiden, 22 Mei 1998, ia bertemu Jenderal Wiranto. “Dia mengatakan pada saya bahwa pasukan di bawah komando seseorang yang namanya tidak disembunyikan lagi, Jenderal Prabowo, sedang mengonsentrasikan di beberapa tempat, termasuk di rumah saya. Kemudian sebagai Panglima Tertinggi, saya perintahkan tarik pasukan ke barak. Saya tanya Wiranto, apakah perintah saya itu baik. Ya, itu baik, Pak, jawab Wiranto.”

Beberapa kali Habibie melukiskan suasana tersebut. “Tidak usah ditutup-tutupi, kita tahulah yang memimpin konsentrasi pasukan itu, orangnya Prabowo Subianto,” kata Habibie berapi-api.



Prabowo Subianto, Wiranto, dan BJ Habibie. Mereka pernah saling berseteru.

Dalam wawancara dengan koran *Inggris Sunday Times*, 8 November 1998, Habibie menyebutkan, “*My house was surrounded by two lots of troops. One, the ordinary troops responsible to General Wiranto who ordered a cordon to protect me and one lot belonged to Kostrad, responsible to Prabowo.*” Saat itu, Prabowo belum genap tiga bulan menjabat Panglima Kostrad dan pangkat Letnan Jenderal, promosi dari posisi sebelumnya, Komandan Jenderal Kopassus.

Pidato ini kontan menyulut kontroversi. Bantahan segera datang dari Prabowo, yang saat itu masih berada di Amman, Yordania. Melalui kawan-kawannya, Farid Prawiranegara, Fadli Zon, dan Ahmad Soemargono, ia menyampaikan surat yang dibebaskan dalam konferensi pers di Hotel Regent.

Surat itu isinya menyatakan bahwa pengerahan pasukan yang berada di bawah komandonya pada 12-22 Mei 1998 dilaksanakan sesuai prosedur. “Semua itu dilaksanakan sepenuhnya di bawah Panglima Komando Operasi Jaya, yaitu Pangdam Jaya. Dan semua pengerahan pasukan pun dilaporkan kepada komando atas.”

Prabowo menjelaskan, pada rapat malam hari di Mako Garnizun Ibu Kota, 14 Mei 1998, Wiranto memerintahkan Panglima Kostrad membantu mengamankan objek-objek vital di Ibu Kota. Sementara, Komandan Korps Marinir membantu

mengamankan kedutaan asing, serta Danjen Kopassus membantu mengamankan presiden dan wakil presiden.

Dalam suratnya, Prabowo kemudian menantang, "... mungkin perlu dilakukan pengecekan langsung pada puluhan perwira dan ratusan prajurit yang ditempatkan di Ibu Kota, terutama yang mengamankan presiden dan wakil presiden ... apa perintah yang telah mereka terima, siapa yang memberikannya, dan sebagainya."

Lewat tantangan itu, otomatis 'durian' jatuh mengarah ke muka Wiranto. Terang-terangan Prabowo menyatakan bahwa Wiranto mengetahui, bahkan memerintahkan seluruh gerakan pasukan, termasuk ke rumah Habibie. Sampai di sini, orang pun berspekulasi, "Adakah maksud tersembunyi di balik laporan Wiranto, sehingga Prabowo tersudut, lantas tersingkir dari percaturan politik yang 'dikuasai' Habibie?"

Tetapi selang dua hari setelah pidato Habibie itu, Wiranto membantah ucapan Habibie dalam sidang di Komisi I DPR RI. Menurutnya, itu bukan konsentrasi pasukan, melainkan konsolidasi. Tak ada yang berniat kudeta saat itu.

Anehnya, Habibie tak bereaksi atas bantahan Wiranto itu. Sehingga publik makin bingung, mana yang benar, ucapan Habibie atau Wiranto. Benarkah Habibie dapat masukan dari Wiranto? Sebab dalam satu pertemuannya dengan tokoh Dewan Dakwah Islamiyah, 30 Juni 1998, Habibie mengaku diberi tahu soal konsentrasi pasukan itu oleh Letjen TNI Sintong Panjaitan, orang dekat Habibie yang kini menjabat Sesdalopbang.

Toh, bantahan Wiranto cukup menenangkannya. "Pak Wiranto harus membantah karena memang apa yang diucapkan Habibie tidak benar," kata Prabowo. Menurutnya, semua panglima saat itu menerima perintah dari Mabes ABRI. Saat situasi genting, ada pembagian tugas, bahwa Kopassus dipasrahi mengawal presiden dan wakil presiden, sedangkan Kostrad diminta menjaga objek vital dan strategis.

Prabowo kemudian menambahi, untuk melaksanakan perintah Mabes ABRI itulah sejumlah pasukan berada di sekitar kawasan Istana dan Monas. “Pak Wiranto tahu persis bahwa perintah itu ada. Saksinya banyak, para panglima komando,” kata Prabowo.

Pers asing bahkan sempat memberitakan bahwa ketika itu Wiranto dan Prabowo sedang adu banyak pasukan. Di atas kertas pada hari-hari pertama kerusuhan, Prabowo memiliki lebih banyak pasukan ketimbang Wiranto. Mengingat keadaan yang gawat itu maka Wiranto terpaksa mendatangkan pasukan dari Jawa Timur. Baik dari Marinir, Kostrad maupun Brawijaya. Bahkan ada cerita yang mengatakan, pelaut-pelaut ALRI pun diberi seragam Marinir supaya Marinir dari Surabaya itu tampak banyak jumlahnya.

Prabowo yang didukung Kodam Jaya, Kostrad Cilodong, Kopassus Cijantung, Solo dan Cimahi serta Marinir Cilandak, belakangan mendapat bantuan Siliwangi. Namun Prabowo yang sempat bertahan di Cijantung dengan sebagian pasukan Kopassus dan Kostrad, akhirnya menyerah. Tapi ia minta agar Johnny Lumintang yang menggantikannya. Pangkostrad dicopot dan digantikan oleh Pangdam Siliwangi Djamari Chaniago. Sementara perwira ketika itu sempat mendesak Wiranto agar Prabowo langsung dihukum di lapangan karena membahayakan dan menentang perintah atasan. Tetapi permintaan itu ditolak Wiranto.

Nah, kejadian yang sebenar-benarnya tentang apa yang terjadi di kediaman Habibie ini hanya mereka berdua yang tahu. Toh, keduanya membeberkan versi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pernyataan yang paling mencolok adalah ungkapan Habibie yang merasa kedatangan Prabowo adalah ancaman kekuasaan baginya, sementara Prabowo merasa tindakannya adalah bentuk dari pengamanan kenegaraan.

Coba kita telisik satu per satu menurut versi mereka.

22 Mei, versi Habibie

Ingatan Habibie mencatat, di ruang kerja Presiden, saat itu Pangab Jenderal Wiranto tengah berjumpa dengan Habibie. Habibie memberitahu Jenderal TNI Wiranto bahwa posisinya tetap sebagai Menhankam/Pangab, sama sewaktu Kabinet Pembangunan VII. “Terima kasih Bapak Presiden,” ujar Wiranto seperti dikutip Habibie.



Mantan Presiden BJ Habibie.

Setelah mengucapkan terima kasih, Jenderal Wiranto langsung meminta setelah mengucapkan terima kasih, Jenderal Wiranto langsung meminta untuk berbicara dengannya. “Bolehkah saya bicara sebentar,” tutur Habibie mengulangi permintaan Jenderal TNI Wiranto. “Dia (Wiranto -*pen*) mengatakan pada saya bahwa pasukan di bawah komando seseorang yang namanya tidak usah disembunyikan lagi Jenderal Prabowo sedang dikonsentrasikan di beberapa tempat, termasuk di rumah saya (presiden),” paparnya. Untuk itu, Wiranto mohon petunjuk.

Nah, dari laporan tersebut, Habibie berkesimpulan bahwa Pangkostrad bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Pangab. “Pangab, sebelum matahari terbenam, Pangkostrad harus sudah diganti dan kepada penggantinya diperintahkan agar semua pasukan di bawah komando Pangkostrad harus segera kembali ke basis kesatuan masing-masing.” Sebagai Panglima Tertinggi (Pangti), Habibie memerintahkan Jenderal Wiranto untuk menarik pasukan

Prabowo ke barak. “Saya tanya Wiranto: ‘Apakah perintah saya itu baik?’ Wiranto pun menjawab: ‘Ya, itu baik, Pak’.”

Meski Prabowo mengidolakan dirinya, konon Habibie merasa jengah dengan desakan Prabowo yang ingin eksklusif menemuinya. Sebab, sebelumnya Habibie sudah sepakat dengan Menhankam/Pangab Wiranto bahwa setiap ada anggota ABRI yang ingin menemuinya, harus seizin atau sepengetahuan Pangab. Dan, setelah Prabowo masuk ke ruangnya dan melihatnya tanpa membawa senjata, Habibie pun merasa puas. “Hal ini berarti pemberian ‘eksklusivitas’ kepada Prabowo tidak dilaksanakan lagi,” tulis Habibie, di bukunya.

Dialog antara keduanya pun segera terjadi dan dilakukan dalam bahasa Inggris. “Ini penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya Presiden Soeharto. Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrad.” Habibie menjawab, “Anda tidak dipecat, tapi jabatan Anda diganti.” Prabowo balik bertanya, “Mengapa?”

Habibie kemudian menjelaskan bahwa ia menerima laporan dari Pangab bahwa ada gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan, dan Istana Negara. “Saya bermaksud mengamankan presiden,” kata Prabowo.

“Itu adalah tugas Pasukan Pengamanan Presiden yang bertanggung jawab langsung pada Pangab dan bukan tugas Anda,” jawab Habibie. “Presiden apa Anda? Anda naif?” jawab Prabowo dengan nada marah. “Masa bodoh, saya presiden dan harus membereskan keadaan bangsa dan negara yang sangat memprihatinkan,” jawab Habibie.

“Atas nama ayah saya, Prof Soemitro Djojohadikusumo dan ayah mertua saya Presiden Soeharto, saya minta Anda memberikan saya tiga bulan untuk tetap menguasai pasukan Kostrad,” kata Prabowo.

Habibie menjawab dengan nada tegas, “Tidak! Sampai matahari terbenam Anda sudah harus menyerahkan semua pasukan

kepada Pangkostrad yang baru. Saya bersedia mengangkat Anda menjadi duta besar di mana saja!” “Yang saya kehendaki adalah pasukan saya!” jawab Prabowo. “Ini tidak mungkin, Prabowo,” tegas Habibie.

Ketika perdebatan masih berlangsung seru, Habibie kemudian menuturkan bahwa Sintong masuk, sembari menyatakan kepada Prabowo bahwa waktu pertemuan sudah habis. “Jenderal, Bapak Presiden tidak punya waktu banyak dan harap segera meninggalkan ruangan.”

Percakapan itu terekam dalam buku yang dilansir Habibie dan sempat mengundang rasa panas dari kubu Prabowo.

Konon, sore hari itu Prabowo memang mendatangi Habibie di istana. Namun, entah karena merasa akrab atau alasan lainnya, Prabowo menolak meletakkan pistolnya saat akan menghadap Habibie. Tentu saja Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) melarangnya menemui presiden. Prabowo pun marah besar. Paspampres yang keder melihat ledakan amarah Jenderal berbintang tiga itu segera mengontak Jenderal Wiranto. Walhasil, Wiranto menginstruksikan Paspampres agar Prabowo ‘diamankan’, karena dapat membahayakan keselamatan presiden.

Akhirnya, Kopassus diusir dari sekitar Istana oleh pasukan Marinir. Saat itu, Wiranto meminta Mayjen Marinir Soeharto, Komandan Marinir untuk mengusir pasukan Kopassus dari sekitar Istana dan rumah Habibie. Mayjen Soeharto bukan orang asing bagi Prabowo karena mereka berdua pernah tinggal dalam satu kamar di Seskogab Bandung, ketika keduanya menjadi siswa sekolah komando itu.

Konon, saat itu Wiranto bertanya apakah Soeharto berani menghadapi pasukan Prabowo. Dan Soeharto pun menjawab, “Berani. Kami sendiri ingin menunjukkan kepada Kopassus, coba siapa yang lebih unggul sekarang, mereka atau Marinir.” Pasukan

Marinir kemudian memang bergerak menuju Istana dan pasukan Kopassus akhirnya mengundurkan diri.

Menurut Habibie, pasukan Kostrad dan mesin perangnya yang dikonsentrasikan di beberapa lokasi strategis kawasan ibukota negara, menyulitkan pengendalian pasukan oleh Jenderal Wiranto. Habibie dilapori Wiranto soal konsentrasi pasukan Prabowo yang tak jelas maksudnya itu. Nah, dengan pengakuan Habibie ini, sebenarnya secara hukum, Prabowo sudah bisa dikenai tuduhan percobaan makar atau bahkan subversif.

Pernyataan Habibie ini pun mengundang beragam spekulasi. Saat itu, ada yang menebak bahwa itu adalah langkah Habibie untuk mendongkrak popularitasnya di mata masyarakat. Terutama berkaitan dengan keinginannya untuk mencalonkan diri sebagai presiden lagi.

Di luar negeri ia sempat mendapat poin lantaran mengangkat isu Timor-Timur. “Sedangkan di dalam negeri ia akan kesankan bukanlah hal yang mudah untuk duduk sebagai presiden sekarang ini. Ia ingin bilang bahwa pernah dilawan juga oleh kelompok *status quo*,” kata seorang sumber.

Spekulasi lain juga datang. Pernyataan Habibie tersebut merupakan dukungan moral terhadap langkah-langkah Wiranto untuk membersihkan Kopassus. Saat itu, sempat dikabarkan Wiranto membentuk satgas khusus yang dipimpin oleh seorang kolonel Kopassus untuk melakukan pembersihan terhadap pengikut setia Prabowo di jajarannya. Karena ada dugaan keras bahwa kerusuhan di berbagai tempat belakangan ini adalah hasil operasi pengikut Parbowo, terutama dari kelompok bekas prajurit Kopassus yang membentuk sebuah geng tentara bayaran di Cikarang.

Atas beragam tudingan dan spekulasi ini, Fadli Zon dan Farid Prawiranegara angkat bicara. Dua teman dekat Prabowo ini mengatakan, konsentrasi pasukan saat itu dilakukan Prabowo untuk mengamankan tempat strategis, bukan untuk tujuan lain. Menurut

mereka, memang ada prosedur tetap, yaitu pembagian tugas dari jajaran pasukan ABRI di bawah koordinasi Panglima Komando Operasi untuk mengamankan Jakarta. Dalam pembagian tugas itu ditetapkan bahwa pasukan Kostrad bertanggung jawab untuk mengawasi sejumlah lokasi strategis, pasukan Kopassus menjaga kediaman presiden dan wakil presiden, serta pasukan Korps Marinir yang bertanggung jawab menjaga semua kedutaan besar.

KSAD yang saat itu dipegang Jenderal Soebagyo H.S. juga menegaskan tidak pernah ada perintah pasukan TNI AD mengepung Istana dan kediaman mantan Presiden B.J. Habibie. “Semua pergerakan pasukan TNI AD pada masa transisi dari Presiden Soeharto kepada Presiden B.J. Habibie atas sepengetahuan saya sebagai pimpinan Angkatan Darat,” ujarnya.

Sebagai KSAD, kata Soebagyo, ia mendapatkan semua laporan lengkap penggunaan satuan TNI AD, sehingga semua pasukan dari Kostrad, Kopassus, Kodam Jaya, dan seluruh satuan TNI AD harus dilaporkan kepadanya. Dus, ia mengaku tidak mengerti sampai muncul istilah adanya pergerakan pasukan yang diduga akan melakukan kudeta. “Saya tidak pernah dapat laporan dari Mabes ABRI soal kudeta. Juga tidak pernah ada laporan pengepungan rumah Presiden Habibie dan Istana Presiden,” ujarnya.

Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin yang saat itu bertindak sebagai Panglima Daerah Militer Jakarta Raya dan Panglima Komando Operasi Jaya, juga menolak tuduhan yang sudah kadung dibebankan Habibie di muka pers ini. Ia kembali menegaskan tidak ada kemungkinan Prabowo Subianto melakukan kudeta terhadap Habibie. Pasalnya, saat itu tidak ada kemungkinan Prabowo mengendalikan pasukan. “Pasukan yang dia bisa kendalikan itu mungkin yang ada di barak-barak. Yang ada di barak itu mau kudeta? Kudetalah, sampai di mana bisanya?” kata Sjafrie yang kini menjabat sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan.

Menurut Sjafric, semua pasukan Kostrad berada di bawah kendalinya untuk menghadapi situasi di Jakarta, ketika huru-hara Mei 1998 dan terjadinya peralihan kepemimpinan. Sjafric mengaku waktu itu semua pasukan Kostrad disiagakan, yakni pasukan yang ada di Divisi Infanteri I Kostrad (Jawa Barat), Divisi Infanteri II Malang, dan Brigade III Kostrad di Makassar disiapkan untuk mendukung Koops Jaya.

“Jadi Koops Jaya yang meminta kekuatan. Dan kekuatan itu diberikan, serta diangkut TNI sendiri. Jadi kalau ada pasukan-pasukan yang tidak terkendali, dari mana dia datang? Naik apa? Logistiknya *gimana*? Pengendalian Koops Jaya itu solid betul. Komando kendali komunikasi dan informasi itu, logistiknya sudah di tangan kita semua. Tidak ada kemungkinan orang mau bikin kudeta,” ujar Sjafric.

Lucunya, delapan tahun usai peristiwa ini terjadi, Wiranto baru urun bicara. Menurutnya, ada kemungkinan Habibie salah paham dengan informasi yang diberikan tentang keberadaan pasukan di Istana Merdeka. Tidak menutup kemungkinan informasi itu diterima secara tidak tepat oleh Habibie sehingga menduga Pangkostrad hendak melakukan kudeta. “Bisa saja, sangat bisa,” tegasnya. Menurut Wiranto, informasi itu sebenarnya ditujukan untuk meyakinkan Habibie bahwa TNI tidak akan melakukan kudeta dan justru berupaya melindungi keselamatan negara dan pemerintahan yang sah.

Wiranto memaparkan, dari sisi teknis organisasi tidak mungkin Pangkostrad dapat melakukan kudeta. Alasannya, kudeta militer hanya dapat dilakukan oleh pemegang komando atas ketiga angkatan dan Polri. Dan kewenangan sebesar itu hanya ada di tangan panglima ABRI. “Kalau mau kudeta yang paling pantas melakukan hanya panglima ABRI,” katanya.

Rupanya, peristiwa upaya kudeta ini memberikan kesan sangat mendalam pada Habibie. Kesan itu pernah mengganggu

konsentrasinya saat membacakan pidato pada Sidang Paripurna DPR/MPR 5 Januari 1999 — pidato resmi pertamanya sejak menjadi presiden. Ketika membaca teks pidatonya, Habibie sempat berulang kali batuk-batuk dan menyeka hidungnya. Banyak media massa memberitakan presiden sakit flu dan pilek saat berpidato. Padahal, menurut sumber tadi, Habibie saat itu sehat cuma merasa terharu karena ingat pada ancaman Prabowo setelah ia menjadi presiden.

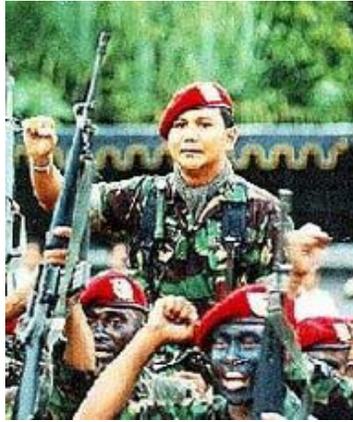
22 Mei, versi Prabowo

Lain Habibie, lain Prabowo.

Pada hari itu, Jumat 22 Mei 1998 ia mendapat laporan dari stafnya, Pataka Kostrad yang merupakan lambang kepemimpinan komando kesatuan akan diambil. Itu berarti komandan akan diganti. “Kok, tidak ada pemberitahuan kepada saya?” kata Prabowo. Prabowo mengatakan sudah menyadari dari sejarah, jika seorang pemimpin turun, semua yang dekat dengan pemimpin itu juga akan turun. “Saya punya intuisi saya akan diganti, tetapi itu biasa saja,” kata Prabowo. “Saya menjunjung tinggi konstitusi dan saya tidak mengeluh atas keputusan presiden.”



Ketenangan Prabowo dalam menghadapi masalah modal kuat sebagai pemimpin.



Mayjen. Prabowo Subianto ketika menjabat Danjen KOPASSUS.

Prabowo menggambarkan, hubungannya cukup dekat dengan Habibie ketika itu. Dia mengagumi Habibie saat menjadi Menteri Negara Ristek karena dia anggap Habibie dapat membawa Indonesia menjadi negara industri maju. “Saya ingat perkataan Habibie. ‘Prabowo, kapan pun kamu ragu, temui saya setiap waktu dan jangan berpikir tentang protokol’. Saya kenal betul dengan Habibie selama bertahun-tahun. Saya jawab oke.”

Seusai shalat Jumat sekitar pukul 14.00, dia datang dengan dua kendaraan ke Wisma Negara. Satu dinaiki Prabowo dan satu kendaraan pengawal. Dia menemui ajudan Presiden untuk minta bertemu Presiden. “Saya orangnya naif dan polos-polos saja. Kalau saya lihat sekarang, mungkin mereka tegang lihat saya datang dan saat itu banyak pengawal di sana. “Prabowo datang dengan pakaian loreng, pakai kopel, dan bawa senjata. Ia melepas kopel dan senjata karena itu etika dalam militer.

Kedatangan Prabowo ke kediaman Habibie ia hanya ingin bertanya soal jabatannya. Apalagi, waktu kejadian itu berlangsung. Habibie tengah direpotkan dengan penyusunan Kabinet Reformasi Pembangunan. “Para pengawal presiden sangat terkejut. Mungkin mereka baru saja di-briefing, saya akan datang menyerbu. Maka, saya segera memberi tahu hanya ingin menemui Pak Habibie. Paling

sekitar sepuluh menit untuk menanyakan sesuatu yang sangat mendesak...”.

Sebelum masuk ke ruangan, Prabowo menyerahkan senjatanya. “Aturannya begitu sehingga saya bukan dilucuti, tetapi perwira yang tahu aturan.” Menurut Prabowo, di kediaman Habibie ia berbuat menurut prosedur resmi. Ia menanggalkan senjata di depan pintu. “Jangankan menghadap presiden, *wong* menghadap komandan kompi saja senjata harus dicopot,” katanya.

“Tapi, saya diinformasikan mau mengadakan kudeta. Informasi itu keliru. Saya percaya ada kelompok tertentu yang menginginkan saya menjadi kambing hitam untuk menutupi keterlibatan mereka (dalam drama kerusuhan 13-14 Mei),” ungkapnya. Ia menegaskan, bohong besar berita yang mengatakan ia hendak mengancam Habibie. “Jujur saja, kalau memang saya ingin, bisa saja. Jangan meremehkan pasukan Kopassus, tempat saya dibesarkan,” tandasnya.

Toh, usai izin diberikan, ia memasuki ruangan dan Habibie segera memeluk dan mencium pipi Prabowo. Saat itulah, Prabowo bertanya pada Habibie, “*Sir, did you know I was going to be replaced today?*”

“*Yes, yes, yes...*,” begitu jawaban Habibie. “*Your father-in-law asked me to replace you. It’s best. If you resign from the army, I’ll make you ambassador to the United States.*” Sontak, Prabowo kaget, “*My God, what is this?*” Soalnya, “*In my mind, (Habibie) was still at the time fond of me but he was being fooled...*”

Tak lama, Prabowo segera meninggalkan istana, menemui KSAD Jenderal Soebagyo HS. Dalam perjalanan, dia bertemu sejumlah perwira militer sahabatnya. Tanpa diminta, mereka beramai-ramai menyatakan tekad, “Jangan khawatir, kita lawan perintah (Habibie) tersebut.” Tapi Prabowo tak menggebu-gebu. “Diam kalian, jangan membangkang perintah pimpinan.”

Prabowo juga bertemu Mayjen Muchdi PR, Komandan Jenderal Kopassus, yang sama-sama akan digeser dari jabatan. Menurut Prabowo, “Kami berdua sepakat rela digeser, tetapi mohon diberi waktu untuk bisa menumbuhkan persepsi positif di masyarakat, suasananya normal, tanpa gejolak.” Keduanya sepakat membangun persepsi bahwa pergantian Pangkostrad tersebut hendaknya tetaplah dikesankan sebagai pergantian biasa.

Usulan dari Prabowo dan Muchdi pun disampaikan pada Soebagyo saat Prabowo menyambangnya. Soebagyo pun segera memberi tahu perintah pergantian sekaligus penugasan barunya sebagai Komandan Sekolah Staf Komando ABRI di Bandung. Mendengar ini, Prabowo menolak. Menurut Soebagyo, secara pribadi penolakan tersebut bisa dia pahami karena Prabowo baru 63 hari menjadi Panglima Kostrad. Namun, dari sisi militer, penolakan tak bisa diterima.

Maka, sebagai teman, dia mengingatkan, “Wo, kalau kamu nolak, berarti kamu *nggak* menghormati pimpinan, *nggak* menghormati atasan dan seniormu. Ini semua kan bertujuan baik...” Pendekatan Soebagyo meluluhkan Prabowo. Ia pun menyatakan bersedia diganti dengan syarat jabatan akan dia serahkan kepada KSAD.

Soebagyo menyampaikan keinginan Prabowo dan Muchdi, bahwa pergantian Pangkostrad tersebut hendaknya tetaplah dikesankan sebagai pergantian biasa. Namun usulan manis tersebut ternyata tak digubris Wiranto. Prabowo memperoleh kabar dari Soebagyo bahwa Wiranto tidak mau ada penundaan penggantian Pangkostrad.

“Wiranto mengatakan penggantian Pangkostrad harus terjadi hari itu juga,” tutur Prabowo. Jumat sore menjelang magrib, serah terima jabatan Panglima Kostrad kepada KSAD berlangsung tertib, dilanjutkan pukul 19.00 di Markas Besar Kostrad, Soebagyo menyerahkan jabatan panglima kepada Johny Lumintang.

Prabowo sempat dikabarkan menyambangi Habibie di kediamannya untuk menagih janjinya soal jabatan Pangab. Kabar ini disangkal oleh Prabowo. Meski ia memang pernah dijanjikan akan menjadi Pangab oleh Habibie, tapi ia tidak pernah meminta untuk menjadi Pangab, bahkan di saat-saat genting pada 21 Mei 1998. Toh, ia tak pernah menyangkal dan menyembunyikan keinginan untuk menjadi Pangab. “Setiap prajurit, tentara, tentu bercita-cita menjadi Pangab,” ujarnya.

Sesungguhnya, lebih dari tiga kali Habibie mengatakan kepadanya. “Bowo, kalau saya jadi presiden, you Pangab.” Menurut Prabowo, itu faktanya. Habibie bahkan mengatakan pada Prabowo bahwa dia sudah dianggap anak ketiganya. “Meskipun sekarang saya kecewa karena dia menuduh saya berbuat sesuatu yang bohong. Saya merasa dikhianati,” tukas Prabowo.

Apapun yang ditudingkan padanya, Prabowo tampaknya sudah mulai kebal. “Saya kaget ada tukang jahit yang nanya, apa benar Bapak telah menodong Pak Habibie? Tapi, meski kaget, saya tidak akan menanggapi rumor-rumor seperti itu. Saya sudah kebal dengan berbagai macam rumor. Kalian tahulah dengan gosip-gosip seperti itu. Masak kita mau tanggapi,” katanya.

Karir Prabowo Habis?

“Apakah perlu saya bertemu? Apa gunanya bertemu? Letjen Prabowo menantu Presiden Soeharto. Siapa saja yang menghadap presiden tidak diperkenankan membawa senjata. Tentunya itu berlaku untuk Panglima Kostrad. Namun, bagaimana dengan menantu Pak Harto? Apakah Prabowo akan diperiksa? Apakah pengawal itu berani?” (hal 95).

Namun, setelah Prabowo masuk ke ruangnya dan melihatnya tanpa membawa senjata, Habibie pun merasa puas. Ini berarti tidak ada lagi eksklusivitas (hal 101). (Versi Prabowo,

“Saya melepas kopel dan senjata saya karena itu etika dalam militer menghadap pimpinan.”)

Keduanya lalu terlibat dialog dalam bahasa Inggris, hal (101-102): “Ini penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya Presiden Soeharto. Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrad,” kata Prabowo.

Habibie menjawab, “Anda tidak dipecat, tapi jabatan Anda diganti.” Prabowo balik bertanya, “Mengapa?”

Habibie menjelaskan, ia menerima laporan ada gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan, dan Istana. “Saya bermaksud mengamankan presiden,” kata Prabowo.

“Itu tugas Pasukan Pengamanan Presiden bukan tugas Anda,” jawab Habibie. “Presiden apa Anda? Anda naif?” jawab Prabowo dengan nada marah. “Masa bodoh, saya presiden dan harus membereskan keadaan bangsa dan negara yang sangat memprihatinkan,” jawab Habibie.

“Atas nama ayah saya, Prof. Soemitro Djojohadikusumo dan mertua saya Presiden Soeharto, saya minta Anda memberikan saya tiga bulan untuk tetap menguasai pasukan Kostrad,” kata Prabowo.

Habibie menjawab, “Tidak! Sampai matahari terbenam Anda harus serahkan pasukan kepada Pangkostrad baru. Saya bersedia mengangkat Anda jadi duta besar di mana saja!” “Yang saya kehendaki pasukan saya!” jawab Prabowo. “Ini tak mungkin, Prabowo,” tegas Habibie.

Percakapan itu rupanya membuat Prabowo jengah. “Itu insinuasikan, khayalan saja. Secara logika, kalau saya mau, tidak ada yang bisa menghalangi,” kata Prabowo dalam acara “Save The Nation” yang ditayangkan Metro TV.

Well. Begini ceritanya. Pada era Prabowo menjadi orang nomor satu di Kopassus, Jakarta dilanda berbagai aksi demo oleh kelompok

anti-Présiden Soeharto. Hingga akhirnya huru-hara itu meledak di bulan Mei 1998. Prabowo kemudian dituding sebagai aktor berbagai peristiwa penting, termasuk penculikan aktivis bandel demi mengamankan sang mertua. Ia dituding memegang tangkai 'Mawar' dari Cijantung. Namanya juga dikaitkan dengan kerusuhan di Jakarta, 13-15 Mei. Sampai-sampai secara berseloroh Pak Cum, panggilan Soemitro, mengatakan, "Orang pacaran ditimpuk hansip pun yang dituduh Prabowo." Bisa jadi, tuduhan yang bertubi-tubi dihujamkan pada Prabowo itu berlebihan. Tetapi, bisa juga benar.

Namun yang tak bisa diingkari dari posisinya sebagai perwira tinggi penting ABRI plus menantu bekas Presiden Soeharto adalah perannya yang sangat besar dalam percaturan politik di tanah air. Betapa tidak. Ia mempunyai jalur akses setiap saat kepada mertuanya, sehingga orang menyebutnya sebagai *the man who knows too much*, orang yang terlalu banyak tahu.

Nah, atas semua 'dosa politik' ini, karier militer Prabowo hanya sampai bintang tiga saja. Karier ini ditutup di usia 47 tahun, setelah 11 tahun kariernya melesat supercepat mendahului rekan-rekan seangkatannya. Meski Habibie menjanjikan bintang empat dan jabatan Pangab, itu menjadi mimpi yang hanya bisa didekap saja. Prabowo dicopot dari jabatan Panglima Kostrad, satu hari setelah Soeharto lengser. Ia dimutasikan menjadi Komandan Sesko ABRI, sebelum akhirnya pensiun dini.

"Kenaikan pangkat yang cepat dari anak saya itu sudah jelas mengundang ketidaksenangan bagi beberapa orang. Kondisi kecemburuan seperti ini sudah merupakan sifat umum dari manusia di manapun," papar Soemitro dalam sebuah wawancara dengan media asing.

Konon, pencopotan Prabowo oleh Wiranto karena Prabowo dianggap semakin berbahaya bagi 'keutuhan ABRI'. Yang menarik, Wiranto mengambil langkah ini setelah mendapat persetujuan dari mantan Presiden Soeharto. Ada yang mengatakan bahwa ini

menunjukkan Soeharto masih mempunyai kendali di kalangan ABRI, khususnya melalui Wiranto.

Soeharto agaknya bisa membaca ketidaksesuaian menantunya dengan Wiranto. Benar. Sudah sejak lama Wiranto dan Prabowo 'bermusuhan'. "Antara kami tidak ada kesesuaian. Kami tidak pernah bertugas di bagian yang sama. Kami berasal dari latar belakang yang berbeda," ujar Prabowo.

Wiranto dibesarkan di suasana tradisional daerah Jawa Tengah. Prabowo dibesarkan di luar negeri di kota-kota Eropa dan Asia. Saat Prabowo bertugas di lapangan dan pertempuran, Wiranto menghabiskan waktunya dalam pekerjaan-pekerjaan staf dan komando daerah. Setelah menjadi ajudan Suharto selama empat tahun, Wiranto naik dengan cepat dari Pangdam Jaya menjadi Panglima Kostrad. Tahun 1997, ia menjadi KSAD. Bulan Maret 1998, Suharto menjadikannya Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan.

Nah, soal pencopotan Prabowo, tidak jelas mengapa Soeharto dengan mudah menyetujui tindakan Wiranto. Bisa jadi, Soeharto menganggap Prabowo tidak dapat diandalkan untuk mempertahankan keselamatan diri dan keluarga Cendana, setelah ia tidak lagi menjadi Kepala Negara. 'Tuduhan' ini bisa terbaca dari amukan keluarga Cendana pada Prabowo.

Begini ceritanya. Usai Soeharto lengser, konon Keluarga Cendana marah besar kepada Prabowo. "Kamu ke mana saja dan mengapa membiarkan mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR?" kata Siti Herdijanti Rukmana (Tutut) dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiék), memarahi Prabowo. Prabowo dengan sengit balik bertanya, apakah ia harus menembaki para mahasiswa itu!

Nah, disinilah benang merah pergesekan antara Prabowo dan Wiranto itu bisa ditarik. Wiranto melihat peluang untuk menghempaskan Prabowo. Kabarnya Wiranto mengeluh kepada

Soeharto mengenai pergerakan Prabowo, Soeharto pun langsung ‘menginstruksikan’ agar Prabowo segera dilepaskan dari pasukan. “Copot saja Prabowo dari Kostrad!” katanya.

Wiranto tak serta merta mencopot Prabowo. Ia bertanya pada Soeharto, apa Prabowo harus dilempar ke teritorial, ke Irian Jaya, atau entah ke mana. Soeharto sontak menjawab, seraya mencibir keluarga Soemitro, “Ndak usah, kasih saja pendidikan. Bukankah keluarganya intelektual?”

Cerita lain dibalik pencopotan Prabowo adalah lantaran Prabowo mempunyai banyak sekali musuh di lapisan panglima tinggi ABRI di Markas Besar dan di Kodam-Kodam. Lebih-lebih, yang menjadi musuh dalam selimut adalah Wiranto, lantaran karier Prabowo yang menanjak dengan sangat pesat. Bersama kelompoknya, niscaya Wiranto dalam posisi terus mengintai, dan bahkan mungkin sebagai pihak yang berusaha mengambil inisiatif.

Dalam sebuah wawancara, Soemitro menegaskan bahwa ide untuk melepaskan Prabowo itu datang dari Wiranto. “Kita tahu, Wiranto dan Prabowo seperti ini (mengadu kedua kepalan tangan). Prabowo bilang, “Waduh, orang yang saya bela kok melepaskan saya dari pasukan begitu saja...”,” papar Soemitro.

Ketidakharmonisan Prabowo dan Wiranto ini memang bukan rahasia lagi. Meskipun sudah agak lama didesas-desuskan dan kerap dibantah, tetapi akhirnya muncul juga ke luar. Yaitu, pencopotan Prabowo oleh Wiranto. Bahkan, beberapa cerita tentang alasan yang dipakai Wiranto untuk menggeser Prabowo adalah Prabowo dituduh sebagai orang yang di belakang layar penembakan mahasiswa Universitas Trisakti, juga dalam pembakaran gedung-gedung di Jakarta. Motif Prabowo dalam melakukan kegiatan siluman (*undercover*) itu, kata seorang analis, adalah untuk mendiskreditkan Wiranto, sehingga Panglima ABRI itu bisa dianggap tidak becus mengamankan kota-kota dari penjarahan dan pembakaran.

Soemitro sendiri sudah mulai membaca ketidakberesan tindakan Wiranto pada masa kritis bulan Mei. Pada tanggal 14 Mei itu, Jakarta mengalami kekosongan perwira tinggi ABRI, karena Wiranto ngotot untuk memberangkatkan semua Jenderal penting ke Malang guna menghadiri upacara peralihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dari Divisi I ke Divisi II. Padahal sudah ada info bahwa akan ada kerusuhan dan Prabowo sudah pula mengingatkan untuk menunda acara itu.

Mengenai hal ini, Soemitro menilai sikap Wiranto sangatlah janggal dan menduga keras tersembunyi maksud-maksud terselubung mengapa ia “mengungsikan” para pimpinan pasukan keluar Jakarta. Sedangkan isu-isu yang mneyerang Prabowo, bagi Soemitro, adalah propaganda hitam yang dijalankan para pembenci anaknya itu.

Dalam bukunya yang berjudul Bersaksi di Tengah Badai, Wiranto menampik tudingan-tudingan tersebut. Ia mengatakan, tidak pernah berpikir untuk mengganjal laju karier Prabowo. “Karena itu, ketika Dewan Kepangkatan dan Karier bersidang dan mengusulkan Pak Prabowo menjadi Pangkostrad, saya setuju,” paparnya. Kemudian, lanjutnya, mengenai pemecatan terhadap Prabowo, bukan dikarenakan rivalitas yang diisukan itu. Pembebastugasan Prabowo, ujanya, ditempuh selaku Pangab melalui prosedur persidangan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang anggotanya 15-an perwira tinggi bintang tiga dan empat.

Dus, usai DKP mengkaji selama sebulan soal keterlibatan Prabowo dalam penculikan aktivis dan mengusulkan kepada Pangab supaya Prabowo diberhentikan dari dinas militer. “Saya paham, Dewan ini sudah bersidang dengan susah payah selama sebulan dan orang-orangnya telah berpengalaman. Maka, saya ‘acc’ (setuju),” jelasnya. Seperti putus asa atas pemberitaan-pemberitaan miring terhadap dirinya, “Jadi, berhentilah mempolemikkan rivalitas saya dengan Pak Prabowo,” ujar Wiranto.

Cerita penjurangan Prabowo secara sistematis oleh kubu Wiranto terus berlanjut. Awalnya sebuah pernyataan pers dari markas angkatan bersenjata, setelah terjadinya kerusuhan, yang mendukung sikap organisasi massa NU. Tahu sendiri, sebelumnya NU menyatakan supaya Presiden Soeharto mundur dari jabatan. Membaca surat itu, Soeharto meminta Prabowo melacak dari mana asal surat yang tidak ditandatangani itu. Anehnya, tak ada satu pun perwira tinggi mengaku telah membuat surat itu.

Meskipun menurut Prabowo, kopi faksimili surat itu diperolehnya dari kantor Kapuspen ABRI, Brigjen A. Wahab Mokodongan. Belakangan, setelah Soeharto mundur, keluarga Cendana justru menyalahkan Prabowo. Ia dianggap pengkhianat. Pasalnya, banyak laporan sampai ke telinga Soeharto yang mengatakan bahwa Prabowo dan Habibie, beberapa waktu sebelumnya, telah mengadakan pertemuan berkali-kali.

Ada juga laporan bahwa Prabowo melakukan pertemuan pada 14 Mei dengan Adnan Buyung Nasution dan sejumlah tokoh lain. Hal ini diartikan sebagai upaya terencana untuk menyingkirkan Soeharto. Dengan demikian, segala kesalahan pun ditumpahkan ke mukanya -termasuk pernyataan pers misterius itu.

Prabowo mengaku, ia memang sempat bertemu Habibie setelah terjadinya kerusuhan. Namun, menurutnya, konteks pertemuan itu bukanlah untuk merebut kekuasaan, melainkan 'untuk membicarakan cara terbaik menenangkan kekerasan'. Secara logis, Prabowo merasa tidak mempunyai motif apa pun untuk merebut kekuasaan. "Saya adalah bagian dari rezim Soeharto. Seandainya Soeharto bertahan tiga tahun lagi saja, saya sangat mungkin berpangkat Jenderal berbintang empat. Mengapa saya harus menyulut kerusuhan?" tanyanya.

Dari ceritanya, tampak sekali bahwa Prabowo ingin menunjukkan diri sebagai korban yang terperangkap dalam situasi yang merugikan. Pertama, ketika kerusuhan terjadi, Wiranto tidak

berada di ibukota. Dengan sendirinya, karena Prabowo dan Sjafrie Sjamuddin yang waktu itu menjabat sebagai Pangdam Jaya berada di Jakarta, merekalah yang dianggap paling bertanggungjawab atas keamanan. Kedua, meskipun sudah meminta mandat, Wiranto sebagai Panglima tidak berbuat apa-apa.

Di sini terkesan pula, Prabowo ingin mengatakan bahwa seharusnya Wiranto yang bertanggungjawab. Memang, sejumlah pertanyaan muncul, mengapa Wiranto bersikeras membawa sejumlah perwira tinggi pada 14 Mei 1998? Siapa yang bertanggungjawab atas pembuatan pernyataan pers militer tentang Soeharto? Lalu, mengapa Panglima TNI membiarkan mahasiswa terus berada di Gedung DPR/MPR sampai Soeharto jatuh?

Prabowo tak langsung menjawabnya. “Saya harus adil pada Wiranto. Ia memang menginginkan reformasi, namun ia juga punya ambisi-ambisi politik,” ujarnya diplomatis.

Serangkaian tudingan telah menutup karier Prabowo sebagai Pangkostrad. Jabatan Pangkostrad kemudian diserahkan dari Prabowo kepada pejabat baru, Mayjen TNI Johnny Lumintang. Prabowo selanjutnya memegang jabatan sebagai Komandan Sekolah Staf Komando (Dansesko) ABRI menggantikan Letjen TNI Arie J Kumaat. Tidak seperti biasanya dalam acara serah terima jabatan Pangkostrad, upacara militer saat itu berlangsung sangat sederhana dan tertutup tanpa kehadiran wartawan.

Sebelumnya, Prabowo merasa diperlakukan tidak adil kala dipaksa menyerahkan jabatan sebagai Pangkostrad. “Saya tak sempat membuat memorandum serah terima jabatan. Istri saya, ketua Persit pun, tak sempat serah terima. Setahu saya, dalam sejarah ABRI, belum pernah ada perwira tinggi dipermalukan oleh institusinya, seperti yang saya alami,” kata Prabowo.

Soal pemecatan ini, Prabowo tak menuntut pada institusinya. Di satu sisi ia tak ingin mencemari institusi ABRI, khususnya TNI AD. Di sisi lain, ia menghormati Soeharto sebagai Jenderal bintang

lima. Baginya, ini adalah persoalan dilematis. “Bagaimanapun dia kakek dari anak saya, walaupun dia kemudian membenci saya. ...” ujarnya.

Henggang dari Cendana

Keruwetan semakin menjadi-jadi. Seperti saat malam sebelum pengumuman lengsernya Soeharto, Prabowo menelepon ayahnya. “Saya dikhianati,” katanya. “Papi nggak percaya kalau saya bilang, saya dikhianati oleh mertua. Dia bilang kepada Wiranto, dingkirkan saja Prabowo dari pasukan,” tambah Prabowo. Prabowo belakangan diberhentikan sama sekali dari masa kedinasannya setelah Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai KSAD Jenderal Soebagyo HS memberi sanksi sehubungan dengan dengan kasus penculikan yang dilakukan Tim Mawar Kopassus, antara bulan Februari 1998 hingga Maret 1998.

Sementara Prabowo merasa dikhianati Keluarga Cendana, Keluarga Cendana justru merasa Prabowo lah yang mengkhianatinya.

Konon, empat hari sebelum Soeharto mundur, ketika mahasiswa menduduki Gedung DPR-MPR, Prabowo ditanya oleh salah seorang anak Soeharto. Pertanyaannya: mau diapakan mahasiswa bila mereka terus berdemonstrasi. Jawabnya, mereka tak bisa ditembak. Lalu, apa solusinya? Prabowo mengatakan, presiden mesti mengundurkan diri. Kemungkinan kedua, presiden harus melakukan kompromi sedikit dan harus ada perubahan ke arah reformasi. “Itu yang dianggap sebagai pengkhianatan oleh Keluarga Cendana,” tegas Soemitro, mengomentari tuduhan pengkhianatan puteranya.

Pada 20 Mei 1998, diluar kediaman Soeharto, Mayor Jenderal Kivlan Zen, bekas Kepala Staf Kostrad itu berada di kelompok Prabowo bersama sejumlah Jenderal lain. Ketika ribuan mahasiswa

menduduki gedung parlemen, ia mengaku menggalang sejumlah organisasi massa pro-Soeharto untuk merebut kembali gedung parlemen dari tangan mahasiswa. Hanya saja, massa ini batal beraksi karena Soeharto mundur lebih cepat.

Menurut pengakuan Kivlan, ia berusaha mati-matian mencegah demonstrasi yang digalang Amien Rais, Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, pada 20 Mei di kawasan Monas. Kemudian ia memerintahkan pasukannya membawa peluru tajam untuk menghadang massa. “Saya sempat meminta Prabowo menemui Amien agar membatalkan niatnya. Jika tidak, dia bisa ditembak anak buah saya atau saya tangkap,” ujar Kivlan yang membeberkan kisahnya pada majalah *TEMPO*.

Kivlan pula yang mengatur agar tank dan panser ditempatkan di pusat kota. “Lindas mereka yang memaksa masuk Monas dengan tank!” ujar Kivlan kepada pasukannya saat itu. Namun, aksi sejuta orang di Monas urung dilakukan. Sementara itu, nasib Soeharto sebagai presiden kian terdesak ke tubir jurang.

Selepas magrib di hari yang sama, Prabowo yang masih mengenakan pakaian tempur loreng menemui Habibie di Patra Kuningan. “Pak, kemungkinan besar Pak Tua akan turun,” katanya. Habibie menyatakan siap menggantikan Soeharto. Dari Kuningan, ia melajukan kendaraannya menuju Cendana. Prabowo mengira bakal mendapat pujian karena sudah menggagalkan demonstrasi. Nyatanya, yang dia dapatkan adalah “kejutan”. Di ruang keluarga, Soeharto sedang duduk bersama Wiranto dan putra-putri Cendana. Ia dianggap pecundang di depan keluarga istrinya.

Yang pertama berdiri adalah putri bungsu Suharto, Mamiek. “Mamiek melihat saya, kemudian menudingkan jarinya seinci dari hidung saya dan berkata: “Kamu pengkhianat!” Dan kemudian “Jangan injak kakimu di rumah saya lagi!” Jadi, saya keluar. Saya menunggu. Saya ingin masuk. Saya katakan saya butuh penjelasan. Istri saya menangis.” Setelah itu, Prabowo pulang.

Soeharto cenderung lebih percaya kepada Wiranto. Bahkan, menjelang kejatuhannya, Soeharto menggenggam dua surat di tangan. Isinya, instruksi pembentukan Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional. Satu surat dia sodorkan kepada Jenderal Wiranto, Panglima ABRI merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan. Satunya lagi dia ulurkan ke Soebagyo.

Soeharto mewanti-wanti Wiranto saat surat berpindah tangan, “*Mbok menowo mengko ono gunane*—siapa tahu kelak ada gunanya,” sumber *TEMPO* yang hadir di ruangan menirukan ucapan Soeharto dalam bahasa Jawa. Melalui surat itu, Wiranto dilimpahi wewenang sebagai Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional. Kedudukan ini memberi dia kekuasaan hampir tak terbatas untuk menjaga ketertiban negara.

Penanggalan hari itu 20 Mei 1998, menjelang tengah malam. Senyap meliputi scantero Jalan Cendana 10, Jakarta Pusat kediaman pribadi keluarga Presiden. Soeharto duduk. Wajahnya pias. Bahunya luruh. Dia berkata dengan pelan, “Saya sudah bicara dengan anak-anak. Saya akan mundur besok agar tidak ada korban lebih besar,” ujar sumber *TEMPO* yang menirukan ujaran Soeharto.

Wiranto kemudian mengeluarkan secarik kertas dari saku. Rupanya ia sudah menyiapkan catatan. Orang kepercayaan Soeharto itu berkata, “ABRI akan melindungi semua mantan presiden beserta keluarganya.” Soeharto mengangguk. Melihat hal itu, Siti Hediati Harijadi meneteskan air mata di sudut ruangan. Putri Soeharto sekaligus istri Prabowo itu menangis dengan suara tertahan. Di ruangan itu juga hadir Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Mayor Jenderal Endriartono Sutarto.

Semua pilar kekuasaan yang dia bangun sejak 12 Maret 1967 runtuh. ABRI yang disangkanya akan berada di pihaknya untuk mendukungnya, ternyata mangkir. Golongan Karya, kekuatan politik utama yang selama bertahun-tahun menopangnya, telah berpaling.

Tak hanya itu saja. Empat belas menteri meninggalkan dia. Mereka adalah Ir Akbar Tanjung; Ir Drs AM Hendropriyono SH, SE, MBA; Ir Ginandjar Kartasasmita; Ir Giri Suseno Hadihardjono MSME; Dr Haryanto Dhanutirto; Prof Dr Ir Justika S. Baharsjah M.Sc; Dr Ir Kuntoro Mangkusubroto M.Sc; Ir Rachmadi Bambang Sumadhijo; Prof Dr Ir Rahardi Ramelan M.Sc; Subiaktio Tjakrawerdaya SE; Sanyoto Sastrowardoyo M.Sc; Ir Sumahadi MBA; Drs Theo L. Sambuaga; dan Tanri Abeng MBA.

Melalui Kolonel Sumardjono, mereka membikin sepucuk surat yang kemudian disebut-sebut sebagai Deklarasi Bappenas. Alinea pertama surat itu, secara implisit meminta agar Soeharto mundur dari jabatannya. Perasaan ditinggalkan, terpukul, telah membuat Soeharto tidak mempunyai pilihan lain kecuali memutuskan untuk mundur. Soeharto benar-benar tidak menduga akan menerima surat seperti itu. Persoalannya, sehari sebelum surat itu tiba, ia masih berbicara dengan Ginandjar untuk menyusun Kabinet Reformasi. Ginandjar masih memberikan usulan tentang menteri-menteri yang perlu diganti, sekaligus nama penggantinya.

Dan yang lebih aneh lagi adalah sikap Harmoko, yang saat itu memegang posisi amat penting sebagai Ketua DPR/MPR. Dulu, ketika menjabat Menteri Penerangan selama tiga periode kabinet, ia dikenal sebagai Soehartois sejati, yang selalu mengawali ucapannya dengan begini, "Atas petunjuk Bapak Presiden..." Tapi kini, memimpin lembaga tertinggi negara yang mewakili kedaulatan rakyat, Harmoko tak cuma bisa memanggil Soeharto dengan sebutan "Saudara Presiden". Ia seolah-olah berubah rupa menjadi reformis sejati dan bisa juga memberikan ultimatum: Jumat 22 Mei adalah batas waktu Soeharto mengundurkan diri.

Sikap mbalelo Harmoko itu agaknya bukan sikap pribadi. Soalnya, sebelumnya ia sudah menggelar rapat dengan fraksi-fraksi DPR. Nah, bila Soeharto mengabaikan tenggat waktu yang diberikan, Harmoko akan segera menggelar Sidang Istimewa MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden baru. Padahal, Soeharto

juga punya agenda sendiri untuk mengantar proses suksesi secara mulus. Kamis lalu, ia membentuk komite reformasi, yang ia pimpin sendiri.

Arus balik itu tampaknya ada pemicunya, yakni pernyataannya sendiri sewaktu menghadiri KTT G-15 di Kairo. Di depan masyarakat Indonesia di Mesir, Soeharto menyatakan, kalau memang rakyat tidak menghendaki dirinya sebagai presiden, maka ia siap mundur.

Sebelum pertemuannya dengan Wiranto dan Soebagyo, Soeharto juga mengumpulkan putra-putri dan kerabatnya. Sementara Titiek dan Mamiek menangis selama pertemuan, Bambang Trihatmodjo sempat bertanya kenapa ayahnya tidak mundur sesuai dengan jadwal. Tutut, anak sulung keluarga Cendana, membuka suara, “Sama saja, besok atau lusa Bapak harus mundur!”

Jadwal yang dimaksudkan Bambang adalah skenario awal mundurnya Soeharto yang telah disampaikan mantan presiden itu kepada keluarganya. Yakni, mengumumkan pembentukan Komite Reformasi pada 21 Mei, merombak kabinet pada 22 Mei. Dan, lengser pada 23 Mei.

Nyatanya, pada pukul 23.00 WIB, Soeharto memerintahkan ajudan untuk memanggil Yusril Ihza Mahendra, Mensesneg Saadillah Mursjid, dan Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Soeharto sudah berbulat hati menyerahkan kekuasaan kepada Wapres BJ Habibie. Bahkan, Wiranto sampai tiga kali bolak-balik Cendana-Kantor Menhankam untuk menyikapi keputusan Soeharto. Wiranto perlu berbicara dengan para Kepala Staf Angkatan mengenai sikap yang akan diputuskan ABRI dalam menanggapi keputusan Soeharto untuk mundur. Setelah mencapai kesepakatan dengan Wiranto, Soeharto kemudian memanggil Habibie.

Dua puluh menit sesudahnya, Yusril bertemu dengan Amien Rais. Dalam pertemuan itu, Yusril menyampaikan bahwa Soeharto bersedia mundur dari jabatannya. Yusril juga menginformasikan bahwa pengumumannya akan dilakukan Soeharto 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB.

Pada Margaret Scott, wartawan yang sempat bercakap-cakap informal dengannya, Prabowo bercerita ia merasa bagaikan menjadi anak kaisar dalam film Kurosawa berjudul *Run*, sebuah adaptasi drama *Shakespeare King Lear*. Dialah satu-satunya yang loyal tapi justru dianggap punya niat menjatuhkan presiden.

‘Dosa-dosa’ Prabowo semakin dilegitimasi dengan terbentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menginvestigasi terjadinya kerusuhan Mei 1998. Dalam laporannya, TPGF menyimpulkan, peristiwa penculikan para aktifis HAM berhubungan erat dengan kerusuhan Mei 1998. Hal yang menurut Prabowo lebih merupakan opini ketimbang fakta. Munir, Ketua Kontras pun mengakui ada perbedaan mendasar antara peristiwa penculikan aktifis dengan kerusuhan Mei. Katanya, peristiwa Mei merupakan gerakan dari elit untuk perubahan politik. Sementara peristiwa penculikan, merupakan konspirasi untuk mempertahankan kekuasaan?

Lantaran nama Prabowo diseret-seret dalam penyelidikan tersebut, media dalam dan luar negeri pun mulai menghubungkan namanya dengan kata-kata seperti ‘dalang’, ‘kejam dan liar’, ‘fanatik yang haus kekuasaan’. Bahkan sebuah harian Asia pun menulis, “Menurut kabarnya, ia membenci bangsa Cina.” Keyakinan bahwa Prabowolah yang memulai beragam kerusuhan tersebut dan tidak berhasil mengendalikannya telah tercatat dalam buku-buku sejarah. “Saya monster di balik segalanya,” kata Prabowo.

Khianat-mengkhianati ini, mengingatkan kita pada cerita dua legenda Jawa tentang apa yang terjadi bilamana seseorang menikahi putri raja. Ia bisa menjadi seperti Jaka Tingkir, yang membunuh

mertuanya dan mendirikan kerajaan baru. Atau ia bisa mengikuti jejak Ageng Mangir, yang mencoba merebut kekuasaan raja lain dan akhirnya tewas.

Hashim Wahid, pengusaha yang mengenal Prabowo sejak taman kanak-kanak pernah bertanya padanya sambil bercanda, “Kamu mau jadi siapa? Jaka Tingkir atau Ageng Mangir?” Jawaban yang diperoleh Hashim dari Prabowo di luar dugaannya. “Ia membanting pintu dan tak mau berbicara lagi dengan saya selama 12 tahun.”

Pusaran Konflik Makin Kencang

Hubungan menantu dan mertua nyatanya tak selamanya baik-baik saja. Saat tenang-tenang ada di Yordania, sebuah kabar mampir di telinga Prabowo. Soeharto sakit pada pertengahan tahun 1999.

Juru bicara Prabowo saat itu, A Soemargono yang juga Ketua Partai Bulan Bintang, menegaskan bahwa konflik antara Prabowo dan mertuanya sudah sangat serius. Karena itu, kemungkinan Prabowo datang untuk menjenguk Soeharto yang tengah terbaring di RS Pertamina Jakarta sangat kecil. Bahkan, bisa dipastikan, jika Soeharto meninggal dunia, Prabowo tidak akan datang. “Saya kira sulit bagi Prabowo bisa datang ke Indonesia. Apalagi, hanya untuk urusan menjenguk mertuanya,” tegas Soemargono.

Menurutnya, konflik Prabowo itu sebenarnya bukan hanya dengan Soeharto, tapi juga dengan anak-anaknya. “Prabowo itu kan tidak punya hubungan genetik dengan Soeharto. Karena itu, dugaan saya, sampai Pak Harto meninggal pun, Prabowo tak akan datang,” imbuhnya. Prabowo merasa sulit datang ke Indonesia, tambahnya, juga karena adanya kekhawatiran akan menjadi sasaran tembak dari lawan-lawan politiknya.

Menurut Soemargono, yang juga dikenal sebagai teman dekat Prabowo, siapa pun akan bisa merasakan bagaimana sakitnya Prabowo. “Bayangkan, yang selama ini merasa menolong Soeharto

malah dituduh sebagai pengkhianat. Ini kan tuduhan yang sangat menyakitkan. Padahal, apa yang dilakukannya selama ini untuk menyelamatkan Soeharto,” tegas Soemargono lagi.

Sebuah sumber pernah mengungkapkan, sesaat setelah terjadinya kerusuhan 14 Mei 1998 keluarga Cendana mengadakan rapat. Dalam pertemuan itu, Prabowo diusir keluar oleh salah seorang anak Soeharto dan dituding sebagai pengkhianat. Tudingan itu jelas membuat Prabowo sakit hati. Namun, menurut Soemargono, selain berbagai tudingan itu, Prabowo juga sulit untuk datang ke Indonesia karena adanya kekhawatiran akan menjadi sasaran tembak dari lawan-lawan politiknya.

Soemargono bilang, yang lebih mengerikan bukan hanya ancaman fitnah, tapi juga ancaman fisik. Jadi, terlalu besar risikonya kalau Prabowo datang ke Indonesia. “Karena itu, daripada membuat masalah, lebih baik Prabowo tenang-tenang saja di luar negeri,” tandas Soemargono.

Tapi, bukan Prabowo dan Soeharto saja yang menjadi kian tidak harmonis. Keluarga Cendana sudah mulai terlihat berantakan sejak kematian Ibu Tien Soeharto pada 28 April 1996. Saat itu, kalangan istana menyebut Ibu Tien meninggal dunia akibat serangan jantung. Hanya saja, publik lebih mempercayai kematian Ibu Tien masih diliputi misteri yang ditutup rapat-rapat.

Apalagi, banyak orang Jawa percaya bahwa hoki Soeharto ada pada Ibu Tien. Sejarawan Onghokham pada tahun 2001 pernah bilang, “Ketika Soeharto naik (berkuasa), orang percaya bahwa istrinya memiliki wahyu, dan siapa pun yang bersatu bersamanya akan mendapatkan wahyu. Setelah kematiannya, orang mulai berpikir wahyu telah hilang.” Bisa jadi kepercayaan itu ada benarnya. Belum genap dua tahun Ibu Tien meninggal, Soeharto lengser pada 21 Mei 1998.

Setelah itu, satu per satu masalah menjadi sahabat terdekat di keluarga ini. Soeharto disebut sebagai ‘diobok-obok’ oleh generasi

penerusnya. Padahal, selama ia berkuasa, keluarga orang nomor satu di Indonesia dipandang berwibawa dan nyaris tak tersentuh oleh masalah sedikitpun baik di bidang politik, hukum, bisnis, hingga konflik rumah tangga. Sejak itu, bukan hanya anak-anak Soeharto saja yang mulai memanen masalah keluarga maupun bisnisnya, tetapi juga menantu-menantu dan para kroninya.

Si sulung dari dalam Cendana, Sigit Hardjojudanto, misalnya, diperiksa oleh Kejati Sumut pada 12 September 1998 dalam masalah kredit bermasalah Rp 200 miliar yang dikeluarkan Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara (BPDSU). Sigit juga pernah diperiksa polisi pada November 2000 dalam kasus kaburnya Tommy Soeharto. Pada 14 Februari 2001, Sigit diperiksa empat jam oleh Kejaksaan Agung dalam kasus KKN pada Proyek Kilang Minyak Balongan, di Indramayu. Istri Sigit, Elsyce Sigit, juga pernah berurusan dengan polisi. Elsyce diadukan ke polisi oleh rekanan bisnisnya, Stephanus Setiawan, menilap uang Rp 20 miliar pada awal 2002.

Sebagai anak kedua, Mbak Tutut paling sering tampil di depan publik. Dia sering menjadi juru bicara keluarga. Dalam kasus hukum, Mbak Tutut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pipanisasi Pertamina di Jawa pada 23 Februari 2001. Mbak Tutut juga pernah diperiksa Kejagung dalam kasus korupsi proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) bagian selatan, Pondok Pinang-Kampung Rambutan dengan tersangka Djoko Ramiadji. Suami Mbak Tutut, Indra Rukmana, juga tak luput dari pemeriksaan aparat Kejagung dalam kasus JORR tersebut pada Oktober 2001.

Anak ketiga Soeharto, Bambang Trihatmodjo — akrab dipanggil Bambang Tri —, juga pernah diperiksa oleh Kejagung pada awal April 2001 sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Kanindotex. Pada September 1998, bahkan Bambang beserta seluruh jajaran komisaris dan Direksi Bank Andromeda dilarang keluar negeri dengan cap sebagai bankir bermasalah.

Tahun 2006, nama Bambang Tri sangatlah moncer. Dia menjadi bulan-bulanan *infotainment*. Hal ini bermula dari beredarnya gambar mesra dirinya dengan artis Mayangsari. Setelah itu, Mayang diketahui hamil tujuh bulan. *Infotainment* menguber-uber pasangan ini hingga sang jabang bayi lahir. Setelah lahir, wartawan melupakan Bambang-Mayang, hingga meledaklah peristiwa penyerangan terhadap rumah Mayang pada 21 Mei 2006, tepat sewindu lengsernya Soeharto dari tampuk kekuasaan.

Istri Bambang Tri adalah Halimah Agustin Kamil. Perempuan ayu ini tidak pernah diperiksa oleh penegak hukum dalam kasus apa pun sebelum 21 Mei 2006. Namun kini Halimah berstatus tersangka perusakan dan dikenai pasal 170 KUHP.

Anak keempat Soeharto adalah Siti Hediati Hariyadi alias Mbak Titiek. Mbak Titiek pernah diperiksa tujuh jam oleh penyidik Mabes Polri pada November 2001 terkait kaburnya Tommy Soeharto. Nama Mbak Titiek jarang disebut-sebut dalam kasus hukum.

Namun, ia menjadi buah bibir dalam hubungannya dengan Prabowo, pria yang memberinya seorang anak. Hubungan Mbak Titiek dan Prabowo disebut-sebut retak menjelang kejatuhan Soeharto pada 1998. Meski tidak ada berita resmi tentang perceraian mereka, namun media massa kini menyebut Mbak Titiek tanpa embel-embel Prabowo di belakang namanya.

Adik Titiek, Tommy Soeharto, kisahnya bagaikan melihat ikan di dalam akuarium kaca, gamblang. Mulai kasus pembunuhan Hakim Agung yang membuatnya dibui 10 tahun, pengakuan Sandy Harun dan Lina Banjarani yang punya anak dengan pembalap itu, hingga gugatan cerai Tata yang telah memasuki masa sidang.

Si bungsu keluarga Cendana adalah Siti Hutami Endang Adiningsih yang akrab disapa Mbak Mamiek. Dia jarang muncul di depan publik. Namun seperti sejumlah kakaknya, pernikahan Mamiek dengan Pratikno Singgih juga berakhir dengan perceraian.

Jangan dikira, carut marutnya keluarga Cendana ini tak hanya menjadi konsumsi masyarakat dalam negeri. Tokoh sekaliber Lee Kuan Yew (mantan perdana menteri yang kini menjadi menteri senior Singapura), juga pernah mengomentari anak-anak Soeharto ini agar mereka jangan menyalahgunakan posisi mereka guna memperoleh keuntungan keuangan dan bisnis. Ia menuliskannya dalam buku riwayat hidup Lee Kuan Yew, *From Third World to First: The Singapore Story* yang diterbitkan pada tahun 2000.

“Kelakuan anak-anak ini akhirnya ikut menyumbang kejatuhan ayah mereka,” ujar Lee dalam bukunya itu. Namun, bekas menteri senior Singapura ini mengatakan dibandingkan dengan mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos, dia tidak melihat Soeharto sebagai seorang yang brengsek (*crook*). Ia bilang, ia bertemu dengan dua putri Soeharto saat puncak krisis keuangan Asia tahun 1997 dan 1998 untuk memberi tahu gejolak yang sedang dialami Indonesia berkaitan dengan nilai rupiah yang terus melemah.

“Khawatir atas melemahnya kurs rupiah yang begitu cepat, saya kontak duta besar kami di Jakarta guna meminta Tutut jika dia dapat bertemu dengan saya di Singapura untuk menyampaikan pesan saya kepada ayahnya,” ujar Lee dalam bukunya sebagaimana dikutip *The Sunday Times*. Pertemuan dengan Tutut berlangsung hari Natal tahun 1997, juga dihadiri PM Singapura Goh Chok Tong. “Saya tegas-tegas mengatakan kepadanya dan juga saudara-saudaranya agar memahami bahwa *fund manager internasional* di Jakarta memfokuskan perhatian pada perlakuan ekonomi khusus yang dinikmati mereka,” ujarnya.

Lee kemudian menyampaikan kepada Tutut, hal terbaik dalam masa krisis ini adalah jika mereka sepenuhnya mundur dari pasar dan tidak ikut-ikutan dalam berbagai proyek baru. Pada kesempatan itu Lee juga bertanya secara terbuka kepada Tutut, apakah dia bisa menjamin bahwa pesan ini bisa dipahami oleh saudara-saudaranya. Tutut pun kemudian menjawab secara jujur bahwa ia tidak bisa.

Lee mengaku terus mengirim laporan pasar harian dari para analis di Singapura menyangkut Indonesia kepada Tutut. Tujuannya, untuk menilai berbagai tindakan dari anak-anak Soeharto. “Namun hal ini tidak berpengaruh pada mereka,” tambahnya.

Tak mempan dengan menyentil Tutut, Lee menjumpai istri Prabowo, yaitu Titiek pada bulan Januari 1998. Titiek mengaku datang ke Singapura atas sepengetahuan ayahnya guna menjajaki surat berharga dalam dollar AS. Pada akhirnya, menurut Lee, masalah Soeharto selain karena kesehatan yang menurun, “Juga ditambah oleh berbagai gangguan yang muncul akibat anak-anaknya yang ikut dalam berbagai kontrak yang menguntungkan dan monopoli.”

Lee dalam bukunya ini juga menjelaskan konteks di mana mantan Presiden Soeharto harus menuruti anak-anaknya. Dikatakan, Soeharto melihat dirinya sebagai seorang ‘Sultan Besar dari sebuah negara besar’, dan dia yakin bahwa anak-anaknya punya hak-hak istimewa sebagaimana sistem kerajaan Jawa di Solo.

Yordania, Negeri Kedua Prabowo

Tidak ada satupun nama Prabowo yang muncul sebagai koruptor dalam sebuah institusi bisnis. Ini yang membedakan Prabowo dengan mertuanya, Soeharto. Dus, Prabowo hanya ‘habis’ di panggung kemiliteran saja. Dan Prabowo lenyap, seolah tanpa jejak. Ke mana ia pergi? Tentu saja, ke Yordania.

Mencoba untuk bersembunyi dan mencari suaka di luar negeri memang tidak pernah ditempuh oleh Soeharto. Tuduhan yang sepanas apapun, Soeharto tetap melenggang di tanah air. Bisa jadi, karena kroni Soeharto dan jejaring lawasanya di bisnis maupun pemerintahan masih tertancap di kursi kekuasaan di negeri ini. Berbeda dengan Prabowo yang ruang geraknya terbatas pada kemiliteran semata.



Raja Abdullah II dari Yordania sahabat karib Prabowo Subianto, merekapun sama-sama dari militer.

Setelah tabokan datang bertubi-tubi pada Prabowo, Soemitro menasihatinya. “Pada hari-hari yang gelap, jangan pernah berharap kepada orang yang pernah kamu tolong. Tapi akan selalu datang bantuan dari siapa saja.” Eh... benar! Ada telepon dari Amman. Pangeran Abdullah—sekarang Raja Yordania—menelepon. Dia bilang, “*What can I do? You’re my friend.*” Gayung bersambut, telepon dari Pangeran Abdullah ini kemudian menjadi tiket emas bagi Prabowo untuk terbang ke Yordania.

Benar. Garis nasib mempertemukan mereka kembali. Mereka berkenalan saat menempuh pendidikan infanteri di Amerika Serikat, yang kemudian disambung saat menjalani latihan antiteror di Jerman Barat. Hubungan dekat itu juga terus berlangsung ketika mereka kembali ke negeri masing-masing dan memegang pos komandan pasukan khusus.

Pangeran Abdullah merupakan satu dari tiga nama yang paling dijagokan mewarisi tahta Kerajaan Hasyimiyah itu. Sosoknya makin disorot pers setelah kesehatan Raja Hussein menurun drastis akibat kanker kelenjar getah bening. Abdullah adalah anak pertama dari istri kedua Raja Hussein, Antonitte Gardner alias Ratu Muna. Kans Abdullah sedikit terganjal karena alasan sepele: ia lahir dari rahim perempuan berkebangsaan Inggris, yang kemudian masuk Islam. Dari empat istrinya, Raja Hussein memperoleh 11 anak. Raja yang paling lama memerintah di kawasan Timur Tengah itu juga mengadopsi seorang putri.

Abdullah memimpin Komando Pasukan Khusus Kerajaan Yordania (RJSOC) yang sejarahnya berawal pada April 1963. Saat itu, unit penerjun yang menerima penyematan *wing* menjadi cikal-bakal pasukan khusus. Enam tahun kemudian, pada tahun 1969, terbentuklah satuan udara setingkat Batalyon Pasukan Khusus. Pasukan yang dilatih tentara Inggris itu menghadapi ujian berat perdana, tatkala pecah perang sipil di kamp pengungsi Palestina pada tahun 1970. Peristiwa itu dikenal sebagai Tragedi September Hitam.

Setahun kemudian, kekuatan pasukan ditingkatkan menjadi Brigade Pasukan Khusus, dengan tugas pokok merancang strategi pertahanan terhadap ancaman serius dari militer zionis Israel. Yordania yang berpenduduk 4 juta orang juga menghadapi ancaman potensial dari sesama negara Arab tetangganya, terutama Irak dan Suriah. Wilayah perbatasan di tepi Sungai Yordan dan Dataran Tinggi Golan menjadi daerah panas, sehingga sering dijadikan target latihan pasukan khusus.

Insiden penyerbuan Hotel Intercontinental, Amman, oleh gerilyawan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (FPLP) pada 1976 merupakan tonggak penting bak titik balik. Sejak saat itu, satuan anti-teroris digalang sebagai kekuatan inti. Konon, Pangeran Abdullah kagum dengan keberhasilan Prabowo memimpin Operasi Rajawali dalam pembebasan sandera di Mapenduma, Irian Jaya.

Mei 1996, prajurit yang dipimpin Prabowo memang berhasil membebaskan sembilan sandera yang disekap gerombolan Kelly Kwalik selama hampir empat bulan. Sukses itu mengundang banyak pujian, termasuk dari pasukan elite Israel, Inggris, dan juga Yordania.

Dua puluh tahun kemudian, RJSOC berfungsi sebagai komando payung bagi Brigade Pasukan Khusus dan Pengawal Kerajaan. Abdullah, yang berpangkat mayor Jenderal, diangkat sebagai komandannya sejak 1996. Secara struktural, komando itu mirip dengan pasukan khusus Amerika Serikat dan Inggris. Pengembangan unit operasinya, diakui Abdullah, terinspirasi oleh Kopassus ala Indonesia, tempat Prabowo pernah menjadi Komandan Jenderal.

Pasukan Khusus Yordania bertugas sebagai kekuatan strategis sepanjang pengerahan militer penuh. Misinya, menghadang serangan yang tak konvensional dan bersifat dadakan. Pasukan itu juga berperan dalam menjaga pengamanan dalam negeri dan meredam gerakan teroris. Instalasi penting kerajaan di dalam dan luar negeri Yordania turut menjadi tanggung jawabnya.

Tak pelak lagi, Unit Operasi Khusus 71 merupakan kekuatan inti. Unit itu berada di garis depan dalam menjamin keamanan domestik Yordania, sekaligus stabilitas regional yang kian rentan. Konstelasi politik kawasan Timur Tengah memang sedang goyah. Kemungkinan pecah perang besar selalu terbuka setiap saat. Serangan udara Amerika Serikat terhadap Irak bisa menjadi pemicunya. Begitu pula, peningkatan mobilisasi militer Israel dapat menggugurkan perjanjian damai dengan Palestina dan negara Arab lainnya.

Meski begitu, Abdullah konon tetap memandang Prabowo sebagai seniornya. Sewaktu prajurit Kopassus berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia, Mount Everest, Pangeran Abdullah

mengikutinya dengan antusias. Ia terharu ketika mendengar cerita bahwa suara takbir diteriakkan pertama kalinya dari situ.

Kedatangan Prabowo ke Yordania, negeri antik yang berjulukan 'Philadelphia Abadi' dan menjadi lanskap film Indiana Jones, rupanya berlangsung tanpa pengawalan ketat atau protokoler. Layaknya Prabowo yang lebih senang bergaya informal, Pangeran Abdullah juga biasa menyetir mobilnya sendiri. Pada hari dan jam yang ditentukan (sekitar pukul satu siang), Prabowo berkunjung ke markas tentara pimpinan Pangeran Abdullah.

Namun Prabowo mendapat hadiah kecil dari Abdullah. Untuk menyambut kehadirannya telah disiapkan upacara penyambutan tamu secara militer. Padahal Prabowo datang mengenakan busana kasual. Oleh anak buah Pangeran Abdullah, Prabowo 'dipaksa' menginspeksi pasukan. Di ujung barisan, Pangeran Abdullah tampak tersenyum-senyum dan memeluk Bowo. "Di sini, Anda tetap Jenderal," bisik Abdullah.

Selama di Yordania, konon Prabowo ditawarkan untuk bermalam di salah satu istana kerajaan. Tetapi Prabowo menolak. Ia lebih memilih tinggal di apartemen yang berdinding batu gurun warna abu-abu ketimbang berada di istana Pangeran Abdullah. Saat berangkat ke Yordania, Prabowo bahkan sempat dikabarkan mengusung empat stafnya. Istrinya, Siti Hediati Harijadi atau Titiek, tidak ikut besertanya. Ia memilih tinggal di Amerika Serikat untuk menemani puteranya yang belajar di sana.

Ia pun jatuh cinta pada Yordania tanpa sengaja. "Saat saya disingkirkan oleh ABRI, oleh elite politik di Indonesia, negeri ini menerima saya dengan baik," kata Prabowo.

Sementara Prabowo berada di jazirah Arab ini, ada sejumlah tudingan yang dialamatkan padanya dari tanah air. Misalnya, Prabowo diisukan melatih pasukan khusus di Yordania. Ada yang menduga, ia menjadi semacam penasihat. Ada pula yang berspekulasi bahwa Prabowo melatih unit elite dari pasukan khusus

itu. “Kalau Yordania ingin minta pelatih asing, ngapain mesti mendatangkan dari Indonesia? Kita saja mendatangkan pelatih dari Barat. Jadi, Yordania langsung mengambil dari sumbernya sana,” kata seorang sumber yang namanya ogah muncul di majalah *Gatra*.

Sesungguhnya tak ada yang aneh bila Prabowo berada di luar negeri. Ini bukan pertama kalinya ia berada di luar Indonesia. Hanya saja, kepergian Prabowo kali itu terasa ‘istimewa’ karena ia berada di mancanegara saat sejumlah kasusnya sedang disorot. Tunjuk saja. Kerusuhan Mei tengah diselidiki, dan perkara penculikan juga tengah bergulir di pengadilan. Apalagi, tak sedikit orang-orang yang menyeret-nyeret nama Prabowo dalam dua kasus besar di dalam negeri itu.

Ada pula yang mengabarkan bahwa Prabowo lewat PT Tirtamas yang dimiliki Hashim Djojohadikusomo lebih tertarik dengan kegiatan ekspor. Karet, kopi, dan rempah-rempah, misalnya, merupakan komoditi yang amat dicari di sana. Yordania merupakan pintu terbuka menuju seantero Timur Tengah, bahkan bisa menembus pasar Eropa dan Asia Tengah.

Kegiatan Prabowo memang tak terpantau. Resminya, Prabowo mengatakan merintis bisnis keluarganya di bidang perdagangan umum. Dari teman-temannya di Jakarta, bahkan sempat tersiar kabar bahwa Prabowo sedang menjajaki bisnis minyak di sana. Wajar saja. Memang, selama ini, Kerajaan Yordania mengimpor 4,8 juta ton minyak dari Mesir dan Irak. Namun, April lalu, Pemerintah Yordania mengumumkan ditemukannya cadangan minyak di bagian utara negeri itu.

Yang pasti, negeri yang luasnya tiga perempat Pulau Jawa itu makmur karena pariwisatanya. Negeri ini kaya akan peninggalan sejarah, bahkan dari zaman 3.000 tahun lalu. Yordania juga kaya dengan mineral fosfat. Cadangannya 1,5 miliar ton, yang membuatnya menjadi negara penghasil fosfat terbesar kelima di dunia. Pendapatan per kapita penduduk negeri itu sekitar US\$

1.500, dengan pertumbuhan ekonomi 6,5% setahun. Memang, banyak peluang bisnis di sana bagi Prabowo.

Selain ke Yordania, Prabowo juga mengasingkan diri ke Jerman. Ia bolak-balik di dua negara yang memayunginya dengan aman dan nyaman itu. Prabowo bisa aman di Jerman konon berkat jasa BJ Habibie yang turut melobi pada pemerintah Jerman. Kendati Habibie telah menuduh Prabowo hendak ‘mengkudeta’ kekuasaannya, Habibie tetap berbaik hati pada Prabowo dan menguruskan keamanannya di Jerman. “Ia beberapa kali memberi ceramah di sebuah sekolah komando angkatan bersenjata Jerman,” ujar seorang sumber.

Yang jelas, di Jerman, Prabowo tak kelihatan aktifitas bisnisnya, apalagi bagaimana mungkin seorang mantan komandan pasukan komando yang menculik saja tak becus hingga ketahuan bisa berbisnis? Namun yang jelas, Prabowo memang hidup terjamin di Jerman dan Yordania.

Bayangkan jika menantu kesayangan Soeharto itu tidak mendapat perlindungan di Jerman maupun Yordania. Taruh kata, Prabowo minta suaka di AS. Wah, belum tentu hidupnya bakal senyaman tinggal di Jerman atau Yordania. Di AS, tiap hari pasti akan ada demonstrasi orang-orang Indonesia di AS yang menentang kehadirannya.

Pada awal Oktober 1998 Prabowo juga pernah dikabarkan mencari visa untuk kunjungan biasa ke Inggris. Hanya saja, Kedutaan Inggris di Jakarta telah menolak permintaan Prabowo. Menurut seorang pejabat di kedubes tersebut, alasan Inggris menolak permintaan Prabowo adalah lantaran Inggris tidak mau dimasuki oleh orang yang sangat kuat diduga bertanggung jawab atas matinya atau hilangnya sejumlah aktivis dan rakyat tak berdosa lainnya di Indonesia dan Timor Timur.

Batal bertolak ke Inggris, toh Prabowo bisa terbang ke Yordania. Kabar keberadaan Prabowo di Yordania memang sempat

membuat pemerintah Indonesia pusing tujuh keliling. Apalagi, tersiar kabar dari harian Al-Ra'i terbitan Amman, Yordania, 12 Desember 1998, ada penganugerahan status kewarganegaraan Yordania melalui dekret Raja Hussein kepada Prabowo. Dalam terjemahan bebas, harian berbahasa Arab itu menyebutkan, "Sebuah Dekrit Raja juga dikeluarkan untuk menganugerahkan status kewarganegaraan Yordania kepada seorang warga negara Indonesia, Prabowo Subianto Kusumo."

Sebetulnya, ini tak istimewa, karena saban tahun Kerajaan Yordania memberikan status kewarganegaraan kepada siapa pun yang mengajukannya. Masalahnya, status hukum Prabowo masih dipersoalkan. Saat itu, Menkeh Prof Muladi SH dan Menlu Ali Alatas terpaksa sibuk mencari kabar keseriusan Prabowo menjadi warga negara Yordania itu.

Menkeh bahkan sudah menyiapkan senjata pamungkas. Kalau memang Prabowo resmi menjadi warga negara Yordania, dia akan dicekal. "Pencekalan itu akan dilakukan pemerintah karena status hukum Prabowo sampai sekarang belum selesai," ujar Muladi.

Yang pusing bukan hanya Muladi dan Ali Alatas saja. Mantan KSAD Jenderal (Purn.) Rudini urun bicara. Menurutnya, pemberian penghargaan pemerintah Yordania kepada mantan Pangkostrad Prabowo sebagai warga negara kehormatan adalah hal wajar dan sah. Apalagi, Prabowo sudah menjadi sipil. "Menurut saya, tidak ada yang dimasalahkan," kata Rudini.

Pasalnya, saat itu tidak ada larangan bagi Prabowo bepergian ke luar negeri. Dengan demikian, tidak ada aturan yang melarangnya menerima penghargaan dari negara lain, kecuali kalau ia kena cekal. Atau, mahkamah militer menyatakan statusnya sebagai tahanan. "Selama itu belum dikenakan, Prabowo seperti warga negara lainnya, karena tidak ada aturan hukum yang mengikatnya," jelas Rudini.

Menurut Rudini, penghargaan Yordania bisa dilihat dari dua aspek. Pertama, Prabowo mungkin dinilai banyak membantu pengembangan militer Yordania. Kedua, bisa jadi, ia ingin menjadi warga negara Yordania untuk bisa melatih tentara di sana. “Mana yang benar, saya tidak tahu,” ucap Rudini. Mungkin, imbuhan Rudini, ada kekhawatiran dari Indonesia bahwa Prabowo akan membocorkan rahasia negara. Soalnya, Prabowo pernah menempati pos-pos penting militer di tubuh ABRI. “Kalau ada kekhawatiran, mengapa Prabowo diizinkan ke luar negeri, tidak dicekal,” tanya balik Rudini.

Yang tak kalah puyeng adalah Kabidpol KBRI Yordania Feisal. Kabarnya, pemerintah Yordania sama sekali tak memberitahukan kepada KBRI tentang pemberian status warga negara kehormatan. “Kami di sini justru tahu dari Jakarta bahwa Pak Prabowo diberi status kewarganegaraan Yordania,” katanya. Karena itu, lanjut dia, pihak KBRI Yordania buru-buru mencari informasi secepat mungkin soal ini. “Saya belum bisa memberi keterangan banyak karena memang situasinya seperti itu,” papar Feisal. Toh, ia mengaku mengetahui keberadaan Prabowo di Yordania. Hanya saja, tujuan dan aktivitas Prabowo tidak diketahuinya.

Sementara itu, Kasum ABRI yang saat itu dijabat oleh Letjen TNI Fachrur Razi menyatakan, bila dipandang perlu, ABRI bakal mengusung pulang Prabowo untuk dimintai keterangan. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang jelas sehubungan dengan pemberian gelar warga negara kehormatan dari Kerajaan Yordania. Juga, tentang kemungkinan Prabowo melatih pasukan Yordania.

“Sementara kami berusaha mendapatkan informasi tentang Prabowo dari atase pertahanan kita. ABRI juga akan meminta kepala BIA untuk mengecek hal tersebut. Tetapi, bila dipandang perlu, kami akan mendatangkan Prabowo,” kata Fachrur. Tentang kemungkinan melatih pasukan Yordania, Kasum mengatakan

belum tahu secara pasti. Tetapi, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Dan, kalau itu terjadi, Prabowo tak perlu izin Pangab. Sebab, Prabowo telah pensiun.

Hashim yang juga adik kandung Prabowo menegaskan, meski telah mendapatkan gelar warga negara kehormatan dari negara lain, Prabowo takkan melepaskan status sebagai warga negara Indonesia. “Prabowo takkan melepas status tersebut dan juga tidak ada keinginan untuk eksodus atau melarikan diri ke luar negeri untuk mencari suaka,” tegasnya. “Kalau ada rumor” bahwa Prabowo dan keluarga Soemitro hengkang ke luar negeri, imbuh Hashim, “semuanya fitnah dan bohong belaka.”

Hashim menyebutkan, bila dalam beberapa waktu terakhir mereka berada di luar negeri, itu karena memang ada kepentingan khusus. Prabowo, contohnya. Ia harus berobat ke luar negeri akibat penyakit yang diderita seperti malaria, lever, dan ginjal. Nah, kepergiannya ke Yordania, selain berumrah, juga untuk bisnis di beberapa negara Timur Tengah seperti di Irak, Yordania, dan Sudan.

Menurut Hashim, Prabowo telah lapor ke Pangab dan Kassospol ABRI (sekarang Kaster) untuk bisnis yang tengah dilakoninya. “Tetapi kalau memang ada permintaan untuk kembali, Prabowo siap pulang ke tanah air,” tegas Hashim yang mengaku telah beberapa kali berjumpa dengan Prabowo di luar negeri ini.

Seruan agar Prabowo pulang ke Indonesia tak urung datang dari Wiranto, Maret 1999. Musuh politiknya ini diminta pulang untuk kepentingan klarifikasi terhadap pertemuan di Makostrad, 14 Mei 1998 sesuai rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus kerusuhan 14-15 Mei 1998. Saat itu, Prabowo memang tengah berada di Malaysia. Tetapi dalam dua-tiga hari, Prabowo bakal kembali ke Yordania.

Mabes ABRI memanggil Prabowo melalui surat panggilan. Seperti diberitakan saat itu, Ketua TGPF Marzuki Darusman

meminta pemerintah meneliti pertemuan 14 Mei 1998 di Makostrad. Dalam rekomendasinya itu, Marzuki menilai untuk menyibak kasus kerusuhan 14-15 Mei itu, pertemuan di Makostrad tersebut harus diselidiki.

Tak pulang, gugatan justru dilayangkan Prabowo ke tanah air. Saat itu, surat Presiden Habibie kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tanggal 13 September 1999 dikabarkan bocor melalui Mensesneg Muladi. Lewat surat itu, Habibie memastikan bahwa Letjen (Purn) Prabowo Subianto, mantan Panglima Kostrad sebetulnya tidak terbukti sebagai dalang peristiwa kerusuhan Mei 1998. Meski demikian, Habibie sudah telanjur menonaktifkan Prabowo dari jabatannya dan memensiunkan sebagai anggota TNI-AD. Habibie memandang, saat kerusuhan Mei 1998 Prabowo sebagai pejabat militer yang bertanggung jawab atas keamanan negara.

Nah, sebagai konsekuensinya, pemerintah telah memberhentikan dirinya dari jabatan panglima Kostrad dan memensiunkannya dari anggota TNI-AD. “Ini sangat merugikan nama baik Prabowo. Kami tengah menyiapkan pengacara untuk menggugat kembali agar nama baik keluarga, khususnya Prabowo dapat pulih kembali,” ujar Hashim.

Konstelasi politik di tanah air memang sedang berubah saat itu. Poros Tengah menguat, dan Gus Dur dijadikan Prabowo sebagai pintu masuk untuk kembali ke Jakarta. Gus Dur yang didukung Poros Tengah ini memang tengah mengancam kursi Presiden yang dikangkangi Habibie. Bersama dengan Wiranto, Habibie telah mendepak karirnya dari Angkatan Darat dan menghujannya dengan beragam tuduhan, termasuk mengepung rumahnya di Patra Kuningan.

Maka, sah-sah saja Prabowo menggunakan Gus Dur sebagai pintu masuknya pulang ke Indonesia. Dan tetap saja, di mata Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pimpinan Jenderal TNI Soebagyo,

Prabowo keliru karena teknis kemiliteran. Prabowo. Ia dianggap sering melakukan tindakan sendiri, tanpa izin dan pelaporan ke atasannya.

Nah, kalau Prabowo akhirnya tersingkir, sebenarnya karena ia tak disukai oleh sebagian besar perwira-perwira Angkatan Darat. Perangnya temperamental, dan sebagai menantu diktator, ia memegang nasib para perwira itu. Jadi, ketika sang ditaktor itu, Soeharto, lengser, Prabowo pun ikut lengser. Prabowo sendiri bukan seorang pemberani. Setelah dipecat ia justru bersembunyi di bawah ketiak Pangeran Abdullah.

Kunci untuk masuk ke Indonesia itu datang dari Gus Dur. Prabowo merasa, masa akhir kekuasaan Habibie dan Wiranto sudah dekat. Jika Gus Dur akan menjadi presiden, itulah kesempatan Prabowo untuk *come back* dan namanya akan direhabilitasi. Ia merasa sedemikian percaya diri lantaran ia merasa Gus Dur sayang padanya. “Saya dulu sering datang ke rumah Gus Dur dan memijatnya,” ujar Prabowo memberitahu soal kedekatannya dengan Gus Dur.

Konon, Gus Dur pula yang menyarankan Prabowo agar menghindari dulu di luar negeri. Saran itu terlontar dari mulut Gus Dur saat mereka bertemu di sebuah tempat di Eropa setahun sebelumnya. Apalagi, ‘orang dekat’ Prabowo, seorang mantan wartawati Kompas di Canberra, Ratih Harjono, adalah sekretaris pribadi Gus Dur.

Di saat yang bersamaan, Gus Dur saat itu tengah *running* dalam pencalonannya sebagai presiden atas jasa Poros Tengah, di mana Partai Bulan Bintang (PBB), adalah salah satu pemrakarsanya. Tahu sendiri, kawan-kawan dekat Prabowo bernaung disini. Contohnya, Faried Prawiranegara, Fadli Zon, Hartono Mardjono dan Achmad Sumargono. Kedekatan PBB dengan Prabowo, sering diledek orang dengan memanjangkan PBB menjadi ‘Partai Bentukan Bowo’.

Momentum ini, menguatnya kekuatan politik Poros Tengah, dan dominannya pengaruh Gus Dur, tampaknya membuat nyali Prabowo mengacung. Langkah pertama yang paling mungkin ya itu tadi, menggugat pemerintah. Langkah kedua, menunggu Gus Dur jadi presiden. Siapa tahu, Presiden Gus Dur nanti akan merehabilitasinya dan mengembalikannya ke jabatan terakhirnya sebagai Komandan Sesko TNI. Dari tempat ini, ia bisa ke mana saja, termasuk jadi KSAD dan siapa tahu Panglima TNI.

Nyatanya, usai Gus Dur menjadi Presiden, Prabowo tak langsung pulang. “Dia menanyakan kepada saya apakah saya (Prabowo, *pen*) sebaiknya pulang atau tetap tinggal dulu di Yordania karena dulu saya yang minta dia agar tidak pulang dahulu,” kata Gus Dur saat menceritakan pertemuannya dengan mantan Danjen Kopassus. Bahkan Gus Dur pun memberi kebebasan pada Prabowo, mau pulang silakan, atau bila mau di sana dulu juga silakan. “Kita patut memperlakukannya sebagai manusia biasa,” kata Gus Dur.

Lucu ya, keamanan dan kenyamanan justru ada di negeri orang. Toh, meski tak menuruti wejangan Soemitro agar tak terlalu berharap banyak pada orang-orang yang pernah ditolong Prabowo, ia betah berada di Yordania. Nyatanya, tanpa diminta, Abdullah dan Gus Dur bak dua lembar tiket emas untuk masuk dan keluar di Indonesia maupun di Yordania.

Sudah menjauhi negeri sendiri, Prabowo masih juga dituding-tuding. Ia dikabarkan melatih militer Yordania. Hingga akhirnya muncul selorohan jenaka, “Kini Prabowo jadi Pangab Yordania.”



Prabowo bersama GERINDRA namanya kembali berkibar.

Prabowo *facelift*

AMBISI ITU RUPANYA masih terselip di dalam diri Prabowo Subianto.

Masih ingatkah Anda, tahun 2004 lalu Prabowo sempat ikut serta dalam Konvensi Partai Golkar yang menyaring kandidat-kandidat kuatnya untuk berlaga dalam panggung pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Sayangnya, ia gagal menjadi jagoan Golkar untuk melenggang ke pentas nasional.

Namun Prabowo tak pernah menyesali usai keagalannya. “Kekalahan di Konvensi Partai Golkar itu pelajaran politik yang paling mahal. Jadi, kalau belajar di universitas saja sudah mahal, ikut konvensi itu lebih mahal. Namun, memang memberikan pengalaman riil politik,” katanya.

‘Mahalnya’ konvensi yang digelar oleh partai berlambang pohon beringin itu memberikan pelajaran bagi Prabowo bahwa komitmen politisi tidak bisa dipegang. Menurutnya, politik menjadi sangat pragmatis dan penuh transaksional. Lebih dari itu, politisi terlalu banyak mengumbar janji yang sering kali tidak bisa ditepati.

Tertempa oleh pengalaman yang tak sederhana, Prabowo pun menebalkan stamina untuk pemilu 2009. Menurutnya, keterpurukan Indonesia tidak akan cepat diatasi jika segalanya berjalan dengan biasa-biasa saja. Itu sebabnya Indonesia membutuhkan revolusi yang damai. Revolusi adalah perubahan cepat karena terdesak kondisi bangsa yang darurat. “Kalau kita puas dengan 6-7 persen pertumbuhan, 50 tahun lagi masih tetap miskin,” ujarnya.

Prabowo menilai, bangsa ini perlu menyelamatkan aset yang dimiliki dan membangun kemandirian. Tanpa itu, maka sulit untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar. “Kesehatan cuma-cuma tanpa bayar, bisa sekolah tanpa bayar, dan menyantuni fakir miskin, itu semua perintah UUD. Jadi kita sekarang harus bekerja keras, bagaimana menjalankan perintah itu,” ujarnya.

Ia yakin betul, berpolitik di Indonesia membutuhkan stamina yang kuat dan juga harus siap dibohongi. Berbagai komitmen politik yang dibuat tidak bisa dianggap sebagai keputusan final. “Selalu saja ada diskonnya. Kalau kondisi seperti ini dianggap biasa, inilah yang menggelisahkan saya. Dan, saya tidak sendiri. Rakyat juga kecewa dengan pemimpin yang terlalu banyak janjinya,” ujarnya.

Itu sebabnya, bangsa ini membutuhkan tampilnya pemimpin-pemimpin yang andal. Sayangnya, setiap kali ada calon pemimpin yang muncul selalu dicurigai hanya akan mengejar kekuasaan. “Logikanya, kalau ada yang mau maju dalam pemilihan memang untuk berkuasa. Hanya saja, kekuasaan itu akan digunakan untuk apa. Budaya curiga inilah yang sering menghancurkan kita sendiri,” tegas Prabowo.

Momen itu tiba. Dinamika politik yang bergulir empat tahun belakangan ini mencuatkan kembali ambisi terpendamnya untuk menjadi presiden.

Tak ingin terperosok di lubang yang sama, Prabowo memutuskan untuk keluar dari keanggotaannya di Partai Golkar

pada pertengahan Juli 2008. Terakhir, Mantan Danjen Kopassus ini tercatat sebagai anggota Dewan Penasihat Partai.

“Pada tanggal 12 Juli 2008, saya menghadap Bapak Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Saya sampaikan kepada beliau bahwa saya mengundurkan diri dari Golkar, baik sebagai anggota dewan penasihat dan sebagai anggota Partai Golkar,” kata Prabowo.

Prabowo bilang, Kalla menyadari bahwa ini pilihan politiknya. Ia sendiri merasa masih kurang maksimal berkiprah, menyumbangkan pikiran, dan tenaganya jika ia tetap berada di Golkar. Sebaliknya, ia akan lebih maksimal berkiprah jika berada di luar Golkar, terutama untuk mewujudkan visinya, membangun ekonomi kerakyatan.

Pertanyaan yang mengganjal pun muncul: kecewakah ia dengan garis perjuangan Golkar selama ini? “Saya katakan, saya merasa tidak maksimal berkiprah. Perasaan saya, sebagai Ketua Umum HKTI saya harus membawa pesan dan memperjuangkan pesan kaum tani. Dan sebagai anggota dewan penasihat Golkar, saya kurang maksimal berjuang untuk itu,” tandasnya.

Kendaraan anyar Prabowo adalah Partai Gerakan Indonesia Raya alias Gerindra. “Platformnya cocok dengan pandangan saya, yaitu ekonomi kerakyatan. Sekarang negara kita kok lebih kapitalis daripada negara kapitalis,” katanya. Dengan Partai Gerindra, Prabowo merasa bisa lebih optimal memperjuangkan konsep ekonomi-kerakyatan karena platform yang sangat dekat.

Namun bila menilik hubungan Prabowo dengan Gerindra, keduanya seperti bersifat simbiosis mutualistik. Lihat saja, Prabowo membutuhkan Gerindra sebagai kendaraan politik lantaran Partai Golkar tak m e m u n g k i n k a n mewadahnya. Sebaliknya Prabowo juga dibutuhkan oleh Partai Gerindra untuk ikon partai anyar dan sebagai mesin penyedot suara.



Lambang partai Gerindra

Kendati masih terbilang ‘anak kemarin sore’, namun sejumlah survei menunjukkan bahwa popularitas Partai Gerindra cukup tinggi, menyamai partai-partai peserta Pemilu 2004. Apalagi, partai ini mengantongi modal dukungan yang kuat dari dua organisasi kemasyarakatan berbasis massa besar, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI dan Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA. Masih ditambah lagi, Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), jaringan kerja Resimen Mahasiswa, dan birokrasi di sejumlah daerah.

Prabowo for President

Oktober 2008 lalu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Suhardi membenarkan, secara de facto hanya ada satu nama yang dimunculkan sebagai calon presiden yang akan diusung dalam Pemilihan Umum 2009, yaitu Prabowo Subianto. “Rapimnas menyepakati rekomendasi tentang kepemimpinan nasional yang menyetujui untuk mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon

presiden RI periode 2009-2014,” kata Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra, Prabowo yang mantan Danjen Kopassus itu telah ditetapkan dan diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Dan Prabowo mantap melenggang. Simak saja pidato politik Prabowo saat merayakan pesta satu tahun partai berlambang kepala burung garuda itu. Ia mengkritik habis-habisan hampir seluruh kebijakan pemerintahan di masa lalu. Layaknya partai dan kandidat calon presiden/calon wakil presiden lain, Prabowo menawarkan diri dan partainya akan membuat perubahan jika terpilih.

“Indonesia telah terjebak dalam perangkap pertumbuhan rendah dan utang. Dengan sistem ekonomi, pengelola negara, dan ahli ekonomi sekarang, Indonesia bakal jadi kacung tanpa harkat dan martabat di antara bangsa-bangsa lain,” ujar Prabowo.

Atas nama Partai Gerindra, Prabowo menegaskan, Indonesia sekarang tengah berada pada jalur yang salah. Dengan kekayaan alam berlimpah, kenyataannya masih banyak orang miskin, menganggur atau kehilangan pekerjaan, dan tidak mampu membeli kebutuhan pokok. Ironisnya, masih ada yang mengatakan perekonomian Indonesia sudah berada di jalur yang benar dan angka kemiskinan semakin menurun.

Prabowo juga mengkritik kebijakan pemerintahan lalu, yang menjual satu per satu aset negara dan badan usaha milik negara yang berharga ke tangan asing, sementara pemerintah terus berutang ke lembaga-lembaga donor asing setiap terjadi gejolak.

Prabowo juga mengkritik berbagai lembaga survei yang selalu menyebut perolehan suara partainya tidak lebih dari 4 persen. Dia mengingatkan para ‘tukang survei’ itu agar tidak menjual diri dan menipu bangsa sendiri.



Menurut Permadi SH, Prabowo merupakan Soekarno kecil Indonesia, dan dia lebih Soekarnoish.

Tapi Prabowo dan Gerindra tak boleh lekas berpuas diri. Di luar sana, sejumlah pengamat menilai bagaimana keduanya mengelinding dalam panggung politik pemilihan umum kali ini.

Peneliti senior CSIS, J Kristiadi, misalnya. Ia bilang, sekarang ini semua orang menjadi ahli berpidato. Apa yang diumbar pun akan dengan mudah, ibaratnya, ‘masuk telinga kiri lalu keluar telinga kanan’. Dus, kalau cuma mengkritik, semua orang bisa. Itu sebabnya, Kristiadi menegaskan, “Kalau mau konkret, coba tunjukkan cara dia dan parpolnya akan ‘menjinakkan’ legislatif sehingga dapat menjalankan seluruh kebijakan yang dia buat.”

Duh, Militer Lagi?

Baju doreng lagi, baju doreng lagi.

Tercuat di benak saya, apakah tidak ada sosok sipil yang bisa memimpin negeri ini, sehingga (masih) harus menyurungkan

purnawirawan untuk berperan besar dalam panggung politik negeri ini.

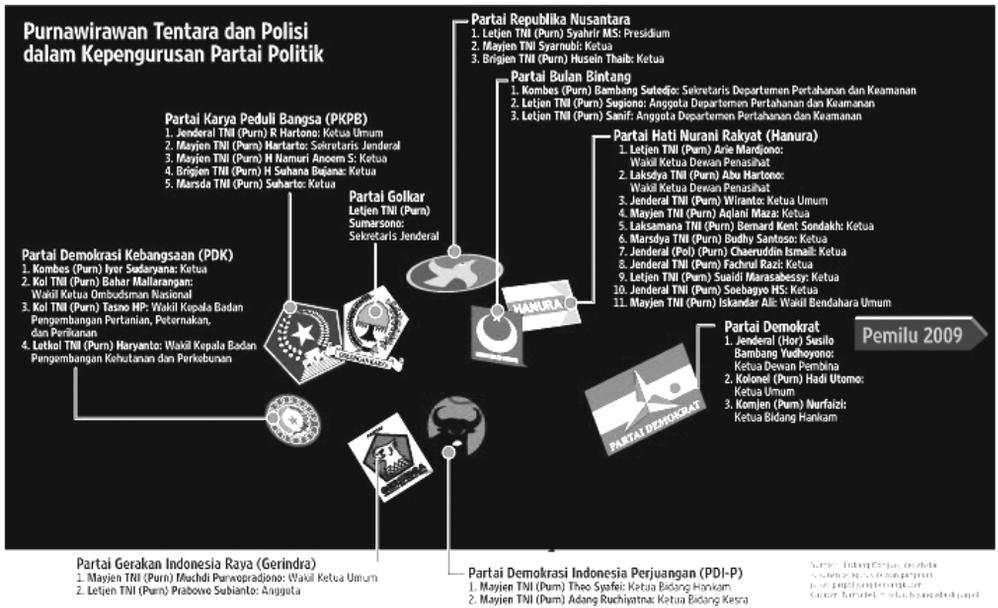
Namun, ada secuil hitungan yang menarik tentang kegaharan militer ketimbang sipil dalam memimpin Indonesia, September 2008 lalu. Hitungan ini muncul dari Peneliti Senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi.

Ia menilai, meskipun kelompok sipil sudah mendapat kesempatan luas untuk memimpin bangsa pasca-Orde Baru, kenyataannya sipil belum siap sepenuhnya. Partai politik sebagai basis pengkaderan pemimpin sipil justru gemar dan masih menggunakan cara-cara militer untuk mengkader calon pemimpinnya. “Sipil masih merasa inferior (rendah diri) terhadap militer,” katanya.

Menurutnya, kondisi ini terjadi karena masih kuatnya budaya patriarki masyarakat dan keterlambatan parpol dalam mengkader calon-calon pemimpin sipil. Pelatihan fisik dalam kaderisasi parpol justru lebih dikedepankan dibandingkan kemampuan berdebat, berdiskusi, serta menerjemahkan visi dan misi partai dalam membuat kebijakan alternatif.

Ia juga mengakui sistem pengkaderan dan pencetakan pemimpin dalam militer saat ini memang lebih baik dibandingkan yang dilakukan kelompok sipil.

http://pustaka-indo.blogspot.com



Sekadar menyegarkan ingatan saja, meski tak ingin mengumbar kesan buruk atas citra militer di kursi kekuasaan di Indonesia, sisa cerita pemilu tahun 2004 itu kemudian dikenang sebagai kebangkitan kekuatan militer. Ini bukan lantaran mereka berhak atas privelese politik, lo. Lebih dari itu, ya karena para elite politik kita keliru membaca kerinduan rakyat Indonesia atas apa yang disebut keamanan dan stabilitas.

Dus, kita bisa melihat politisi yang menggandeng tokoh-tokoh eks militer di pemilu 2004 lalu. Sebut saja, Megawati sempat melirik SBY dan Agum. Abdurrahman Wahid mengunci Wiranto dan SBY. Akbar Tandjung melirik Sutarto dan Amien Rais menyebut-nyebut SBY, Agum dan Prabowo sebagai tokoh yang bakal dipinang. Pasca-konvensi Golkar, persekutuan militer-sipil yang mungkin adalah, SBY-Kalla, Mega-Agum, Mega-Sutarto, Wiranto-Hasyim Muzadi, Wiranto-Alwi Shihab, Amien-Prabowo, Amien-Agum, atau Amien-Sutarto.

Tapi dalam dua pemilu terakhir sejak lengsernya Soeharto ini belum ada pemimpin yang mampu membaca kerinduan akan

kesejahteraan, stabilitas dan keamanan rakyat Indonesia. Sebaliknya, pemilu justru mengesankan pemerintahan yang kuat harus dipimpin seorang jebolan tentara.

Adalah hal yang penting untuk mengingat sepak terjang si empunya baju doreng alias tentara ini. Tahu sendiri, dulu hampir semua pejabat teras sipil dan militer sesuka hati memainkan kekuasaan. Jika perlu, dengan mengorbankan nyawa dan harta rakyatnya sendiri seperti yang terjadi pada bulan Mei 1998. Nah, kalau sudah begini, sebaiknya kita Jangan mau dipaksa menderita penyakit amnesia sejarah.

Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon, militer masih menjadi salah satu institusi terbaik membentuk calon pemimpin. Bahkan, sejak masa Orde Baru hingga sekarang, figur berlatar belakang militer masih banyak dilirik partai mengingat pengalaman dan kemampuan kebanyakan parpol terkait kaderisasi calon pemimpin masih rendah.

“Tambah lagi, selama 10 tahun terakhir reformasi berjalan, rakyat melihat banyak hal belum berhasil dicapai, seperti terkait kesejahteraan dan ekonomi, sehingga memunculkan kerinduan hadirnya kembali kepemimpinan yang lebih tegas dan berwibawa,” ujar Fadli.

Fadli percaya keberadaan purnawirawan dalam partai, selain dapat dijadikan sumber suara dalam pemilu, terutama dari kalangan keluarga purnawirawan, juga dapat dimanfaatkan keahlian lainnya. “Mereka juga punya jejaring dan pengalaman teritorial, yang setidaknya bisa dimanfaatkan. Jejaring itu dibutuhkan walau kondisinya sekarang sudah berbeda,” ujarnya.

Dari beberan diatas menunjukkan bahwa saat ini militer masih memiliki peran besar dalam panggung politik Indonesia. Dus, sesungguhnya tak hanya mantan Pangkostrad saja yang blingsatan menghadapi pemilu 2009 ini. Keluarga besar Tentara Nasional

Indonesia dan purnawirawan TNI juga tengah memburu figur baru kepemimpinan nasional di luar Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat ini Presiden RI.

Pergerakan keluarga besar TNI dan purnawirawan untuk mencari figur baru itu terlihat di internal PKP Indonesia yang didirikan Jenderal (Purn) Edi Sudradjat dengan nama PKP. Hanya saja, PKP Indonesia menghadapi situasi yang kritis sepeninggal Edi. PKP Indonesia yang menjadi salah satu gerbong keluarga besar TNI berpolitik kini ditinggalkan sekitar 30 persen aktivisnya. Mereka pertama-tama bukan lari ke SBY, tetapi ke figur-figur baru keluarga TNI yang lebih tegas dan cekatan.

Menurut data PKP Indonesia, 30 persen aktivisnya dari keluarga besar TNI dan purnawirawan sebagian besar beralih ke Partai Hanura yang didirikan dan diketuai Jenderal (Purn) Wiranto. Partai berikutnya yang dituju adalah Partai Gerindra di mana Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto menjadi tokohnya.

September 2008, survei yang dilakukan oleh Survei Pride Indonesia terhadap 2.068 responden menunjukkan mantan Panglima Kostrad Letjen (Purn) Prabowo Subianto sebagai tokoh militer baru yang memiliki popularitas dan elektibilitas paling tinggi. Selanjutnya disusul Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto dan mantan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Purn) Adang Daradjatun.

(Masih) Tersandung Kasus HAM

Meski bersih dari kasus korupsi, tapi Prabowo tak bisa mengelak dari kasus kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan, menjelang pemilihan umum pun Prabowo masih diburu oleh Panitia Khusus (Pansus) Orang Hilang yang dihidupkan kembali oleh DPR setelah setahun lamanya mengendap anteng. Tentu saja, langkah DPR menimbulkan reaksi pro kontra dari pihak yang disebut-sebut terkait dalam penculikan aktivis.

Untuk mengingatkan saja, penculikan ini terjadi saat Jenderal TNI (Purn) Wiranto menjabat Panglima ABRI/TNI, Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto sebagai Komandan Jenderal Kopassus, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso sebagai Panglima Kodam Jaya, dan Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Assospol Kassospol ABRI.

“Kami tidak menggali-gali, tetapi hanya mendasarkan pada rekomendasi Komnas HAM,” kata Ketua Pansus DPR Kasus Orang Hilang Effendi MS Simbolon dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Oktober 2008.

Nah, munculnya Pansus ini diduga terkait dengan persaingan politik menjelang Pemilu 2009. Bisa dimaklumi, pasalnya Wiranto kini memimpin Partai Hanura, Prabowo adalah calon presiden dari Partai Gerindra, dan Yudhoyono adalah presiden saat ini yang akan mencalonkan diri lagi pada Pemilu 2009. Mantan Panglima Kostrad Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto menilai pemanggilan Pansus Orang Hilang DPR terhadap dirinya sebagai manuver politik untuk menahan laju Partai Gerindra. “Kalau kami lihat timing-nya, tentu saja sulit tidak mengatakan ini tidak bukan manuver politik,” ujar Prabowo.

Namun, bukan hanya tokoh-tokoh kunci saja yang berangkat dengan aksi anggota dewan ini. Keluarga korban orang hilang dan lembaga pendampingnya juga tidak menghadiri undangan rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus DPR tentang Penanganan Pembahasan atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997/1998.

Sedianya, rapat itu mengagendakan penyampaian pengalaman dan harapan keluarga korban. Rapat dengar pendapat antara keluarga korban dan Pansus Orang Hilang itu dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi III DPR, Oktober 2008.

Pansus juga mengundang sejumlah lembaga yang mendampingi keluarga korban, seperti Komisi untuk Orang Hilang

dan Korban Tindak Kekerasan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, serta Setara Institute. Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan, ketidakhadirannya dalam acara itu karena Kontras sedang ada pertemuan dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri untuk membahas kasus Munir yang sudah diagendakan jauh hari.

Para keluarga korban juga telah meminta jika Pansus ingin mendengarkan pengalaman mereka, anggota Pansus dapat mendengarnya di Kantor Kontras. Keluarga korban telah menyampaikan semua pengalamannya kepada Komisi Nasional HAM serta semua pihak yang didatangi, termasuk fraksi dan komisi di DPR. “Keluarga korban tidak ingin terus mengulang apa yang sudah disampaikan sebelumnya karena akan membuka ingatan dan kesedihan atas penyiksaan yang mereka alami,” katanya.

Tak cukup kasus penculikan aktivis saja, partai yang mengusung Prabowo sebagai capresnya juga harus menghadapi rintangan lain yang tak jauh dari isu kejahatan HAM, yaitu pembunuhan aktivis HAM, Munir. Pasalnya, kasus ini ikut menyeret mantan Deputy V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono yang notabene adalah ketua di Partai Gerindra.

Tak heran, awal Januari 2009 Gerindra langsung menggelar jumpa pers usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus bebas Muchdi PR. Partai ini juga menuding bahwa sikap serta perlakuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap penanganan kasus kematian aktivis hak asasi manusia Munir selama ini dinilai janggal dan berlebihan.

Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon, selain diduga bermotif politis, reaksi yang ditujukan Presiden Yudhoyono selama ini dalam kasus tersebut dicurigai terjadi karena adanya tekanan dan intervensi asing lewat lembaga swadaya asing tertentu.

“Sejak awal kami sudah keberatan, kenapa kasus ini bisa diberi perhatian khusus dari sekian banyak kasus HAM lain, yang korban dan dampaknya jauh lebih banyak? Seperti dalam kasus Tragedi Mei 1998 kan pemerintah cuma mengeluarkan surat keputusan bersama menteri, sedangkan kalau kasus Munir kan sampai buat keputusan Presiden. Ada apa ini?” ujar Fadli.

Belum lagi, Presiden Yudhoyono sebelumnya pernah menerima langsung kunjungan Tim Pencari Fakta Kematian Munir dan malah baru-baru ini terkesan menunjukkan sikap keberatan atas vonis pengadilan terhadap Muchdi dan akan memanggil Kepala Polri dan Jaksa Agung. Seharusnya, kata Fadli, Presiden Yudhoyono bisa bersikap menghormati hukum. “Reaksi dan penyikapan yang seperti selama ini ditunjukkan kami nilai sangat aneh dan janggal sekaligus membuktikan Presiden Yudhoyono hidup dari opini,” kata Fadli.

Tapi, baik Gerindra maupun Muchdi PR tak boleh berlega hati terlebih dulu. Soalnya, putusan bebas majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Muchdi Purwopranjono tidak menyurutkan langkah Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) untuk menegakkan keadilan dalam kasus ini. Kasum justru mengajak masyarakat untuk menyampaikan masukan yang berkaitan dengan pengungkapan perkara pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM Munir.

Iklan: Mengerek Popularitas

Partai baru, calon presiden baru; keduanya menyisakan ‘pekerjaan mendongkrak imej’ yang sangat tak sederhana. Pasalnya, jika tak kerap digaungkan, maka tak banyak yang tahu Partai Gerindra ada dan Prabowo nyapres. Hukum alam masih berjalan: tak kenal maka tak sayang.

Dan keduanya pun menghiasi sejumlah media massa cetak dan elektronik. “Saya Prabowo Subianto. Indonesia adalah negara

dengan banyak kepulauan, penduduk, dan kepercayaan. Negara akan kuat bila kita bergerak satu visi, satu misi ... “

Prabowo sendiri menegaskan bahwa iklan politik di berbagai jenis media massa hanyalah salah satu sarana penting dalam berdemokrasi, terutama untuk menyampaikan pesan politik terhadap masyarakat luas. Meski begitu, pesan politik tidak lantas berhenti begitu saja dan harus diikuti dengan aksi turun ke jalan, menemui masyarakat sebagai calon pemberi suara (konstituen) dalam proses pemilihan umum mendatang.

“Sosialisasi keliling ke berbagai daerah, bertemu sejumlah kalangan masyarakat seperti petani, akademisi, seniman, semua itu juga penting dilakukan,” ujar Prabowo yang menyempatkan diri untuk menemui mantan petinggi Fretilin.

Tapi, data telah berbicara. Catatan AC Nielsen yang diliris Media Indonesia pada awal Desember 2008 tentang pengeluaran partai politik untuk iklan, menunjukkan bahwa iklan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan dukungan terhadap partai politik.

Tapi, ada catatan yang jauh lebih menarik, yaitu ongkos beriklan yang harus dikeluarkan oleh beberapa partai yang beriklan, salah satunya Gerindra. Juni 2008, Gerindra mengeluarkan dana iklan di bawah Rp 1 miliar. Namun, sejak Juli hingga Oktober 2008, biaya iklan Gerindra per bulan mencapai Rp 8 miliar. Untungnya, besarnya pengeluaran iklan ini ternyata diikuti peningkatan popularitas dan dukungan yang memuaskan.

Menurut survei Lembaga Survei Indonesia, 26 Oktober-5 November 2008, kampanye parpol lewat televisi cukup mampu menarik massa pemilih yang kurang partisan dan mengarahkan swing voter ke parpol bersangkutan. Sosialisasi secara konvensional dinilai tidak cukup efektif.

Pada Juni dukungan terhadap Gerindra yang terekam survei LSI hanya pada tingkatan 1,0 persen. Namun, dukungan terhadap Gerindra meningkat menjadi 3,0 persen dan 4,0 persen pada September dan November. Hasil survei Cirrus Surveyors Group pada November menunjukkan, dukungan terhadap Gerindra meningkat jika dibandingkan Juni lalu, menjadi sekitar 5,5 persen. Jadi, ada korelasi antara perolehan dukungan Gerindra dan pengeluaran iklan.

Tak heran Gerindra maupun Prabowo giat membikin iklan di setiap momen nasional dalam setengah tahun belakangan ini. Di Indonesia, iklan memang cukup penting; apalagi iklan televisi yang bisa menjangkau publik dalam lingkup yang begitu luas. Soalnya, ada begitu banyak jumlah *swing voters* di Indonesia. *Swing voters* adalah pemilih yang berganti-ganti pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lain. Nah, *undecided* dan *swing voters* ini yang menjadi target iklan politik.

Iklan yang dibuat oleh Gerindra, dan juga sejumlah partai lainnya, semoga hanya menjadi alat untuk mengenalkan partai anyar pada publik. Jangan lupa, politik tidak bisa dibangun dari iklan yang menyentuh indera dengar maupun penglihatan saja, tetapi harus dibangun dari bawah bersama dengan rakyat.

Publik juga harus lebih cerdas mencerna iklan partai politik. Pasalnya, iklan belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Identitas partai politik tidak mudah diperkenalkan melalui iklan di media. Lagi pula, kekuatan uang untuk beriklan di televisi bukan jaminan untuk bisa memenangi pemilihan umum.

Prabowo harus bisa menunjukkan kinerja yang sesungguhnya. Ajakan berbelanja di pasar tradisional telah mendongkrak nama Prabowo dan Gerindra, seyogianya belanja di pasar tradisional juga dilakukan oleh orang-orang Gerindra. Jika bukti telah mereka tunjukkan, ditambah dengan kinerja yang cukup baik, maka komunikasi dengan masyarakat lebih mudah dilaksanakan.

Oktober 2008 silam, pengajar ilmu manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Taufik Bahaudin, yang juga Presiden Direktur National Leadership Center (NLC), menegaskan bahwa iklan-iklan politik menjelang Pemilu 2009, termasuk pemilihan presiden periode 2009-2014, yang semakin marak di media, khususnya media elektronik, dianggap menarik dan berpengaruh besar terhadap perubahan suhu politik di masyarakat. Bahkan, iklan yang menampilkan realitas kehidupan mampu menarik perhatian masyarakat dan diperkirakan temanya mendekati realitas.

Ia memperkuat pendapatnya dengan hasil polling terhadap 2.000 orang yang diambil secara random di 200 kecamatan di 30 provinsi bersama lembaga riset Taylor Nelson Sofress (TNS) dalam dua tahap, Juli dan September.

Hasilnya menyebutkan, dalam lima besarnya, 34 persen responden pada bulan September memilih Susilo Bambang Yudhoyono, 22 persen memilih Megawati Soekarnoputri, 15 persen Prabowo Subianto, serta 4 persen masing-masing untuk Sultan Hamengku Buwono X dan Wiranto.

Untuk lima besar di partai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 25 persen, Partai Demokrat (24 persen), Partai Gerindra (13 persen), Partai Golkar (11 persen), dan 5 persen untuk Partai Keadilan Sejahtera.

Menurut Taufik, hasil polling tersebut belum menunjukkan arah Pemilu 2009. Namun, ia mengaku terkejut dengan munculnya nama seperti Prabowo Subianto bersama Partai Gerindra diminati responden. Padahal, partai tersebut masih baru dan pertama kali bertanding pada pemilu tahun depan.

Daftar Pustaka

Dunia Spiritual Socharto, Menelusuri Laku Ritual, tempat dan Guru Spiritualnya, 2007, Arwan Tuti Artha

Perang Panglima, *Siapa Mengkhianati Siapa Galang Press*, 2007, Femi Adi Soempeno-AA Kunto A

Media Massa

KOMPAS - Rabu, 28 Mar 1973 *“Rahasia” jalan cendana*

KOMPAS - Senin, 25 Apr 1994 *HUMPUSS GROUP BERISIA 10 TAHUN*

KOMPAS - Selasa, 04 Jan 1994 *ROSANO BARACK: BIMANTARA TERBUKA!*

KOMPAS - Sabtu, 08 Jun 1996 *PRESIDEN SOEHARTO 75 TAHUN*

KOMPAS - Kamis, 08 Feb 1996 *Kasus Penghinaan Presiden: BINTANG: MUNGKIN SAYA GUNAKAN ISTILAH DIKTATOR*

Femi Adi Soempeno

KOMPAS - Sabtu, 10 Feb 1996 *Presiden Soeharto: BANYAK PELANGGARAN ETIKA DALAM PERS*

KOMPAS - Kamis, 18 Jan 1996 *ISTILAH DIKTATOR DIPERDEBATKAN DALAM SIDANG KASUS SRI BINTANG*

KOMPAS - Kamis, 01 Feb 1996 *Sidang Sri Bintang: KALIMAT “SI A MENYELEWENG” TAK BERARTI MENGHINA*

TEMPO Edisi 14/03 - 6/Juni/1998 *Wawancara Christianto Wibisono: “Lima Puluh Lima Persen Harta Soeharto Untuk Negara”*

KOMPAS - Rabu, 20 May 1998 *PAK HARTO: SAYA INI KAPOK JADI PRESIDEN*

KOMPAS - Rabu, 20 May 1998 *“TAK BERSEDIA DICALONKAN LAGI”, ANGKAT NILAI SAHAM*

KOMPAS - Rabu, 20 May 1998 *DUNIA TANGGAPI PERNYATAAN PRESIDEN SOEHARTO*

KOMPAS - Selasa, 26 May 1998 *AS TIDAK BERADA DI BELAKANG JATUHNYA SOEHARTO*

KOMPAS - Selasa, 19 May 1998 *PRESIDEN TANGGAPI DENGAN TEGAR*

KOMPAS - Jumat, 22 May 1998 *PEMBAWA TONGKAT ESTAFET*

KOMPAS - Minggu, 13 Dec 1998 *MENGUASAI, TIDAK MEMIMPIN*

KOMPAS - Rabu, 27 May 1998 *“LENGSER”-NYA PAK HARTO*

KOMPAS - Minggu, 13 Dec 1998 *“LENGSER” DAN “SELEH KEPRABON”, * “Otak-atik Gathuk” dalam Kasus Soeharto*

KOMPAS - Jumat, 22 May 1998 *JAKARTA SEUSAI “LENGSER KEPRABON”*

KOMPAS - Minggu, 24 May 1998 *“PELAJARAN INDONESIA DAN PERANAN ABRI*

KOMPAS - Jumat, 14 Aug 1998 *PENUNTASAN PELANGGARAN HAM DEMI REKONSILIASI NASIONAL*

KOMPAS - Jumat, 14 Aug 1998 *MENJADI HARAPAN KITA SEMUA, PENUNTASAN MASALAH PELANGGARAN HAM*

KOMPAS - Kamis, 19 Mar 1998 *PBB CATAT TIGA KATEGORI PELANGGARAN HAM DI INDONESIA*

KOMPAS - Senin, 07 Sep 1998 *REKONSILIASI HARUS LIBATKAN FIGUR MENGAJAR*

KOMPAS - Senin, 07 Sep 1998 *Catatan Hukum Kastorius Sinaga: REKONSILIASI SEBAGAI INVESTASI PENEGAKAN HAM*

Suara Pembaruan December 11, 1998 *Pelanggaran HAM Di Indonesia*

KOMPAS - Jumat, 23 Apr 1999 *BISNIS KELUARGA SOEHARTO*

KOMPAS - Sabtu, 16 Jan 1999 *LSM DESAK KOMNAS SELIDIKI PELANGGARAN HAM OLEH SOEHARTO*

TEMPO Edisi. 03/XXIII/23 - 29 Maret 1999 *Harta Cendana Entah di Mana*

TEMPO Edisi. 03/XXIII/23 - 29 Maret 1999 *Properti Keluarga Soeharto di Mancanegara*

TEMPO Edisi. 03/XXIII/23 - 29 Maret 1999 *Buang Duit Gaya Dinasti Cendana*

Femi Adi Soempeno

KOMPAS - Senin, 08 Feb 1999 *TERJADI KEKELIRUAN
MERUMUSKAN HAM DI INDONESIA*

KOMPAS - Kamis, 08 Apr 1999 *KOMNAS HAM AKAN MILIKI
WEWENANG "SUBPOENA"*

KOMPAS - Rabu, 21 Jul 1999 *SOEHARTO DIDUGA
"STROKE" RINGAN*

KOMPAS - Kamis, 22 Jul 1999 *Soeharto Setelah Terserang
"Stroke" BELUM JELAS, KONDISINYA*

KOMPAS - Kamis, 22 Jul 1999 *SOEHARTO DATANG SEBAGAI
PASIEN*

KOMPAS - Jumat, 23 Jul 1999 *SOEHARTO MASIH
TERBARING* Kejagung Hentikan Penyelidikan*

KOMPAS - Jumat, 23 Jul 1999 *PENERBANGAN DARI
YOGYAKARTA PENUH*

KOMPAS - Sabtu, 24 Jul 1999 *SOEHARTO SUDAH BISA
BERKOMUNIKASI*

KOMPAS - Senin, 26 Jul 1999 *"STROKE" MANTAN PRESIDEN
MERANGSANG PENYELESAIAN POLITIK
PERKARANYA*

KOMPAS - Senin, 26 Jul 1999 *SELANG INFUS SOEHARTO
SUDAH DILEPAS*

KOMPAS - Kamis, 29 Jul 1999 *WAJAH SOEHARTO NORMAL
LAGI*

KOMPAS - Jumat, 08 Oct 1999 *SOEHARTO MASIH SAKIT,
TAK DAPAT IKUT PEMERIKSAAN KEJAGUNG*

KOMPAS - Minggu, 23 May 1999 *HARTA KELUARGA
SOEHARTO BISA DILACAK*

KOMPAS - Sabtu, 27 Nov 1999 *MENGADILI SOEHARTO?*

TEMPO Edisi. 03/XXIII/23 - 29 Maret 1999 *Properti
Keluarga Soeharto di Mancanegara*

TEMPO Edisi. 03/XXIII/23 - 29 Maret 1999 *Buang Duit
Gaya Dinasti Cendana*

KOMPAS - Senin, 17 Jan 2000 *SEABAD KONTROVERSI
SEJARAH*

KOMPAS - Rabu, 08 Mar 2000 *MENGAKHIRI
KONTROVERSI SUPERSEMAR*

KOMPAS - Jumat, 03 Mar 2000 *Soal Dokumen Supersemar:
SOEHARTO BISA DIDAKWA LANGGAR UUNO 7/1971*

KOMPAS - Jumat, 03 Mar 2000 *“TESTAMEN POLITIK”
HINGGA “SP 11 MARET 1966”*

KOMPAS - Senin, 11 Sep 2000 *LEE: ANAK SOEHARTO
MENGABAIKAN NASIHAT*

KOMPAS - Rabu, 16 Feb 2000 *Harkristuti Harkrisnowo: JAKSA
HARUS BENTUK TIM MEDIS SENDIRI*

KOMPAS - Jumat, 18 Feb 2000 *PROBOSUTEDJO: PAK HARTO
SEHAT, TETAPI TIDAK BISA BICARA*

KOMPAS - Selasa, 11 Apr 2000 *PEMERIKSAAN URUNG
DILAKUKAN- Karena Kesehatan Soeharto Menurun*

KOMPAS - Selasa, 18 Apr 2000 *SOEHARTO MINTA STATUS
TAHANAN KOTA DICABUT*

KOMPAS - Kamis, 11 May 2000 *JAKSA AGUNG:
PENYELESAIAN KASUS: SOEHARTO TAK BISA
DIPASTIKAN KAPAN*

KOMPAS - Selasa, 13 Jun 2000 *PENGACARA MINTA
PEMERIKSAAN SOEHARTO DIHENTIKAN*

Femi Adi Soempeno

KOMPAS - Senin, 28 Aug 2000 *Juan Felix Tampubolon: DATANG TIDAKNYA SOEHARTO TERGANTUNG TIM DOKTER*

KOMPAS - Selasa, 05 Sep 2000 *Saran Ketua Komnas HAM: HAKIM DATANGI SOEHARTO DI CENDANA*

KOMPAS - Senin, 11 Sep 2000 *SOROTAN: SURAT SAKIT SOEHARTO*

KOMPAS - Kamis, 14 Sep 2000 *SOEHARTO TIDAK AKAN HADIR*

KOMPAS - Jumat, 15 Sep 2000 *HAKIM PERINTAHKAN SOEHARTO HADIR*

KOMPAS - Kamis, 21 Sep 2000 *SOEHARTO AKAN DIPERIKSA DI RSCM*

KOMPAS - Rabu, 15 Nov 2000 *SOEHARTO SEHARIAN TIDUR DIBANTU OKSIGEN DAN INFUS*

KOMPAS - Senin, 04 Dec 2000 *PEMBANTAIAN 1965, KEKERASAN TERBESAR DAN REKONSILIASI*

KOMPAS - Senin, 04 Dec 2000 *Mengusut Kekerasan di Masa Lalu ASPEK HISTORIS KOMISI KEBENARAN*

KOMPAS - Selasa, 20 Jun 2000 *JAKSA AGUNG: HAM SOEHARTO TAK PERNAH DILANGGAR*

KOMPAS - Kamis, 14 Jun 2001 *SEJARAH SOEHARTO*

KOMPAS - Rabu, 13 Jun 2001 *SOEHARTO DIBAWA KE RS PERTAMINA*

KOMPAS - Kamis, 14 Jun 2001 *OPERASI PEMASANGAN ALAT PACU JANTUNG SOEHARTO SUKSES*

KOMPAS - Selasa, 18 Dec 2001 *SOEHARTO KEMBALI MASUK RUMAH SAKIT*

KOMPAS - Selasa, 27 Feb 2001 *TUTUT: BAPAK HARUS SERING JALAN-JALAN AGAR CEPAT SEMBUH*

KOMPAS - Sabtu, 16 Mar 2002 *MANTAN PRESIDEN ITU TERGELETAK LEMAH*

KOMPAS - Selasa, 11 Jun 2002 *PEMERIKSAAN KESEHATAN SOEHARTO MASIH TERHAMBAT*

KOMPAS - Selasa, 19 Nov 2002 *KOMNAS AKAN BENTUK KPP HAM SOEHARTO*

KOMPAS - Jumat, 20 Dec 2002 *KOMNAS HAM BENTUK TIM KASUS SOEHARTO, ACEH, MEI*

KOMPAS - Jumat, 10 Jan 2003 *TIM AD HOC KASUS SOEHARTO TERBENTUK, BERANGGOTAKAN 15 ORANG*

KOMPAS - Rabu, 22 Jan 2003 *PERLU REINTERPRETASI SEJARAH ORBA*

KOMPAS - Minggu, 28 Dec 2003 *Nurcholish Madjid: PEMILU 2004, TITIK BALIK PERTUMBUHAN BANGSA*

KOMPAS - Selasa, 16 Dec 2003 *Catatan Akhir Tahun Bidang Politik dan Hukum: REKONSILIASI MENUJU INDONESIA BARU 2004*

KOMPAS - Sabtu, 12 Jun 2004 *PEMILU 2009 BISA JADI PERTARUNGAN PARA ANTEK*

KOMPAS - Senin, 09 Feb 2004 *PRABOWO SUBIANTO: JANGAN JUAL ASET*

KOMPAS - Selasa, 24 Feb 2004 *PRABOWO: ELITE POLITIK TELAH BERKHIANAT PADA RAKYAT*

KOMPAS - Selasa, 02 Mar 2004 *KERISAUAN PRABOWO DAN KETERPANGGILANNYA KE DUNIA POLITIK*

Femi Adi Soempeno

KOMPAS - Kamis, 08 Jan 2004 *KEJAKSAAN PERINTAHKAN KESEHATAN SOEHARTO DIPERIKSA*

KOMPAS - Sabtu, 10 Jan 2004 *DOKTER PEMERIKSA SOEHARTO HARUS DIGANTI*

KOMPAS - Rabu, 28 Apr 2004 *PENDARAHAN USUS BESAR, SOEHARTO DIRAWAT DI RSPP*

KOMPAS - Selasa, 04 May 2004 *KONDISI SOEHARTO MEMBAIK*

KOMPAS - Senin, 26 Jan 2004 *SOEHARTO DIDUGA LANGGAR HAM DI LIMA KASUS*

Tempo Interaktif 23 Januari 2004 LSM: *Selidiki Pelanggaran HAM Soeharto*

KOMPAS - Selasa, 06 Apr 2004 *BUMI MANUSIA, BUMI PARA KORUPTOR*

KOMPAS - Jumat, 10 Juni 2005 Pengamat Asing tentang Soeharto

KOMPAS - Rabu, 26 Oct 2005 *Pelanggaran HAM Masa Lalu: MOU HELSINKI MOMENTUM BARU UNTUK KKR*

KOMPAS - Selasa, 10 May 2005 *KESEHATAN SOEHARTO BELUM STABIL*

KOMPAS - Kamis, 12 May 2005 *SOEHARTO TERLIHAT GEMBIRA PULANG KE RUMAH*

KOMPAS - Jumat, 05 May 2006 *Kesehatan: SOEHARTO KEMBALI DIRAWAT*

KOMPAS - Sabtu, 06 May 2006 *Kesehatan: KONDISI SOEHARTO MASIH BELUM STABIL*

KOMPAS Sumbagsel - Senin, 08 May 2006 *SOEHARTO JALANI OPERASI PEMBEDAHAN, Berisiko, tetapi Jalan Terbaik*

KOMPAS - Rabu, 10 May 2006 *Sakit Soekarno, Soeharto, dan Bangsa Ini*

KOMPAS - Kamis, 18 May 2006 *SOEHARTO LEMAH: Pro-Kontra Berlanjut*

KOMPAS - Jumat, 19 May 2006 *SOEHARTO KRITIS LAGI: Pada Otak Muncul Dua Titik Penyumbatan Baru*

KOMPAS - Sabtu, 15 Jul 2006 *Kesehatan Soeharto: KONDISI MEMBAIK, SELANG DI LAMBUNG DIANGKAT*

Tempo Interaktif 18 Mei 2006 *Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Soeharto Diadili*

KOMPAS - Sabtu, 16 Dec 2006 *PENEGAKAN HAM JALAN DI TEMPAT*

KOMPAS - Rabu, 06 Sept 2006 *Posisi Soeharto dalam Sejarah Indonesia*

KOMPAS - Sabtu, 11 Maret 2006 *M Jusuf, Supersemar, dan Naiknya Soeharto*

KOMPAS - Sabtu, 20 May 2006 *STABILITAS DAN DEMOKRATISASI UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI*

KOMPAS - Rabu, 23 Aug 2006 *Target Pembangunan: KETIKA TAHUN 2009 JADI ACUAN*

KOMPAS - Kamis, 19 Apr 2007 *Setengah Jalan Pemerintahan: MENGARAHKAN HALUAN, MENJINAKKAN KEMISKINAN*

KOMPAS - Jumat, 21 Dec 2007 *PRESIDEN NILAI IKLAN BERTEMA KEMISKINAN MENYESATKAN*

KOMPAS - Kamis, 27 Dec 2007 *Laporan Akhir Tahun 2007: MASIHKAH KITA BISA BERHARAP..*

Femi Adi Soempeno

KOMPAS - Sabtu, 18 Aug 2007 *JANGAN UBAH KONSENSUS
BERNEGARA, Bentuk NKRI Sudah Final*

KOMPAS - Selasa, 16 Jan 2007 *Panggung Politik: KETIKA PARA
SENIOR TURUN*

KOMPAS - Rabu, 17 Oct 2007 *MILITER MASIH DILIRIK
ELITE POLITIK: Ada Inferioritas di Kalangan Sipil*

KOMPAS - Kamis, 18 Oct 2007 *POLITISI SIPIL HARUS
BERHATI-HATI, Peran Purnawirawan TNI pada Pemilu
2009 Akan Berkurang*

Republika - Jumat, 23 Nopember 2007 *Yudhoyono-Mega
Berpotensi Berhadapan pada Pemilu 2009*

KOMPAS - Senin, 12 Mar 2007 *PELAJARAN DARI
SUPERSEMAR*

KOMPAS Jawa Tengah - Senin, 12 Mar 2007 *KONTROVERSI
SUPERSEMAR TERUS BERLANJUT*

KOMPAS - Kamis, 20 Sep 2007 *REKOR KORUPTOR “TOP
MARKOTOP”*

KOMPAS - Sabtu, 22 Sep 2007 *HARGA DIRI BANGSA*

KOMPAS - Rabu, 11 Apr 2007 *Otobiografi: SOEHARTO,
PATRIOT ATAU “CROOK”*

KOMPAS - Sabtu, 19 May 2007 *Peradilan Soeharto: KEJAKSAAN
HARUS TETAP LIMPAHKAN PERKARANYA*

KOMPAS - Rabu, 21 Mar 2007 *Dugaan Korupsi: WASPADAI
PURA-PURA SAKIT OLEH YANG TERBELIT
PERKARA*

KOMPAS - Kamis, 26 Apr 2007 *Potret Hak Asasi Manusia
KONSISTEN DI BIDANG LEGAL NORMATIF*

Sindo Sabtu, 08/12/2007 *Dugaan Pelanggaran HAM Soeharto
Akan Diselidiki*

KOMPAS - Senin, 01 Oct 2007 *Jajak Pendapat "Kompas"
MERENTANG KEMBALI KEKUASAAN SOEHARTO*

Tempo interaktif Selasa, 11 September 2007 | 08:45 WIB
Kemenagngan Soeharto Tak Pengaruhi Kasusnya Yang Lain

KOMPAS - Rabu, 09 Jan 2008 *KASUS MANTAN PRESIDEN
SOEHARTO*

KOMPAS - Kamis, 03 Jan 2008 *WASPADAI SEPARATISME*

ANTARA News 04/01/08 23:42 *Beberapa Mantan Pejabat Negara
Jenguk Pak Harto*

ANTARA News 04/01/08 21:07 *Mantan Presiden Soeharto
Dirawat di RSPP Jakarta*

ANTARA News 06/01/08 10:24 *Kesehatan Mantan Presiden
Soeharto Membaik*

ANTARA News 06/01/08 09:09 *Kondisi Mantan Presiden
Soeharto Tenang*

ANTARA News 06/01/08 11:56 *Belum Dapat Dipastikan Sampai
Kapan Soeharto Dirawat di RSPP*

ANTARA News 06/01/08 11:33 *Ketua MK Jenguk Mantan
Presiden Soeharto*

sctv.com 04/01/2008 18:05 *Soeharto Masuk Rumah Sakit*

sctv.com 07/01/2008 13:04 *Pembesuk Soeharto Dibatasi*

sctv.com 08/01/2008 00:28 *Soerhato Membaik, Alat Bantu Belum
Dilepas*

sctv.com 08/01/2008 12:27 *Kondisi Soeharto Kembali Memburuk*

Femi Adi Soempeno

sctv.com 07/01/2008 18:11 *Titik Soeharto Meminta Pemerintah Memaafkan Ayahnya*

detikcom 04/01/2008 19:00 WIB *Sakit Soeharto dari 1999-2008*

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0801/05/nas14.html>
Soeharto sakit lagi

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/07/154300.htm>
Rombongan DPR Kunjungi Soeharto

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/07/132727.htm>
Muladi: Jangan Ulangi Kasus Soekarno

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/07/124803.htm>
Status Hukum Soeharto Jangan “Digantung”

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/07/111605.htm>
Soeharto Tak Mungkin Jalani Cangkok Ginjal

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/07/073530.htm>
Aspri Soeharto: “Tahun Baru Pak Harto Masih Sehat”

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/07/022748.htm>
Kondisi Soeharto, Masih Up and Down

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/07/000627.htm>
Penjenguk Soeharto Semakin Lihai

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/231330.htm>
Kerabat Soeharto di Kemusuk Gelar Doa Bersama

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/222423.htm>
Camelia Malik Tidak Bisa Lihat Soeharto

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/221942.htm>
300-an Anak Yatim Doakan Soeharto

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/210106.htm>
Warga Kalitan Doakan Soeharto

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/204822.htm>

Tommy Besuk Soeharto

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/185929.htm>

Golkar Minta Pemerintah Kesampingkan Proses Hukum Soeharto

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/181227.htm>

Soeharto Masih Bengkak, Tindakan Terakhir Cuci Darah

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/180712.htm>

Pak Harto Sudah Bisa Tertawa

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/173506.htm>

Soeharto Sakit, Tugas Juru Parkir Nonstop

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/172558.htm>

AM Fatwa Maafkan Soeharto

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/171127.htm>

Soeharto Sudah Bisa Berkomunikasi dan Mengenal Keluarga

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/120320.htm>

Gus Dur Bersalaman Dengan Soeharto

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/111044.htm>

Ketua MK Bungkam Soal Proses Hukum Soeharto

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/111550.htm>

Gus Dur dan Istri Jenguk Soeharto

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/092950.htm>

R.Soepipto Jenguk Soeharto

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/005802.htm>

Keluarga Soeharto Tak Ajukan Penghentian Gugatan

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/100201.htm>

Kondisi Soeharto Membaik

Femi Adi Soempeno

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/002532.htm>
Gugatan Soeharto Jalan Terus

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/05/205944.htm>
Kondisi Soeharto Makin Tak Stabil

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/05/222045.htm> Soeharto Lewati Masa Kritis

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/05/182905.htm> Soeharto Tidak Akan Dibawa ke Luar Negeri

<http://www.kompas.com/ver1/Kesehatan/0801/05/210535.htm> Media Australia Sorot Kondisi Soeharto

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/084929.htm> Pagi ini, Kondisi Soeharto Mulai Dievaluasi Lagi

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/05/234436.htm>
Tiga Dokter Jaga Soeharto

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/080215.htm>
Bangsa Indonesia Harus Berani Memafkan Soeharto

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/144103.htm>
Air Seni Soeharto Sudah Lancar

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/140150.htm>
Soeharto Sadar, Lalu Shalat

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/105041.htm>
Dalam 2-3 Hari Soeharto Boleh Pulang

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/153448.htm>
Rezeki Dadakan dari Kamar 536

<http://www.kompas.com/ver1/Hiburan/0801/06/002811.htm>
Bambang-Halimah “Rukun” di Depan Soeharto

<http://www.kompas.com/ver1/Kesehatan/0801/06/141228.htm>
Bilik Kiri Jantung Penyebab Rentetan Penyakit Soeharto?

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/125011.htm>
Soeharto Masih Dalam Kategori Kritis

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/005924.htm>
DPR Silang Pendapat soal Soeharto

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/06/105041.htm>
Dalam 2-3 Hari Soeharto Boleh Pulang

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/05/191908.htm>
Ketua DPR: Kasus Hukum Soeharto Dianggap Selesai

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/05/170231.htm>
Karangan Bunga untuk Soeharto Terus Berdatangan

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/05/175222.htm>
Soeharto Dirawat, Dokter Tidak Tidur Seharian

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/05/161450.htm>
Soeharto Masih Kritis, Menkes Kerahkan Jajarannya

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/05/112003.htm>
Fungsi Ginjal Soeharto Terus Menurun

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/05/005345.htm>
Kadar HB Soeharto Drop Hingga 8 GRDL

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/05/131159.htm>
SBY-Kalla Bertemu Antisipasi Sakitnya Soeharto

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/04/204214.htm>
Soeharto Sadar 100 Persen, Kondisinya Stabil

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/04/154744.htm>
Mantan Presiden Soeharto Masuk RSPP

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/04/172445.htm>
Moerdiono Besuk Soeharto di RSPP

Femi Adi Soempeno

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0712/11/112607.htm>
Kuasa Soeharto Siapkan Saksi

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0711/23/190447.htm>
Anwar Nasution: Presiden dan Bank Dunia Sepakat Telusuri Aset Soeharto

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/05/035858.htm>
Soeharto Dirawat, Penjaga RSPP Ditambah

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0711/28/050620.htm>
Bob Hasan Tiga Kali Transfer Dana Supersemar

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/05/012959.htm>
Soeharto dan Riwayat Kesehatannya

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/05/031157.htm>
Tiga Ruang Khusus untuk Soeharto

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/05/014948.htm>
Puluhan Wartawan “Tunggu” Soeharto

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/05/120208.htm>
Soeharto Sakit Presiden: Masih Kritis

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/05/105215.htm>
Presiden Segera Jenguk Soeharto

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/04/204214.htm>
Soeharto Sadar 100 Persen, Kondisinya Stabil

<http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0801/05/123809.htm>
Haryono Suyono: 40 Dokter Rawat Soeharto

RRI-Online Selasa, 08 Januari 2008, 15:41 WIB **KONDISI
SOEHARTO KEMBALI MENURUN**

detikcom008-01-06 17:35:00 Tommy ‘Nginap’ di Giribangun
Sehari Sebelum Soeharto Sakit

detikcom2008-01-06 17:03:00 Fatwa dan Mien Jenguk Soeharto

Okezone 09/01/2008 13:59:42 *Tempat Soeharto Lahir, Banyak Burung Hantu Berkeliaran*

<http://www.harian-global.com/news.php?item.32494.21> Golkar Minta Soeharto Diputihkan Gus Dur: Proses Hukum Jalan Terus

TEMPO Interaktif Rabu, 09 Januari 2008 | 07:06 WIB *Kondisi Terakhir Soeharto Belum Diketahui*

<http://www.suarapembaruan.com/News/2008/01/07/Sorotan/sorot01.htm> Kontroversi Kasus Hukum Soeharto

sctv.com 08/01/2008 12:27 *Kondisi Soeharto Kembali Memburuk*

ANTARA News 08/01/08 18:46 *Amelia Yani: Tuduhan Kepada Pak Harto Hendaknya Dihentikan*

ANTARA News 08/01/08 18:17 *PBB Minta Status Hukum Soeharto Tidak Dipolitisasi*

ANTARA News 08/01/08 16:33 *PDIP: Kasus Hukum Soeharto Dapat Dihentikan*

ANTARA News 08/01/08 18:17 *Suharto Doakan Soeharto*

ANTARA News 08/01/08 14:21 *Pengacara: Pak Harto Tak Perlu Pengampunan*

Kapanlagi.com Selasa, 08 Januari 2008 10:49 *Pengampunan Atas Pak Harto Dimungkinkan Asal Ada Permintaan*

Kapanlagi.com – Selasa, 08 Januari 2008 09:46 *Selasa, Soeharto Jalani Pemeriksaan Jantung*

Kapanlagi.com – Senin, 07 Januari 2008 20:41 *Kasus Soeharto Dapat Disidangkan Secara In Absentia*

Kapanlagi.com – Senin, 07 Januari 2008 15:06 *Fraksi Golkar Ingin Kasus Soeharto Dihentikan*

Femi Adi Soempeno

Kapanlagi.com Senin, 07 Januari 2008 13:18 *Soeharto Dikunjungi Juan Felix Tampubolon dan Muladi*

ANTARA News 08/01/08 12:00 *Dokter Larang Soeharto Terima Kunjungan*

ANTARA News 08/01/08 18:30 *Jangan Jadikan Sakitnya Soeharto Sebagai Komoditas Politik*

ANTARA News 08/01/08 13:25 *Pengacara: Ahli Waris Soeharto Bisa Tolak Kewajiban Hukum*

ANTARA News 08/01/08 12:09 *Pemerintah Harus Ambil Keputusan Politik Soal Soeharto, Kata Amien*

ANTARA News 08/01/08 15:46 *Muladi: Kejelasan Status Hukum Soeharto Penting*

ANTARA News 08/01/08 08:51 *FPN: Sakitnya Pak Harto Dijadikan Komoditas Politik*

ANTARA News 08/01/08 12:00 *Dokter Larang Soeharto Terima Kunjungan*

ANTARA News 08/01/08 08:54 *Kasus Soeharto Dapat Disidangkan "In Absentia"*

ANTARA News 08/01/08 08:51 *FPN: Sakitnya Pak Harto Dijadikan Komoditas Politik*

ANTARA News 08/01/08 06:48 *Hari Ini, Jantung Soeharto Diperiksa*

ANTARA News 07/01/08 23:46 *RSPP Sudah Siapkan Alat Pacu Jantung bagi Soeharto*

ANTARA News 07/01/08 23:17 *Soeharto Tanyakan Mertua Ical*

ANTARA News 07/01/08 23:14 *Miranda Goeltom: Sakitnya Soeharto Belum Pengaruhi Pasar*

ANTARA News 07/01/08 18:57 *Ketua Umum PBNU Serukan Gerakan Moral Maafkan Soeharto*

ANTARA News 07/01/08 20:36 *Ryaas Rasyid: Soeharto Berhak Dimaafkan*

ANTARA News 07/01/08 17:18 *Jaksa Agung: Kasus Soeharto Ditutup Sejak Keluar SKP3*

ANTARA News 07/01/08 17:49 *Jaksa Agung: Kasus Pidana Soeharto Sudah Ditutup Demi Hukum*

ANTARA News 07/01/08 16:59 *Ngabalin Harapkan Antarfraksi DPR ada Sambung-rasa Soal Soeharto*

ANTARA News 07/01/08 23:20 *Sidang Perdata Soeharto Digelar Selasa*

ANTARA News 07/01/08 15:43 *Fraksi Golkar Ingin Kasus Soeharto Dihentikan*

ANTARA News 08/01/08 14:21 *Pengacara: Pak Harto Tak Perlu Pengampunan*

ANTARA News 08/01/08 20:16 *Moerdiono: 25 Dokter Tangani Soeharto*

ANTARA News 07/01/08 11:09 *Terapi Intensif Atas Soeharto Tetap Dilanjutkan*

ANTARA News 07/01/08 00:35 *Meski Lewati Masa Kritis, Keluarga Soeharto Tetap Khawatir*

ANTARA News 07/01/08 00:24 *Tuty Alawiyah dan Santrinya Doakan Kesembuhan Soeharto*

ANTARA News 07/01/08 08:39 *Usulan Pemberian Maaf Soeharto "Penghinaan" Terhadap Korban Orba*

ANTARA News 08/01/08 18:46 *Amelia Yani: Tuduhan Kepada Pak Harto Hendaknya Dihentikan*

Femi Adi Soempeno

ANTARA News 06/01/08 19:29 *Golkar Perjuangkan Agar Perkara HM Soeharto Dikesampingkan*

ANTARA News 06/01/08 19:33 *Banyak Hal yang Baik yang Bisa Dipelajari dari Pak Harto*

ANTARA News 06/01/08 19:19 *Mien Sugandhi: HM Soeharto Sudah Bicara Jelas*

suarasurabaya.net 05 Januari 2008, 12:55:29, *SOEHARTO Masuk Rumah Sakit, SBY Besuk*

ANTARA News 06/01/08 19:14 *Pak Harto Tersenyum Saat Dahinya Dicum Meutia Hatta*

ANTARA News 05/01/08 01:52 *Riwayat Kesehatan HM Soeharto*

ANTARA News 06/01/08 13:54 *Soeharto Shalat Dzuhur di RSPP*

Detikcom *Rahasia umur panjang Soeharto semede di Gunung Lawu*

KOMPAS Jawa Timur - Jumat, 30 Jan 2009 *Partai Gerindra: Andalkan Basis Massa Marginal*

<http://indonesiamemilih.kompas.com/partai/view/5>

KOMPAS - Sabtu, 18 Oct 2008 *Hidup Lagi, Pansus DPR Penculikan Aktivis * Wiranto, Prabowo, Sutiyoso, Yudhoyono Jadi Target*

KOMPAS - Minggu, 08 Feb 2009 *Pidato Politik: Partai Gerindra Semakin Percaya Diri*

KOMPAS - Senin, 05 Jan 2009 *Gerindra Tuding Yudhoyono Berlebihan*

KOMPAS - Kamis, 23 Oct 2008 *Kepemimpinan: Komitmen Politisi Tidak Bisa Dipegang*

KOMPAS Jawa Tengah - Kamis, 28 Aug 2008 *Pertanian: Reformasi Belum Mengangkat Petani*

KOMPAS - Rabu, 06 Aug 2008 *Mencari Figur Selain Yudhoyono*

KOMPAS - Senin, 04 Aug 2008 *Parpol Perluas Basis Organisasi*

KOMPAS - Selasa, 15 Jul 2008 *Pemilu 2009: Prabowo Keluar dari Partai Golkar, Maju dari Partai Gerindra*

KOMPAS - Jumat, 10 Oct 2008 *Iklan Politik di Media Pengaruhi Masyarakat*

KOMPAS - Jumat, 12 Sep 2008 *Pemimpin Nasional: Sipil Masih Merasa Inferior terhadap Militer*

KOMPAS - Kamis, 23 Oct 2008 *Keluarga Korban Tidak Hadiri Undangan Pansus*

KOMPAS - Rabu, 15 Oct 2008 *Pilpres 2009: Partai Gerindra Usung Prabowo Subianto sebagai Capres*

KOMPAS - Sabtu, 22 Nov 2008 *Kampanye: Iklan Wajib Tunjukkan Kelemahan Pemerintah*

KOMPAS - Selasa, 20 Jan 2009 *Kebangsaan: Prabowo: Indonesia Butuh Revolusi Damai*

Tentang Penulis



Femi Adi Soempeno mulai menulis sejak usia 12 tahun. Wadah pertamanya adalah rubrik GEMA, harian BERNAS di Jogja. Menginjak bangku SMU, ia menjadi staf redaksi GEMA. Tahun 1998, masa-masa transisi itu, ia masih duduk di bangku kelas 3 di Jogja. Saat kuliah di FISIP Universitas Atma Jaya Jogjakarta, ia menulis beberapa buku, diantaranya Belajar untuk Hidup (1999), Kampus Demokratis (1999), dan Wajah FISIP UAJY (2002). Ia juga menjadi staf redaksi Majalah Keluarga FAMILIA, milik Kanisius di Jogja. Bersama dengan Sanggar Talenta, komunitas penulis muda Jogja, ia menulis Dari Gandring Sampai Einstein (2002) dan Mengasih Maria, 100 Tahun Sendangsono (2003). Buku politik pertamanya ditulis bersama dengan AA Kunto A yaitu Perang panglima (2007). Saat ini ia tengah belajar menulis novel dan buku cerita anak-anak. Hingga saat ini, ia masih tercatat sebagai staf redaksi mingguan ekonomi bisnis KONTAN di Jakarta.

PRABOWO

★★★ Dari Cijantung Bergerak ke Istana



Jalan terjal harus dihadapi capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dalam bukunya, Letjen (Purn) Sintong Panjaitan telah menuding Prabowo merencanakan *counter coup d'etat* pada Maret 1983. Saat itu Prabowo menengarai Moerdani akan melakukan kudeta dan ia berusaha untuk menggagalkannya. Cara *counter coup d'etat* ala Prabowo tersebut adalah dengan berencana 'mengambil' sejumlah nama perwira tinggi ABRI.

Menanggapi tuduhan itu Prabowo menyatakan, rakyat saat ini sudah pandai dan dapat melakukan penilaian yang obyektif. "Saya penganut falsafah Jawa *sing becik ketitik, sing olo ketoro* artinya yang baik akan ketahuan dan yang buruk juga terlihat," ujarnya. Jika tuduhan itu benar, sebagai ksatria ia tidak akan lari dari tuduhan, hal ini terbukti saat mempertanggungjawabkan kasus penculikan aktivis 1998 di Dewan Kehormatan Perwira.

Sikap menahan emosi di saat dirinya teraniaya dan tertuduh merupakan watak yang sulit dicari tandingannya di zaman ini. Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto memegang teguh falsafah, "Bila gajah bertarung dengan gajah, pelanduk (rakyat) mati di tengah." Sebuah kata penting yang mesti dipegang teguh oleh seorang pemimpin.

Jalan panjang penuh duri dilewati Prabowo tanpa keluh kesah, layak jika ia maju sebagai calon Presiden RI periode 2009-2014. Pengalaman Prabowo Subianto sebagai seorang prajurit TNI akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang tegas dan pantang menekuk pundak di hadapan bangsa lain. Kariernya sebagai salah satu pengusaha sukses sangat membantu cara pengambilan keputusan mendesak di bidang ekonomi. Kini Prabowo tak lagi dekat dengan militer justru lekat dengan petani, nelayan, pedagang, dan rakyat yang begitu rindu akan perubahan.



PENERBIT GALANGPRESS (Anggota IKAPI)
Jln. Angrek No. 3/34 Baciro Baru Yogyakarta 55225
Tlp: (0274) 554985, 554986 Faks: (0274) 554985
email: redaksi@galangpress.com
www.galangpress.com

ISBN 978-602-8174-18-3



9 786028 174183

Politik

Buku adalah Gizi, maka Kami Peduli